

**PERAN KONEKSI POLITIK DALAM MEMODERASI PENGARUH AGRESIVITAS  
PAJAK TERHADAP KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN**

**DISERTASI**



**DISUSUN OLEH:**

**NORA HILMIA PRIMASARI**

**NIM: 12020121510018**

**PROGRAM DOKTOR EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2025**

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN DISERTASI

Nama : Nora Hilmia Primasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020121510018  
Program Studi : Program Doktor Ekonomi  
Konsentrasi : Akuntansi  
Judul Disertasi : Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan

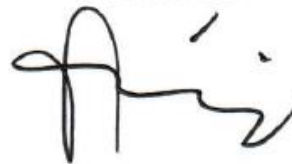
Disertasi tersebut telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Oktober 2025 dan dinyatakan LULUS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Susunan Tim Penguji:

Ketua Sidang/Promotor : Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D.  
Sekretaris/Co-Promotor : Dr. Siti Mutmainah, S.E., Akt., M.Si.  
Penguji Eksternal : Prof. Dr. I Wayan Suartana, M.Si., Akt.  
Penguji : Dr. Nur Cahyonowati, S.E, M.Si., Akt.  
Penguji : Puji Harto, S.E., Akt., M.Si., Ph.D.  
Penguji : Dr. Agus Purwanto, S.E., Akt., M.Si.



Semarang, Oktober 2025  
Menyetujui  
Ketua Program Doktor Ekonomi/  
Co-Promotor



Dr. Siti Mutmainah, S.E., Akt., M.Si.

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nora Hilmia Primasari

NIM : 12020121510018

menyatakan bahwa disertasi saya dengan judul: “ **PERAN KONEKSI POLITIK DALAM MEMODERASI PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN**” adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan saya, maka saya sebagai penulis akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, September 2025  
Yang membuat pernyataan



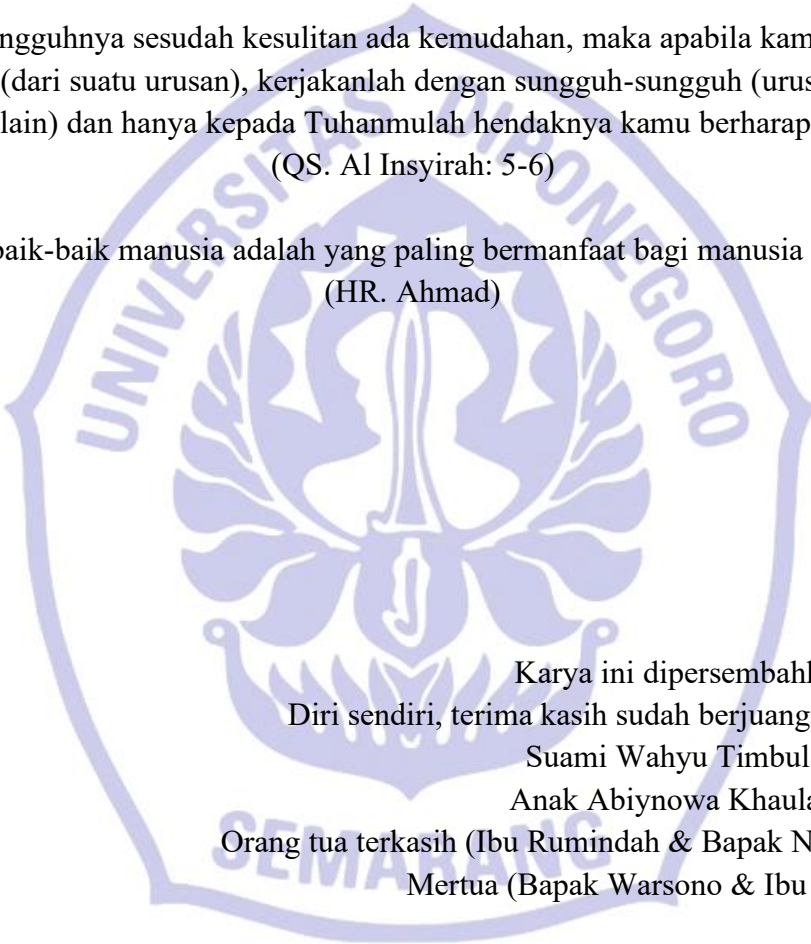
Nora Hilmia Primasari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.”  
(QS. Ali Imran: 139)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”  
(QS. Al Insyirah: 5-6)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.”  
(HR. Ahmad)



Karya ini dipersembahkan untuk:  
Diri sendiri, terima kasih sudah berjuang sejauh ini  
Suami Wahyu Timbul Sasongko  
Anak Abiynowa Khaulafa Laudzi  
Orang tua terkasih (Ibu Rumindah & Bapak Noor Sa'di)  
Mertua (Bapak Warsono & Ibu Sugiyarti)

**FEB UNDIP**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang memungkinkan terselesaikannya disertasi berjudul "Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan". Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berharga dari berbagai pihak, baik berupa dukungan material maupun moril. Dengan penuh kerendahan hati, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya atas dukungan fasilitas yang disediakan selama proses studi.
2. Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro sekaligus Promotor yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi, serta dukungan hingga disertasi ini terselesaikan. Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan dan kebaikan.
3. Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Doktor Ekonomi sekaligus Co-Promotor yang telah dengan tulus dan sabar membimbing perjalanan akademik penulis. Tidak hanya ilmu pengetahuan yang Ibu ajarkan, tetapi juga keteladanan hidup, integritas, serta kebijaksanaan yang menjadi penuntun bagi saya. Setiap masukan berharga, saran akademis, dan dorongan yang Ibu berikan telah menjadi energi penyemangat untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibu dan keluarga.
4. Dr. Farida Indriani, S.E., M.M., Sekretaris Program Doktor Ekonomi, serta Prof. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Ak., Ketua Program Doktor Ekonomi periode sebelumnya, atas fasilitas, bantuan administratif, dan motivasi selama menempuh pendidikan doktoral.
5. Bapak Ibu penguji (Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt, Dr. Totok Dewayanto, S.E, M.Si., Akt., Dr. Nur Cahyonowati, S.E, M.Si., Akt., Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E, M.Si, Bapak Puji Harto, S.E., MSi., Akt., Ph.D, Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Prof. Dr. I Wayan Suartana, M.Si., Akt) sejak ujian tahap awal sampai dengan ujian tahap akhir atas masukan dan arahan sehingga menyempurnakan disertasi ini. Masukan-masukan yang diberikan sangat membantu dalam memperbaiki kualitas penelitian ini, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan lebih komprehensif.
6. Bapak/Ibu dosen PDE UNDIP atas bimbingan, motivasi, dan ilmu yang telah

- diberikan selama masa studi. Semoga setiap ilmu yang dibagikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya bagi Bapak Ibu Dosen semua.
7. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Kemendikbudristek dan LPDP yang telah memberikan dukungan pendanaan studi doktoral ini. Bantuan finansial ini sangat berarti dalam mendukung kegiatan penelitian dan penulisan disertasi.
  8. Bapak Drs. Djaetun HS, dan Bapak Kasih Hanggoro, MBA selaku Pendiri dan Ketua Yayasan Budi Luhur Cakti beserta jajarannya, yang telah mendukung dan menginspirasi kami untuk terus bertumbuh.
  9. Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc, Rektor Universitas Budi Luhur Prof. Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M., Rektor Universitas Budi Luhur periode 2020-2024 beserta jajarannya atas dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat melanjutkan studi S-3 di Program Doktor Ekonomi UNDIP.
  10. Dr. Ir. Deni Mahdiana, MM, M.Kom Deputy Rektor Bidang Akademik Universitas Budi Luhur saat ini, Prof. Dr. Ir. Arief Wibowo, M.Kom, Deputy Rektor Bidang Akademik Universitas Budi Luhur sebelumnya, atas bimbingan dan dukungan yang sangat berarti bagi perkembangan akademik penulis.
  11. Dr. Puspita Rani, S.E, M.Ak Dekan FEB Universitas Budi Luhur, saat ini, dan Prof. Dr. Drs. Selamat Riyadi, M.Si. Dekan FEB Universitas Budi Luhur sebelumnya beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan studi S-3 di PDE UNDIP.
  12. Ibu Prita Andini, S.E, M.Akt. Ketua Program Studi S1 Akuntansi saat ini, dan Bapak Dicky Arisudhana, S.E, M.M, Ak, CA, Ketua Program Studi S-1 Akuntansi sebelumnya, atas bimbingan, masukan berharga, dan dukungan tanpa henti.
  13. Teman-teman sejawat dosen dan karyawan program studi S1 Akuntansi Universitas Budi Luhur, atas kebersamaan yang hangat, atas pertanyaan “kapan lulus?” yang menghantui penulis untuk segera menyelesaikan studi.
  14. Mbak Lina, mas Aris, mas Supri, mbak Tiara, Pak Gono dan seluruh staf kependidikan Program Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas dukungan dan semua layanan yang luar biasa baik, sehingga memudahkan selama penyelesaian studi doktoral.
  15. Mas Wahyu Timbul Sasongko, suami terkasih yang selalu menyelipkan nama penulis dalam setiap sujud dan doanya, atas pelukan hangat, motivasi, arahan, semangat dan optimisme sehingga setiap langkah terasa ringan.
  16. Putraku tercinta Abiynowa Khaulafa Laudzi yang telah bersabar merelakan waktu kebersamaan demi proses studi ini. Pelukan hangat, dan kebaikan kecil darimu sangat membantu penulisan halaman demi halaman disertasi ini.
  17. Kepada keluarga besar Eyang Supardi dan Eyang Mitro, terutama Ibu Ayah

- (Ibu Rumindah dan Ayah Noor Sa'di), Mertua (Bapak Warsono dan Ibu Sugiyarti), Adik-Adik (Riska, Dhilla, Danik, Kukuh, Andi) beserta para keponakan (Rayya, Kanes, Zio dan Binar), atas doa dan dukungan moralnya.
18. Teman-teman sekelas di Program Doktor Ekonomi Akuntansi 2021, Desty, mbak Maylia, bu Zaky, mbak Meita, mbak Dwiya, bu Juli, Pak Dimas, Pak Toton, Pak Rito, mbak Ratih, mbak Ani, mbak Sukma, mbak Aldila, mbak Prima, mbak Nadia, mbak Dian, terimakasih atas kebersamaan dan supportnya selama ini. Semoga kita semua bisa menjalin kolaborasi dan silaturahmi tidak terputus.
  19. Teman-teman seperjuangan di kubikal; Dr Christian Manu, Dr. Septian, Dr. Ani Setyowati, Dr. Juliana, Dr. Rintar, Dr. Gilang, Dr Ika, Oma Renya, mbak Wina, Pak Joe, Pak Adi, kaka Rara, Bu Ira, mbak Tania, mbak Yeni, mbak Adeth, mbak Tari, mbak Efva, bu Putri, mbak Neni, pak Toni, atas diskusi-diskusi seru yang kadang tidak berujung, kebersamaan, sharing dan dukungannya selama studi.
  20. Cik Titin, atas diskusi yang mencerahkan, *support* dan perhatian selama menjalani perkuliahan sangat membantu.
  21. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian disertasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu guna penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi.

Semarang, September 2025

Penulis,

Nora Hilmia Primasari

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan, serta peran koneksi politik sebagai pemoderasi dalam konteks perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2022. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan perusahaan. Temuan ini konsisten dengan teori pemangku kepentingan, di mana praktik agresivitas pajak dipersepsikan sebagai pengabaian tanggung jawab sosial yang dapat merusak legitimasi, menurunkan reputasi, serta melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, koneksi politik terbukti mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Selaras dengan *Resource Dependence Theory* (RDT), koneksi politik menyediakan akses terhadap sumber daya preferensial, kontrak pemerintah, maupun perlindungan regulasi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi dampak buruk strategi pajak agresif. Temuan ini memberikan implikasi teoretis dengan memperluas literatur mengenai agresivitas pajak, tata kelola, dan keberlanjutan di negara berkembang, sekaligus implikasi praktis bagi regulator dalam memperkuat transparansi dan pengawasan. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan ESG *score* dan data publik untuk mengukur koneksi politik yang belum sepenuhnya menangkap kualitas hubungan politik perusahaan. Agenda penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan pengukuran keberlanjutan perusahaan dan koneksi politik yang lebih komprehensif, termasuk analisis longitudinal terhadap perubahan kebijakan dan stabilitas politik. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis pada integrasi teori pemangku kepentingan dan teori ketergantungan sumber daya dalam konteks keberlanjutan perusahaan di pasar negara berkembang.

Kata kunci: keberlanjutan perusahaan, agresivitas pajak, koneksi politik.

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the impact of tax aggressiveness on corporate sustainability and the moderating role of political connections in the context of firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2017–2022 period. Using purposive sampling, the research sample was selected based on specific criteria. The findings reveal that tax aggressiveness has a negative effect on corporate sustainability. This result is consistent with stakeholder theory, wherein tax aggressiveness is perceived as neglect of social responsibility that undermines legitimacy, damages reputation, and erodes stakeholder trust. Furthermore, political connections are shown to moderate this relationship by mitigating the negative impact of tax aggressiveness on sustainability. Aligned with Resource Dependence Theory (RDT), political connections provide access to preferential resources, government contracts, and regulatory protection, enabling firms to reduce the adverse consequences of aggressive tax strategies. These findings carry theoretical implications by extending the literature on tax aggressiveness, governance, and sustainability in emerging markets, while also offering practical implications for regulators to strengthen transparency and oversight. The study is limited by its reliance on ESG scores and public data to measure political connections, which may not fully capture the quality of firm–political actor relationships. Future research is encouraged to develop more comprehensive measures of corporate sustainability and political connections, including longitudinal analyses of policy changes and political stability. Overall, this study contributes to the theoretical integration of stakeholder theory and resource dependence theory in understanding corporate sustainability within emerging market contexts.*

*Keywords: corporate sustainability, tax aggressiveness, political connections.*



## RINGKASAN

Keberlanjutan perusahaan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan telah menjadi isu strategis sejak peluncuran SDGs oleh PBB pada 2015 (Rudyanto *et al.*, 2021). Di Indonesia, OJK mewajibkan pelaporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/2017, mendorong transparansi dampak bisnis (Geraldina *et al.*, 2023). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keberlanjutan kuat cenderung memperoleh keunggulan kompetitif (Harnesk & Myhrberg, 2019) dan legitimasi sosial (Vidal & Van Buren, 2022).

Beberapa penelitian seperti Asmoro *et al.* (2024); Son (2024), dan Karbala & Vincenzo (2024) menghubungkan agresivitas pajak dengan keberlanjutan perusahaan. Pajak tidak hanya memiliki peran sentral dalam pengelolaan perusahaan, tetapi juga memiliki efek pada kesejahteraan masyarakat (Vacca *et al.*, 2020). Menurut Lanis & Richardson (2013), kekurangan penerimaan pajak mengakibatkan kerugian yang signifikan dan berpotensi merugikan masyarakat. Frank *et al.* (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai semua aktivitas pengurangan pembayaran pajak baik melalui perencanaan pajak legal maupun ilegal. Upaya untuk menghubungkan antara agresivitas pajak dan kinerja keberlanjutan didasari oleh teori pemangku kepentingan.

Teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan perusahaan, mencakup pemegang saham, karyawan, pemerintah, dan masyarakat (Payne & Raiborn, 2018). Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, pihak yang paling dirugikan adalah pemerintah dan masyarakat. Akibat tindakan tersebut pemerintah dapat memberikan sanksi perpajakan, dan dari sisi masyarakat sanksinya dapat berupa boikot produk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hanlon & Slemrod (2009) bahwa praktik penghindaran pajak yang agresif dapat mengakibatkan sanksi negatif yang parah seperti hilangnya reputasi perusahaan, meningkatnya

tekanan politik/media, potensi denda dan penalti dari kantor pajak, dan bahkan boikot konsumen. Pada akhirnya tindakan agresivitas pajak akan memengaruhi keberlanjutan perusahaan.

Namun, temuan empiris mengenai dampak agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan masih menunjukkan hasil yang kontradiktif. Beberapa penelitian seperti Fabian *et al.* (2022), Emeka & Ngozi (2022), Lanis & Richardson (2013), Mashuri & Ermaya (2020), Nasih *et al.* (2024), dan Sui *et al.* (2019) menemukan efek positif, di mana keberlanjutan perusahaan sebagai alat untuk memperbaiki citra. Di sisi lain, Kristiadi *et al.* (2020), Rudyanto *et al.* (2021); Shin & Park (2022) justru melaporkan dampak negatif akibat hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mendorong pentingnya eksplorasi faktor moderasi dalam hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Studi terdahulu lebih banyak menyoroti faktor internal seperti kinerja perusahaan (Emeka & Ngozi, 2022; Kristiadi *et al.*, 2020; Lanis & Richardson, 2013; Nusantari *et al.*, 2015). Namun, pendekatan yang lebih komprehensif justru menekankan bahwa organisasi sangat bergantung pada lingkungan eksternal dalam mengamankan sumber daya dan mengurangi ketidakpastian (Tashman, 2020). Dalam kerangka ini, *Resource Dependence Theory* (RDT) relevan digunakan karena menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa akses ke sumber daya eksternal yang mendukung stabilitas dan keberlangsungan operasional (Pfeffer & Salancik, 2003).

Penelitian sebelumnya telah menguji beberapa faktor moderasi eksternal, seperti program pengampunan pajak (Nasih *et al.*, 2024) dan praktik korupsi (Rudyanto *et al.*, 2021). Namun, peran koneksi politik sebagai variabel moderasi belum banyak dieksplorasi secara komprehensif, padahal fenomena ini sangat relevan di Indonesia. Keterhubungan antara dunia usaha dan politik telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi-politik nasional, di mana hampir separuh anggota DPR periode 2019–2024 memiliki afiliasi bisnis, dengan 262 dari 575 anggota terhubung dengan 1.016 perusahaan, termasuk 243 yang

menjabat sebagai direktur atau komisaris (Ramadhan, 2019). Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan memperhitungkan koneksi politik sebagai variabel moderasi antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Koneksi politik dapat memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan melalui tiga mekanisme: (1) akses informasi kebijakan, (2) pengurangan risiko regulasi, dan (3) legitimasi sosial (Huang *et al.*, 2021).

Temuan penelitian menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan perspektif teori pemangku kepentingan, praktik penghindaran pajak yang berlebihan merusak hubungan dengan pemerintah, masyarakat, dan lingkungan, serta dianggap mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat menurunkan reputasi, legitimasi sosial, dan kepercayaan publik, yang pada akhirnya melemahkan keberlanjutan jangka panjang. Tekanan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan juga berpotensi meningkatkan biaya operasional, sehingga risiko jangka panjang sering kali lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek dari penghindaran pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koneksi politik mampu memoderasi pengaruh tersebut. Adanya koneksi politik sebagai pemoderasi, mampu memperlemah pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan. Hal tersebut disebabkan perusahaan memperoleh akses sumber daya eksternal, perlindungan regulasi, serta legitimasi tambahan. Berdasarkan RDT, koneksi politik menjadi strategi untuk mengurangi ketidakpastian dan mempertahankan keberlangsungan operasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa agresivitas pajak memiliki implikasi negatif terhadap keberlanjutan perusahaan karena menurunkan reputasi, legitimasi sosial, dan kepercayaan publik. Bagi manajer, hasil ini menjadi peringatan bahwa manfaat finansial jangka pendek dari penghindaran pajak agresif tidak sebanding dengan risiko jangka panjang. Bagi regulator, implikasinya adalah perlunya memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memberi insentif bagi perusahaan yang patuh serta aktif

dalam keberlanjutan. Bagi investor, implikasinya adalah menjadikan agresivitas pajak sebagai indikator risiko dalam keputusan investasi dan menilai kepatuhan pajak sebagai bagian dari kriteria ESG. Selain itu, temuan tentang peran koneksi politik menunjukkan implikasi bahwa koneksi dapat menjadi sumber daya strategis yang melemahkan dampak negatif agresivitas pajak, meskipun berpotensi menimbulkan moral hazard.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada pengukuran keberlanjutan yang hanya bergantung pada *ESG score*, sehingga berpotensi kurang merepresentasikan kondisi perusahaan secara menyeluruh, khususnya di negara berkembang. Selain itu, pengukuran koneksi politik berbasis data publik tidak mampu menangkap kualitas dan intensitas hubungan politik yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan indikator keberlanjutan yang lebih komprehensif, misalnya indeks regional atau global, serta menggabungkan triangulasi data dari audit, wawancara pemangku kepentingan, dan sumber pihak ketiga. Untuk koneksi politik, penelitian masa depan perlu mengembangkan metode pengukuran yang lebih mendalam, misalnya melalui analisis jaringan politik atau pendekatan kualitatif. Dengan demikian, hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan mampu memperkaya pemahaman mengenai pengaruh agresivitas pajak dan koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan.



## **SUMMARY**

*Corporate sustainability, which emphasizes the importance of balancing economic, social, and environmental performance, has become a strategic issue since the launch of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015 (Rudyanto et al., 2021). In Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) mandated sustainability reporting through Regulation No. 51/2017, encouraging transparency regarding business impacts (Geraldina et al., 2023). Prior studies have shown that firms with strong sustainability performance tend to gain competitive advantage (Harnesk & Myhrberg, 2019) and social legitimacy (Vidal & Van Buren, 2022).*

*Several studies, such as Asmoro et al. (2024), Son (2024), and Karbala & Vincenzo (2024), have linked tax aggressiveness with corporate sustainability. Taxation plays not only a central role in corporate management but also has an impact on social welfare (Vacca et al., 2020). According to Lanis & Richardson (2013), shortfalls in tax revenue result in significant losses and may harm society. Frank et al. (2009) define tax aggressiveness as all activities aimed at reducing tax payments, whether through legal tax planning or illegal practices. The attempt to connect tax aggressiveness with sustainability performance is grounded in stakeholder theory.*

*Stakeholder theory (Freeman, 1984) defines stakeholders as groups or individuals who affect or are affected by corporate objectives, including shareholders, employees, government, and society (Payne & Raiborn, 2018). When companies engage in tax aggressiveness, the most disadvantaged parties are the government and society. As a result, the government may impose tax sanctions, while from society's perspective, sanctions may take the form of product boycotts. This aligns with Hanlon & Slemrod's (2009) assertion that aggressive tax avoidance practices may lead to severe negative consequences, such as reputational loss, heightened political/media pressure, potential fines*

*and penalties from tax authorities, and even consumer boycotts. Ultimately, tax aggressiveness influences corporate sustainability.*

*However, empirical findings regarding the impact of tax aggressiveness on corporate sustainability remain contradictory. Several studies—such as Fabian et al. (2022), Emeka & Ngozi (2022), Lanis & Richardson (2013), Mashuri & Ermaya (2020), Nasih et al. (2024), and Sui et al. (2019)—find a positive effect, suggesting that sustainability serves as a tool for reputation management. Conversely, Kristiadi et al. (2020), Rudyanto et al. (2021), and Shin & Park (2022) report negative consequences due to stakeholder trust erosion.*

*The inconsistency of previous findings underscores the importance of exploring moderating factors in the relationship between tax aggressiveness and corporate sustainability. Prior research has largely focused on internal factors such as firm performance (Emeka & Ngozi, 2022; Kristiadi et al., 2020; Lanis & Richardson, 2013; Nusantari et al., 2015). However, a more comprehensive approach emphasizes that organizations are highly dependent on the external environment to secure resources and mitigate uncertainty (Tashman, 2020). Within this framework, Resource Dependence Theory (RDT) is particularly relevant, as it asserts that firms cannot survive without access to external resources that ensure operational stability and continuity (Pfeffer & Salancik, 2003).*

*Previous studies have examined several external moderating factors, such as tax amnesty programs (Nasih et al., 2024) and corruption practices (Rudyanto et al., 2021). Yet, the role of political connections as a moderating variable has not been comprehensively explored, despite being highly relevant in Indonesia. The interconnection between business and politics has become an integral part of the country's political economy, with nearly half of parliament members (2019–2024) affiliated with businesses—262 out of 575 members linked to 1,016 companies, including 243 who serve as directors or commissioners (Ramadhan, 2019). This study extends prior research by incorporating political connections as a moderating variable in the*

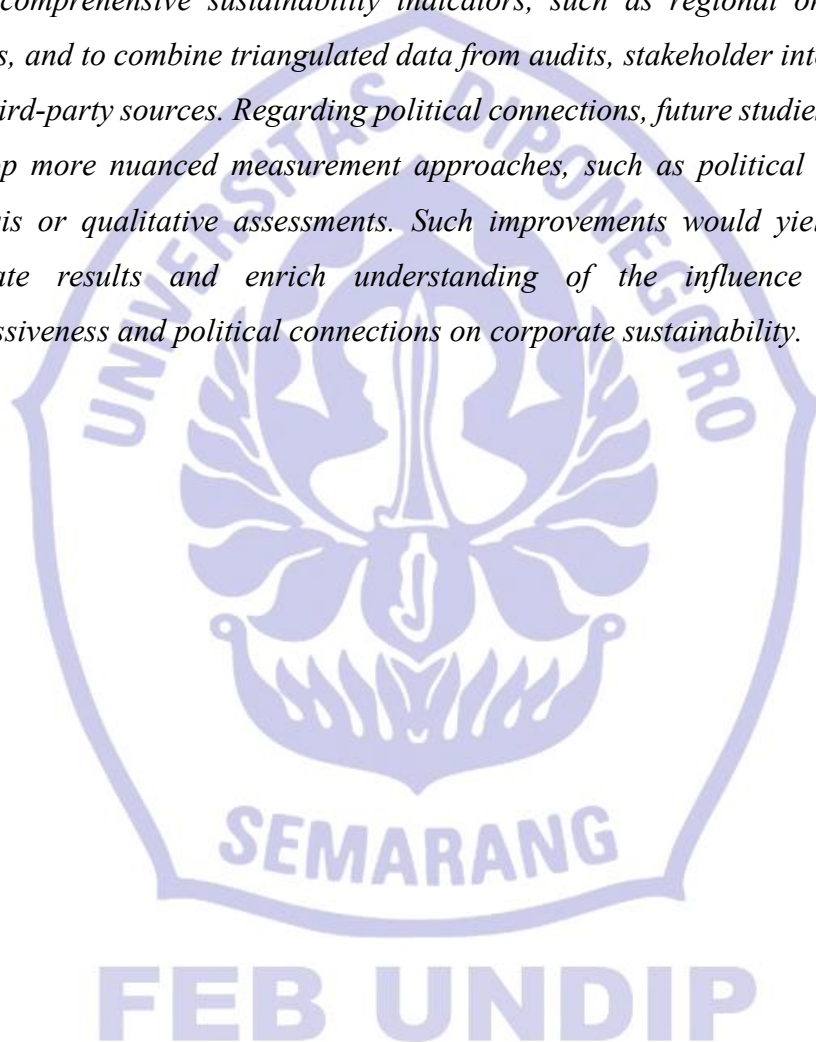
*relationship between tax aggressiveness and corporate sustainability. Political connections may moderate this relationship through three mechanisms: (1) access to policy information, (2) reduction of regulatory risks, and (3) enhanced social legitimacy (Huang et al., 2021).*

*The findings indicate that tax aggressiveness negatively affects corporate sustainability. From a stakeholder theory perspective, excessive tax avoidance undermines relationships with the government, society, and the environment, and is perceived as neglecting corporate social responsibility. This may diminish reputation, social legitimacy, and public trust, ultimately weakening long-term sustainability. Regulatory pressures and stakeholder expectations also increase operational costs, making long-term risks often greater than short-term benefits from tax avoidance.*

*This study also demonstrates that political connections moderate this relationship by mitigating the negative impact of tax aggressiveness on sustainability. Political ties provide firms with access to external resources, regulatory protection, and additional legitimacy. Consistent with RDT, political connections serve as a strategy to reduce uncertainty and secure operational continuity.*

*This study affirms that tax aggressiveness has negative implications for corporate sustainability, as it reduces reputation, social legitimacy, and public trust. For managers, the results highlight that short-term financial gains from aggressive tax avoidance are outweighed by long-term risks. For regulators, the findings imply the need to strengthen oversight, enhance transparency, and provide incentives for firms that comply with tax obligations and actively engage in sustainability. For investors, the implications are to consider tax aggressiveness as a risk indicator in investment decisions and to evaluate tax compliance as part of ESG criteria. Furthermore, the moderating role of political connections suggests that such ties may serve as strategic resources that weaken the adverse effects of tax aggressiveness, though they may also create potential moral hazard.*

*The main limitation of this study lies in measuring sustainability solely through ESG scores, which may not fully capture firm conditions, particularly in developing countries. In addition, political connections measured based on publicly available data may not reflect the quality and intensity of political ties that could influence outcomes. Future research is recommended to employ more comprehensive sustainability indicators, such as regional or global indices, and to combine triangulated data from audits, stakeholder interviews, and third-party sources. Regarding political connections, future studies should develop more nuanced measurement approaches, such as political network analysis or qualitative assessments. Such improvements would yield more accurate results and enrich understanding of the influence of tax aggressiveness and political connections on corporate sustainability.*



## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN DISERTASI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
RINGKASAN .....	x
SUMMARY .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	11
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	12
BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL .....	16
2.1. Kajian Literatur .....	17
2.1.1. Teori Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder Theory</i> ) .....	17
2.1.2. Teori Ketergantungan Sumber Daya ( <i>Resource Dependence Theory</i> ) .....	21
2.1.3. Keberlanjutan Perusahaan .....	25
2.1.4. Agresivitas Pajak .....	40
2.1.5. Koneksi Politik .....	46
2.2. Penelitian Terdahulu .....	54
2.3. Model Penelitian .....	71
2.3.1. Model Teoritikal Dasar .....	71
2.3.2. Model Penelitian Empiris .....	73
2.4. Pengembangan Hipotesis .....	75
2.4.1. Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Keberlanjutan Perusahaan .....	75
2.4.2. Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Keberlanjutan Perusahaan .....	78
BAB III: METODE PENELITIAN .....	83
3.1. Desain Penelitian .....	83
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian .....	83
3.3. Operasionalisasi Variabel .....	85
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	101
3.5. Teknik Analisis Data .....	101

3.6. Analisis Statistik Deskriptif.....	102
3.7. Uji Pemilihan Model Penelitian.....	103
3.8. Uji Asumsi Klasik.....	104
3.9. Uji Regresi.....	106
3.10. Uji Sensitivitas.....	107
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>111</b>
4.1. Pemilihan Sampel.....	111
4.2. Statistik Deskriptif.....	112
4.3. Hasil Uji Pemilihan Model.....	116
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	117
4.5. Hasil Uji Regresi.....	120
4.6. Hasil Uji Sensitivitas.....	124
4.7. Pembahasan.....	132
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>149</b>
5.1. Kesimpulan Penelitian.....	149
5.2. Implikasi Penelitian.....	151
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	155
5.4. Agenda Penelitian Mendatang.....	156
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>158</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>178</b>



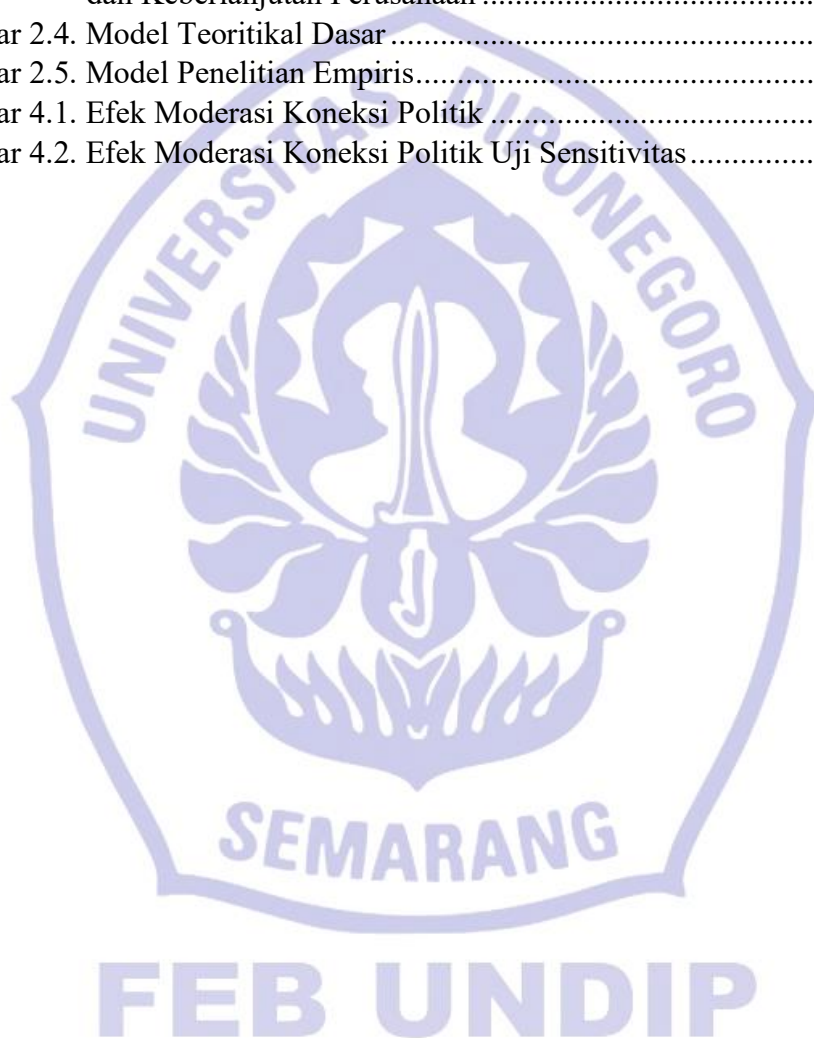
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator-Indikator Keberlanjutan Perusahaan Penelitian Sebelumnya .....	32
Tabel 2.2. Pengukuran Koneksi Politik Penelitian Sebelumnya .....	53
Tabel 2.3. Hasil Studi Empiris Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan .....	59
Tabel 2.4. Hasil Studi Pengaruh Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi .....	68
Tabel 3.1. Komponen Perhitungan Keberlanjutan Perusahaan .....	88
Tabel 3.2. Definisi dan Operasionalisasi Variabel .....	100
Tabel 4.1. Kriteria Seleksi dan Jumlah Sampel Penelitian .....	111
Tabel 4.2. Uji Statistik Deskriptif .....	112
Tabel 4.3. Uji Pemilihan Model .....	117
Tabel 4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	118
Tabel 4.5. Uji Hipotesis .....	121
Tabel 4.6. Uji Sensitivitas .....	125



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tiga Dimensi dari Keberlanjutan .....	27
Gambar 2.2. Gambaran Umum dan Hubungan Konsep Dasar dan Terminologi yang Berkaitan dengan Pelaporan Keberlanjutan	35
Gambar 2.3. Kronologi Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Keberlanjutan Perusahaan .....	37
Gambar 2.4. Model Teoritikal Dasar .....	73
Gambar 2.5. Model Penelitian Empiris.....	75
Gambar 4.1. Efek Moderasi Koneksi Politik .....	121
Gambar 4.2. Efek Moderasi Koneksi Politik Uji Sensitivitas.....	126



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabulasi Data Penelitian.....	178
Lampiran 2: Hasil Uji Utama .....	189
Lampiran 3: Hasil Uji Sensitivitas.....	193
- Uji Sensitivitas-Tingkat Utang.....	193
- Uji Sensitivitas-Mengeluarkan Sampel Komite Audit Kurang dari Tiga .....	197
- Uji Sensitivitas-Agresivitas Pajak diukur dengan BTD .....	200
- Uji Sensitivitas-Agresivitas Pajak diukur dengan ETR.....	203
- Uji Tambahan-Beda Tahun 2017-2019 (Sebelum Covid)- 2020-2022 (Selama Covid).....	206



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberlanjutan menjadi isu penting dalam perkembangan perusahaan, terlebih sejak munculnya tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada tahun 2015 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menekankan pentingnya kesejahteraan berkelanjutan (Rudyanto *et al.*, 2021). Keberlanjutan perusahaan dapat diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di tingkat korporasi, meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam jangka pendek maupun panjang bagi suatu perusahaan (Hahn *et al.*, 2017). Konsep keberlanjutan perusahaan juga dipahami sebagai upaya memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung (seperti pemegang saham, karyawan, klien, kelompok penekan, komunitas, dan lain-lain), tanpa mengorbankan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut di masa depan (Dyllick & Hockerts, 2002).

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan POJK Nomor 51 /POJK.03/2017. Peraturan tersebut mengatur implementasi prinsip keuangan berkelanjutan untuk institusi keuangan, emiten, dan perusahaan terbuka, dengan kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan yang berlaku efektif mulai tahun 2020. Laporan keberlanjutan adalah proses penyampaian informasi tentang dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari kegiatan bisnis perusahaan atau organisasi (Geraldina *et al.*, 2023). Salah satu

alasan kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab dan memilih untuk memasukkan keberlanjutan dalam model bisnis perusahaan karena penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan melakukan hal tersebut (Harnesk & Myhrberg, 2019).

Vidal & Van Buren (2022), menyatakan perusahaan yang aktif dalam menyampaikan laporan keberlanjutan pada umumnya dianggap lebih bertanggung jawab dalam mempertimbangkan dampak bisnisnya pada masyarakat dan lingkungan. Pencapaian keberlanjutan perusahaan memerlukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, konsumen, karyawan, pemasok, masyarakat dan lingkungan (Geraldina *et al.*, 2023). Konsep tersebut sesuai dengan teori pemangku kepentingan, yang menyatakan perusahaan harus menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan.

Beberapa penelitian seperti Fabian *et al.* (2022); Harnesk & Myhrberg (2019); Rudyanto *et al.* (2021) menghubungkan perencanaan atau strategi pajak dengan keberlanjutan. Perencanaan pajak merupakan alat optimasi untuk menurunkan pajak perusahaan (Harnesk & Myhrberg, 2019). Ada berbagai kemungkinan pengurangan pajak yang berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial sekaligus memaksimalkan keuntungan, namun hal tersebut bertentangan dengan upaya berkelanjutan perusahaan (Harnesk & Myhrberg, 2019). Hal tersebut merupakan isu sensitif yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dalam membedakan antara agresivitas pajak, penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Frank *et al.* (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai semua aktivitas pengurangan pembayaran pajak baik melalui perencanaan pajak legal maupun ilegal. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perilaku perusahaan yang berusaha meminimalkan pajak, baik secara legal maupun ilegal, tidak sesuai konsep keberlanjutan karena agresivitas pajak meniadakan kebaikan yang mereka lakukan (Sikka, 2010). *Tax avoidance* merupakan upaya menghindari pajak yang tidak melanggar hukum (legal), sedangkan *tax evasion* merupakan pengelakan atau pelanggaran hukum pajak yang disengaja dan ilegal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Bird & Davis-Nozemack, 2018).

Upaya untuk menghubungkan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan didasari oleh teori pemangku kepentingan. Teori tersebut menganggap bahwa korporasi bertindak dalam rangka menanggapi keinginan pemangku kepentingan, baik secara preventif maupun proaktif (Wood, 1991). Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, pihak yang paling dirugikan adalah pemerintah dan masyarakat. Akibat tindakan tersebut pemerintah dapat memberikan sanksi perpajakan, dan dari sisi masyarakat sanksinya dapat berupa boikot produk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hanlon & Slemrod (2009) bahwa praktik penghindaran pajak yang agresif dapat mengakibatkan sanksi negatif yang parah seperti hilangnya reputasi perusahaan, meningkatnya tekanan politik/media, potensi denda dan penalti dari kantor pajak, dan bahkan boikot konsumen (Hanlon & Slemrod, 2009). Pada akhirnya tindakan agresivitas pajak akan memengaruhi keberlanjutan perusahaan.

Fenomena boikot karena permasalahan pajak dialami oleh Starbucks di Inggris. Selama 15 tahun terakhir, Starbucks mengaku merugi di Inggris, namun memperluas lokasi ritelnya secara dramatis. Strategi perencanaan pajak Starbucks dianggap terlalu agresif dan ditanggapi dengan publisitas negatif oleh media setempat (Gribnau & Jallai, 2017). Dampak dari boikot tersebut Starbucks kemudian berjanji untuk membayar pajak sebesar £20 juta, dan melalui pembayaran inilah Starbucks mendapatkan kembali izin sosialnya untuk beroperasi (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, yaitu kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa reputasi perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan finansial, tetapi juga oleh sejauh mana perusahaan menghormati budaya dan norma yang ada di masyarakat. Lebih lanjut Baudot *et al.* (2020) menyatakan pemangku kepentingan menilai reputasi perusahaan tidak hanya dari segi keuangan dan kinerja tertentu, tetapi juga dari segi yang menunjukkan keutuhan budaya dan kesesuaian dengan norma-norma lokal. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada kelompok-kelompok lain seperti karyawan, konsumen, pemasok, komunitas lokal, dan lingkungan hidup.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Fabian *et al.* (2022), Emeka & Ngozi (2022), Lanis & Richardson (2013), (Mashuri & Ermaya, 2020), Nasih *et al.* (2024), dan Sui *et al.* (2019) menemukan bahwa agresivitas

pajak memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan perusahaan. Perusahaan mungkin meningkatkan aktivitas sosial mereka sebagai strategi untuk mengimbangi citra negatif akibat praktik agresivitas pajak. Sebaliknya, Kristiadi *et al.* (2020); Rudyanto *et al.* (2021); Shin & Park (2022) melaporkan bahwa agresivitas pajak justru berdampak negatif pada tanggung jawab sosial perusahaan, sementara Nusantari *et al.* (2015); Vacca *et al.* (2020) tidak menemukan pengaruh signifikan antara keduanya.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mendorong perlunya eksplorasi aspek yang memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Studi terdahulu seperti Emeka & Ngozi (2022), Kristiadi *et al.* (2020), Lanis & Richardson (2013), Nusantari *et al.* (2015) lebih berfokus pada faktor internal seperti kinerja perusahaan sebagai pemoderasi. Di sisi lain, pendekatan yang lebih komprehensif justru menunjukkan bahwa organisasi bergantung pada lingkungan eksternalnya, dan menekankan upaya antar organisasi mengamankan sumber daya dan mengurangi ketidakpastian lingkungan (Tashman, 2020). Dalam konteks ini, teori ketergantungan sumberdaya/*Resource Dependence Theory* (RDT) menjadi relevan, teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa akses terhadap sumber daya eksternal, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasi bisnis (Pfeffer & Salancik, 2003).

Penelitian sebelumnya telah menguji beberapa faktor moderasi eksternal, seperti program pengampunan pajak (Nasih *et al.*, 2024) dan praktik korupsi (Rudyanto *et al.*, 2021). Namun, belum ditemukan kajian yang secara komprehensif mengeksplorasi peran koneksi politik—sebagai salah satu faktor eksternal—dalam

memoderasi hubungan tersebut. Koneksi politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai hubungan perusahaan dengan individu yang memiliki atau pernah memiliki posisi strategis di pemerintahan, partai politik atau militer (Faccio, 2006; Nuswantara *et al.*, 2023). Fenomena terkait koneksi politik ini justru sangat relevan di Indonesia, di mana keberadaan koneksi politik antara kalangan bisnis dan pemerintah telah berkembang menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi-politik nasional. Data Ramadhan (2019) dalam harian Tempo mengungkapkan bahwa hampir separuh anggota DPR periode 2019-2024 memiliki latar belakang pengusaha, dengan 262 dari 575 anggota terafiliasi dengan 1.016 perusahaan, termasuk 243 yang menjabat sebagai direktur atau komisaris.

Koneksi politik kerap dikaitkan dengan potensi konflik kepentingan, namun dalam perspektif RDT dapat dipandang sebagai bentuk kolaborasi strategis ketika dikelola dengan baik. Di Indonesia, relasi antara kalangan bisnis dan pemerintah tergolong erat, ditandai dengan fenomena *political umbrella* di mana pelaku usaha secara aktif membangun jaringan politik untuk melindungi kepentingan bisnis mereka, termasuk memfasilitasi kepentingan perpajakan korporasi (Hidayati & Diyanty, 2018). Koneksi politik dapat memoderasi hubungan agresivitas pajak dan keberlanjutan melalui tiga mekanisme (Chen, 2021). Pertama, melalui akses informasi kebijakan yang memungkinkan perusahaan mengantisipasi perubahan regulasi perpajakan. Kedua, melalui pengurangan risiko regulasi dengan meminimalkan intervensi pemerintah. Ketiga, melalui legitimasi sosial yang membantu perusahaan memperoleh insentif pajak sekaligus menjaga citra korporasi (Huang *et al.*, 2021).

Namun demikian, dampak koneksi politik ini bersifat paradoks. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung memiliki risiko regulasi lebih rendah (Faccio, 2006) dan kemampuan mengakses kebijakan preferensial (Faisal *et al.*, 2023), yang memungkinkan strategi pajak lebih agresif. Namun, hal tersebut dapat berpotensi mengurangi kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan (Cheng *et al.*, 2017). Di sisi lain, justru mampu meningkatkan keberlanjutan perusahaan melalui peningkatan legitimasi dan akses terhadap sumber daya (Berkman *et al.*, 2010; Wu *et al.*, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki peran ganda yang saling bertolak belakang, dapat memberikan manfaat sekaligus risiko bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan memperhitungkan koneksi politik sebagai variabel moderasi antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Menurut Hair *et al.* (2017), variabel moderasi dapat memengaruhi kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dalam konteks ini, koneksi politik diharapkan mampu: (1) menjelaskan kontradiksi empiris yang ada, (2) memberikan kerangka analisis komprehensif mengenai dinamika antara strategi fiskal dan kinerja keberlanjutan perusahaan, serta (3) memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kompleks.

## 1.2. Perumusan Masalah

Isu tentang keberlanjutan perusahaan dan agresivitas pajak mendapat perhatian yang cukup besar dalam diskusi praktik bisnis kontemporer. Sejumlah besar penelitian, seperti Asmoro *et al.* (2024); Son (2024); Anggraeni & Hastuti (2020); Lanis & Richardson (2012, 2018); Nogueira (2021); Ortas & Gallego-Álvarez (2020); Supriyati & Anggraini (2021), telah mengkaji bagaimana komitmen keberlanjutan dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Temuan-temuan ini dapat dipahami dalam konteks meningkatnya permintaan *stakeholder* akan keterbukaan finansial dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Hubungan antara kedua variabel ini dipandang lebih kompleks daripada sekadar hubungan satu arah. Sebagaimana diungkapkan oleh Karbala & Vincenzo (2024), Kovermann & Velte (2021), dan Kristiadi *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa hubungan keduanya bersifat resiprokal. Karbala & Vincenzo (2024) menyatakan bahwa komitmen keberlanjutan dapat mengurangi agresivitas pajak untuk memitigasi risiko regulasi dan reputasi, sementara praktik pajak yang transparan justru memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan stabilitas jangka panjang.

Sementara itu, literatur yang menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan masih terbatas dan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan temuan tersebut mendorong perlunya eksplorasi faktor moderasi dalam hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Sejauh ini, studi lebih banyak menyoroti faktor internal seperti kinerja perusahaan (Emeka & Ngozi, 2022; Kristiadi *et al.*, 2020; Lanis & Richardson,

2013; Nusantari *et al.*, 2015), sementara pendekatan komprehensif menunjukkan pentingnya ketergantungan pada lingkungan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam *Resource Dependence Theory* (Pfeffer & Salancik, 2003; Tashman, 2020). Penelitian terdahulu memang telah menguji faktor eksternal seperti program pengampunan pajak (Nasih *et al.*, 2024) dan praktik korupsi (Rudyanto *et al.*, 2021), tetapi peran koneksi politik sebagai variabel moderasi belum banyak ditelaah secara mendalam. Fenomena ini sangat relevan di Indonesia, di mana hampir separuh anggota DPR periode 2019–2024 memiliki keterkaitan dengan dunia usaha (Ramadhan, 2019).

Koneksi politik merujuk pada hubungan perusahaan dengan aktor politik atau pemerintah, yang dapat memberikan akses lebih mudah ke sumber daya, informasi, dan perlindungan dari risiko regulasi. Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya eksternal melalui koneksi politik cenderung lebih mampu mengatasi ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan operasional mereka. Perusahaan dengan koneksi politik yang kuat mungkin dapat mengurangi dampak negatif dari agresivitas pajak terhadap keberlanjutan, karena mereka mungkin mendapatkan perlakuan istimewa atau kelonggaran dari regulator. Riset ini menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan dan bagaimana koneksi politik memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan?

2. Apakah koneksi politik memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana agresivitas pajak dapat memengaruhi upaya perusahaan dalam mencapai keberlanjutan perusahaan di tengah tantangan regulasi dan politik yang dinamis di Indonesia. Berdasarkan tujuan umum tersebut maka secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan.
2. Menganalisis peran koneksi politik dalam memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis dalam penelitian ini berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori dan pemahaman konseptual dalam suatu bidang ilmu. Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pemecahan masalah atau penerapan langsung antara hasil penelitian dengan konteks yang ada dilapangan.

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan literatur akademis, khususnya dalam bidang akuntansi, keberlanjutan, dan perpajakan. Secara teoretis, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang bagaimana agresivitas pajak memengaruhi keberlanjutan

perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan perspektif baru tentang peran koneksi politik dalam memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kerangka teori pemangku kepentingan dan teori ketergantungan sumber daya dengan temuan empiris yang relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi sejumlah pihak, termasuk manajemen perusahaan, pemerintah, dan dunia akademik. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang risiko dan implikasi jangka panjang dari strategi perpajakan yang agresif terhadap keberlanjutan perusahaan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kembali kebijakan perpajakan mereka guna memastikan bahwa strategi yang diadopsi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Perhatian investor sebagai pemangku kepentingan terhadap pengungkapan keberlanjutan perusahaan yang kredibel terus meningkat. Hal ini mendorong studi ini untuk berkontribusi pada pemahaman umum mengenai keberlanjutan perusahaan, khususnya apakah keberlanjutan tersebut memperhitungkan agresivitas pajak. Pengetahuan ini dapat membantu perusahaan memilih strategi yang lebih tepat sesuai dengan pendekatan keberlanjutan yang diinginkan, sekaligus memberikan wawasan tambahan bagi investor untuk membuat keputusan investasi berkelanjutan yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka.

Manfaat praktis penelitian ini bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam merancang regulasi yang mencegah praktik perpajakan yang berlebihan namun tetap mendukung keberlanjutan perusahaan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, temuan ini dapat menjadi dasar memperkuat regulasi terkait koneksi politik dan transparansi dalam praktik bisnis, khususnya dengan menunjukkan bagaimana koneksi politik berperan sebagai pemoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap dinamika kekuasaan dalam korporasi. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan antara perpajakan dan keberlanjutan, serta implikasi praktisnya di berbagai konteks industri dan geografis.

### **1.5. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua aspek orisinalitas yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Orisinalitas pertama yaitu mengkombinasikan teori pemangku kepentingan dan teori ketergantungan sumber daya. Kedua, menjadikan koneksi politik sebagai variabel pemoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan.

Kombinasi teori pemangku kepentingan dan teori ketergantungan sumber daya untuk menganalisis hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. Teori Pemangku

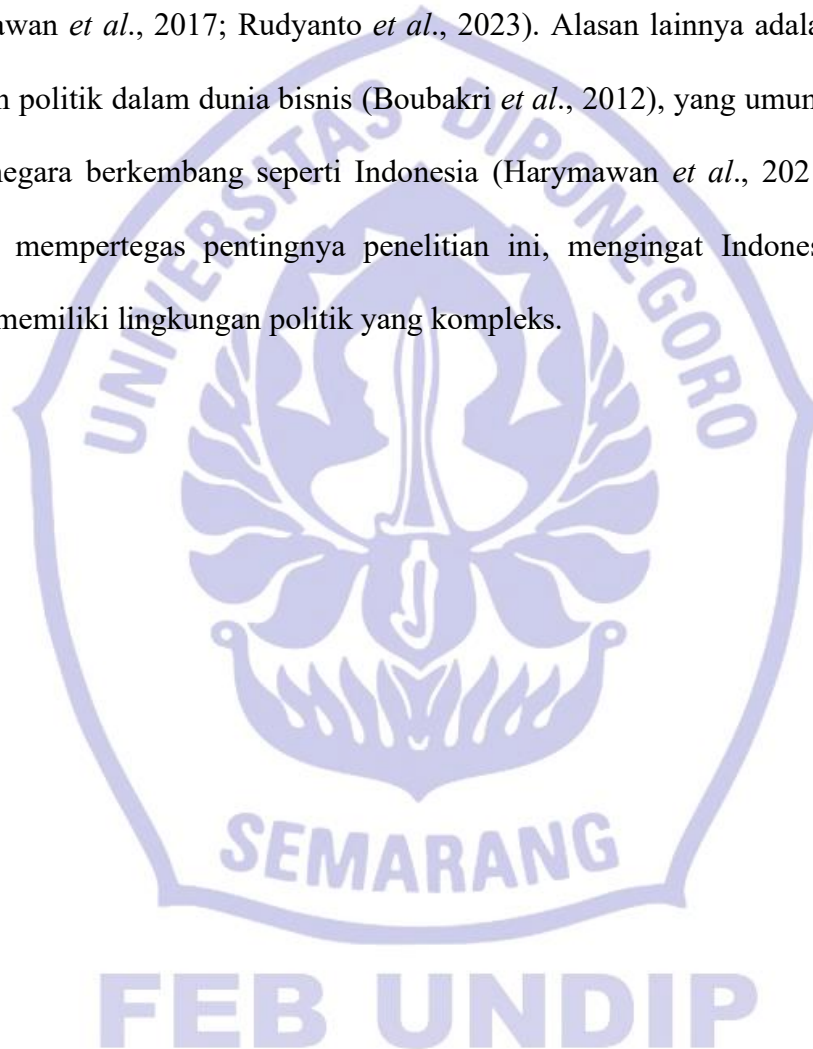
Kepentingan menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, investor, dan lingkungan, dalam pengambilan keputusan. Agresivitas pajak dapat menimbulkan risiko reputasi dan tekanan dari pemangku kepentingan jika dianggap merugikan kepentingan publik atau melanggar prinsip tata kelola yang baik. Teori ketergantungan sumber daya berfokus pada bagaimana perusahaan bergantung pada lingkungan eksternal untuk memperoleh sumber daya kritis, termasuk akses kebijakan dan perlindungan regulasi. Koneksi politik dalam hal ini berperan sebagai sumber daya strategis yang membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian dan mengoptimalkan strategi pajak tanpa mengorbankan keberlanjutan. Kombinasi kedua teori ini belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan.

Aspek orisinalitas penelitian kedua yaitu koneksi politik sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan pengamatan, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara eksplisit menjadikan koneksi politik sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Penelitian sebelumnya seperti Emeka & Ngozi (2022), Kristiadi *et al.* (2020), Lanis & Richardson (2013), dan Nusantari *et al.* (2015) lebih berfokus pada faktor internal (misalnya kinerja keuangan) sebagai pemoderasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, koneksi politik sering kali menjadi penentu utama dalam strategi perusahaan dalam konteks bisnis, termasuk kebijakan pajak dan keberlanjutan.

Koneksi politik menjadi penting untuk dijadikan sebagai pemoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Perubahan dalam hubungan politik kemungkinan dapat memengaruhi tindakan perusahaan dalam bereaksi terhadap perubahan rezim politik (Pan & Tian, 2020). Koneksi politik berfungsi sebagai sumber daya eksternal perusahaan yang dapat memberikan keuntungan strategis. Keuntungan tersebut seperti menyediakan akses ke informasi, perlindungan hukum, dan kebijakan fiskal yang lebih menguntungkan. Koneksi politik juga dapat membantu perusahaan mengurangi risiko yang berkaitan dengan regulasi yang tidak pasti dan mengelola dampak kebijakan publik, termasuk kebijakan pajak yang dapat memengaruhi keputusan keberlanjutan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik yang kuat mungkin lebih mampu menavigasi lingkungan politik yang dinamis, mengoptimalkan agresivitas pajak tanpa mengorbankan tujuan keberlanjutan jangka panjang mereka.

Pendapat tersebut didasarkan teori ketergantungan sumber daya yang menekankan pentingnya hubungan antara perusahaan dan lingkungan eksternal, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik kuat dapat mengakses sumber daya dan perlindungan yang memungkinkan mereka untuk melakukan strategi pajak lebih agresif tanpa menghadapi konsekuensi negatif yang signifikan. Perusahaan dengan koneksi politik kuat dapat memanfaatkan akses informasi dan perlindungan regulasi untuk menjalankan strategi pajak agresif dengan risiko minimal. Dukungan politik ini membantu mengurangi tekanan eksternal dan mencegah konsekuensi negatif seperti denda atau kerusakan reputasi. Hillman *et al.*

(2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik sering kali mendapatkan perlakuan lebih baik dari regulator, termasuk dalam hal perpajakan. Ini memungkinkan perusahaan tersebut untuk lebih agresif dalam strategi pajak mereka sambil tetap mempertahankan keberlanjutan jangka panjang mereka (Harymawan *et al.*, 2017; Rudyanto *et al.*, 2023). Alasan lainnya adalah kuatnya pengaruh politik dalam dunia bisnis (Boubakri *et al.*, 2012), yang umum terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Harymawan *et al.*, 2021). Hal ini semakin mempertegas pentingnya penelitian ini, mengingat Indonesia sendiri dikenal memiliki lingkungan politik yang kompleks.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), dan teori ketergantungan sumberdaya (*resource dependence theory/RDT*). Teori pemangku kepentingan dan teori ketergantungan sumber daya menyediakan kerangka konseptual yang saling melengkapi untuk memahami bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya dalam konteks keberlanjutan, agresivitas pajak, dan koneksi politik. Teori pemangku kepentingan berfungsi menjelaskan bagaimana keputusan strategis perusahaan terkait agresivitas pajak memengaruhi persepsi dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga untuk pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, komunitas, dan pemerintah. Dalam konteks ini, agresivitas pajak dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, keberlanjutan perusahaan dapat terancam, karena strategi pajak yang agresif tersebut dapat merusak hubungan dengan pemangku kepentingan karena dianggap tidak etis dan merugikan kepentingan publik.

Di sisi lain, teori ketergantungan sumber daya menjelaskan peran koneksi politik sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Menurut teori ketergantungan sumber daya, perusahaan bergantung pada lingkungan eksternal untuk sumber daya kritis seperti akses

terhadap regulasi yang mendukung, perlindungan dari kebijakan yang merugikan, atau dukungan dari pemerintah. Koneksi politik dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian yang muncul dari praktik agresivitas pajak, seperti risiko regulasi dan sanksi dari pemerintah. Adanya pemanfaatan hubungan politik, perusahaan dapat memperoleh perlindungan atau pengaruh yang menguntungkan dalam menghadapi tekanan dari pemangku kepentingan dan regulasi yang lebih ketat. Koneksi politik memungkinkan perusahaan untuk tetap mempertahankan keberlanjutan meskipun mengadopsi strategi pajak yang agresif, karena perusahaan mampu mengelola ketergantungan mereka pada lingkungan politik untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, integrasi kedua teori ini dalam model penelitian memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola hubungan mereka dengan pemangku kepentingan dan sumber daya eksternal secara strategis untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

## **2.1. Kajian Literatur**

### **2.1.1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Freeman (1984) mendefinisikan teori pemangku kepentingan sebagai pendekatan manajerial yang menyatakan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan meliputi pemegang saham, karyawan, dan manajemen, calon investor, kreditur, pesaing, dan masyarakat luas, serta pemerintah negara di mana entitas tersebut melakukan transaksi bisnis atau

melaporkan keuntungan (Payne & Raiborn, 2018). Konsep pemangku kepentingan memberikan cara berpikir baru tentang manajemen strategis mampu menetapkan dan menerapkan tujuan perusahaan (Freeman, 1984). Teori pemangku kepentingan menganggap korporasi bertindak dalam menanggapi keinginan pemangku kepentingan, baik secara preventif maupun proaktif (Wood, 1991). Pelaporan keberlanjutan kemudian menjadi saluran untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan (Torelli *et al.*, 2020).

Konsep pemangku kepentingan sendiri terus berkembang, dengan berbagai penelitian yang menambah pemahaman tentang peran dan pentingnya pemangku kepentingan dalam operasi bisnis. Carroll (1991) menyusun piramida struktur tanggung jawab sosial dalam empat tingkatan, yaitu: tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis dan tanggung jawab filantropi. Donaldson & Preston (1995) memperjelas implikasi teori pemangku kepentingan dalam konteks bisnis dan etika, yang menyatakan bahwa implikasi etis dari teori pemangku kepentingan, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan sosial dan lingkungan, tetapi juga untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan (Waddock & Graves, 1997). Tujuan keberlanjutan perusahaan agar tercapai, diperlukan mengintegrasikan teori pemangku kepentingan dan keberlanjutan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan (Hörisch *et al.*, 2020). Strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan dapat dilakukan dengan menilai dampak sosial dan lingkungan, menerapkan

strategi bisnis yang berkelanjutan, serta mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam seluruh lini bisnis perusahaan (Freudenreich *et al.*, 2020).

Studi sebelumnya telah mengidentifikasi tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan sebagai bentuk etika perusahaan (Finch, 2006). Namun, tujuan dari kegiatan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan bagian dari etika perusahaan tetapi lebih untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Rudyanto & Siregar, 2018). Laporan keberlanjutan dapat dianggap sebagai media akuntabilitas untuk menyebarkan informasi keberlanjutan tentang tanggung jawab perusahaan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas (Ardiana, 2019). Keberlanjutan dalam teori pemangku kepentingan adalah sesuatu yang secara inheren baik, karena memperhitungkan kesejahteraan pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan tidak membatasi apa yang baik hanya untuk beberapa organisasi, tetapi lebih ke bagaimana membentuk hubungan pemangku kepentingan yang berkelanjutan (Freeman *et al.*, 2021).

Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa organisasi harus menciptakan kekayaan bagi semua peserta (*stakeholder*) yang dipengaruhi oleh tujuan dan proses bisnis (Benvenuto *et al.*, 2023). Ini berbeda dengan model keuangan tradisional, yang didasarkan pada penciptaan nilai secara eksklusif untuk pemegang saham (Gray *et al.*, 1995). Berdasar penjelasan tersebut, maka menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kinerja perusahaan merupakan hal yang esensial. Pemangku kepentingan, memiliki tanggung jawab moral untuk

memberikan masukan dan mengarahkan perilaku perusahaan ke arah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan (Rodríguez-Fernández *et al.*, 2020).

Pembayaran pajak oleh perusahaan akan menjadi perhatian publik jika hal tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat luas, dan bukan sekadar menjadi bagian dari strategi efisiensi operasional perusahaan (Lanis & Richardson, 2013). Pembayaran pajak yang hanya fokus pada pengurangan beban tanpa memperhatikan dampak sosial dapat dipahami sebagai strategi minimisasi pajak. Namun demikian, pendekatan ini cenderung mengesampingkan tanggung jawab etis serta kewajiban perusahaan terhadap komunitas dan pemangku kepentingan lainnya (Avi-Yonah, 2008). Biaya dan manfaat dari penghindaran pajak dapat bertambah bagi pemangku kepentingan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Sementara beberapa pemangku kepentingan mungkin mendapat manfaat dari penghindaran pajak, yang lain mungkin harus menanggung biayanya (Kovermann & Velte, 2019).

Konsep keberlanjutan perusahaan juga dikedepankan untuk mencapai nilai-nilai pemangku kepentingan yang menyiratkan integrasi pelestarian alam dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien (Liu & Yan, 2018). Namun, keberlanjutan bersifat jangka panjang, multi-tahap, dan membutuhkan pengambilan risiko. Keberlanjutan sangat mungkin dipengaruhi oleh kebijakan dan pemangku kepentingan yang relevan (Huang *et al.*, 2021). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah faktor kunci dalam kemampuan perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian eksternal dan mengamankan sumber daya (Li *et al.*, 2008). Ketika inovasi keberlanjutan perusahaan tidak didukung oleh kebijakan pemerintah dan

pemangku kepentingan, sulit bagi perusahaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Huang *et al.*, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka koneksi politik secara luas dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam interaksi perusahaan dengan pemangku kepentingannya (Faccio, 2006).

### **2.1.2. Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependence Theory*)**

Hart (1995) telah meramalkan bahwa kemungkinan besar strategi dan keunggulan bersaing di masa yang akan datang akan ditentukan oleh sejauh mana perusahaan mampu mendorong aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lebih lanjut Hart (1995) menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan strategi yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, upaya atau strategi untuk mencapai keberlanjutan yang dilakukan perusahaan lebih fokus pada faktor persaingan dan kelembagaan (Hoffman & Jennings, 2021). Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Tashman (2020) berpendapat bahwa ketergantungan langsung pada sumber daya alam yang langka dan ketidakpastian yang ditimbulkannya mendorong organisasi untuk menyesuaikan strategi dalam mengelola lingkungan alam. Argumen ini didasarkan pada teori ketergantungan sumber daya/*Resource Dependence Theory* (RDT) karena fokusnya pada bagaimana organisasi mengelola ketergantungan sumber daya eksternal dan ketidakpastian terkait (Tashman, 2020).

RDT pertama kali diperkenalkan oleh Jeffrey Pfeffer dan Gerald R. Salancik pada tahun 1978. Teori RDT menjelaskan bagaimana organisasi bergantung pada sumber daya eksternal yang dikendalikan oleh entitas lain. Perkembangan teori RDT tidak terlepas dari buah pemikiran peneliti sebelumnya antara lain (Blau,

1964; Emerson, 1962; Jacobs, 1974; Thompson, 1967). Riset Blau (1964); Emerson (1962) merupakan konsep dasar RDT yang muncul dari kekuatan organisasi. Temuan Jacobs (1974) menyumbang kontribusi dengan menjelaskan bahwa organisasi yang berbeda dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh lingkungannya melalui hubungan timbal balik, seperti pertukaran sumber daya atau informasi. Blau (1964) memperkenalkan konsep penting tentang bagaimana hubungan sosial berkembang dari interaksi dasar menuju struktur sosial yang kompleks. Pandangan tersebut sangat relevan dengan RDT, yang mengasumsikan bahwa organisasi, termasuk perusahaan, bergantung pada sumber daya eksternal. Secara umum RDT menyatakan bahwa keberlangsungan hidup organisasi sangat bergantung pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, dan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya maka perusahaan harus mampu mengelolanya (Thompson, 1967).

Kotter (1979); Scott & Davis (2016); Ulrich & Barney (1984) merupakan beberapa peneliti yang mengembangkan teori RDT. Kotter (1979) menyatakan perspektif ketergantungan eksternal mengintegrasikan pengetahuan tentang bagaimana organisasi membentuk dan dibentuk oleh lingkungan eksternal mereka. Ulrich & Barney (1984) menjelaskan temuannya mengenai cara organisasi dapat mengoptimalkan potensinya, terutama dalam memperoleh sumber daya. Terdapat tiga sudut pandang mengenai hubungan antara organisasi dan lingkungan, yaitu: (1) perspektif ketergantungan sumber daya; (2) perspektif efisiensi; dan (3) perspektif populasi. Kerangka ini menawarkan cara sederhana dan logis untuk memahami

berbagai taktik atau tindakan yang terkadang digunakan manajer untuk menghadapi ketergantungan eksternal dan menyoroiti pilihan dasar yang dimiliki oleh manajer.

RDT memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan bagaimana organisasi mengelola ketidakpastian akibat ketergantungan mereka pada sumber daya alam yang langka (Tashman, 2020). Jacobs (1974) membedakan organisasi dalam berbagai tingkatan, bergantung pada lingkungan eksternal untuk sumber daya penting seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Ketergantungan ini membuat organisasi rentan terhadap pengaruh dan kontrol eksternal. Jiang *et al.* (2023) melakukan pengujian ketergantungan sumber daya pada bisnis internasional, menyimpulkan terdapat tiga dimensi utama, yaitu; ketergantungan lokasi, ketergantungan antarorganisasi, dan ketergantungan intraorganisasi. Ketergantungan terhadap organisasi eksternal dapat memperburuk ketidakpastian organisasi, antara lain isu tentang sumber daya penting, barang dan jasa, informasi, ikatan politik, inovasi, kondisi persaingan, legitimasi masyarakat, dan kebijakan publik (Davis & Cobb, 2010; Hillman *et al.*, 2009).

Organisasi berusaha untuk mengelola ketergantungan ini dengan berbagai strategi, termasuk membangun hubungan dengan entitas eksternal yang memiliki kontrol atas sumber daya tersebut (Pfeffer & Salancik, 2003). Banyak organisasi mengandalkan strategi untuk menyerap atau mengatasi hambatan, seperti menjalin aliansi dengan mitra yang dapat dipercaya, melakukan merger, menggunakan strategi politik, atau membentuk koneksi dewan (Beckman *et al.*, 2004). Pfeffer & Salancik (2003) mengidentifikasi lima strategi utama yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengurangi ketergantungan lingkungan, sebagai berikut:

1. Merger dan integrasi vertikal: organisasi dapat mengurangi ketergantungan dengan mengakuisisi atau bergabung dengan organisasi lain yang memberikan input atau menjadi pembeli produk mereka.
2. *Joint ventures* dan hubungan antarorganisasi: kolaborasi antar organisasi, seperti aliansi strategis atau konsorsium riset, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya atau pasar.
3. Dewan direksi: memanfaatkan dewan direksi sebagai sumber daya eksternal yang dapat memberikan informasi, akses ke sumber daya, dan legitimasi.
4. Tindakan politik: menggunakan mekanisme politik untuk memengaruhi peraturan pemerintah agar lebih menguntungkan bagi organisasi.
5. Suksesi eksekutif: menggantikan pemimpin eksekutif dengan individu yang lebih mampu menangani ketidakpastian dan ketergantungan lingkungan.

RDT berasumsi bahwa kinerja organisasi bergantung pada lingkungannya, dan menekankan upaya antar organisasi untuk mengamankan sumber daya dan mengurangi ketidakpastian lingkungan (Pfeffer & Salancik, 2003; Tashman, 2020).

RDT sangat diperlukan dalam rangka mengelola ketergantungan sumber daya alam dan perbedaan ini dapat dijelaskan oleh logika kelembagaan yang berbeda mengenai bagaimana alam seharusnya dikelola (Hoffman & Jennings, 2021).

Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bagaimana peran negara dalam pengambilan kebijakan menimbulkan ketidakpastian dalam sistem perekonomian (Hillman & Hitt, 1999).

Kekuasaan dalam konteks RDT dapat diperluas melalui koneksi politik, di mana organisasi yang memiliki hubungan dengan aktor politik atau pemerintah dapat mengakses sumber daya secara lebih efektif dan dengan biaya yang lebih rendah. Emerson (1962) dalam teorinya tentang (*Power-Dependence Relations*) menekankan bahwa kekuasaan berasal dari ketergantungan, dan dalam konteks modern, koneksi politik dapat menjadi salah satu sumber kekuasaan utama bagi organisasi. Crane *et al.* (2019) menyoroti bagaimana pemerintah melalui investasi strategis dapat memengaruhi dan bahkan mendikte arah pengembangan teknologi tertentu, yang menguntungkan perusahaan yang memiliki koneksi politik kuat. Lebih jauh, Febrianti *et al.* (2024) menegaskan bahwa organisasi yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber daya publik, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan mereka pada pasar dan meningkatkan otonomi mereka dalam pengambilan keputusan strategis. Koneksi politik ini tidak hanya memperkuat posisi tawar organisasi tetapi juga mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakpastian lingkungan (Febrianti *et al.*, 2024).

### **2.1.3. Keberlanjutan Perusahaan**

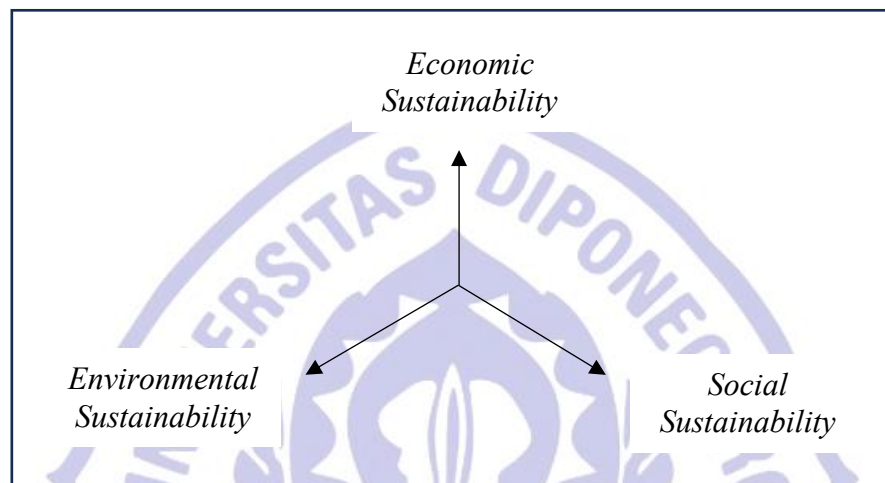
Laporan Komisi Brundtland, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa merusak kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka (Keeble, 1988). Laporan tersebut menyatakan bahwa keberlanjutan mendasarkan perdebatan pembangunan dalam kerangka global, di mana pemenuhan kebutuhan manusia secara terus-menerus merupakan tujuan akhir. Definisi dari Laporan Komisi Brundtland memiliki nilai fundamental bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh melemahkan faktor sosial

dan lingkungan yang mendasarinya. Laporan dari World Commission on Environment and Development (WCED) tahun 1987 yang berjudul “*Our Common Future*” tersebut merupakan tonggak utama dalam mendorong kesadaran global tentang keberlanjutan.

Satu dekade setelah laporan Komisi Brundtland, Elkington (1998) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yang lebih spesifik. Definisi tersebut berkembang menjadi konsep *triple bottom line* (TBL), yang merupakan keseimbangan antara *people-planet-profit* (3P) (Elkington, 1998). Konsep ini berada di persimpangan tiga dimensi, yaitu *people* (sosial); *planet* (lingkungan); dan *profit* (ekonomi). Mengintegrasikan dan menyeimbangkan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi secara bersamaan dengan pemfokusan pada sifat jangka panjang dari kegiatan bisnis adalah karakteristik kunci dari pembangunan berkelanjutan (Robinson, 2004).

Dyllick & Hockerts (2002) menerapkan gagasan pembangunan berkelanjutan dalam bisnis sebagai keberlanjutan perusahaan. Dyllick & Hockerts (2002) menjelaskan bahwa keberlanjutan perusahaan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, kelompok penekan, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, tanpa mengorbankan kemampuannya untuk mencapai tujuan tersebut, juga mencukupi kebutuhan pemangku kepentingan di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mempertahankan dan menumbuhkan basis modal ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sambil secara aktif memberikan kontribusi

terhadap keberlanjutan dalam bidang politik. Dari definisi ini, tiga elemen kunci keberlanjutan perusahaan dapat diidentifikasi dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial dalam *triple-bottom line* (tampak pada gambar 2.1).



**Gambar 2.1. Tiga Dimensi dari Keberlanjutan**

Sumber: Dyllick & Hockerts (2002)

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, dunia usaha harus memiliki tiga dimensi yaitu *economic sustainability* (keberlanjutan ekonomi), *social sustainability* (keberlanjutan sosial), *environmental sustainability* dan (keberlanjutan lingkungan). Definisi keberlanjutan perusahaan diadopsi dari konsep pembangunan berkelanjutan dan dapat dipahami sebagai penerapan pembangunan berkelanjutan di tingkat korporasi, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial jangka pendek dan jangka panjang dari suatu perusahaan (Hahn *et al.*, 2017).

Entitas yang berharap menjadi lebih besar, wajib beradaptasi dengan lingkungan, keadaan yang berubah dan bertanggung jawab, prinsip-prinsip ini berlaku untuk makhluk hidup dan organisasi (Marrewijk, 2003). Dapat disimpulkan

bahwa organisasi yang terus meningkatkan kualitasnya, pada akhirnya harus mengadopsi gaya manajemen yang lebih sosial, dan bergerak menuju keberlanjutan perusahaan yang lebih tinggi. Marrewijk (2003) mendefinisikan keberlanjutan perusahaan berdasarkan tingkat ambisi perusahaan atas keberlanjutan, sebagai berikut:

1. *Compliance-driven CS*<sup>1</sup>

Keberlanjutan perusahaan pada level ini terdiri dari memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dalam batas-batas peraturan dari otoritas. Motivasi keberlanjutan perusahaan adalah bahwa keberlanjutan perusahaan dianggap sebagai tugas dan kewajiban, atau perilaku yang benar.

2. *Profit-driven CS*

Keberlanjutan perusahaan pada level ini terdiri dari integrasi aspek sosial, etika, dan ekologis ke dalam operasi bisnis dan pengambilan keputusan, dengan syarat berkontribusi pada keuntungan finansial. Keberlanjutan perusahaan dipromosikan jika menguntungkan, misalnya karena peningkatan reputasi di berbagai pasar (pelanggan/karyawan/pemegang saham).

3. *Caring CS*

Keberlanjutan perusahaan dengan menyeimbangkan perhatian ekonomi, sosial dan ekologi, yang ketiganya penting dalam diri mereka sendiri.

Inisiatif keberlanjutan perusahaan melampaui kepatuhan hukum dan

---

<sup>1</sup> CS sebagai CS (*Corporate Sustainability*) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*)

pertimbangan keuntungan. Motivasi keberlanjutan perusahaan ini adalah bahwa potensi manusia, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap planet sama pentingnya.

#### 4. *Synergistic CS*

Keberlanjutan perusahaan ini terdiri dari pencarian solusi fungsional yang seimbang yang menciptakan nilai di bidang ekonomi, sosial, dan ekologis dari kinerja perusahaan, dalam pendekatan yang sinergis dan saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan yang relevan. Motivasi keberlanjutan perusahaan adalah bahwa keberlanjutan itu sendiri penting, terutama karena memang diakui sebagai arah kemajuan yang tak terelakkan.

#### 5. *Holistic CS*

Keberlanjutan perusahaan sepenuhnya terintegrasi dan tertanam dalam setiap aspek organisasi, bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas dan kelangsungan hidup setiap makhluk dan entitas, sekarang dan di masa depan. Motivasi keberlanjutan perusahaan adalah bahwa keberlanjutan adalah satu-satunya alternatif karena semua makhluk dan fenomena saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, setiap orang atau organisasi memiliki tanggung jawab universal terhadap semua makhluk lainnya.

Serangkaian definisi keberlanjutan perusahaan yang berbeda menyiratkan bahwa tidak ada pengertian mutlak untuk keberlanjutan perusahaan. Seiring kemajuan zaman, keberlanjutan menjadi isu penting dalam perkembangan

perusahaan. Sejak munculnya SDGs yang digagas oleh PBB tahun 2015, konsep ini makin berkembang. SDGs mengembangkan 3P yang dikenalkan oleh Elkington (1998) menjadi 5P (*people, planet, prosperity, peace, dan partnership*), yang terdiri dari 17 tujuan dalam 169 sasaran dan dituangkan ke 242 indikator (United Nations, 2018).

Meningkatnya perhatian yang diberikan pada fenomena keberlanjutan telah menghasilkan kebutuhan besar akan laporan non keuangan (Torelli *et al.*, 2020). Standar global saat ini mengharuskan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri (Zaid *et al.*, 2020). Pada tahun 2017, 75% dari 100 perusahaan-perusahaan besar di 49 negara (4.900 perusahaan) merilis laporan berkelanjutan, naik cukup tajam dari tahun 1993 yang hanya 12% (Serafeim & Trinh, 2020). Perusahaan semakin banyak menggunakan pengungkapan keberlanjutan untuk mengkomunikasikan filosofi, strategi, dan hasil dari keterlibatan sosial dan lingkungan mereka (Lashitew, 2021). Tantangan utamanya adalah bahwa keberlanjutan kegiatan organisasi tidak dapat diamati dan oleh karena itu tidak dapat diukur secara ketat dan objektif.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2015, SDGs telah digunakan sebagai kerangka komunikasi oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan besar di dunia (Lashitew, 2021), namun sangat sedikit perusahaan yang melaporkan kinerja mereka sehubungan dengan target spesifik. PWC (2019) menyatakan hanya 25% perusahaan menyertakan SDGs dalam strategi bisnis mereka, dan hanya 14% perusahaan mempublikasikan dan mengidentifikasi SDGs secara lebih spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa relatif sedikit perusahaan yang secara aktif

mengintegrasikan SDGs ke dalam kegiatan inti mereka dan mengevaluasi efektivitas kegiatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam menilai, melacak, dan menghubungkan hasil keberlanjutan dengan aktivitas perusahaan tertentu (Lashitew, 2021).

Terdapat perbedaan pengukuran keberlanjutan perusahaan pada penelitian penelitian sebelumnya. Lashitew (2021) menyatakan di antara banyak elemen keberlanjutan, dampak sosial mungkin yang paling sulit dinilai melalui kerangka kerja yang ada. Karena sifat hasil keberlanjutan yang beragam, lembaga pemeringkat cenderung mengembangkan metrik kinerja yang khas, sering kali menghasilkan peringkat yang berbeda untuk organisasi yang sama (Lashitew, 2021). Misalnya, Organisasi Internasional untuk Standardisasi/*International Organization for Standardization* (ISO) telah mengeluarkan beberapa sertifikasi yang mengukur kinerja keberlanjutan seperti ISO 14001, yang memberi organisasi kerangka kerja yang lebih baik untuk pengelolaan lingkungan (Elalfy *et al.*, 2021).

Indikator keberlanjutan dalam menilai kinerja keberlanjutan di tingkat korporasi menurut (Rahdari & Rostamy, 2015) adalah menyeluruh (*exhaustive*), relevan (*relevance*), memenuhi syarat (*eligible*), terukur (*measurable*), monoton (*monotonic*), kumulatif (*cumulative*), mandiri (*autonomous*), umum (*communal*). (Herbohn *et al.*, 2014) mengembangkan indeks kinerja keberlanjutan berdasarkan *International Finance Corporation* (IFC). Indeks ini memperluas pengukuran sebelumnya yang hanya berfokus pada indeks kinerja lingkungan bermasalah yang dirilis oleh *Council on Economic Priorities* (CEP), atau tingkat emisi beracun yang hanya menangkap satu aspek lingkungan, dan bahkan lebih sedikit dari bagian

keberlanjutan. Tabel 2.1 menunjukkan pengukuran keberlanjutan perusahaan yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

**Tabel 2.1. Indikator-Indikator Keberlanjutan Perusahaan Penelitian Sebelumnya**

No	Penulis dan Tahun	Pengukuran Keberlanjutan Perusahaan
1	Herbohn <i>et al.</i> (2014)	- Manajemen lingkungan, komitmen pengembangan sosial dan kapasitas - Tata kelola perusahaan - Efisiensi lingkungan ( <i>eco efficiency</i> ) dan jejak lingkungan ( <i>environmental footprint</i> ) - Pengembangan komunitas - Kesehatan, keamanan dan kesejahteraan tenaga kerja
2	Asiaei & Jusoh (2017)	- Ukuran keuangan - Ukuran pelanggan - Ukuran proses bisnis internal - Langkah-langkah inovasi dan pembelajaran - Langkah-langkah sosial dan lingkungan
3	Zaid <i>et al.</i> (2020)	- Pengungkapan lingkungan - Pengungkapan sumber daya manusia - Pengungkapan produk dan konsumen - Pengungkapan keterlibatan masyarakat
4	Jarboui <i>et al.</i> (2020)	- menggunakan skor lingkungan, sosial dan ekonomi tahunan yang diperoleh dari <i>Thomson Reuters-ASSET 4</i>
5	Asiaei <i>et al.</i> (2021)	- pengukuran diadopsi dari skala Asiaei & Jusoh (2017). Item dinilai pada skala Likert tujuh poin dengan titik akhir 'tidak sama sekali' (1) sampai 'sangat banyak' (7).
6	Li & Guo (2022)	- total skor tanggung jawab sosial perusahaan dalam satu tahun - peringkat kinerja CSR suatu perusahaan

Gagasan bahwa perusahaan diharapkan memiliki standar dan praktik kinerja sosial dan lingkungan sekaligus memenuhi kewajiban finansial dan hukum biasanya disebut sebagai CSR atau keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability/CS*) (Ashrafi *et al.*, 2018). Penelitian sebelumnya telah mengungkap perbedaan dari CSR dan CS, beberapa menyatakan kedua hal tersebut sama, lainnya menyatakan berbeda bahkan berdiri sendiri. Penelitian-penelitian tersebut mengurai CSR dan CS, untuk membantu memahami perbedaan kedua konsep tersebut adalah

Ashrafi *et al.* (2018, 2020); Hahn & Kühnen (2013); Hahn *et al.* (2017); Marrewijk (2003); Sánchez-Teba *et al.* (2021).

CSR berkaitan dengan fenomena seperti transparansi, dialog pemangku kepentingan dan pelaporan kemampuan berkelanjutan, sedangkan CS berfokus pada penciptaan nilai, pengelolaan lingkungan, sistem produksi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya manusia dan sebagainya (Marrewijk, 2003). Mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaptein & Wempe (2001) dan Marrewijk (2003), menggambarkan hubungan antara 3P, CS dan CSR tujuan akhir, dengan CSR sebagai tahap perantara di mana perusahaan berusaha menyeimbangkan *Triple Bottom Line* (3P).

Sánchez-Teba *et al.* (2021) memperkuat pernyataan Marrewijk (2003) dengan menyatakan bahwa untuk mencapai keberlanjutan, perusahaan harus mengonfigurasi CSR, karena CSR merupakan fase peralihan untuk mencapai keberlanjutan. CS merupakan penciptaan nilai dan aspek sosial, sementara CSR adalah sebuah konsep dengan interpretasi berbeda yang diarahkan pada pengembangan, kesadaran, dan komitmen perusahaan (Sánchez-Teba *et al.*, 2021). Dapat dikatakan CSR sebagai tahap transisi untuk mencapai keberlanjutan. Senada dengan Ashrafi *et al.* (2018), yang menyatakan CSR adalah cara untuk menunjukkan kepedulian dan komitmen korporasi terhadap masyarakat.

Terdapat tiga tahapan untuk menggambarkan konsep tersebut yaitu; acuan normatif dan titik awal, pengukuran kinerja internal, dan keterbukaan informasi eksternal (gambar 2.2). Titik awal dan acuan normatif CSR berasal dari definisi yang menganggap CSR sebagai tanggung jawab perusahaan atas dampaknya

terhadap masyarakat, untuk mengintegrasikan kepedulian sosial, lingkungan hidup, etika, hak asasi manusia dan konsumen ke dalam operasi bisnis dan strategi perusahaan (European Commission, 2011).

Acuan normatif dan titik awal keberlanjutan berasal dari konsep *triple bottom line*, keadilan intra dan antargenerasi, dan keterkaitan antara TBL dan dimensi waktu. Konsep pertama dan kedua berasal dari definisi menurut Dyllick & Hockerts (2002), yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung, tanpa mengorbankan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan di masa depan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu mempertahankan basis modal ekonomi sosial dan lingkungan, merujuk konsep yang diangkat oleh Elkington (1998), yaitu *triple bottom line*. Konsep ketiga mengacu pada dimensi yang diusulkan oleh Lozano & Huisingh (2011), yang mengusulkan dimensi waktu sebagai tambahan dimensi ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dimensi waktu terdiri dari tiga perspektif yaitu perspektif jangka pendek, jangka panjang dan jangka lebih panjang.

Tahapan kedua pada gambar 2.2 adalah pengukuran kinerja internal. Berdasarkan acuan normatif dan titik awal di tahapan pertama, Hahn & Kühnen (2013) berpendapat bahwa pelaporan keberlanjutan dan pelaporan CSR sebagai konsep yang konsisten dan dapat diukur dengan akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan bertujuan untuk menciptakan data berkualitas tinggi yang mendukung pengambilan keputusan internal mengenai keberlanjutan perusahaan (Hahn & Kühnen, 2013).

Rujukan dan Sudut Pandang Normatif	<b>Keberlanjutan</b>	<b>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)</b>
	Tiple Bottom Line (TBL)	Tanggung jawab perusahaan, kewarganegaraan korporasi
	Keadilan Intra- dan Antar-generasi	
	Keterkaitan antara TBL dan dimensi waktu pada keseimbangan (Empat Dimensi)	
Pengukuran Kinerja Internal	↓	
	<b>Akuntansi terkait Keberlanjutan (CSR)</b>	
	↓	
Pengungkapan Informasi Eksternal	<b>Pelaporan terkait Keberlanjutan (CSR)</b>	
	dalam bentuk	mencakup
	Laporan terintegrasi	Tiga dimensi keberlanjutan (keuangan, ekologi, dan sosial dalam keseimbangan)
	Laporan khusus keberlanjutan, CSR, kewarganegaraan perusahaan, dll.	Dua dimensi keberlanjutan (fokus pada ekologi dan sosial; aspek keuangan kurang diperhatikan)
Laporan lingkungan atau sosial yang terpisah	Satu dimensi keberlanjutan (ekologi atau sosial)	

Holistik ↑  
 ↓  
 Terpisah  
 Lingkup Pertimbangan Keberlanjutan

 = fokus dalam tinjauan literatur

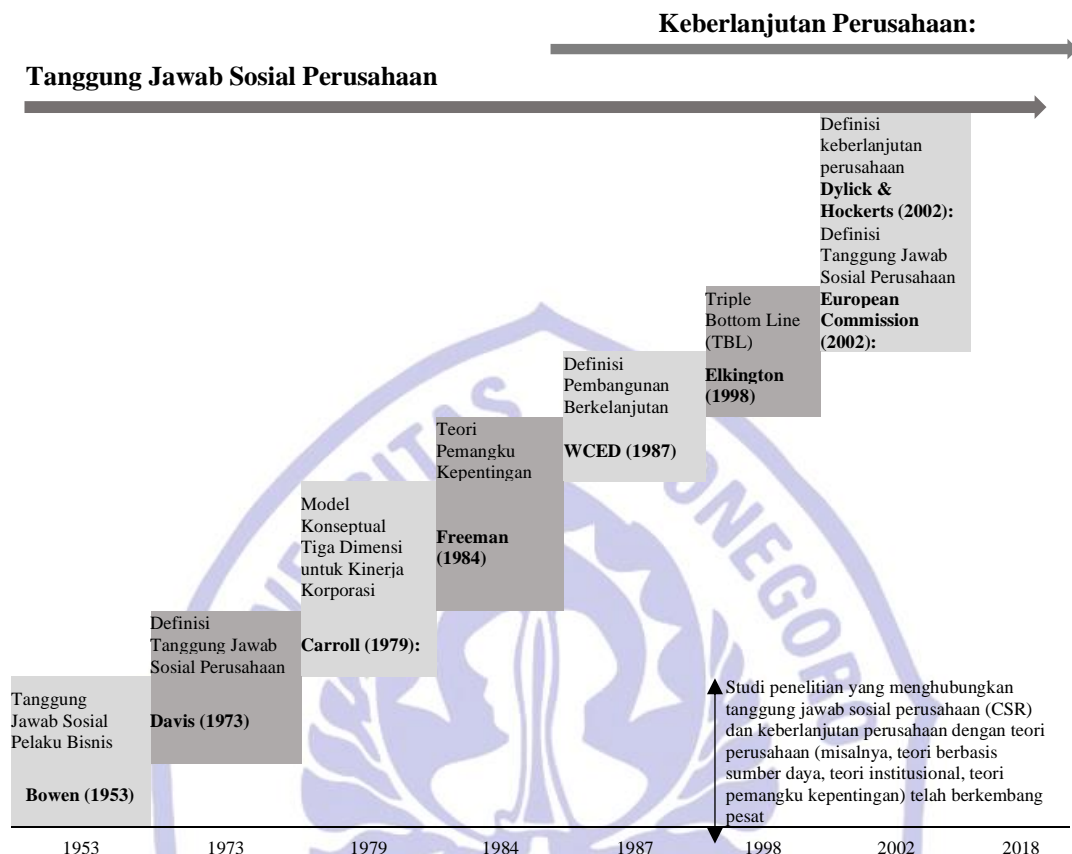
### Gambar 2.2. Gambaran Umum dan Hubungan Konsep Dasar dan Terminologi yang Berkaitan dengan Pelaporan Keberlanjutan

Sumber: Hahn & Kühnen (2013)

Tahapan ketiga adalah pengungkapan informasi untuk eksternal perusahaan seperti masyarakat dan pemerintah. Pada tahapan tersebut Hahn & Kühnen (2013) menguraikan tiga bentuk laporan berdasarkan pertimbangan keberlanjutan dari yang paling menyeluruh (*holistic*) sampai mengerucut yang paling spesifik (*isolated*). Pertama adalah *integrated reports* yang terdiri dari tiga dimensi keberlanjutan yaitu keuangan, ekologi dan sosial. Kedua, keberlanjutan yang

terspesialisasi, terdiri dari dua dimensi keberlanjutan, yaitu fokus pada ekologi dan sosial, sedangkan keuangan agak diabaikan. Ketiga yaitu laporan lingkungan atau sosial yang terisolasi, yang hanya terdiri dari satu dimensi keberlanjutan yaitu ekologi atau sosial.

Ashrafi *et al.* (2018) melakukan tinjauan literatur mengenai perkembangan dan evolusi dalam tanggung jawab dan keberlanjutan bisnis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh gambar 2.3 di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa konsep tanggung jawab sosial pertama kali muncul pada tahun 1953 yang dipelopori oleh (Bowen, 1953). Perkembangan tanggung jawab sosial memunculkan konsep CSR Carroll (1979); Davis (1973), teori *stakeholder* Freeman (1984) yang memicu permintaan akan adanya kesejahteraan berkelanjutan di tahun 1987 oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED). Elkington (1998) menyempurnakan konsep kesejahteraan berkelanjutan dengan gagasan *people-planet-profit* (TBL). Kesejahteraan berkelanjutan dan TBL menjadi awal mula berkembangnya konsep keberlanjutan perusahaan, dan yang paling sering dijadikan rujukan definisi keberlanjutan perusahaan adalah Dyllick & Hockerts (2002).



**Gambar 2.3. Kronologi Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Keberlanjutan Perusahaan**

Sumber: Ashrafi *et al.* (2020)

Bowen (1953) membuat terobosan tentang CSR dalam bukunya yang berjudul “*Social Responsibilities of the Businessman*”. Bowen (1953) mengartikan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban pelaku bisnis untuk menerapkan kebijakan, mengambil keputusan, atau melakukan tindakan yang selaras dengan tujuan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, terdapat upaya lebih lanjut untuk menghubungkan CSR dan kepentingan jangka panjang pemegang saham, dan banyak perdebatan tentang bagaimana mengkolaborasi CSR dan kepentingan ekonomi pada tahun 1970 (Ashrafi *et al.*,

2020). Keith Davis salah satu pakar CSR paling terkemuka pada masa itu, mendefinisikan CSR sebagai kewajiban perusahaan untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan dan dampak keputusan tersebut terhadap sistem sosial eksternal untuk mencapai manfaat sosial tanpa mengabaikan keuntungan ekonomi yang diharapkan perusahaan (Davis, 1973).

Pada tahun 1979, Carroll mengembangkan model konseptual tiga dimensi *corporate social performance* (CSP) yang mencakup integrasi CSR, tanggung sosial, dan isu-isu sosial. Carroll (1979) juga mengusulkan empat bagian definisi CSR, yaitu tanggung jawab sosial entitas mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan memenuhi harapan masyarakat terhadap suatu organisasi. Pada pertengahan tahun 1980an, penelitian menunjukkan adanya peran pemangku kepentingan dalam memengaruhi kinerja perusahaan yang berkaitan dengan CSR (Ashrafi *et al.*, 2020). Freeman (1984) mempelopori munculnya teori pemangku kepentingan, dan mendefinisikan pemangku kepentingan merupakan setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau terdampak oleh pencapaian tujuan organisasi. Freeman (1984) berpendapat bahwa pemangku kepentingan yang efektif dalam manajemen strategis dapat memitigasi risiko perusahaan.

Aspek lingkungan hidup dari aktivitas perusahaan semakin mendapat arti penting sejak munculnya konsep pembangunan berkelanjutan oleh WCED pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan secara eksplisit dikaitkan dengan aktivitas perusahaan dan CSR, dengan diperkenalkannya *triple bottom line* pada akhir tahun 1990an oleh John Elkington. Pembangunan berkelanjutan dan *triple bottom line* menjadi tonggak munculnya keberlanjutan perusahaan. Sejak munculnya konsep

*triple bottom line*, banyak penelitian yang menghubungkan CSR dan keberlanjutan perusahaan dengan teori perusahaan, seperti *resource-based theory* (teori berbasis sumber daya), *institutional theory* (teori kelembagaan) dan *stakeholder theory* (teori pemangku kepentingan). Penggunaan istilah ‘keberlanjutan perusahaan’ sejak tahun 2000an telah meluas, salah satu definisi CS yang paling awal dan paling banyak dikutip adalah karya Dyllick & Hockerts (2002) dan Ashrafi *et al.* (2020). Menurut Dyllick & Hockerts (2002), CS adalah pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung suatu perusahaan, dengan tetap menjaga kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di masa mendatang. CSR makin berkembang dengan lebih aktif merangkul aspek lingkungan hidup, sehingga (European Commission, 2002) mendefinisikan CSR sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab dan mengambil tindakan di luar kewajiban hukum dan tujuan ekonomi atau bisnisnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang CSR dan keberlanjutan perusahaan, Sánchez-Teba *et al.* (2021) melakukan studi bibliometrik untuk menarik kesimpulan hubungan antara CSR dan keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian Sánchez-Teba *et al.* (2021) menunjukkan para pemangku kepentingan semakin banyak menuntut peran dalam menentukan tindakan perusahaan, dan perusahaan menanggapi hal tersebut dengan lebih berfokus pada kesejahteraan pemangku kepentingan. Perusahaan telah berhenti berfokus pada pencarian keuntungan pemegang saham, dan telah mulai meneliti penilaian masyarakat tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan tindakan dan keputusan mereka. Pencapaian tujuan akhir keberlanjutan, perusahaan harus

mewujudkan dan mengutamakan fase peralihan untuk mencapai keberlanjutan. Sánchez-Teba *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa CS yaitu penciptaan nilai dan aspek sosial, sementara CSR mengaitkannya dengan nilai, keberlanjutan, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

#### 2.1.4. Agresivitas Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak tidak hanya memiliki peran sentral dalam pengelolaan perusahaan, tetapi juga memiliki efek pada kesejahteraan masyarakat (Vacca *et al.*, 2020). Menurut Lanis & Richardson (2013), kekurangan penerimaan pajak mengakibatkan kerugian yang signifikan dan berpotensi merugikan masyarakat. Perpajakan adalah harga yang kita bayar untuk institusi sosial, sipil dan politik kita, untuk keamanan hidup dan harta benda, dan tanpanya, kita harus menggunakan hukum paksa (Bird & Davis-Nozemack, 2018).

Berbagai istilah dalam literatur perpajakan menggambarkan cara perusahaan meminimalkan kewajiban pajaknya, di antaranya:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu proses menyusun atau mengelola aktivitas usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa untuk meminimalkan utang pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perpajakan

maupun komersial. Menurut Graham *et al.* (2012), perencanaan pajak efektif (*effective tax planning*) merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan dalam transaksi (*all parties*), seluruh jenis pajak baik secara langsung maupun tidak langsung (*all tax*), serta mencakup semua biaya terkait pajak maupun non-pajak (*all cost*)."

2. Manajemen pajak (*tax management*), merupakan serangkaian tindakan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh aspek perpajakan agar dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi wajib pajak (Rachmawati *et al.*, 2020). Tang & Firth (2011) mendefinisikan manajemen pajak sebagai tindakan wajib pajak dalam memanfaatkan kelemahan atau kelonggaran aturan pajak untuk memilih metode pelaporan yang optimal, baik melalui perencanaan pajak, penghindaran pajak, maupun tax shelter, guna meminimalkan liabilitas perpajakan.
3. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), merupakan kapabilitas perusahaan dalam menekan pembayaran pajaknya, namun melalui metode yang legal dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara luas sebagai segala transaksi yang memengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Definisi ini mencakup aktivitas operasional berinsentif pajak (*tax-favoured*), strategi khusus pengurangan pajak, hingga lobi untuk memperoleh manfaat perpajakan, tanpa membedakan sifat transaksinya."

4. Agresivitas pelaporan pajak (*tax aggressiveness*), merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan melalui praktik pengelolaan pajak, baik dengan metode yang termasuk dalam penghindaran pajak (*tax evasion*) maupun cara-cara lainnya (Frank *et al.*, 2009).
5. Penyelundupan pajak (*tax evasion*), yakni praktik yang dilakukan perusahaan untuk menekan pembayaran pajak dengan metode yang melanggar hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Weisbach, 2003).

Penelitian ini menguji dampak agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Frank *et al.* (2009) mendefinisikan pelaporan pajak agresif sebagai indikasi kecurangan pelaporan keuangan yang mencerminkan ketidakandalan laporan perusahaan. Temuan mereka menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan pajak merupakan alat statistik paling efektif untuk mengidentifikasi praktik *tax shelter*. Lebih lanjut, tingkat agresivitas tersebut dapat mencerminkan besarnya pelanggaran pajak yang dilakukan. Hanlon & Heitzman (2010) membedakan strategi perencanaan pajak dari penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana istilah seperti "ketidakpatuhan", "pengelakan", "agresivitas", dan "*shelter*" berada pada spektrum paling ekstrem. Aktivitas perencanaan pajak dapat bervariasi sepanjang spektrum ini, tergantung pada tingkat agresivitas pengurangan pajak. Sejumlah penelitian sebelumnya mengonfirmasi kecenderungan perusahaan melaporkan laba fiskal lebih rendah dari sebenarnya melalui pelaporan pajak yang agresif (Chen *et al.*, 2010; Frank *et al.*, 2009).

Hanlon & Heitzman (2010) menganalisis berbagai penelitian sebelumnya yang membahas mengenai praktik penghindaran pajak dan kecenderungan agresif dalam pelaporan pajak, serta menyajikan 12 indikator pengukuran yang paling banyak diterapkan dalam studi-studi perpajakan, di antaranya:

1. GAAP ETR: berbandingan antara total beban pajak dan pendapatan buku sebelum pajak
2. *Current* ETR: perbandingan antara beban pajak kini dengan pendapatan buku sebelum pajak
3. *Cash* ETR  
Dyreng *et al.* (2008) mengembangkan ukuran ini karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu mampu menangkap adanya strategi penangguhan beban pajak serta mampu memberikan ukuran penghindaran pajak yang lebih riil karena langsung diukur berdasarkan pembayaran pajak secara tunai. *Cash* ETR diukur dengan cara: kas yang digunakan untuk membayar pajak dibagi laba akuntansi sebelum pajak.
4. *Long-run cash* ETR  
Ukuran ini juga dikembangkan oleh Dyreng *et al.* (2008), karena mampu menangkap strategi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dalam jangka panjang. Berdasarkan Dyreng *et al.* (2008), rumus yang digunakan untuk mengukur *long-run cash* ETR adalah jumlah pajak tunai yang dibayarkan selama  $n$  tahun dibagi dengan jumlah pendapatan sebelum pajak tahun-tahun sebelumnya

5. ETR *Differential*

ETR *Differential* diukur berdasarkan selisih antara *statutory* ETR dan GAAP ETR.

6. DTAX (*discretionary permanent difference*)

Frank *et al.* (2009) mengembangkan ukuran agresivitas pajak dengan mengisolasi komponen-komponen non-perencanaan pajak dalam model untuk meminimalkan kesalahan pengukuran. Dalam pendekatan ini, error term dari model merepresentasikan tingkat agresivitas pelaporan pajak. Penelitian tersebut mendefinisikan perusahaan yang agresif secara fiskal sebagai perusahaan yang memiliki diskresi dalam mengelola perbedaan permanen antara laba akuntansi dan laba fiskal. Berikut model pengukuran yang diajukan oleh Frank *et al.* (2009) untuk mengukur agresivitas pajak.

$$PERMIDIFF_{it} = \Theta_0 + \Theta_1 INTANG_{it} + \Theta_2 UNCON_{it} + \Theta_3 MI_{it} + \Theta_4 CSTE_{it} + \Theta_5 \Delta NOL_{it} + \Theta_6 LAGPERM_{it} + \epsilon_{it}$$

$PERMIDIFF_{it}$  = Total book-tax differences dikurangi dengan beda temporer dihitung dengan rumus:

$$PTI_{it} - \frac{CTE_{it}}{STR_{it}} - \frac{DTE_{it}}{STR_{it}}$$

- $PTI_{it}$  = Pretax income (penghasilan sebelum pajak).  
 $CTE_{it}$  = Current tax expense (beban pajak kini perusahaan i pada tahun t).  
 $DTE_{it}$  = Differed tax expense (beban pajak tangguhan perusahaan i tahun t).  
 $STR_{it}$  = Statutory tax rate (tarif pajak penghasilan yang berlaku pada perusahaan i tahun t)  
 $INTANG_{it}$  = Goodwill and other intangibles (Goodwill dan aset takberwujud lainnya untuk perusahaan i tahun t)  
 $UNCON_{it}$  = Unconsolidated earnings (laba/rugi anak perusahaan yang dilaporkan metode ekuitas oleh perusahaan i tahun t)

$MI_{it}$	=	<i>Minority interest</i> (laba/rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali perusahaan i tahun t).
$CSTE_{it}$	=	<i>Current state income tax expense</i> (beban pajak penghasilan negara bagian saat ini perusahaan i tahun t)
$\Delta NOL_{it}$	=	<i>Net operating loss</i> (perubahan saldo kompensasi kerugian fiskal perusahaan i tahun t).
$LAGPERM_{it}$	=	<i>Lagged PERMDIFF</i> ( <i>PERMDIF</i> satu tahun sebelumnya untuk perusahaan i tahun t)
$\epsilon_{it}$	=	<i>Discretionary permanent difference</i> (DTAX) perusahaan i tahun t.

#### 7. *Total* BTD

Selisih total antara laba akuntansi dan laba fiskal. Hanlon (2005) menyatakan bahwa indikator ini mampu mengungkap kualitas laba sebuah perusahaan. Nilai BTD yang semakin tinggi mengindikasikan kualitas laba yang semakin buruk pada perusahaan tersebut.

#### 8. *Temporary* BTD

*Temporary BTD* (beda temporer) dihitung melalui pembagian beban pajak tangguhan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku.

#### 9. *Abnormal total* BTD:

Ukuran ini telah dirumuskan berdasarkan riset terdahulu, seperti Desai & Dharmapala (2006) serta Tang & Firth (2011). Nilai *abnormal total BTD* dihitung sebagai nilai residual dari model regresi yang memprediksi total BTD. Tang & Firth (2011) menjelaskan bahwa ukuran ini efektif untuk mengidentifikasi praktik manajemen laba dan pajak perusahaan. Berikut merupakan persamaan model regresinya:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta INV_{it} + \beta_2 \Delta REV_{it} + \beta_3 NOL_{it} + \beta_4 TLU_{it} + \beta_5 TAX_{it} + \epsilon_{it}$$

$\Delta INV_{it}$	=	“perubahan investasi dalam <i>gross</i> aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud dari tahun t-1 ke tahun t”
$\Delta REV_{it}$	=	“perubahan pendapatan dari tahun t-1 ke tahun t”
$NOL_{it}$	=	“jumlah kerugian operasi bersih ( <i>net operating loss</i> ) perusahaan i pada tahun t. “
$TLU_{it}$	=	“jumlah kerugian yang telah dikompensasikan ( <i>tax losses utilized</i> ) untuk perusahaan i pada tahun t”
$TAX_{DIFF_{it}}$	=	“perbedaan tarif pajak yang ditetapkan oleh perusahaan konsolidasi dan anak perusahaan yang dikonsolidasi”
$\epsilon_{it}$	=	“ <i>error</i> (ABTD <sub>it</sub> ) untuk perusahaan i pada tahun t”

#### 10. *Unrecognized tax benefits (UTB)*

UTB merupakan kewajiban pajak potensial atas transaksi yang status perpajakannya masih dalam ketidakpastian atau sedang dalam proses penyelesaian.

#### 11. *Tax shelter activity*

Merupakan skema perencanaan pajak yang diidentifikasi melalui laporan perusahaan, pemberitaan media, atau investigasi otoritas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara agresif

#### 12. *Marginal tax rate*

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai sekarang (*present value*) dari beban pajak yang timbul pada setiap unit pendapatan tambahan.

### 2.1.5. **Koneksi Politik**

Koneksi politik adalah hubungan formal antara perusahaan dengan pejabat politik (melalui kepemilikan saham, jabatan direksi, atau hubungan personal) yang memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan istimewa dari negara. Menurut Marbun *et al.* (2021), koneksi politik adalah suatu keadaan terdapat keterkaitan antar dua belah pihak dimana salah satu pihak memiliki kepentingan

politik. Sebagai contoh, seorang direktur, komisaris, atau pemegang saham suatu perusahaan terlibat dalam kegiatan politik dengan menjadi anggota parlemen, menteri, atau pejabat negara (Faisal *et al.*, 2023). Sebuah perusahaan terhubung dengan seorang politisi jika (setidaknya) salah satu pemegang saham besar atau direktur puncak perusahaan adalah: (1) anggota parlemen, (2) menteri atau kepala negara, atau (3) “berkerabat dekat” dengan seorang petinggi di pemerintahan (Faccio, 2006).

Sebuah perusahaan didefinisikan memiliki koneksi politik apabila setidaknya satu dari pemegang saham besar (minimal memiliki 10 persen kepemilikan) atau salah satu dari direktur utamanya (CEO, presiden, wakil presiden, atau sekretaris) adalah anggota parlemen, atau menteri, atau terkait erat dengan politisi atau partai papan atas (Faccio, 2007). Selain itu Faccio (2007) mengungkapkan bahwa hubungan dekat dapat melalui persahabatan dengan mantan kepala negara atau perdana menteri, jabatan direktur yang pernah dipegang, politisi asing, atau hubungan lama dengan partai politik. Dalam perspektif teori ketergantungan sumber daya, koneksi politik menjadi mekanisme strategis bagi perusahaan swasta untuk mengamankan akses terhadap sumber daya kritis. Beberapa perusahaan swasta akan mencurahkan sumber daya untuk membangun hubungan politik dengan pemerintah dan mendapatkan akses dan perlindungan pasar preferensial oleh pemerintah (Kong *et al.*, 2020).

Koneksi politik merupakan aset relasional, yang dapat memfasilitasi perusahaan memperoleh sumber daya dan dukungan utama pemerintah (Boubakri *et al.*, 2012; Faccio, 2006). Teori tinjauan berbasis sumber daya menekankan

pentingnya keunggulan sumber daya perusahaan sebagai modal untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Faisal *et al.*, 2023). Dalam hierarki struktur perusahaan di Indonesia, dewan komisaris lebih tinggi dari direksi, untuk memastikan akuntabilitas kedua dewan tersebut anggota dewan komisaris tidak dapat duduk di jajaran direksi begitupun sebaliknya (Hermawan, 2011).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia menjalankan *corporate governance* di bawah sistem dewan dua tingkat (*two-tier board system*). Pada sistem tersebut, posisi dewan komisaris lebih penting dan lebih strategis daripada dewan direksi. Dewan komisaris memengaruhi kinerja perusahaan melalui fungsi pengawasan dan pemantauan strategis yang dilakukannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memiliki beberapa tanggung jawab utama, antara lain:

- Melakukan pemantauan terhadap direksi perusahaan;
- Melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Berperan untuk kepentingan perusahaan dan memiliki tanggung jawab kepada RUPS; dan
- Memeriksa, menelaah dan menandatangani pelaporan keuangan (Laporan keuangan dan laporan tahunan) yang disiapkan oleh direksi.

International Finance Corporation (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris memainkan peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia, seperti menentukan perencanaan jangka panjang dan strategis, melakukan negosiasi strategis dengan kreditor, bahkan menentukan paket

remunerasi direksi.

Harymawan *et al.* (2017) menyatakan menjadi perusahaan yang terhubung secara politik memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Domain ekonomi tidak dapat dipelajari secara terpisah dari kerangka politik, sosial dan kelembagaan di mana ekonomi berlangsung (Gray *et al.*, 1995). Berdasarkan penelitian sebelumnya Gray *et al.* (1995) membedakan ekonomi politik menjadi dua sudut pandang, yaitu:

- ekonomi politik klasik, disebut juga ekonomi politik Marxian yang menempatkan kepentingan-kepentingan sektoral (kelas), ketidakadilan struktural, konflik, dan peran negara sebagai inti analisisnya.
- ekonomi politik borjuis atau vulgar, adalah ekonomi politik yang sebagian besar mengabaikan elemen dalam ekonomi klasik, dan memandang dunia pada dasarnya pluralistik

Hubungan politik, khususnya di pasar negara berkembang menurut Wu *et al.* (2022), biasanya diidentifikasi sebagai hubungan patron-klien. Hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran di mana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien) (Hakim, 2016). Hal tersebut dibuktikan oleh Berkman *et al.* (2010) bahwa di negara dengan sistem peradilan yang lemah, investor ragu regulator akan melakukan tindakan membahayakan pemegang saham pengendali dengan koneksi politik yang kuat. Berdasarkan daftar negara berkembang yang dirilis oleh *International*

*Monetary Fund* (IMF), Indonesia tergolong dalam jajaran negara berkembang (International Monetary Fund, 2021). IMF mengategorikan negara berkembang berdasarkan produk domestik bruto (PDB) per kapita, diversifikasi ekspor dan terintegrasi dalam sistem keuangan global.

Dang *et al.* (2022) membagi koneksi politik menjadi koneksi simbolik dan material. Perusahaan besar dengan koneksi politik simbolik lebih cenderung menggunakan prestise koneksi politik sebagai penyangga terhadap tekanan untuk melakukan kegiatan CSR. Hasil penelitian Dang *et al.* (2022) menggarisbawahi pentingnya membedakan antara ikatan politik yang berbeda karena mereka mungkin timbul dari berbagai pengaturan kelembagaan yang memberikan efek yang berbeda pada insentif manajerial. Analisis menunjukkan bahwa memperlakukan semua jenis hubungan politik secara sama akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan (Dang *et al.*, 2022).

Menurut Ajili & Khlif (2020) perusahaan dengan koneksi politik memiliki dua keuntungan. Pertama mampu melindungi perusahaan dari deteksi dan risiko litigasi di masa depan. Keuntungan kedua adalah kemampuan mengakses informasi mengenai perubahan di masa depan dalam peraturan dan penegakan pajak, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan strategi pajak yang kompleks. Sejalan dengan ini, Faccio (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat memperoleh akses ke informasi preferensial, yang memungkinkan mereka untuk lebih mengetahui kapan perencanaan pajak yang agresif lebih mungkin ditoleransi.

Terdapat tiga dampak adanya hubungan politik pada risiko pajak

perusahaan menurut (Chen, 2021). Pertama, perusahaan dengan koneksi politik lebih mungkin untuk dekat dengan lembaga pengatur pajak dan memperoleh informasi tentang perubahan peraturan perpajakan terlebih dahulu. Kedua, koneksi politik dapat mengurangi intervensi pemerintah dan membantu mengurangi ketidakpastian pengelolaan pajak yang disebabkan oleh penyesuaian kebijakan perpajakan eksternal dan diskresi lembaga penegak hukum. Ketiga, koneksi politik dapat membantu perusahaan mendapatkan saluran pembiayaan dan insentif pajak dengan lebih mudah. Akibatnya, tekanan pada arus kas perusahaan akan relatif rendah, dan perusahaan akan memiliki insentif yang lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak ilegal untuk menghemat arus kas, sehingga mengurangi risiko pajak dari penghindaran pajak yang agresif (Chen, 2021).

Law & Mills (2016) melihat koneksi politik spesifik dari pengalaman militer para pemegang saham besar, direksi dan komisaris perusahaan. Menurutnya ada dua alasan mengapa pengalaman militer dikaitkan dengan penghindaran pajak, pertama manajer dengan pengalaman militer berkaitan dengan legitimasi pemerintah dan memiliki kesetiaan yang sangat tinggi kepada pemerintah. Kesetiaan dan kepercayaan kepada legitimasi mengakibatkan manajer dengan pengalaman militer kurang agresif dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Kedua, CEO dengan pengalaman militer percaya bahwa melakukan agresivitas pajak untuk menghindari pembayaran pajak kurang etis.

Tsai *et al.* (2021) melihat koneksi politik dari adanya pergantian politik. Hasil penelitian Tsai *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pergantian politik menyebabkan perusahaan mengurangi penghindaran pajak, tetapi efek tersebut

hanya signifikan bagi perusahaan yang lebih cenderung berkolusi dengan pemerintah daerah. Kim & Zhang (2016) berpendapat perusahaan yang terhubung secara politik memiliki lebih sedikit tekanan untuk transparan. Akibatnya, koneksi politik digunakan untuk mengurangi hukuman pasar yang menjadikan perusahaan menjadi lebih agresif dalam meminimalkan pembayaran pajak (Faccio, 2016).

Selain menghubungkan koneksi politik dengan agresivitas pajak, penelitian ini juga mencoba mengaitkan dengan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang koneksi politik dan keberlanjutan perusahaan dirangkum dalam penjelasan berikut. Huang *et al.* (2021) menunjukkan bukti bahwa CEO yang terhubung secara politik mendorong lebih banyak inovasi hijau. Selain itu, mereka membandingkan dampak CEO dengan koneksi yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah terhadap inovasi hijau. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya CEO yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah pusat secara signifikan memengaruhi inovasi hijau.

Li *et al.* (2020) memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat Huang *et al.* (2021). Li *et al.* (2020) menyatakan perusahaan dengan koneksi politik memiliki komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah, pada saat yang sama, pemerintah akan lebih santai dalam memantau masalah lingkungan perusahaan tersebut, mengakibatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi lebih rendah. Hasil tersebut didukung oleh Cheng *et al.* (2017) dan Wang *et al.* (2018) yang menyatakan bisnis yang terhubung secara politik, seperti yang terjadi di Cina, kurang peduli dengan masalah lingkungan karena mereka lebih terlindungi dari pengawasan publik dan pemerintah. Didukung pula oleh hasil riset Li & Guo

(2022), yang berpendapat pengunduran diri wajib oleh direktur independen dari politik secara signifikan mengurangi kinerja CSR perusahaan. Jadi, koneksi politik memainkan peran penting dalam membentuk strategi tanggung jawab lingkungan dan inovasi industri perusahaan kecil (Wu *et al.*, 2022). Tabel 2.2 menyajikan pengukuran koneksi politik dari penelitian-penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.2. Pengukuran Koneksi Politik Penelitian Sebelumnya**

No	Penulis dan Tahun	Pengukuran Koneksi Politik
1	Faccio (2007)	“jika setidaknya satu dari pemegang saham (minimal memiliki 10 persen saham dengan hak suara) atau salah satu direktur utamanya (CEO, presiden, wakil presiden, atau sekretaris) adalah anggota parlemen, atau menteri, atau terkait erat dengan politisi atau partai papan atas.”
2	Law & Mills (2016)	”mengidentifikasi afiliasi politik manajer berdasarkan catatan sumbangan pribadi mereka.”
3	Sudibyo & Jianfu (2016)	- salah satu pemegang sahamnya yang minimal memiliki 10% kepemilikan dan salah satu pejabat puncaknya (dewan komisaris/direktur) adalah politikus (anggota partai, anggota parlemen, pejabat pemerintah, perwira militer, mantan anggota parlemen, mantan pejabat pemerintah) - perusahaan milik negara sebagai perusahaan yang terhubung secara politik
4	Harymawan <i>et al.</i> (2017)	“jika setidaknya satu dari pemegang saham (minimal memiliki 10 persen saham dengan hak suara) atau salah satu direktur utamanya (CEO, presiden, wakil presiden, atau sekretaris) adalah anggota parlemen, atau menteri, atau terkait erat dengan politisi atau partai papan atas (Faccio, 2007).”
5	Li <i>et al.</i> (2020)	- Manajemen perusahaan sebagai deputi <i>National People's Congress</i> (NPC) sebuah lembaga negara tertinggi negara di China, atau - anggota <i>Chinese People's Political Consultative Conference</i> (CPPCC) merupakan perwakilan dari berbagai partai politik dan organisasi, serta anggota independen di China
6	Ajili & Khlif (2020)	jika setidaknya salah satu dewan direksinya, adalah: - direktur keluarga yang berkuasa - anggota parlemen - anggota Khazanah Berhad (perusahaan pengelola aset negara milik Pemerintah Malaysia) - seorang menteri atau kepala pemerintah daerah - terkait erat dengan seorang pejabat tinggi.
7	Tsai <i>et al.</i> (2021)	Daftar riwayat hidup CEO atau ketua dewan:

No	Penulis dan Tahun	Pengukuran Koneksi Politik
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pejabat pemerintah saat ini atau sebelumnya;</li> <li>- anggota Kongres Partai Komunis atau Komite Partai Komunis saat ini atau mantan;</li> <li>- anggota Kongres Rakyat saat ini atau mantan;</li> <li>- anggota Konferensi saat ini atau mantan</li> <li>- kepemilikan pada perusahaan BUMN</li> </ul>
8	Huang <i>et al.</i> (2021)	Berdasarkan pengukuran (Tsai <i>et al.</i> , 2021) dengan membangun skala lima poin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- koneksi tingkat pusat (5)</li> <li>- koneksi tingkat provinsi (4)</li> <li>- koneksi tingkat kota (3)</li> <li>- koneksi tingkat prefektur (2)</li> <li>- koneksi tingkat kotapraja dan di bawahnya (1)</li> </ul>
9	Wu <i>et al.</i> (2022)	Di ukur dengan item pertanyaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pimpinan pemerintah lokal telah mengunjungi perusahaan Anda atau menangani bisnis resmi di tempat untuk perusahaan Anda;</li> <li>- perusahaan Anda telah berhasil melobi pemerintah daerah untuk menyesuaikan atau mengubah kebijakan yang relevan;</li> <li>- pemerintah daerah menawarkan banyak dukungan kebijakan khusus dan dukungan pembiayaan untuk perusahaan Anda;</li> <li>- perusahaan Anda telah menikmati berbagai jenis dukungan kebijakan yang menguntungkan;</li> <li>- perusahaan Anda sangat akrab dengan pejabat setempat.</li> </ul>
10	Dang <i>et al.</i> (2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membagi koneksi politik menjadi koneksi simbolik dan material.</li> <li>- koneksi material, jika CEO/ketua dewan pernah menjabat sebagai pejabat pemerintah, perwira militer, atau sekretaris partai komunis di yurisdiksi administratif.</li> <li>- Koneksi simbolis jika CEO/ketua dewan adalah anggota NPC/CPPCC.</li> </ul>

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan menunjukkan beragam hasil dan pendekatan yang memberikan wawasan menarik. Tabel 2.3 mencakup berbagai studi tentang hubungan antara agresivitas pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan organisasi di Indonesia dan berbagai negara lain.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia antara Adhariani *et al.* (2024); Mashuri & Ermaya (2020); Nasih *et al.* (2024); Nusantari *et al.* (2015), sedangkan penelitian di luar Indonesia antara lain Col & Patel (2019); Cabelkova (2021); Emeka & Ngozi (2022); Fabian *et al.* (2022); Issah & Rodrigues (2021); Lanis & Richardson (2013); Mpofu (2022); Na *et al.* (2021); Nadir Junior *et al.* (2021); Nyahuna & Doorasamy (2022); Rudyanto *et al.* (2021); Shin & Park (2022); Sui *et al.* (2019); Tsindeliani *et al.* (2019); Uddin *et al.* (2023); Ullah *et al.* (2023); Uryszek & Klonowska (2022); Vacca *et al.* (2020); Zeng (2016).

Nasih *et al.* (2024) mengkaji keterkaitan antara penghindaran pajak dan pelaporan keberlanjutan pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010–2018. Dengan menggunakan analisis regresi kuantitatif, penelitian ini berlandaskan pada teori legitimasi, yang berpendapat bahwa perusahaan berupaya menyesuaikan diri dengan harapan sosial agar tetap eksis. Penelitian tersebut menemukan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan keberlanjutan. Mashuri & Ermaya (2020) meneliti pengaruh agresivitas pajak dan eksposur media terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan regresi linier berganda, studi ini mengadopsi teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Fabian *et al.* (2022) dan Emeka & Ngozi (2022) menggunakan sampel perusahaan di Nigeria, menemukan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. Sejalan dengan penelitian Lanis & Richardson (2013) yang meneliti perusahaan di Australia, mendukung teori legitimasi dengan menemukan agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang lebih besar tampak lebih cenderung menggunakan CSR untuk mempertahankan legitimasi sosial dan politik di tengah praktik pajak yang agresif.

Col & Patel (2019) memberikan perspektif yang berbeda dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak, khususnya melalui surga pajak, meningkatkan pengungkapan CSR sebagai strategi manajemen risiko untuk mengurangi potensi dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa CSR dapat digunakan sebagai perlindungan reputasi dalam menghadapi kritik terhadap strategi pajak yang agresif. Hasil tersebut searah dengan riset Sui *et al.* (2019), dengan menggunakan data survei nasional perusahaan swasta di China dan menemukan hubungan positif signifikan antara spekulasi perusahaan dan keterlibatan CSR. Dalam penelitian ini, keterlibatan politik melemahkan ketergantungan perusahaan spekulatif pada CSR, menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam spekulasi cenderung memanfaatkan CSR untuk membangun citra, tetapi mengurangi keterlibatan ketika ada dukungan politik.

Dalam konteks global, Rudyanto *et al.* (2021) mempelajari perusahaan dari 22 negara dan menemukan bahwa agresivitas pajak berdampak negatif terhadap kesejahteraan berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan tingkat korupsi dan alokasi pajak yang tidak efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak

di lingkungan yang kurang akuntabel cenderung melemahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Zeng (2016) dalam studinya di Kanada menambahkan bahwa CSR dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan, meskipun agresivitas pajak berhubungan negatif dengan aktivitas CSR, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan strategi pajak agresif mungkin kurang terlibat dalam CSR. Di Korea Selatan, Shin & Park (2022) meneliti perusahaan yang mengalami delisting di bursa KOSPI, KOSDAQ, dan KONEX dan menemukan bahwa perusahaan yang di-delisting memiliki tingkat penghindaran pajak lebih tinggi daripada yang tetap terdaftar. Sejalan dengan Kristiadi *et al.* (2020) memfokuskan kajian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan teori legitimasi dan pemangku kepentingan, agresivitas pajak ditemukan berpengaruh negatif terhadap peningkatan CSR. Penghindaran pajak yang tinggi meningkatkan risiko pajak dan menurunkan keberlanjutan, mengindikasikan bahwa strategi pajak agresif dapat merugikan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Nusantari *et al.* (2015) mengamati hubungan antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI di Indonesia. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang sama ditemukan oleh Vacca *et al.* (2020) yang menguji perusahaan di Italia, menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan langsung antara agresivitas pajak dan CSR. Sementara itu, Issah & Rodrigues (2021) melakukan analisis scientometrik untuk memetakan penelitian terkait CSR dan agresivitas pajak secara

global. Studi ini menunjukkan bahwa penelitian tentang CSR dan agresivitas pajak lebih dominan di negara-negara maju, dengan sedikit fokus di Afrika dan negara berkembang lainnya. Beberapa teori yang sering digunakan meliputi teori etika, teori budaya perusahaan, teori pemangku kepentingan, dan teori legitimasi. Temuan ini mengidentifikasi topik seperti pengaruh media, keberagaman gender dewan, dan koneksi politik sebagai area yang memerlukan penelitian lebih lanjut dalam kaitannya dengan agresivitas pajak.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti hubungan yang kompleks antara agresivitas pajak dan keberlanjutan, dengan variabel kontekstual seperti keterlibatan politik dan status listing perusahaan yang berperan penting. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak dapat berdampak positif, negatif bahkan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan, terutama di pasar yang regulasinya ketat, sementara keberlanjutan perusahaan sering dimanfaatkan untuk memperbaiki citra perusahaan di tengah strategi pajak yang agresif.

Tabel 2.3. Hasil Studi Empiris Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
<b>Indonesia</b>						
1	Nasih <i>et al.</i> (2024)	<i>“Tax Avoidance and Sustainability Reporting: Alignment or Greenwashing Strategy”</i>	Perusahaan non-finansial yang terdaftar bursa efek Indonesia, periode 2010–2018	Pendekatan kuantitatif, dengan analisis regresi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> Teori Manajemen Kesan (<i>Impression Management Theory</i>)</li> <li>- <b>Variabel Independen:</b> Penghindaran pajak (<i>Tax avoidance</i>)</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b> Pelaporan keberlanjutan (<i>Sustainability reporting</i>)</li> <li>- <b>Variabel Moderasi:</b> Program amnesti pajak.</li> <li>- <b>Variabel Kontrol:</b> profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>Property, plant and equipment</i> (PPE), ukuran dan independensi dewan direksi, kualitas audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan keberlanjutan sering digunakan sebagai alat untuk mengaburkan praktik penghindaran pajak.</li> <li>- Terdapat hubungan positif antara agresivitas pajak dan pelaporan keberlanjutan</li> <li>- Partisipasi dalam amnesti pajak berhubungan negatif dengan penghindaran pajak, menunjukkan transparansi yang lebih tinggi</li> </ul>
2	Nusantari <i>et al.</i> (2015)	“Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada Perusahaan	- Populasi seluruh perusahaan yang menjadi anggota Indeks SRI-KEHATI tahun 2011-2013 (25 perusahaan)	- Analisis regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> legitimasi</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengungkapan CSR</li> </ul> </li> <li>- <b>Variabel Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tax aggressive</i> (BTD)</li> </ul> </li> <li>- <b>Variabel Kontrol:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- <i>Return on Asset</i> (ROA)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil penelitian menunjukkan agresivitas pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR</li> </ul>

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
		yang Terdaftar dalam Indeks SRI KEHATI Tahun 2011-2013)”			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- <i>Capital Intensity</i></li> <li>- <i>Market to Book Ratio</i></li> </ul>	
3	Mashuri & Ermaya (2020b)	“ <i>The Effect of Tax Aggressiveness and Media Exposure on Corporate Social Responsibility Disclosure with Profitability as Moderated Variables</i> ”	- Perusahaan industri di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018	- Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> legitimasi dan pemangku kepentingan</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>CSR disclosure</i> (CSR Disclosure Index)</li> </ul> </li> <li>- <b>Variabel Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tax aggressive</i> (ETR)</li> <li>- <i>Media exposure</i></li> </ul> </li> <li>- <b>Variabel Moderating:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>profitability</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agresivitas Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR</li> <li>- Eksposur media berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR</li> <li>- Profitabilitas mampu memperkuat dan memperlemah agresivitas pajak dan ekspos media dalam memengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</li> </ul>
4	Kristiadi et al. (2020)	“ <i>Corporate social responsibility and tax aggressiveness: evidence from Indonesia</i> ”	- perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regresi linier berganda menggunakan metode <i>generalized method of moments</i> (GMM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> Legitimasi dan pemangku kepentingan</li> <li>- <b>Variabel Dependen dan Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>tax aggressiveness</i> (ETR)</li> <li>- <i>CSR</i> (Skor CSR dari database Thomson Reuters Eikon)</li> </ul> </li> <li>- <b>Variabel Kontrol:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leverage</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li> <li>- Agresivitas pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan CSR</li> </ul>

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
<b>Luar Negeri</b>						
1	Fabian <i>et al.</i> (2022)	<i>“Tax aggressiveness and sustainability of quoted firms in Nigeria”</i>	- 31 perusahaan (sektor layanan kesehatan, teknologi informasi, minyak dan gas) tahun 2013-2021 yang terdaftar di bursa efek Nigeria	- Alat analisis Ordinary Least Square (OLS)	- <b>Teori:</b> teori pemangku kepentingan dan keagenan - <b>Variabel Dependen:</b> keberlanjutan organisasi (Skor kinerja sosial dan lingkungan) - <b>Variabel Independen:</b> Agresivitas pajak (ETR)	- Agresivitas pajak perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Nigeria.
2	Emeka & Ngozi, (2022)	<i>“Tax Aggressiveness and Sustainability of Listed Oil and Gas Firms in Nigeria: Does Firm Size Matter?”</i>	- Perusahaan minyak & gas yang terdaftar di Nigerian Exchange Group (NGX) mulai tahun 2013-2021.	- Model regresi OLS yang dioperasikan dengan STATA V.15	- <b>Teori:</b> Keagenan - <b>Variabel Dependen:</b> Keberlanjutan organisasi (jumlah reporting kinerja sosial dan lingkungan score 1-20) - <b>Variabel independen:</b> Agresivitas pajak (ETR) - <b>Variabel moderasi:</b> ukuran perusahaan	- Agresivitas pajak mempunyai hubungan yang signifikan dan positif dengan keberlanjutan perusahaan. - Ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan.
3	Vacca <i>et al.</i> (2020)	<i>“The Role of Gender Diversity on Tax Aggressiveness and Corporate Social Responsibility: Evidence from Italian Listed Companies”</i>	- 1176 sampel dari 168 perusahaan, yang terdaftar di Bursa Efek Milano, Italia.	- Analisis data panel dengan regresi logistik - tahun 2011-2018	- <b>Teori:</b> pemangku kepentingan - <b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan CSR - <b>Variabel Independen:</b> Agresivitas pajak (ETR) - <b>Variabel Moderasi:</b> gender - <b>Variabel Kontrol:</b> - ukuran perusahaan, - leverage, - ROA,	- Tidak ada hubungan langsung antara agresivitas pajak dan pelaporan CSR - Keragaman gender dalam dewan direksi meningkatkan orientasi perusahaan terhadap pengungkapan CSR, tetapi tidak berdampak pada hubungan antara agresivitas pajak dan

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
					- Ukuran dewan	<p>pengungkapan CSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gender CEO memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara perencanaan pajak perusahaan dan pelaporan CSR</li> </ul>
4	Lanis & Richardson (2013)	<i>“Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 perusahaan Australia yang dituduh oleh Kantor Perpajakan Australia terlibat dalam aktivitas agresif pajak selama 2001-2006</li> <li>- Ke-20 korporasi pajak agresif ini kemudian dibandingkan dengan 20 korporasi pajak non agresif</li> <li>- Menghasilkan 40 perusahaan untuk dianalisis</li> </ul>	- <i>Pearson correlation analysis</i> dan <i>ordinary least squares regression analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> legitimasi</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b> CSR (penggunaan jumlah kata dalam pengungkapan CSR)</li> <li>- <b>Variabel Independen:</b> <i>tax aggressiveness</i></li> <li>- <b>Variabel Kontrol:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran perusahaan,</li> <li>- <i>leverage</i>,</li> <li>- <i>capital intensity</i></li> <li>- <i>market-to-book ratio</i></li> <li>- ROA</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hubungan positif dan signifikan antara agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR</li> <li>- Mengkonfirmasi teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak perusahaan.</li> </ul>
5	Rudyanto et al. (2021)	<i>“Tax aggressiveness and sustainable welfare: the roles of corruption and tax allocation inefficiency”</i>	- perusahaan manufaktur yang terdaftar di 22 bursa dari 22 negara tahun 2007-2017	- Alat Uji STATA 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> teori pilihan publik dan teori fungsionalisme</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b> <i>sustainable welfare</i></li> <li>- <b>Variabel Independen:</b> Agresivitas pajak</li> <li>- <b>Variabel Moderasi:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan berkelanjutan</li> <li>- Korupsi dan inefisiensi alokasi pajak mengikis penerimaan pajak dan memperkuat efek negatif</li> </ul>

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- korupsi</li> <li>- inefisiensi alokasi</li> <li>- <b>Variabel Kontrol:</b></li> <li>- Inflasi</li> <li>- <i>market competitiveness</i></li> </ul>	agresivitas pajak terhadap kesejahteraan yang berkelanjutan
6	Sui <i>et al.</i> (2019)	<i>“Is Corporate Social Responsibility Used to Mask Corporate Speculation? Evidence from Emerging China”</i>	- Data survei nasional terhadap perusahaan swasta tahun 2014 di China.	- Metode regresi Tobit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> Teori Instrumental CSR dan Teori Kapital Moral</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b> CSR</li> <li>- <b>Variabel Independen:</b> spekulasi perusahaan</li> <li>- <b>Variabel Moderasi:</b> keterlibatan politik</li> <li>- <b>Variabel Kontrol:</b> Karakteristik kewirausahaan, karakteristik perusahaan (ukuran, umur, struktur kepemilikan), dan indikator regional (seperti GDP per kapita).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hubungan positif yang signifikan antara spekulasi perusahaan dan keterlibatan dalam CSR.</li> <li>- Keterlibatan politik secara signifikan melemahkan hubungan ini, memungkinkan perusahaan spekulatif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada CSR.</li> </ul>
7	Shin & Park (2022)	<i>“Differences in Tax Avoidance According to Corporate Sustainability with a Focus on Delisted Firms”</i>	Perusahaan yang terdaftar di Korea Selatan pada bursa saham KOSPI, KOSDAQ, dan KONEX, terdiri dari perusahaan yang mengalami delisting antara 2011 hingga 2020, dengan	Regresi data panel dengan variabel <i>dummy</i> untuk perusahaan delisting dan yang terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> teori risiko finansial dan keberlanjutan perusahaan</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b> Keberlanjutan perusahaan,</li> <li>- <b>Variabel Independen:</b> Penghindaran pajak</li> <li>- <b>Variabel Kontrol:</b> Likuiditas, rasio <i>leverage</i></li> </ul>	Perusahaan yang delisting menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tetap terdaftar, meningkatkan risiko pajak dan menurunkan keberlanjutan.

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
			kelompok kontrol berupa perusahaan yang tidak delisting			
8	Issah & Rodrigues (2021)	<i>“Corporate Social Responsibility and Corporate Tax Aggressiveness: A Scientometric Analysis of the Existing Literature to Map the Future”</i>	data publikasi global tanpa fokus pada lokasi geografis tertentu	metode scientometrik dengan perangkat lunak VOSviewer dan CiteSpace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada variabel penelitian karena menggunakan pendekatan scientometrik, studi ini mengidentifikasi kata kunci dan tren utama dalam literatur terkait CSR dan agresivitas pajak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian di bidang CSR dan agresivitas pajak sangat terfokus di negara-negara maju dan belum banyak dilakukan di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya.</li> <li>- Teori yang sering digunakan meliputi teori etika, teori budaya perusahaan, teori stakeholder, serta teori legitimasi.</li> <li>- Topik-topik seperti pengaruh media, keberagaman gender dewan, dan koneksi politik dalam kaitannya dengan penghindaran pajak membutuhkan penelitian lebih lanjut.</li> </ul>
9	Col & Patel (2019)	<i>“Going to Haven? Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance”</i>	Sampel antara 1995 dan 2012; berisi 3897 pengamatan tahun perusahaan untuk 341 perusahaan unik dengan afiliasi surga pajak	Analisis data panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> teori manajemen risiko dan teori budaya perusahaan</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CSR</li> </ul> </li> <li>- <b>Variabel Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tax avoidance</i> diukur dengan tax haven</li> </ul> </li> </ul>	Konsisten dengan teori manajemen risiko, yang berpendapat bahwa perusahaan melakukan lindung nilai terhadap potensi konsekuensi negatif dari praktik penghindaran pajak

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Var kontrol:</b></li> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- Leverage</li> <li>- Kas</li> <li>- Market to book value</li> <li>- Riset and development</li> <li>- Visibilitas perusahaan</li> </ul>	<p>agresif melalui peningkatan kegiatan CSR positif.</p>
10	Zeng (2016)	<i>“Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness, and Firm Market Value”</i>	Sampel perusahaan Kanada yang terdaftar dalam indeks S&P/TSX 60 th 2005-2009	Analisis regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> teori diferensiasi produk dan teori pemaksimalan keuntungan</li> <li>- <b>Variabel Dependen:</b></li> <li>- <i>CSR, nilai pasar</i></li> <li>- <b>Var independen:</b></li> <li>- Agresivitas pajak</li> <li>- <b>Variabel kontrol:</b></li> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Leverage</li> <li>- Intensitas modal tetap</li> <li>- Intensitas inventaris</li> <li>- kerugian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap CSR</li> <li>- CSR akan meningkatkan nilai pasar perusahaan.</li> <li>- tarif pajak efektif berhubungan positif dengan skor CSR</li> <li>- Tarif pajak efektif lima th berhubungan positif dengan indeks tata kelola CSR dan tata kelola berhubungan positif dengan nilai pasar</li> </ul>

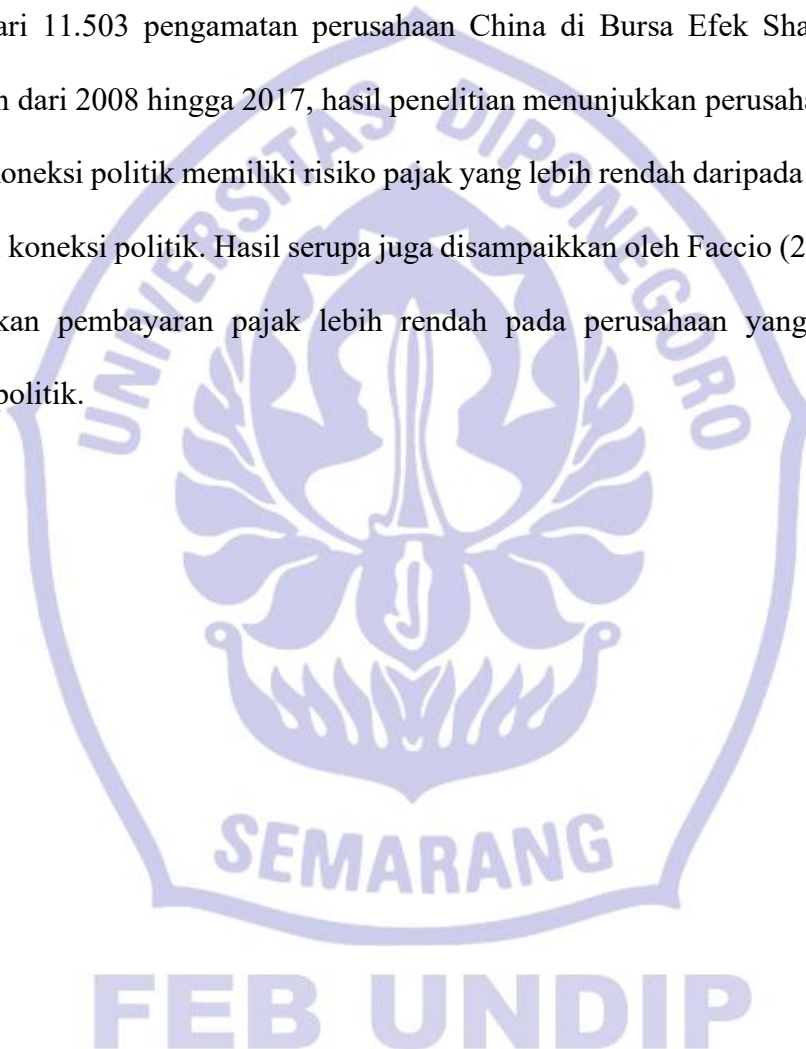
Tabel 2.4 menunjukkan hasil penelitian sebelumnya tentang koneksi politik kaitannya dengan agresivitas pajak dan dengan keberlanjutan perusahaan. Dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya yang spesifik menjadikan koneksi politik sebagai variabel moderasi hubungan antara agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan, maka tabel 2.4 mencoba menggali pengaruh koneksi politik sebagai variabel moderasi dengan menggunakan variabel yang selaras dengan keberlanjutan perusahaan

Dang *et al.* (2022) meneliti pengaruh biaya keagenan terhadap CSR dengan koneksi politik sebagai variabel moderating dan menyatakan koneksi politik memperkuat pengaruh antara biaya keagenan terhadap CSR. Hasil penelitian Li *et al.* (2020) dengan komponen variabel yang berbeda menyatakan koneksi politik melemahkan dampak kontrol keluarga pada tata kelola hijau perusahaan keluarga. Latupeirissa & Adhariani (2020) meneliti pengaruh *eco innovation* terhadap biaya modal ekuitas dengan koneksi politik sebagai pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan koneksi politik memoderasi hubungan antara *eco innovation* dan biaya modal ekuitas dengan arah yang positif.

Wu *et al.* (2022) melakukan pengujian pengaruh tekanan pengujian formal terhadap inovasi hijau (*green innovation*) dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Penelitian Wu *et al.* (2022) menunjukkan hasil koneksi politik meningkatkan pengaruh antara tekanan regulasi formal terhadap inovasi hijau. Chen (2018) meneliti pengaruh koneksi politik sebagai pemoderasi hubungan antara CSR terhadap agresivitas pajak, diperoleh hasil bahwa koneksi politik dapat

secara signifikan melemahkan hubungan positif antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan agresivitas pajak.

Hasil pengujian tentang koneksi politik terkait perpajakan juga dilakukan oleh Chen (2021). Chen (2021) melakukan analisis regresi dengan data panel, yang terdiri dari 11.503 pengamatan perusahaan China di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen dari 2008 hingga 2017, hasil penelitian menunjukkan perusahaan swasta dengan koneksi politik memiliki risiko pajak yang lebih rendah daripada yang tidak memiliki koneksi politik. Hasil serupa juga disampaikan oleh Faccio (2007), yang menyatakan pembayaran pajak lebih rendah pada perusahaan yang memiliki koneksi politik.



Tabel 2.4. Hasil Studi Pengaruh Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
<b>Indonesia</b>						
1	Latupeirissa & Adhariani (2020)	<i>“External and internal economic impacts of eco-innovation and the role of political connections: A sustainability narrative from an emerging market”</i>	Seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016	Regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> teori pemangku kepentingan dan teori sumber daya (<i>resource-based theory</i>)</li> <li>- <b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya modal ekuitas</li> <li>- Kinerja keuangan</li> </ul> </li> <li>- <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Eco innovation</i></li> <li>- Koneksi politik</li> </ul> </li> <li>- <b>Moderasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koneksi politik</li> </ul> </li> </ul>	- Koneksi politik berpengaruh, dan memoderasi hubungan antara <i>eco innovation</i> dan biaya modal ekuitas dengan arah yang positif.
<b>Luar Negeri</b>						
1	Dang et al. (2022)	<i>“Does the nature of political connection matter for corporate social responsibility engagement? Evidence from China”</i>	Perusahaan yang terdaftar di bursa saham Shanghai dan Shenzhen dari 2008-2015.	Analisis regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> teori agensi dan teori legitimasi</li> <li>- <b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CSR</li> </ul> </li> <li>- <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya keagenan</li> </ul> </li> <li>- <b>Moderasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koneksi politik</li> </ul> </li> <li>- <b>Kontrol:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran perusahaan,</li> <li>- <i>tobin q</i>,</li> <li>- <i>leverage</i>,</li> <li>- BUMN</li> </ul> </li> </ul>	- Perusahaan besar dengan koneksi simbolik menunjukkan kinerja CSR yang lebih rendah daripada perusahaan dengan koneksi material.

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
2	Li <i>et al.</i> (2020)	<i>“Family control, political connection, and corporate green governance”</i>	Perusahaan keluarga Cina 2015-2017	Analisis data panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- persaingan</li> <li>- <b>Teori:</b> Teori kekayaan emosional sosial (<i>social emotional wealth</i>), teori sumber daya berbasis keluarga</li> <li>- <b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata kelola hijau perusahaan</li> </ul> </li> <li>- <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrol keluarga</li> </ul> </li> <li>- <b>Moderasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koneksi politik</li> </ul> </li> <li>- <b>Kontrol:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Life cycle</i></li> <li>- <i>Regional green development</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koneksi politik melemahkan efek kontrol keluarga pada tata kelola hijau perusahaan keluarga.</li> </ul>
3	Wu <i>et al.</i> (2022)	<i>“Environmental regulations and innovation for sustainability? Moderating effect of political connections”</i>	4924 perusahaan swasta China, pengambilan sampel dengan survei 2016	Analisis regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Teori:</b> Teori porter dan teori koneksi politik</li> <li>- <b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inovasi hijau</li> </ul> </li> <li>- <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekanan regulasi formal</li> </ul> </li> <li>- <b>Moderasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koneksi politik</li> </ul> </li> <li>- <b>Kontrol:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tingkat keterlibatan keluarga</li> <li>- investasi asing</li> <li>- koneksi dengan masyarakat lokal</li> <li>- latar belakang pendidikan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan politik memperkuat pengaruh tekanan regulasi formal pada inovasi hijau</li> <li>- Hubungan politik memperlemah pengaruh tekanan regulasi informal pada inovasi hijau</li> </ul>

No	Peneliti dan tahun	Judul	Sampel penelitian	Alat analisis	Teori dan Variabel	Temuan
					pengusaha - ukuran perusahaan - profitabilitas perusahaan - efek industri - heterogenitas regional	
4	Chen (2018)	<i>“Corporate Social Responsibility Disclosure, Political Connection and Tax Aggressiveness: Evidence from China’s Capital Markets”</i>	Sampel perusahaan China yang terdaftar dari tahun 2008 hingga 2014	Analisis regresi berganda	- <b>Teori:</b> Teori agensi dan teori manajemen risiko - <b>Variabel Dependen:</b> - Agresivitas pajak - <b>Variabel Independen:</b> - CSR - <b>Variabel moderasi:</b> - Koneksi politik	Koneksi politik dapat secara signifikan melemahkan hubungan positif antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan agresivitas pajak.

## 2.3. Model Penelitian

### 2.3.1. Model Teoritikal Dasar

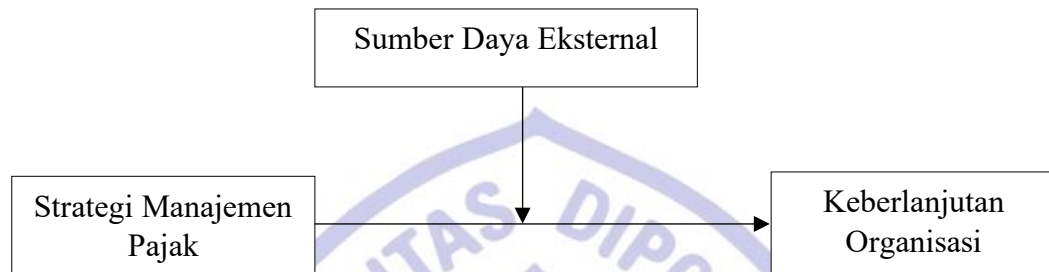
Teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, baik secara preventif maupun proaktif (Wood, 1991). Seiring berjalannya waktu, kajian terkait teori pemangku kepentingan terus mengalami perkembangan. Donaldson & Preston (1995) menekankan pentingnya teori pemangku kepentingan dalam tanggung jawab sosial perusahaan, di mana keberlanjutan strategi bisnis harus memenuhi tuntutan sosial dan lingkungan serta mendukung tujuan jangka panjang (Waddock & Graves, 1997). *Stakeholder Theory* mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan dan menekankan pentingnya memenuhi kepentingan mereka. Perusahaan perlu mengintegrasikan teori pemangku kepentingan, keberlanjutan, dan dampak sosial-lingkungan dalam strategi bisnis serta pelaporan untuk mencapai tujuan keberlanjutan (Hörisch *et al.*, 2020; Freudenreich *et al.*, 2020).

Teori pemangku kepentingan memberikan dasar normatif yang kuat tentang pentingnya memperhatikan pemangku kepentingan. Namun, teori ini kurang memberikan penjelasan tentang bagaimana ketergantungan perusahaan pada sumber daya yang dikendalikan oleh pemangku kepentingan memengaruhi strategi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan pelengkap untuk menjelaskan aspek strategis ketergantungan perusahaan pada sumber daya, khususnya sumber daya eksternal. Fokus pada sumber daya eksternal menjadi penting karena perusahaan tidak dapat beroperasi secara mandiri. Keberhasilan dan keberlanjutan operasi

mereka sangat bergantung pada sumber daya yang sering kali berada di luar kendali langsung perusahaan. *Resource Dependence Theory* (RDT) melengkapi kelemahan tersebut dengan menekankan pentingnya perusahaan mengelola ketergantungan pada sumber daya eksternal yang dikendalikan oleh pemangku kepentingan. RDT menjelaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan bergantung pada kemampuan untuk membangun hubungan strategis, mengurangi ketergantungan, atau memanfaatkan pengaruh terhadap pihak yang memiliki kontrol atas sumber daya tersebut (Pfeffer & Salancik, 1978; Ulrich & Barney, 1984).

Dalam konteks manajemen pajak, teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa strategi perusahaan mencerminkan upaya memenuhi kebutuhan pemegang saham, termasuk memaksimalkan keuntungan. Namun, perspektif keberlanjutan menuntut pertanggungjawaban atas dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan pajak (Waddock & Graves, 1997; Finch, 2006). Perusahaan harus mempertimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih luas, sementara RDT menegaskan perlunya mengelola ketergantungan pada sumber daya eksternal untuk memastikan kelangsungan hidup (Pfeffer & Salancik, 1978; Ulrich & Barney, 1984). Dalam dinamika ini, faktor sumber daya eksternal—seperti regulasi pajak, hubungan dengan pemerintah, dan tekanan kebijakan—berperan sebagai moderator yang memengaruhi hubungan antara strategi manajemen pajak dan keberlanjutan organisasi. Akses perusahaan terhadap sumber daya kritis (legitimasi, dukungan kebijakan, atau stabilitas operasional) sering bergantung pada kemampuan navigasi dalam lingkungan institusional ini (Kotter, 1979; Beckman *et*

*al.*, 2004). Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini adalah model teoritikal dasar dalam penelitian ini:



**Gambar 2.4. Model Teoritikal Dasar**

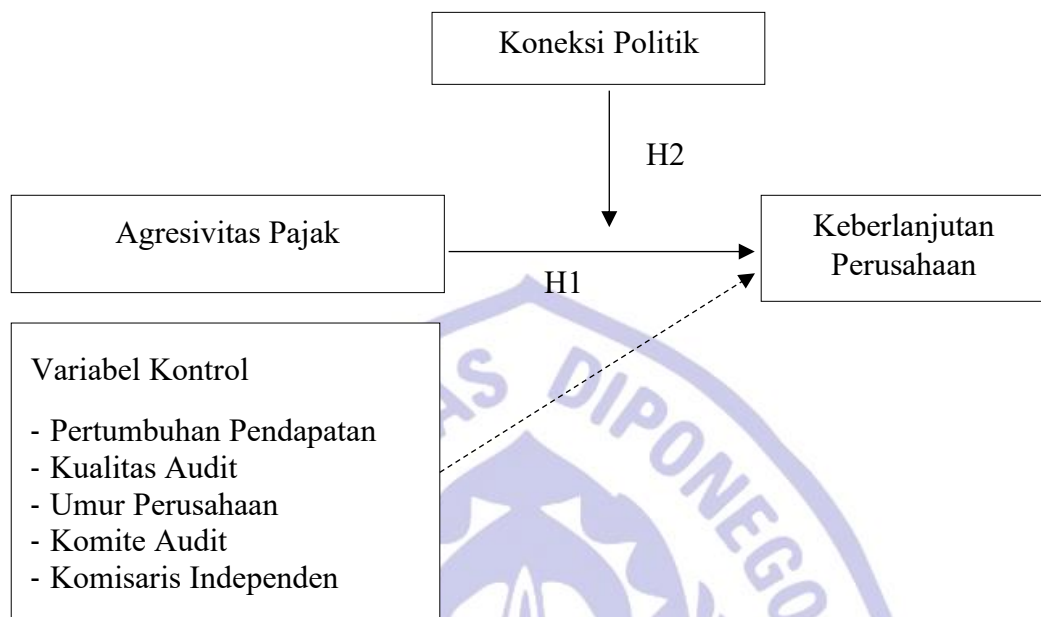
### 2.3.2. Model Penelitian Empiris

Riset ini mengembangkan model empiris berdasarkan teori dan model teoritikal dasar dari penelitian sebelumnya. Dasar utama pengembangan model empiris ini adalah teori pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan menggarisbawahi pentingnya memperhatikan aspek keberlanjutan usaha, selain memenuhi tuntutan sosial dan lingkungan, tetapi juga untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan (Waddock & Graves, 1997). Zaid *et al.* (2020) mendefinisikan kinerja keberlanjutan sebagai aktivitas perusahaan dengan tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Agresivitas pajak dapat dikategorikan sebagai tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Agresivitas pajak perusahaan merupakan skema yang dibuat dengan tujuan tunggal untuk menghindari pajak yang tidak sesuai dengan semangat undang-undang (Lanis & Richardson, 2013). Bagi negara pajak adalah sumber penerimaan utama untuk menjalankan pemerintahan demi

keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Namun dari segi perusahaan pembayaran pajak menjadi beban bagi perusahaan, maka tindakan agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Aktivitas untuk menghindari adanya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan diperlukan aturan dan kebijakan yang kuat oleh pemerintah sebagai pengelola keuangan negara.

Wu *et al.* (2022) menyatakan besarnya pengaruh politik yang dimiliki sebuah perusahaan di dalam suatu negara dapat menentukan seberapa kuat dan ketat peraturan tersebut. Negara-negara berkembang seperti Indonesia cenderung memiliki pengaruh yang kuat dalam bisnis. Menurut Zhang (2017) perusahaan kecil di pasar negara berkembang dapat menyuap pejabat lokal melalui ikatan politik mereka untuk membentuk konspirasi bisnis-pemerintah untuk menghindari peraturan dan hukuman lingkungan. Penelitian sebelumnya yang menghubungkan koneksi politik dengan variabel setara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan adalah Dang *et al.* (2022; Latupeirissa & Adhariani (2020); Li *et al.* (2020); Zhang, (2017). Penelitian ini mencoba untuk meneliti pengaruh koneksi politik sebagai pemoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini adalah model penelitian empiris dalam penelitian ini:



**Gambar 2.5. Model Penelitian Empiris**

## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Keberlanjutan Perusahaan

Agresivitas pajak sering dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek dengan meminimalkan kewajiban pajak. Kegiatan tersebut dapat berdampak buruk pada keberlanjutan perusahaan. Praktik ini dapat menciptakan ketidaksesuaian antara perilaku perusahaan dengan ekspektasi masyarakat, yang memengaruhi reputasi, hubungan dengan regulator, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Perusahaan yang terlibat dalam strategi pajak agresif dianggap lebih mementingkan keuntungan finansial dibandingkan tanggung jawab sosial, yang dapat mengikis kepercayaan publik dan merusak citra perusahaan, sehingga berdampak pada tujuan keberlanjutan (Lanis & Richardson, 2013). Ketika perusahaan memprioritaskan agresivitas pajak daripada transparansi dan tanggung jawab sosial, mereka sering menghadapi risiko reputasi, hubungan

yang tegang dengan pemangku kepentingan, dan peningkatan pengawasan dari otoritas regulasi, yang semuanya dapat menghambat tujuan keberlanjutan jangka panjang (Nasih *et al.*, 2024).

Agresivitas pajak mengacu pada semua aktivitas pengurangan pembayaran pajak baik melalui perencanaan pajak legal maupun ilegal (Frank *et al.*, 2009; Issah & Rodrigues, 2021; Kristiadi *et al.*, 2020; Lanis & Richardson, 2013; Zeng, 2016). Pajak bagi negara merupakan sumber penerimaan utama, namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak (Pranoto & Widagdo, 2016). Perusahaan sering kali berupaya untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin yang diterjemahkan sebagai kegiatan agresivitas pajak.

Keberlanjutan memiliki fleksibilitas konseptual yang cukup untuk beradaptasi dengan perubahan aturan dan harapan masyarakat dari waktu ke waktu (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Damayanti & Hardiningsih (2021) menyatakan bahwa konsep *triple bottom line* mengharuskan perusahaan tidak hanya menjadikan finansial sebagai tujuan utama tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut Serafeim & Trinh (2020), perusahaan mengungkapkan data lingkungan, sosial, dan tata kelola karena pelanggan, karyawan, investor, dan regulator berusaha untuk memasukkan pertimbangan tersebut dalam keputusan mereka. Salah satu alasan perusahaan peduli terhadap keberlanjutan dalam model bisnis mereka karena penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan melakukan hal tersebut (Harnesk & Myhrberg, 2019).

Teori pemangku kepentingan menjadi kerangka yang tepat untuk menjelaskan hubungan agresivitas pajak dengan keberlanjutan perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya berkewajiban memenuhi kepentingan pemegang saham, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah, masyarakat, karyawan, maupun konsumen. Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, mereka gagal memenuhi ekspektasi pemerintah dan masyarakat terkait kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif, melemahkan legitimasi sosial, serta mengurangi dukungan pemangku kepentingan terhadap operasi jangka panjang perusahaan (Issah & Rodrigues, 2021; Rudyanto *et al.*, 2021).

Pemilihan teori pemangku kepentingan dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dalam menjelaskan bagaimana praktik agresivitas pajak yang hanya menguntungkan pihak-pihak seperti pemegang saham dan manajemen perusahaan namun merugikan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, teori ini menegaskan bahwa keberlanjutan perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan kepentingan berbagai pihak, bukan hanya fokus pada laba. Penekanan pada tanggung jawab kepada pemangku kepentingan memperjelas bahwa agresivitas pajak dapat mengurangi legitimasi dan kepercayaan yang esensial bagi keberlanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung penjelasan ini. Kristiadi *et al.* (2020) menemukan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap

pengungkapan sosial. Rudyanto *et al.* (2021) menunjukkan bahwa praktik ini melemahkan kesejahteraan berkelanjutan karena mengurangi kapasitas pemerintah menyediakan barang publik. Sui *et al.* (2019) menekankan bahwa meskipun agresivitas pajak memberi keuntungan awal, dalam jangka panjang justru merusak integritas perusahaan ketika pemangku kepentingan menyadari praktik tersebut. Selain itu, Ullah *et al.* (2023) menyoroti bahwa agresivitas pajak menghambat upaya kolektif dalam mengatasi degradasi lingkungan, yang berimplikasi negatif pada keberlanjutan perusahaan maupun masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan perusahaan

#### **2.4.2. Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Keberlanjutan perusahaan menjadi semakin penting dalam konteks bisnis modern saat ini, tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Keberlanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan memerlukan pendekatan holistik dalam manajemen perusahaan. Namun, dalam praktik bisnis, beberapa perusahaan mengadopsi strategi agresivitas pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, yang sering kali bertentangan dengan tujuan keberlanjutan. Lanis & Richardson (2013) menyatakan bahwa agresivitas pajak sering kali dikaitkan dengan perilaku tidak etis, yang dapat merusak reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat dalam agresivitas

pajak mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan jangka panjang mereka.

Upaya untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan seringkali penuh dengan ketidakpastian, perubahan dan dinamika. Misalnya, perubahan dalam regulasi, kebijakan pemerintah, persaingan, teknologi, ketidakpastian lingkungan dan lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan perusahaan. Ketidakpastian tersebut menuntut perusahaan memiliki strategi yang fleksibel, kemampuan beradaptasi, serta mekanisme pengelolaan risiko yang kuat agar dapat terus beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Logika tersebut sejalan dengan teori RDT, sebagaimana disampaikan Kotter (1979), bahwa perusahaan perlu mengadaptasi strategi mereka agar dapat memenuhi sumber daya dan mengelola ketergantungan pada pihak eksternal.

RDT yang dikemukakan oleh Pfeffer dan Salancik pada tahun 1978 menekankan pentingnya hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal, khususnya dalam hal mengakses sumber daya yang diperlukan untuk operasi mereka. Menurut teori ini, perusahaan sering kali bergantung pada sumber daya yang dikendalikan oleh entitas eksternal seperti pemerintah, dan untuk mengurangi ketergantungan ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi seperti menjalin koneksi politik (Pfeffer & Salancik, 2003). Koneksi politik dapat memberikan perusahaan akses ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan, termasuk perlindungan dari risiko yang terkait dengan agresivitas pajak. Hillman *et al.* (2009) mencatat bahwa perusahaan dengan koneksi politik sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari regulator, termasuk dalam hal perpajakan, yang

memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam strategi pajak tanpa menghadapi konsekuensi negatif yang signifikan. Dalam hal ini, peran koneksi politik menjadi penting, mengingat kemampuan perusahaan untuk memengaruhi kebijakan dan regulasi melalui hubungan politik mereka, yang dapat memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan

Koneksi politik dan dunia bisnis sangat erat kaitannya di negara berkembang seperti Indonesia. Besarnya pengaruh politik yang dimiliki sebuah perusahaan di dalam suatu negara dapat menentukan seberapa kuat dan ketat peraturan tersebut (Wu *et al.*, 2022). Koneksi politik dapat membantu perusahaan memperoleh sumber daya dan kondisi eksternal yang langka seperti keuangan, preferensi pajak, dan subsidi pemerintah serta mendorong perilaku kewirausahaan perusahaan melalui perolehan sumber daya dan kondisi ini, yang menjadikannya sebagai faktor kunci yang memengaruhi kinerja perusahaan (Simsek *et al.*, 2003).

Penelitian Faccio (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki risiko regulasi yang lebih rendah, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam strategi agresivitas pajak dengan lebih aman. Selain itu, Wu *et al.* (2022) menunjukkan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan efektivitas strategi perusahaan dalam menghadapi regulasi lingkungan, yang merupakan bagian penting dari keberlanjutan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola risiko pajak tetapi juga dalam mempertahankan keberlanjutan secara keseluruhan. Hillman *et al.* (2009) menyatakan bahwa koneksi politik dapat memoderasi pengaruh faktor eksternal terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan regulasi dan

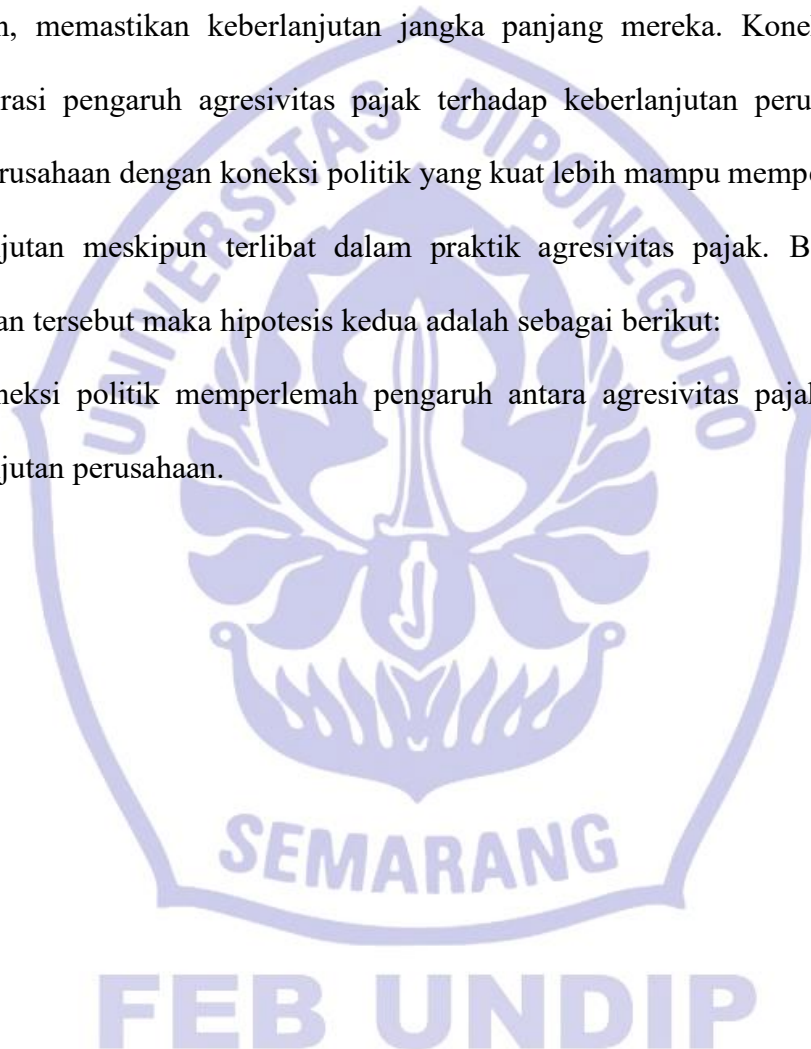
manajemen risiko. Chen (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung memiliki risiko pajak yang lebih rendah. Dalam konteks agresivitas pajak, ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik yang kuat mungkin dapat mengurangi dampak negatif agresivitas pajak terhadap pemangku kepentingan, yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang.

Berdasarkan teori RDT, perusahaan bergantung pada lingkungan eksternal untuk memperoleh sumber daya kritis, termasuk dukungan politik dan regulasi. Pfeffer & Salancik (2003) menekankan bahwa ketergantungan ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi seperti koneksi politik untuk mengurangi risiko dan mengamankan akses sumber daya. Dalam konteks agresivitas pajak, RDT menjelaskan bahwa perusahaan dengan koneksi politik kuat dapat memoderasi dampak negatifnya terhadap keberlanjutan, karena hubungan politik memberikan perlindungan regulasi (Hillman *et al.*, 2009), preferensi pajak (Faccio, 2006), dan fleksibilitas strategis (Wu *et al.*, 2022). Dengan demikian, koneksi politik berfungsi sebagai mekanisme mitigasi yang memungkinkan perusahaan mempertahankan praktik agresivitas pajak sekaligus menjaga keberlanjutan jangka panjang melalui pengaruh atas kebijakan dan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan logika RDT bahwa adaptasi terhadap ketergantungan eksternal (misalnya melalui politik) adalah kunci kelangsungan operasional.

Secara spesifik, perusahaan yang memiliki koneksi politik kuat mungkin memiliki kemampuan untuk memitigasi risiko terkait dengan agresivitas pajak,

seperti risiko hukum, reputasi, atau tekanan dari pemangku kepentingan. Koneksi politik dapat memberikan perlindungan atau perlakuan istimewa yang memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan praktik agresivitas pajak sambil tetap mempertahankan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, dan dengan demikian, memastikan keberlanjutan jangka panjang mereka. Koneksi politik memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan, di mana perusahaan dengan koneksi politik yang kuat lebih mampu mempertahankan keberlanjutan meskipun terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H2: Koneksi politik memperlemah pengaruh antara agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengolah data berupa angka dari laporan keuangan untuk dianalisis. Desain dalam penelitian ini bersifat kausalitas yang dilakukan dengan menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat antara satu atau beberapa variabel dengan variabel lainnya. Analisis hubungan kausalitas antarvariabel dijelaskan menurut model penelitian yang dikembangkan, dan sekaligus dapat menghasilkan implikasi penelitian dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta suatu metode dan teknik bagi pemecahan masalah yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang digunakan.

#### **3.2. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki skor ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang tercatat dalam database Bloomberg dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017-2022. Alasan pemilihan periode penelitian dilatarbelakangi munculnya peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017, tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Tahun 2022 dipilih sebagai tahun akhir pengujian karena pada saat penelitian ini dilakukan, data yang tersedia dan dapat diakses secara lengkap hanya sampai tahun tersebut. Teknik pengambilan sampel

dengan *purposive sampling*, yaitu teknik memperoleh sampel melalui kriteria-kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian, antara lain:

1. Perusahaan yang memiliki skor ESG dari Bloomberg selama periode 2017–2022.

Sampel awal terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017–2022 dan memiliki skor ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang tersedia di database Bloomberg. Bloomberg dipilih karena menyediakan data ESG yang terpercaya, terakreditasi, dan konsisten, sehingga mendukung validitas dan kredibilitas penelitian.

2. Pengecualian perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) selama tahun pengamatan.

Observasi yang berasal dari perusahaan yang melakukan IPO pada tahun penelitian dikeluarkan dari sampel. Hal ini dilakukan karena perusahaan yang baru *go public* umumnya belum memiliki data keuangan dan operasional yang stabil atau lengkap, sehingga dapat memengaruhi konsistensi dan reliabilitas hasil analisis.

3. Pengecualian perusahaan dengan kondisi rugi atau suspensi.

Perusahaan dengan kondisi rugi dikeluarkan karena perusahaan yang merugi cenderung tidak memiliki insentif untuk melakukan agresivitas pajak, sehingga dapat mengaburkan makna analisis. Selain itu, observasi dari perusahaan yang mengalami suspensi juga dikeluarkan karena informasi keuangan atau operasionalnya sering kali tidak tersedia atau tidak lengkap, yang berisiko menyebabkan inkonsistensi dalam analisis.

### 3.3. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen, independen, variabel moderating dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberlanjutan perusahaan. Agresivitas pajak sebagai variabel independen, koneksi politik sebagai variabel moderating dan variabel kontrol terdiri dari pertumbuhan pendapatan, kualitas audit, umur perusahaan, komite audit, dan komisaris independen. Pertumbuhan pendapatan mencerminkan kinerja perusahaan, sedangkan kualitas audit, umur perusahaan, komite audit, dan komisaris independen merepresentasikan *corporate governance* perusahaan. Secara keseluruhan, variabel kontrol ini penting karena dapat membantu menghilangkan pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi hasil penelitian, memungkinkan penilaian lebih tepat antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Pengendalian variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih valid dan dapat diandalkan. Uraian masing-masing variabel sebagai berikut:

#### a. Keberlanjutan Perusahaan

Keberlanjutan merupakan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Definisi berdasarkan Komisi Brundtland yang dikutip oleh Keeble (1988), dan mencerminkan keseimbangan antara kinerja ekonomi, kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan dalam kegiatan bisnis perusahaan. Keberlanjutan perusahaan dalam riset ini diukur menggunakan *Environmental, Social, and Governance (ESG) Score* yang disediakan oleh Bloomberg. Pendekatan ini mengadopsi metode yang digunakan oleh Jarboui *et al.* (2020), di mana skor ESG

dipandang sebagai representasi kuantitatif atas kinerja keberlanjutan perusahaan berdasarkan tiga dimensi utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Skor ESG dipilih sebagai indikator pengukuran dalam penelitian ini karena memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, skor ini bersifat komprehensif dengan mencakup tiga dimensi penting yaitu aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang secara menyeluruh merepresentasikan kinerja keberlanjutan perusahaan. Kedua, skor ESG merupakan alat yang terstandarisasi karena dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terpercaya seperti Sustainability Accounting Standards Board (SASB), State Street Global Advisors (SSGA), dan Morgan Stanley Capital International (MSCI) *ESG Research*, sehingga memiliki metodologi yang jelas dan transparan serta memungkinkan perbandingan yang valid antar perusahaan. Keunggulan ketiga adalah sifatnya yang berbasis industri, dimana penilaiannya mempertimbangkan materialitas isu ESG yang berbeda pada setiap sektor, sehingga menghasilkan evaluasi yang lebih relevan dan kontekstual (Bloomberg, 2021). Terakhir, skor ESG bersifat dinamis karena diperbarui secara berkala, yang memungkinkan analisis perkembangan tren dan peningkatan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan berbagai kelebihan ini, skor ESG menjadi alat ukur yang efektif dan andal untuk menilai tingkat keberlanjutan suatu perusahaan secara objektif.

Bloomberg mengukur skor ESG berdasarkan 92 indikator terstruktur yang terbagi menjadi tiga pilar utama, yang terdiri dari 36 indikator lingkungan, 26 indikator sosial dan 30 indikator tata kelola. Adapun 92 komponen indikator ESG tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Penilaian dilakukan melalui data kuantitatif

dan kualitatif yang diperoleh dari perusahaan, lalu dibandingkan dengan kinerja perusahaan lain dalam industri yang sama (*peer-based scoring*). Pendekatan ini menghasilkan skor yang relevan secara sektoral dan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antarindustri.

Skor ESG diukur dalam bentuk skala numerik terstandarisasi. Setiap dimensi (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dinilai dan diberi bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat relevansinya dalam industri tertentu. Skor akhir ESG merupakan agregat tertimbang dari ketiga dimensi tersebut. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keberlanjutan yang lebih baik. Kinerja tersebut dinilai dari praktik lingkungan yang lebih bertanggung jawab, hubungan sosial yang lebih inklusif dan etis, sistem tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Sebaliknya, skor rendah mencerminkan risiko keberlanjutan yang lebih tinggi dan potensi kegagalan dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Tabel 3.1. Komponen Perhitungan Keberlanjutan Perusahaan

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
<b>Kualitas Udara</b> - Emisi Udara - Kebijakan Emisi Udara <b>Paparan Iklim</b> - Risiko Transisi <b>Dampak Ekologis</b> - Perlindungan Ekosistem - Denda Lingkungan - Insiden Lingkungan <b>Manajemen energi</b> - Konsumsi Energi - Target Energi - Penggunaan Energi Terbarukan <b>Manajemen Rantai Pasokan Lingkungan</b> - kepatuhan lingkungan pemasok - sumber yang berkelanjutan <b>Pengelolaan Emisi GHG (Greenhouse Gas)</b> - Emisi GHG - Kebijakan Emisi GHG - Peraturan GHG - Lingkup GHG 3 - Target GHG <b>Keuangan Berkelanjutan</b> - Keterlibatan - Integrasi ESG - Pengecualian - Emisi yang Dibiayai - Eksposur Industri - Inisiatif Pasar - Portofolio Risiko Transisi Iklim - Pinjaman & Penjaminan Berkelanjutan <b>Produk Berkelanjutan</b> - Teknologi Drivetrain Alternatif - Produk Ramah Lingkungan - Kendaraan Ringan Efisiensi Bahan Bakar - Kendaraan Penumpang Efisiensi Bahan Bakar	<b>Akses &amp; Keterjangkauan</b> - Kebijakan Akses & Keterjangkauan - Praktik Akses & Keterjangkauan <b>Hak &amp; Hubungan Komunitas</b> - Komunitas & Hak Asasi Manusia - Hubungan Masyarakat <b>Kesejahteraan Pelanggan</b> - Edukasi & Kesejahteraan Pelanggan - Kesehatan & Keselamatan Pelanggan <b>Keamanan Data &amp; Privasi Pelanggan</b> - Privasi Data & Manajemen Konten - Keamanan data <b>Etika &amp; Kepatuhan</b> - Etika bisnis - perilaku kompetitif - manajemen hukum & peraturan <b>Praktik Ketenagakerjaan &amp; Ketenagakerjaan</b> - Aksi Buruh - Manajemen Tenaga Kerja - Buruh Terorganisir - Pelatihan - Keragaman tenaga kerja <b>Pemasaran &amp; Pelabelan</b>	<b>KOMPOSISI DEWAN</b> <b>Peran direktur</b> - Peran CEO - Peran pimpinan (chair) - Peran dewan komisaris <b>Keberagaman</b> - Keberagaman usia - Keberagaman gender <b>Independensi</b> - independensi pimpinan dewan komisaris - independensi dewan komisaris <b>Penyegaran (refreshment)</b> - penyegaran dewan komisaris - penyegaran pimpinan (Chair) <b>KOMPENSASI EKSEKUTIF</b> <b>Struktur Insentif</b> - Desain Rencana Insentif CEO - Desain Rencana Insentif Eksekutif - Ekuitas Gaji Eksekutif - Tautan Pembayaran Eksekutif <b>Tata Kelola pembayaran</b> - Pengawasan Dewan Kompensasi - Katakan pada Bayar - Kebijakan Pembayaran <b>Membayar untuk kinerja</b> - Penyelarasan Pembayaran Tetap - Kinerja Pembayaran Variabel

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
<b>Pengelolaan sampah</b> - Timbulnya Limbah Berbahaya - Daur Ulang Limbah Berbahaya - Sampah yang Berkelanjutan - Daur Ulang Sampah <b>Pengelolaan Air</b> - Pengelolaan Air Limbah - Penggunaan Air - Kebijakan Penggunaan Air - Target Air	- Praktik Pemasaran - Pelabelan Produk <b>Manajemen Kesehatan &amp; Keselamatan Kerja</b> - Kematian - Denda Kesehatan & Keselamatan - Kebijakan Kesehatan & Keselamatan - Insiden Keamanan <b>Manajemen Risiko Operasional</b> - Insiden Operasional - Kesiapan operasional <b>Manajemen Kualitas Produk</b> - Kualitas & Keamanan Produk <b>Manajemen Rantai Pasokan Sosial</b> - Kepatuhan Sosial Pemasok	<b>HAK PEMEGANG SAHAM</b> <b>Kebijakan Pemegang Saham</b> - Pertahanan Pengambilalihan - Hak Pilih - Kebijakan Pemilihan Direktur <b>Pemungutan Suara Direktur</b> - Ketentuan Direktur - Dukungan Direktur <b>AUDIT</b> <b>Komite Audit</b> - Rapat Komite Audit - Struktur Komite Audit <b>Auditor Eksternal</b> - Persetujuan Auditor - Biaya Auditor - Masa Jabatan Auditor <b>Hasil Audit</b> - penyajian kembali akuntansi - opini auditor

Sumber: Bloomberg (2023)

## b. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui berbagai teknik yang berada di antara spektrum perencanaan pajak yang sah hingga praktik penghindaran pajak agresif (Frank *et al.*, 2009). Penelitian ini mengukur agresivitas pajak melalui proksi *discretionary permanent differences* (DTAX), yaitu selisih permanen antara laba akuntansi dan laba fiskal yang muncul akibat kebijakan pelaporan diskresioner perusahaan, di luar ketentuan pajak yang berlaku. Model ini diadaptasi dari Frank *et al.* (2009), dengan modifikasi untuk konteks di Indonesia (Rachmawati, 2019).

Pengukuran agresivitas pajak melalui DTAX dianggap lebih representatif dibandingkan dengan ukuran lain seperti *effective tax rate* (ETR) karena beberapa alasan: (1) DTAX lebih merefleksikan aktivitas *tax shelter*; (2) DTAX disajikan dalam satuan mata uang yang memungkinkan perbandingan dengan total akrual (proksi manajemen laba); dan (3) DTAX tidak dipengaruhi oleh beda temporer yang dapat menyesatkan karena terkait erat dengan akrual (Frank *et al.*, 2009; Blaylock *et al.*, 2012; Hanlon, 2005; Rachmawati *et al.*, 2020). Skor DTAX yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang lebih besar, karena mencerminkan besarnya diskresi perusahaan dalam menghasilkan selisih permanen antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Keterbatasan akses terhadap data laba fiskal dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang bersifat rahasia mengharuskan penelitian ini mengestimasi laba fiskal menggunakan data laporan keuangan. Untuk meminimalkan kesalahan pengukuran akibat variabel yang tidak terkait dengan agresivitas pajak, model pengukuran DTAX mengisolasi *non-discretionary permanent differences* melalui pendekatan regresi sebagaimana dikembangkan oleh Frank *et al.* (2009), dengan penyesuaian terhadap regulasi perpajakan Indonesia. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PERMIDIFF_{it} = \theta_0 + \theta_1 INTANG_{it} + \theta_2 UNCON_{it} + \theta_3 \Delta NOL_{it} + \theta_4 LAGPERM_{it} + \epsilon_{it}$$

$PERMIDIFF_{it}$  = Total book-tax differences dikurangi dengan beda temporer dihitung dengan rumus:

$$PTI_{it} - \frac{CTE_{it}}{STR_{it}} - \frac{DTE_{it}}{STR_{it}}$$

$PTI_{it}$  = Pretax income (penghasilan sebelum pajak).

$CTE_{it}$  = Current tax expense (beban pajak kini perusahaan i pada tahun t).

$DTE_{it}$	=	<i>Differed tax expense</i> (beban pajak tangguhan perusahaan $i$ tahun $t$ ).
$STR_{it}$	=	<i>Statutory tax rate</i> (tarif pajak penghasilan yang berlaku pada perusahaan $i$ tahun $t$ )
$INTANG_{it}$	=	<i>Goodwill and other intangibles</i> ( <i>Goodwill</i> dan aset takberwujud lainnya untuk perusahaan $i$ tahun $t$ )
$UNCON_{it}$	=	<i>Unconsolidated earnings</i> (laba/rugi anak perusahaan yang dilaporkan metode ekuitas oleh perusahaan $i$ tahun $t$ )
$\Delta NOL_{it}$	=	<i>Net operating loss</i> (perubahan saldo kompensasi kerugian fiskal perusahaan $i$ tahun $t$ ).
$LAGPERM_{it}$	=	<i>Lagged PERMDIFF</i> ( <i>PERMDIF</i> satu tahun sebelumnya untuk perusahaan $i$ tahun $t$ )
$\epsilon_{it}$	=	<i>Discretionary permanent difference</i> (DTAX) perusahaan $i$ tahun $t$ .

Berbeda dengan Frank *et al.* (2009), model ini tidak memasukkan variabel *minority interest* (MI) dan *current state income tax expense* (CSTE) karena ketidaksesuaian dengan regulasi perpajakan Indonesia. MI tidak dimasukkan karena peraturan pajak Indonesia tidak mengatur secara khusus perlakuan terhadap laba/rugi *minority interest*, sedangkan CSTE, dikarenakan Indonesia tidak mengenal pajak negara bagian seperti di Amerika Serikat.

Semua variabel diskala dengan total aset untuk mengurangi bias ukuran perusahaan dan perbedaan industri. Dengan memfokuskan pada variabel yang relevan dan teramati secara andal, *residual model* (DTAX) diharapkan dapat merepresentasikan tindakan diskresioner perusahaan dalam pelaporan pajak. Pendekatan ini memastikan bahwa agresivitas pajak tidak tercampur dengan faktor *non-discretionary*, sehingga hasil pengukuran lebih akurat dalam konteks Indonesia.

DTAX diestimasi melalui residual ( $\epsilon$ ) dari regresi *permanent book-tax differences* (PERMDIFF) terhadap variabel-variabel *non-discretionary*.

PERMDIFF dihitung sebagai selisih antara laba akuntansi (PTI) dan laba fiskal, dengan menyesuaikan beban pajak kini (CTE) dan tanggihan (DTE) berdasarkan tarif pajak yang berlaku (STR). Selama periode penelitian (2017-2022), tarif PPh badan di Indonesia mengalami perubahan, dan turut menjadi perhatian untuk memastikan akurasi perhitungan. Tahun 2017-2021, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif umum sebesar 25% berlaku untuk semua perusahaan, dengan insentif khusus bagi perusahaan publik yang memenuhi syarat tertentu. Perusahaan terbuka yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia berhak mendapatkan potongan tarif 5%, sehingga tarif efektif menjadi 20%. Pada tahun 2022, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No.7/2021) menurunkan tarif umum menjadi 22%, dengan insentif tambahan untuk perusahaan publik yang memenuhi kriteria serupa (minimal 40% kepemilikan saham diperdagangkan di bursa). Perusahaan tersebut berhak mendapatkan potongan 3%, sehingga tarif efektifnya menjadi 19%. Perubahan tarif ini berdampak signifikan pada perhitungan PERMIDIFF sebagai proksi agresivitas pajak, karena variasi tarif memengaruhi konversi beban pajak menjadi laba fiskal. Penelitian perlu memastikan konsistensi penghitungan dengan menyesuaikan tarif sesuai tahun berlakunya.

### **c. Koneksi Politik**

Koneksi politik merupakan kondisi ketika perusahaan memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan individu yang memiliki atau pernah memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan, militer, parlemen, atau partai politik, baik secara formal maupun melalui relasi pribadi yang signifikan. Pengukuran

koneksi politik dalam riset ini menggunakan variabel *dummy*, memperoleh nilai 1 jika perusahaan memiliki koneksi politik yang dapat diverifikasi, dan 0 jika sebaliknya, pengukuran tersebut sejalan dengan penelitian Faccio (2006) dan Nuswantara *et al.* (2023). Pengukuran koneksi politik difokuskan pada dewan komisaris karena peran strategisnya dalam sistem tata kelola dua tingkat di Indonesia (Joni *et al.*, 2020). Sistem tersebut memposisikan dewan komisaris lebih penting dan lebih strategis dibanding dewan direksi, karena memiliki fungsi sebagai pengawasan dan pemantauan.

Identifikasi koneksi politik dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sistematis guna memastikan akurasi dan reliabilitas data. Proses identifikasi koneksi politik dilakukan melalui tiga langkah utama.

1. Analisis profil dewan komisaris

Meninjau bagian profil dewan komisaris yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan untuk mengidentifikasi riwayat jabatan yang berkaitan dengan posisi politik atau militer.

2. Verifikasi data kelembagaan

Nama-nama anggota dewan komisaris tersebut kemudian dicocokkan dengan informasi yang tersedia di situs web resmi pemerintah dan parlemen, untuk memastikan apakah mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat publik.

3. Pengecekan data tambahan

Memeriksa latar belakang individu-individu tersebut melalui situs web resmi perusahaan serta pencarian informasi tambahan menggunakan mesin

penelusuran Google. Verifikasi ini mencakup latar belakang anggota dewan komisaris/direksi beserta keluarga intinya (pasangan, anak, dan orang tua).

Koneksi politik dalam penelitian ini secara eksklusif mencakup hubungan yang dapat diverifikasi melalui sumber publik. Kriteria ini diterapkan untuk menjamin objektivitas pengukuran, menjaga konsistensi metodologis, dan memenuhi standar praktik empiris yang lazim digunakan dalam studi-studi tentang koneksi politik. Prosedur verifikasi bertahap ini penting untuk meminimalkan bias dan kesalahan klasifikasi dalam penelitian.

Pemilihan variabel *dummy* dalam pengukuran koneksi politik didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang jelas dan terukur antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan yang tidak, sehingga memudahkan analisis statistik (Sohail *et al.*, 2024). Kedua, variabel *dummy* mengurangi subjektivitas karena hanya mengakui koneksi yang dapat diverifikasi melalui data administratif, seperti laporan tahunan perusahaan, database regulator, atau sumber berita kredibel (Kim & Zhang, 2016). Ketiga, metode ini konsisten dengan literatur internasional, termasuk Faccio (2006), yang menggunakan kriteria serupa untuk membandingkan koneksi politik lintas negara secara sistematis. Pendekatan ini juga telah diadopsi dalam konteks lokal Indonesia dengan penyesuaian terhadap regulasi nasional, seperti pendekatan berbasis kategori *Politically Exposed Persons* (PEP) dalam Nasih *et al.* (2020), yang mencakup individu-individu dengan jabatan resmi maupun pengaruh informal yang relevan secara politis.

#### **d. Variabel Kontrol**

Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari pertumbuhan pendapatan, kualitas audit, umur perusahaan, komite audit, dan komisaris independen.

##### **a) Pertumbuhan Pendapatan**

Pertumbuhan pendapatan mengacu pada perubahan penjualan atau pendapatan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pertumbuhan pendapatan mengukur apakah suatu perusahaan mengalami peningkatan pendapatan pada setiap periode tahun berjalan dengan melihat dari sisi kinerja. Pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan berinvestasi ulang, memperluas jangkauan, dan meningkatkan nilai pemegang saham, mendukung adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan persaingan (Youssef *et al.*, 2023). Pertumbuhan pendapatan dalam penelitian ini merujuk penelitian Bodhanwala & Bodhanwala (2018), dengan membandingkan pendapatan pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang kemudian dibagi pendapatan tahun lalu (Bodhanwala & Bodhanwala, 2018). Bagi perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi maka diharapkan akan meningkatkan keberlanjutan perusahaan.

##### **b) Kualitas Audit**

Kualitas audit didefinisikan sebagai kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran material dalam laporan keuangan perusahaan (DeAngelo, 1981). Konsep ini mencakup dua dimensi utama: kompetensi teknis auditor (kemampuan mengidentifikasi kesalahan) dan independensi (keberanian menyampaikan temuan secara objektif). DeAngelo

(1981) berargumen bahwa kualitas audit cenderung lebih tinggi pada firma audit besar (seperti Big Four) karena mereka memiliki sumber daya yang memadai, reputasi untuk dijaga, dan insentif kuat untuk mempertahankan independensi. Big Four—Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers—dianggap sebagai penyedia jasa audit premium yang menerapkan standar ketat, sehingga diasosiasikan dengan kualitas audit superior (Bacha *et al.*, 2021).

Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 diberikan jika perusahaan diaudit oleh firma Big Four atau afiliasinya, dan 0 jika tidak. Pendekatan ini didasarkan pada tiga argumen. Pertama, firma Big Four memiliki struktur pengendalian mutu yang lebih ketat dan cenderung menghindari praktik kompromi yang merusak kredibilitas (Bacha *et al.*, 2021). Kedua, penggunaan Big Four sebagai proksi kualitas audit telah divalidasi secara luas dalam literatur, termasuk oleh Hammami & Zadeh (2020) yang menunjukkan hubungan positif antara auditor Big Four dan transparansi pengungkapan perusahaan. Ketiga, metode ini praktis untuk analisis empiris, khususnya dalam studi berbasis regresi, karena memungkinkan klasifikasi biner yang jelas (Salem *et al.*, 2021).

Dampak kualitas audit yang tinggi tercermin dalam peningkatan transparansi laporan keuangan, penurunan risiko pelanggaran, dan peningkatan akuntabilitas perusahaan (Yasser & Soliman, 2018). Studi Salem *et al.* (2021) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh Big Four cenderung memiliki pelaporan lebih andal dan tingkat

kecurangan lebih rendah. Dengan demikian, pengukuran berbasis Big Four tidak hanya merefleksikan kapasitas deteksi auditor, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal kredibilitas bagi pemangku kepentingan (Hammami & Zadeh, 2020).

#### **c) Umur Perusahaan**

Umur perusahaan merupakan faktor penting yang menentukan dan membedakan kemampuan dalam berinovasi (Pellegrino & Piva, 2020). Memiliki kemampuan berinovasi merupakan salah satu karakteristik perusahaan untuk bertahan hidup atau memiliki keberlanjutan usaha. Di sisi lain, perusahaan yang lebih berpengalaman mungkin melakukan inovasi untuk mempertahankan dan mengkonsolidasikan pangsa pasar dan keunggulan kompetitif mereka (Schumpeter, 2021).

Perusahaan yang memiliki pengalaman bisnis lebih lama memiliki keunggulan kompetitif yang lebih dibandingkan perusahaan dengan umur relatif muda dalam hal pengalaman manajemen dan peningkatan kinerja (Younis & Sundarakani, 2020). Umur perusahaan memegang peranan penting dalam menentukan penyebab kegagalan (Kücher *et al.*, 2020), yang sangat beresiko untuk keberlanjutan perusahaan. Pengukuran umur perusahaan merujuk pada penelitian (Kücher *et al.*, 2020), yaitu perbedaan antara tahun pendirian perusahaan sampai dengan tahun penelitian.

#### **d) Komite Audit**

Komite audit adalah salah satu komponen penting dalam tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian

internal, dan fungsi audit. Menurut berbagai studi, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab memastikan keakuratan, transparansi, dan integritas laporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan investor (Velte, 2017). Komite audit juga berperan penting dalam mengurangi risiko terkait pelaporan keuangan yang keliru dan agresivitas pajak dengan menjaga standar pengawasan dan akuntabilitas yang tinggi (Hsu *et al.*, 2018). Tanggung jawab komite audit meliputi pemantauan efektivitas audit internal dan eksternal, mengevaluasi pengungkapan keuangan, serta menegakkan kepatuhan terhadap standar regulasi (Salem *et al.*, 2021).

Komite audit yang efektif umumnya diasosiasikan dengan berkurangnya kesalahan dalam pelaporan keuangan, peningkatan kualitas pelaporan, dan transparansi perusahaan yang lebih baik, yang secara keseluruhan memperkuat kinerja dan keberlanjutan perusahaan (Idzniah & Bernawati, 2020). Pengukuran komite audit dalam penelitian ini menggunakan ukuran komite audit merujuk pada (Idzniah & Bernawati, 2020; Velte, 2017). Ukuran komite audit diperoleh dari jumlah total anggota komite audit dalam satu periode pelaporan. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai dampak ukuran komite audit terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan. Semakin besar ukuran komite, semakin tinggi kemampuan pengawasan terhadap manajemen, namun juga dapat menciptakan dinamika yang memengaruhi efektivitas pengawasan (Idzniah & Bernawati, 2020).

#### e) Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan dari luar perusahaan yang bertugas memastikan objektivitas dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam proses pengawasan tata kelola perusahaan (Khan & Nuryanah, 2023; Tandean & Winnie, 2016). Mereka ditunjuk dari luar perusahaan untuk memastikan objektivitas dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengawasan manajemen. Komisaris independen diperlukan untuk mengurangi kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Joni *et al.*, 2020). Selain itu, kehadiran komisaris independen membantu memastikan bahwa keputusan dewan tidak hanya menguntungkan pemilik yang dominan (Khan & Nuryanah, 2023).

Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan merujuk pada Khan & Nuryanah (2023); Nasih *et al.* (2020); Primasari (2019), yaitu proporsi anggota komisaris independen terhadap jumlah total anggota dewan. Pengukuran ini penting untuk menilai kemampuan dewan komisaris dalam menjaga independensi, mengurangi risiko pengambilan keputusan yang tidak etis, dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terlindungi. Sebagai pihak yang tidak terlibat dalam operasional harian, komisaris independen cenderung lebih objektif dalam menilai kebijakan dan keputusan manajemen serta memberikan pandangan yang netral. Hal ini membantu perusahaan

menghindari konflik kepentingan yang merugikan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

**Tabel 3.2. Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Keberlanjutan Perusahaan	Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan tanpa mengorbankan kebutuhan pemangku kepentingan di masa depan (Dyllick & Hockerts, 2002)	skor ESG (Jarboui <i>et al.</i> , 2020)	Interval
Agresivitas pajak	Semua aktivitas pengurangan pembayaran pajak baik melalui perencanaan pajak legal maupun ilegal (Frank <i>et al.</i> , 2009)	Diskresi atas beda permanen antara laba akuntansi dan laba fiskal / <i>Discretionary permanent difference (DTAX)</i> , ((Frank <i>et al.</i> , 2009)	Rasio
Koneksi politik	Anggota dewan komisaris perusahaan yang juga menempati posisi jabatan di pemerintahan atau di bidang kemiliteran, baik pada masa saat ini atau masa lalu (Joni <i>et al.</i> , 2020)	<i>Dummy</i> : 1 = ada koneksi politik, 0 = tidak ada koneksi politik (Faccio, 2006)	Nominal ( <i>dummy</i> )
Pertumbuhan pendapatan	Perubahan penjualan atau pendapatan suatu perusahaan dalam periode tertentu (Kücher <i>et al.</i> , 2020).	$\frac{\text{pendapatan } t - \text{pendapatan } t-1}{\text{pendapatan } t-1}$ (Bodhanwala & Bodhanwala, 2018).	Rasio
Kualitas audit	Tingkat keandalan audit atas laporan keuangan (DeAngelo, 1981).	<i>Dummy</i> (1=diaudit oleh big four, 0 = bukan big four) (Bacha <i>et al.</i> , 2021).	Nominal ( <i>dummy</i> )
Umur Perusahaan	Lamanya suatu Perusahaan beroperasi (Kücher <i>et al.</i> , 2020)	Tahun penelitian – tahun pendirian (Kücher <i>et al.</i> , 2020)	Rasio
Komite audit	Bagian dari dewan komisaris dan bertanggung jawab memastikan	Jumlah komite audit (Idzniah & Bernawati, 2020; Velte, 2017)	Rasio

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
	keakuratan, transparansi, dan integritas laporan keuangan (Velte, 2017).		
Komisaris Independen	Anggota dewan dari luar perusahaan yang bertugas memastikan objektivitas dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam proses pengawasan tata kelola perusahaan (Khan & Nuryanah, 2023; Tandean & Winnie, 2016)	jumlah komisaris independen / jumlah anggota dewan kom (Khan & Nuryanah, 2023; Nasih <i>et al.</i> , 2020); Primasari, 2019)	Rasio

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Sumber-sumber data dokumentasi seperti laporan tahunan perusahaan menjadi sampel penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder ini sumbernya berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh melalui *website* (BEI), *bloomberg*, laman KPU RI, media terpercaya dan dari *website* resmi masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji

interaksi. Alasan menggunakan uji interaksi ini karena terdapat variabel moderating dalam riset ini. Aplikasi yang digunakan adalah STATA 17.0, yaitu salah satu program statistik yang memiliki fitur lengkap dalam melakukan pengolahan data. Persamaan yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Keberlanjutan perusahaan}_{it} = & a + b_1 \text{ agresivitas pajak}_{it} + b_2 \\ & \text{koneksi politik}_{it} + b_3 \text{ agresivitas pajak}_{it} * \text{koneksi politik}_{it} + \\ & b_4 \text{ pertumbuhan pendapatan}_{it} + \\ & b_5 \text{ kualitas audit}_{it} + b_6 \text{ umur perusahaan}_{it} + b_7 \text{ komite audit}_{it} + \\ & b_8 \text{ komisaris independen}_{it} + \epsilon \end{aligned}$$

### 3.6. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan ringkasan data melalui ukuran-ukuran seperti rata-rata (*mean*) — kecuali pada data berskala nominal — serta standar deviasi, varians, nilai maksimum, dan nilai minimum. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data, memberikan gambaran umum tentang distribusi variabel dalam dataset. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian dilakukan pada variabel keberlanjutan perusahaan, agresivitas pajak, koneksi politik, pertumbuhan pendapatan, umur perusahaan, komite audit dan komisaris independen. Variabel koneksi politik dan kualitas audit tidak dianalisis menggunakan ukuran rata-rata atau standar deviasi karena keduanya merupakan variabel *dummy* yang bersifat kategorikal, dengan nilai 0 atau 1 untuk merepresentasikan atribut tertentu. Oleh karena itu, deskripsi untuk kedua variabel tersebut disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi.

### 3.7. Uji Pemilihan Model Penelitian

Riset ini didahului dengan uji pemilihan model, yang merupakan langkah penting dalam pengujian menggunakan data panel. Terdapat tiga model yang umum digunakan dalam analisis data panel. Ketiga model tersebut adalah *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM). Dibutuhkan serangkaian uji statistik untuk memilih model yang paling tepat.

Uji Chow digunakan untuk memilih antara CEM dan FEM. Uji ini menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara model efek tetap dan model efek komunal. Jika hasil uji Chow menunjukkan bahwa *p-value* (*probability*) lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05), maka model FEM lebih tepat digunakan. Uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM. Uji ini menguji apakah estimasi koefisien model FEM dan model REM menghasilkan hasil yang berbeda secara signifikan. Jika hasil uji Hausman menunjukkan nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka FEM lebih tepat digunakan karena menunjukkan bahwa variasi antar entitas lebih baik diukur sebagai perbedaan tetap, bukan acak. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara CEM dan REM. Uji ini menguji apakah model efek acak (REM) lebih baik dibandingkan dengan model efek komunal (CEM). Jika hasil uji LM menunjukkan bahwa *p-value* lebih kecil dari 0,05, maka model REM lebih tepat digunakan karena dapat memanfaatkan variasi acak antar entitas. Pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data dan tujuan penelitian.

### 3.8. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi data panel, uji asumsi klasik adalah langkah penting untuk memastikan validitas hasil. Berikut adalah uji asumsi klasik dalam riset ini:

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah data dari variabel independen dan dependen dalam model regresi berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Analisis ini menggunakan Shapiro-Wilk *W test* sebagai alat uji Normalitas. Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis nol bahwa sampel data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusannya, jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (*p-value*) yang lebih besar 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang berarti data dapat dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hipotesis nol ditolak, dan data dianggap tidak normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Analisis ini mengacu pada dua indikator utama, yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi. Suatu model dinyatakan bebas multikolinearitas jika nilai toleransi kurang dari 0.10 atau 10%, yang mengindikasikan tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali, 2018).

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang homoskedastisitas. Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas riset ini menggunakan uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg. Uji ini merupakan *generalized test* yang mengandalkan regresi terhadap kuadrat dari residual model pertama, yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah varians residual bergantung pada variabel independen dalam model regresi. Perintah ini menguji hipotesis nol bahwa varians residual adalah konstan (homoskedastisitas), melawan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Hasil dari uji ini biasanya disajikan dalam bentuk statistik uji dengan nilai *p-value* yang menunjukkan tingkat signifikansi uji. Jika nilai *p-value* yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan (misalnya, 0,05), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa terdapat bukti yang signifikan untuk heteroskedastisitas dalam model regresi yang diuji. Sebaliknya, jika *p-value* lebih besar dari 0,05, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, dan dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi menggunakan Wooldridge *test* adalah metode yang sering digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dalam data panel, terutama ketika menguji apakah *error* dari model regresi memiliki korelasi antar waktu. Pada Stata, Wooldridge *test* sangat bermanfaat karena tidak memerlukan asumsi khusus mengenai distribusi *error*. Hasil dari Wooldridge test akan diperoleh nilai p. Jika nilai p kurang dari 0,05, ini menunjukkan bahwa ada autokorelasi dalam residual model, yang berarti model regresi mungkin memerlukan penyesuaian untuk

mengatasi masalah ini, seperti menggunakan model yang memperhitungkan korelasi serial atau memperbaiki spesifikasi model. Uji ini memberikan cara yang sederhana namun efektif untuk memastikan bahwa analisis data panel bebas dari autokorelasi, sehingga hasil estimasi menjadi lebih robust dan dapat diandalkan.

### 3.9. Uji Regresi

#### a. Uji F

Uji statistik F bertujuan untuk mengevaluasi apakah model yang dibangun fit untuk menjelaskan pengaruh variabel dependen. Uji ini menguji hipotesis nol bahwa semua koefisien regresi (kecuali intersep) sama dengan nol secara simultan. Jika nilai signifikansi ( $\text{Prob} > F$  atau  $\text{Prob} > \chi^2$ ) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan (misalnya 0,05), maka hipotesis nol ditolak. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya, secara statistik dapat disimpulkan bahwa variabel independen fit sebagai prediktor atas variabel dependen.

#### b. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menganalisis perbedaan nilai rata-rata suatu variabel antara dua kelompok atau lebih guna menentukan signifikansi statistik perbedaan tersebut. Pada dasarnya, uji t mengukur sejauh mana sebuah variabel independen secara terpisah mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Dalam pengujian ini, hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa parameter sama dengan nol, yang berarti variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### c. Analisis *Adjusted R<sup>2</sup>*

Analisis ini bertujuan mengevaluasi tingkat akurasi model regresi melalui nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* digunakan untuk mengukur proporsi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. *Adjusted R<sup>2</sup>* menunjukkan persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak termasuk dalam analisis.

Nilai koefisien *adjusted R<sup>2</sup>* berkisar antara nol dan satu. *Adjusted R<sup>2</sup>* yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi dari variabel dependen. Sebaliknya, *adjusted R<sup>2</sup>* yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa variabel independen dapat menjelaskan hampir seluruh variasi yang terjadi pada variabel dependen.

### 3.10. Uji Sensitivitas

Uji pengaruh antara agresivitas perusahaan terhadap keberlanjutan perusahaan dengan koneksi politik sebagai variabel moderating perlu diperkuat. Salah satunya dengan melakukan uji sensitivitas atau pemeriksaan kekokohan (*robustness*) pada hasil penelitian. Uji sensitivitas dalam riset ini dilakukan dengan lima pendekatan. Pertama, dilakukan kontrol terhadap tingkat utang perusahaan diukur menggunakan *logaritma natural* dari total liabilitas (kewajiban) mengikuti metode (Chen *et al.*, 2022). Kedua, sampel perusahaan dengan komite audit kurang

dari tiga orang dikeluarkan untuk meminimalkan bias tata kelola. Ketiga, agresivitas pajak diukur ulang menggunakan pendekatan *book-tax differences* (BTD). Keempat, agresivitas pajak dihitung dengan menggunakan indikator *effective tax rate* (ETR) sebagai alternatif pengukuran. Terakhir, dilakukan analisis komparatif antara periode sebelum pandemi (2017-2019) dan periode pandemi COVID-19 (2020-2022) untuk menguji stabilitas hubungan variabel dalam kondisi makroekonomi yang berbeda secara signifikan.

Perusahaan dengan tingkat utang tinggi cenderung lebih agresif dalam pengelolaan pajak untuk mengurangi beban keuangan (Richardson *et al.*, 2013). Namun, utang yang berlebihan dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam praktik keberlanjutan (Gillan *et al.*, 2021). Selain itu, utang diasosiasikan dengan risiko finansial, di mana utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan menurunkan penilaian investor (Rudyanto & Pirzada, 2021). Dalam konteks Indonesia, utang sering dipersepsikan sebagai beban daripada strategi efisiensi, terutama jika tidak diimbangi dengan penghematan pajak yang optimal.

Hubungan utang dengan agresivitas pajak bersifat kompleks. Frank *et al.* (2009) menjelaskan bahwa utang dapat berperan sebagai pengganti *tax sheltering* sekaligus mencerminkan profil perusahaan yang lebih agresif secara fiskal. Namun, efeknya tergantung pada sudut pandang model—apakah utang bersifat substitusi atau komplementer terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, perusahaan dengan koneksi politik mungkin memiliki akses lebih mudah ke pendanaan, sehingga tingkat utangnya relatif lebih rendah. Namun, utang juga dapat berfungsi sebagai

alat pendisiplinan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, kontrol terhadap utang diperlukan agar tidak mengganggu interpretasi efek moderasi koneksi politik. Uji sensitivitas ini penting untuk memahami bagaimana agresivitas perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan berpengaruh terhadap keberlanjutan, terutama dengan adanya koneksi politik yang memoderasi hubungan tersebut.

Uji sensitivitas kedua didasarkan pada aturan POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mewajibkan perusahaan minimal memiliki tiga orang komite audit. Pendekatan ini memenuhi tiga kriteria: (1) kesesuaian regulasi dengan memastikan sampel hanya terdiri dari perusahaan patuh; (2) pertimbangan tata kelola dimana jumlah anggota memadai menjamin efektivitas pengawasan dan independensi; serta (3) peningkatan validitas metodologis melalui minimasi bias. Komite audit yang memadai tidak hanya penting untuk audit keuangan tetapi juga kredibilitas laporan keberlanjutan (Zaman *et al.*, 2021). Uji sensitivitas ini penting karena ketidakpatuhan terhadap aturan minimal jumlah komite audit berpotensi menimbulkan bias tata kelola. Dengan mengeksklusi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan, analisis menjadi lebih valid dan temuan yang dihasilkan tidak terkontaminasi oleh praktik tata kelola yang lemah, sehingga meningkatkan kekokohan dan kredibilitas kesimpulan penelitian.

Uji sensitivitas ketiga dilakukan dengan mengukur ulang agresivitas pajak menggunakan pendekatan *book-tax differences* (BTD). Ukuran ini dipilih karena mampu menangkap perbedaan sistematis antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang sering kali mencerminkan praktik manajemen pajak agresif, sehingga

memberikan perspektif alternatif atas pengukuran utama. Sementara itu, uji sensitivitas keempat menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai ukuran agresivitas pajak. Penggunaan ETR didasarkan pada pertimbangan bahwa tarif pajak efektif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak nominal dapat mengindikasikan adanya strategi penghindaran pajak yang konsisten. Dengan demikian, penggunaan BTD dan ETR sebagai ukuran alternatif dimaksudkan untuk meminimalkan potensi bias pengukuran, memastikan bahwa hasil penelitian tidak bergantung pada satu metode tertentu, serta memperkuat validitas kesimpulan yang diperoleh.

Uji sensitivitas terakhir dirancang untuk mengisolasi pengaruh guncangan makroekonomi eksternal terhadap hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Terdapat tiga alasan pemilihan periode pandemi sebagai konteks uji sensitivitas. Pertama, perbedaan signifikan dalam kondisi ekonomi, di mana Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,07% pada 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020), berbanding dengan pertumbuhan rata-rata 5% pada periode 2017–2019. Kedua, perubahan regulasi selama pandemi, termasuk pemberian insentif pajak (PMK No. 23/2020) dan relaksasi pelaporan keberlanjutan (POJK No. 51/2017), yang berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan. Ketiga, tingginya volatilitas pasar, tercermin dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 37% pada Maret 2020, yang mengindikasikan ketidakpastian ekonomi yang ekstrem (Indonesia Stock Exchange, 2020). Dengan membandingkan kedua periode ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji ketahanan (*robustness*) hubungan antar variabel dalam menghadapi kondisi makroekonomi yang berfluktuasi secara drastis.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Pemilihan Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian dilakukan dengan cermat untuk memastikan validitas dan keandalan hasil yang diperoleh. Sampel yang digunakan berasal dari perusahaan yang memiliki skor ESG yang tercatat dalam database Bloomberg dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2017-2022. Adapun pengamatan sampel dilakukan dari tahun 2016-2022 dikarenakan terdapat beberapa variabel yang dalam perhitungannya memerlukan data pada tahun sebelumnya. Proses pemilihan sampel dilakukan melalui beberapa tahap seleksi yang sistematis berdasarkan tabel 4.1 di bawah ini.

**Tabel 4.1. Kriteria Seleksi dan Jumlah Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah observasi
1. Perusahaan yang memiliki skor ESG pada tahun 2017-2022	537
2. Perusahaan dari entitas yang melakukan IPO pada tahun penelitian	(100)
3. Perusahaan pada tahun penelitian mengalami rugi atau suspensi	(129)
Total sampel yang digunakan	308

Sumber: Data diolah (2025)

Tahap pertama dalam proses pemilihan sampel adalah mengidentifikasi perusahaan yang memiliki skor ESG yang tersedia di Bloomberg. Dari tahun 2017-2022 perusahaan yang terdaftar di BEI, hanya 110 perusahaan yang memiliki skor ESG, namun tidak semua perusahaan konsisten. Tercatat hanya 537 observasi yang memiliki skor ESG dari tahun 2017-2022. Selanjutnya, 100 observasi dari entitas yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun penelitian dikeluarkan.

Tahapan seleksi berikutnya adalah mengeliminasi 129 observasi dari entitas yang mengalami kerugian atau disuspensi. Setelah menerapkan seluruh kriteria seleksi, maka jumlah total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 308 observasi.

#### 4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum data dalam penelitian. Pada tabel 4.2 tampak hasil pengujian statistik deskriptif. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, terdapat beberapa temuan penting yang menggambarkan karakteristik data pada masing-masing variabel yang dianalisis.

**Tabel 4.2. Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Deviasi		Minimal	Maksimal	Distribusi frekuensi
	Rata-rata	standar			
Keberlanjutan perusahaan	40,97	11,26	16,55	70,16	
Agresivitas pajak	-7,33E-20	0,08	-0,61	0,38	
Pertumbuhan pendapatan	0,36	1,83	-0,93	22,38	
Umur perusahaan	28,03	14,07	7	110	
Komite audit	3,29	0,65	2	8	
Komisaris independen	0,43	0,13	0,13	0,75	
Koneksi politik					0=164 (53,25%)
					1=144 (46,75%)
Kualitas audit					0=219 (71,10%)
					1 = 89 (28,90%)

Sumber: Data diolah (2025)

Statistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan karakteristik sampel yang terdiri dari 308 observasi. Keberlanjutan perusahaan memiliki rata-rata sebesar 40,97 dengan deviasi standar 11,26, menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan dalam sampel memiliki tingkat keberlanjutan yang moderat dengan variasi yang tidak terlalu tinggi. Nilai minimal keberlanjutan perusahaan tercatat sebesar 16,55, yang dimiliki oleh PT Ricky Putra Globalind (RICY) tahun 2017, sedangkan nilai maksimalnya mencapai 70,16, dimiliki oleh PT Megapolitan

Developments (EMDE) tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan perusahaan cukup bervariasi, dengan beberapa perusahaan seperti EMDE di tahun 2021 memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan perusahaan seperti RICY pada tahun 2017.

Sementara itu, agresivitas pajak memiliki rata-rata yang mendekati nol ( $-7,33E-20$ ) dengan deviasi standar sebesar 0,08. Nilai minimal agresivitas pajak adalah -0,61, dimiliki oleh PT Bank Permata (BNLI), dan nilai maksimalnya adalah 0,38, dimiliki oleh PT Timah (TINS). Analisis data menunjukkan bahwa selama periode 2017-2022, perusahaan dengan praktik agresivitas pajak negatif lebih dominan (177 kasus) dibandingkan agresivitas pajak positif (131 kasus). Tren tahunan mengungkapkan pada 2017-2020, perusahaan cenderung tidak agresif dalam pajak. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada 2021 dimana perusahaan dengan agresivitas pajak positif mencapai angka tertinggi (31 perusahaan), mungkin dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang mendorong optimalisasi pajak.

Meskipun tren tahunan selama 2017–2020 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan tidak agresif dalam praktik pajak—dengan dominasi praktik agresivitas pajak negatif—tujuan penelitian ini tetap relevan untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan, karena variasi praktik perpajakan tetap ada dan menunjukkan dinamika yang berarti dalam konteks bisnis dan kebijakan. Data menunjukkan bahwa meskipun rata-rata agresivitas pajak mendekati nol, terdapat sebaran yang cukup lebar antara nilai minimum (-0,61) dan maksimum (0,38), serta lonjakan praktik agresif secara positif pada tahun 2021, yang kemungkinan dipengaruhi oleh strategi perusahaan dalam menghadapi

tekanan ekonomi akibat pandemi. Artinya, terdapat kelompok perusahaan yang tetap melakukan praktik agresif secara signifikan, dan inilah yang menjadi fokus analisis dampaknya terhadap keberlanjutan. Dengan demikian, keberadaan variasi dan pola agresivitas pajak selama periode 2017–2022 memberikan dasar empirik yang cukup kuat untuk menganalisis bagaimana strategi pajak yang berbeda berdampak terhadap dan keberlanjutan perusahaan.

Pertumbuhan pendapatan perusahaan memiliki rata-rata sebesar 0,36 dengan deviasi standar yang cukup tinggi, yaitu 1,83. Nilai minimal pertumbuhan pendapatan adalah -0,93, dimiliki oleh PT Darmi Bersaudara (KAYU) tahun 2021, yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan pada perusahaan tersebut. Sementara itu, nilai maksimalnya mencapai 22,38, dimiliki oleh PT Mitra Komunikasi Nusantara (MKNT) tahun 2017, menandakan adanya pertumbuhan yang sangat signifikan pada perusahaan tersebut.

Umur perusahaan rata-rata adalah 28,03 tahun dengan deviasi standar 14,07. Umur perusahaan bervariasi dari yang termuda, yaitu 7 tahun, dimiliki oleh PT Bali Bintang Sejahtera (BOLA) tahun 2021 dan PT Soechi Lines (SOCI) tahun 2017, hingga yang tertua, yaitu 110 tahun, dimiliki oleh PT Bakrie Sumatera Plantations (UNSP) tahun 2021. Hal ini mencerminkan keberagaman usia perusahaan dalam sampel yang dianalisis, dengan beberapa perusahaan seperti UNSP yang telah beroperasi lebih dari satu abad.

Komite audit memiliki rata-rata sebesar 3,29 anggota dengan deviasi standar 0,65. Jumlah anggota komite audit berkisar antara minimal 2 (dua) orang, dan maksimal 8 orang. Perusahaan dengan komite audit 2 dimiliki oleh PT

Megapolitan Developments (EMDE) tahun 2018 dan 2017, PT Hotel Mandarine Regency (HOME) tahun 2017, PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) tahun 2017, dan PT Bank Ganesha (BGTG) tahun 2017. Sedangkan perusahaan yang memiliki komite audit 8 (delapan) orang adalah PT Bank Syariah Indonesia (BRIS) tahun 2021.

Proporsi komisaris independen memiliki nilai minimal 0,13 sampai dengan maksimal 0,75, nilai rata-rata sebesar 0,43 dengan deviasi standar 0,13. Nilai minimum 0,13 dimiliki oleh PT Timah TBK (TINS) tahun 2017. Nilai maksimum 0,75, dimiliki oleh beberapa perusahaan seperti PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (SDRA) tahun 2020, 2019, dan 2018, PT Pyridam Farma (PYFA) tahun 2022, PT Toba Pulp Lestari (INRU) tahun 2021, PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) tahun 2020, 2019, 2018 dan 2017, dan PT Bank Ganesha (BGTG) tahun 2017. Nilai rata-rata mencapai 43%, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, melampaui batas minimum 30% komisaris independen yang diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 dan peraturan BEI.

Koneksi politik dan kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy* (0 = tidak memiliki koneksi, 1 = memiliki koneksi). Koneksi politik menunjukkan distribusi yang cukup seimbang. Sebanyak 164 perusahaan atau 53.25% dari sampel tidak memiliki koneksi politik, sementara 144 perusahaan atau 46.75% memiliki minimal satu anggota dewan yang pernah atau sedang menjabat di pemerintahan atau institusi militer. Kualitas audit, yang diukur berdasarkan penggunaan auditor Big Four (1 = menggunakan Big Four, 0 = bukan Big Four),

hasil menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok. Sebagian besar perusahaan dalam sampel (219 perusahaan atau 71.10%) tidak menggunakan jasa auditor Big Four, sedangkan hanya 89 perusahaan (28.90%) yang menggunakan auditor dari firma Big Four.

### 4.3. Hasil Uji Pemilihan Model

Pemilihan model estimasi yang tepat sangat penting dalam analisis regresi dengan data panel untuk menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan dalam estimasi model regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pengujian pemilihan model dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian uji statistik untuk menentukan model regresi yang paling sesuai dan akurat dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil uji Chow dalam penelitian ini menunjukkan nilai  $\text{Prob} > F = 0,0000$ . Nilai ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam parameter regresi antarentitas. Dengan kata lain, hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam parameter antarentitas ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa *Common Effect Model* (CEM) tidak cocok untuk data ini, dan model yang lebih tepat adalah model dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan demikian, uji Chow mendukung penggunaan FEM untuk analisis data dalam penelitian ini.

Setelah *Fixed Effect Model* dipilih melalui uji Chow, Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Hasil uji Hausman menunjukkan nilai  $\text{Prob} > F = 0,0000$ , yang juga lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ), yang menyatakan bahwa REM lebih tepat, ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, sehingga FEM dipilih sebagai model yang paling sesuai. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk membandingkan REM dan CEM, apabila hasil uji Chow dan uji Hausman bertolak belakang. Namun, dikarenakan uji Chow dan Hausman menunjukkan hasil yang sama yaitu terpilih model FEM, maka uji LM tidak perlu dilakukan. Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, disimpulkan bahwa FEM merupakan model yang tepat. Ringkasan uji pemilihan model terdapat pada tabel 4.3, sedangkan untuk pengujian terperinci terdapat dalam lampiran.

**Tabel 4.3. Uji Pemilihan Model**

Uji	Probability	Model Terpilih
Uji Chow	0,00	FEM
Uji Hausman	0,00	FEM

Sumber: Data diolah (2025)

#### 4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi data panel, uji asumsi klasik adalah langkah penting untuk memastikan validitas hasil. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut Adalah ringkasan dan uraian hasil uji asumsi klasik:

**Tabel 4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik**

<b>Uji</b>	<b>Prob</b>	<b>VIF</b>	<b>1/VIF</b>	<b>Kesimpulan</b>
Normalitas	0,0820			Residual normal
Multikolinearitas				
Agresivitas pajak		2,11	0,474	
Koneksi politik		1,12	0,895	
Pertumbuhan pendapatan		1,02	0,980	Tidak ada masalah
Kualitas audit		1,13	0,882	multikolinearitas
Umur perusahaan		1,02	0,980	
Komite audit		1,12	0,892	
Komisaris independent		1,05	0,953	
				Tidak ada
Heteroskedastisitas	0,1501			heteroskedastisitas
Autokorelasi	0,0000			Ada autokorelasi

Sumber: Data diolah (2025)

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dalam riset ini digunakan untuk memverifikasi apakah data yang digunakan dalam model terdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam riset ini menggunakan Shapiro-Wilk test. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk pada residual menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0820, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi normalitas dalam analisis regresi. Dengan demikian, model yang digunakan dapat dianggap valid untuk pengujian hipotesis secara parametrik.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa model regresi yang dianalisis tidak mengalami masalah multikolinearitas yang signifikan. Semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari ambang batas yang umum digunakan yaitu

10, dengan (rentang 1,02–2,14) dan nilai  $1/VIF$  lebih besar dari 0,1, dengan rata-rata VIF 1,34. Dengan demikian, koefisien regresi yang dihasilkan dari model ini dapat dianggap stabil dan dapat diinterpretasikan dengan baik tanpa khawatir adanya distorsi yang disebabkan oleh multikolinearitas. Ini berarti bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dievaluasi dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, karena risiko variabel independen yang saling berinteraksi secara linear dengan kuat telah diminimalkan.

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa apakah varian residual dalam model regresi konstan di seluruh rentang nilai prediksi. Dalam analisis ini, uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Uji ini mengasumsikan bahwa *error terms* berdistribusi normal dan memeriksa apakah varians residual berubah seiring dengan perubahan nilai prediksi dari model.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,1501, karena probabilitas ini jauh di atas ambang batas umum 0,05, maka tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Disimpulkan bahwa tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Ini berarti bahwa varians residual dianggap konstan di seluruh tingkat nilai prediksi, sehingga model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Wooldridge test. Hasil pengujian menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,0000. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa ada indikasi yang sangat kuat bahwa model ini mengalami autokorelasi. Permasalahan autokorelasi dapat menyebabkan bias dalam perhitungan *standar error* OLS, sehingga pengujian statistik (seperti *t-test* dan *F-test*) menjadi tidak valid.

Hasil uji asumsi klasik yang ditunjukkan pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa terjadi masalah BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), khususnya terkait autokorelasi. Untuk mengatasi masalah autokorelasi tersebut dilakukan koreksi menggunakan metode *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS). FGLS mengatasi masalah ini dengan memperkirakan matriks kovarian residual, menghasilkan *standar error* yang lebih akurat dan valid untuk pengujian statistik. Setelah dilakukan koreksi dengan FGLS, hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi, artinya asumsi *no autocorrelation* terpenuhi, berdasarkan output FGLS yang menyatakan "*Correlation: no autocorrelation*" hasil uji terdapat pada lampiran 2. Maka seluruh asumsi BLUE terpenuhi setelah koreksi FGLS. Oleh karena itu, model FGLS dipilih sebagai analisis regresi utama.

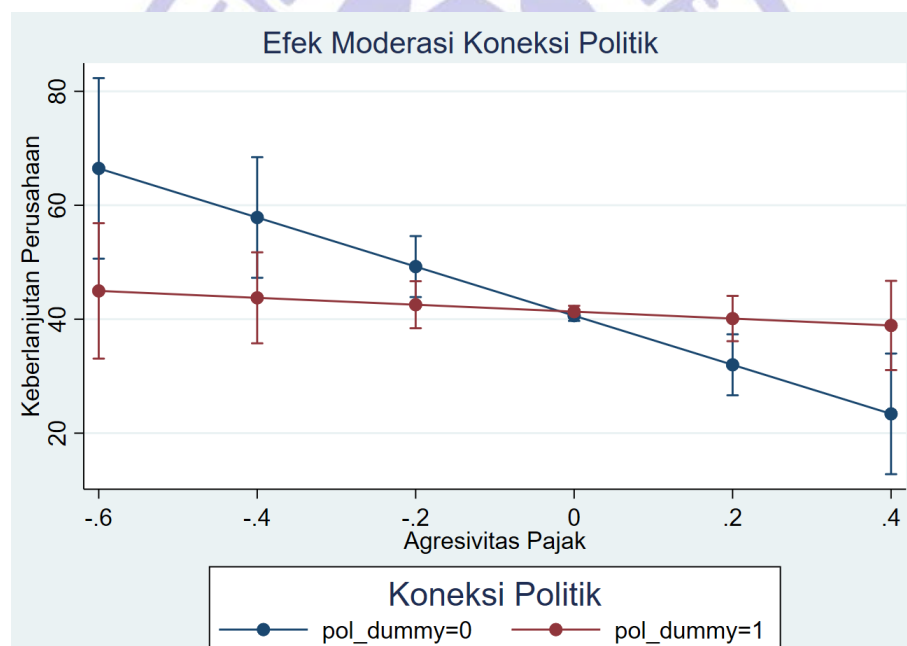
#### **4.5. Hasil Uji Regresi**

Uji regresi dilakukan untuk menganalisis hubungan antara agresivitas pajak, dan interaksi agresivitas pajak dengan koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan. Model FGLS dipilih setelah melalui serangkaian uji asumsi klasik yang menunjukkan adanya masalah autokorelasi, tetapi memenuhi asumsi normalitas, homoskedastisitas dan tidak ada multikolinearitas. Tabel 4.5 merupakan ringkasan dari hasil pengujian penelitian hipotesis yaitu uji F uji *adjusted R<sup>2</sup>* dan uji t.

Tabel 4.5. Uji Hipotesis

	Coefficient	Probability	Hasil
Probability (F-statistic)	0,000		
Adjusted $R^2$	0,482		
Agresivitas pajak	-43,093	0,001	diterima
Koneksi politik	0,709	0,434	
Agresivitas pajak*koneksi politik	37,025	0,029	diterima
Pertumbuhan pendapatan	0,037	0,777	
Kualitas audit	-2,298	0,121	
Umur perusahaan	2,515	0,000	
Komite audit	-1,089	0,242	
Komisaris independent	5,435	0,100	
Konstanta	-41,796	0,000	

Sumber: Data diolah (2025)



Gambar 4.1. Efek Moderasi Koneksi Politik

#### a. Hasil Uji F

Pada tabel 4.5 diperoleh nilai *probability (F-statistic)* sebesar 0,000, menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. *P-value* yang lebih kecil dari 0,05 tersebut mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dapat dipercaya dan cukup baik untuk menjelaskan variabilitas dalam data. Dengan

kata lain, kombinasi variabel agresivitas pajak, koneksi politik, interaksi keduanya, dan variabel kontrol secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap perubahan pada variabel dependen

#### **b. Hasil Uji Hipotesis (t)**

Hasil analisis statistik (tabel 4.5) dan grafik moderasi (gambar 4.1) secara konsisten mendukung kedua hipotesis penelitian. Pertama, temuan menunjukkan bahwa agresivitas pajak mempunyai nilai *p-value* (0,001) dan memiliki nilai koefisien (-43,093). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa agresivitas pajak signifikan pada tingkat 1%, dan koefisien bernilai negatif menunjukkan arah negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa agresivitas pajak berpotensi mengurangi tingkat keberlanjutan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan.

Kedua, hasil analisis interaksi menunjukkan peran penting koneksi politik sebagai variabel pemoderasi. Koefisien interaksi sebesar 37,025 dengan probabilitas sebesar 0,029 mengindikasikan bahwa koneksi politik secara signifikan melemahkan pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Grafik moderasi memperlihatkan perbedaan yang jelas antara perusahaan dengan dan tanpa koneksi politik. Pada perusahaan tanpa koneksi politik (*pol\_dummy* = 0), koefisien agresivitas pajak terhadap keberlanjutan adalah -43,093, yang menunjukkan bahwa peningkatan agresivitas pajak berdampak tajam

terhadap penurunan keberlanjutan perusahaan. Namun, ketika perusahaan memiliki koneksi politik ( $pol\_dummy = 1$ ), efek interaksi sebesar +37,025 akan mengoreksi hubungan tersebut, sehingga kemiringan (*slope*) keseluruhannya menjadi  $(-43,093 + 37,025 = -6,068)$ . Dengan demikian, meskipun hubungan tetap negatif, namun kemiringannya menjadi jauh lebih landai. Hal ini mengindikasikan bahwa koneksi politik mampu memperlemah dampak negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan, yaitu dengan mengurangi tingkat penurunan keberlanjutan yang ditimbulkan oleh praktik agresif dalam perpajakan. Sejalan dengan penjelasan Dawson (2014) dan Hayes (2018), yang menyatakan bahwa tanda positif pada koefisien interaksi menunjukkan efek moderasi yang melemahkan hubungan negatif.

Di antara variabel kontrol, umur perusahaan (koefisien = 2,515; probabilitas = 0,000) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih matang dan memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih berkelanjutan. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan, kualitas audit, ukuran komite audit dan komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan lebih besar dari 10%.

### c. Hasil Uji *Adjusted R<sup>2</sup>*

Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dalam riset ini sebesar 0,482, merupakan nilai yang moderat. Nilai ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 48,2% dari variasi total keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain, hampir separuh variasi keberlanjutan perusahaan dapat diprediksi oleh agresivitas pajak, interaksi antara agresivitas pajak dan koneksi politik, dan variabel kontrol pertumbuhan

pendapatan, kualitas audit, umur perusahaan, komite audit, dan komisaris independen. Sisanya sebesar 51,8% variasi tidak dijelaskan oleh model ini, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

#### 4.6. Hasil Uji Sensitivitas

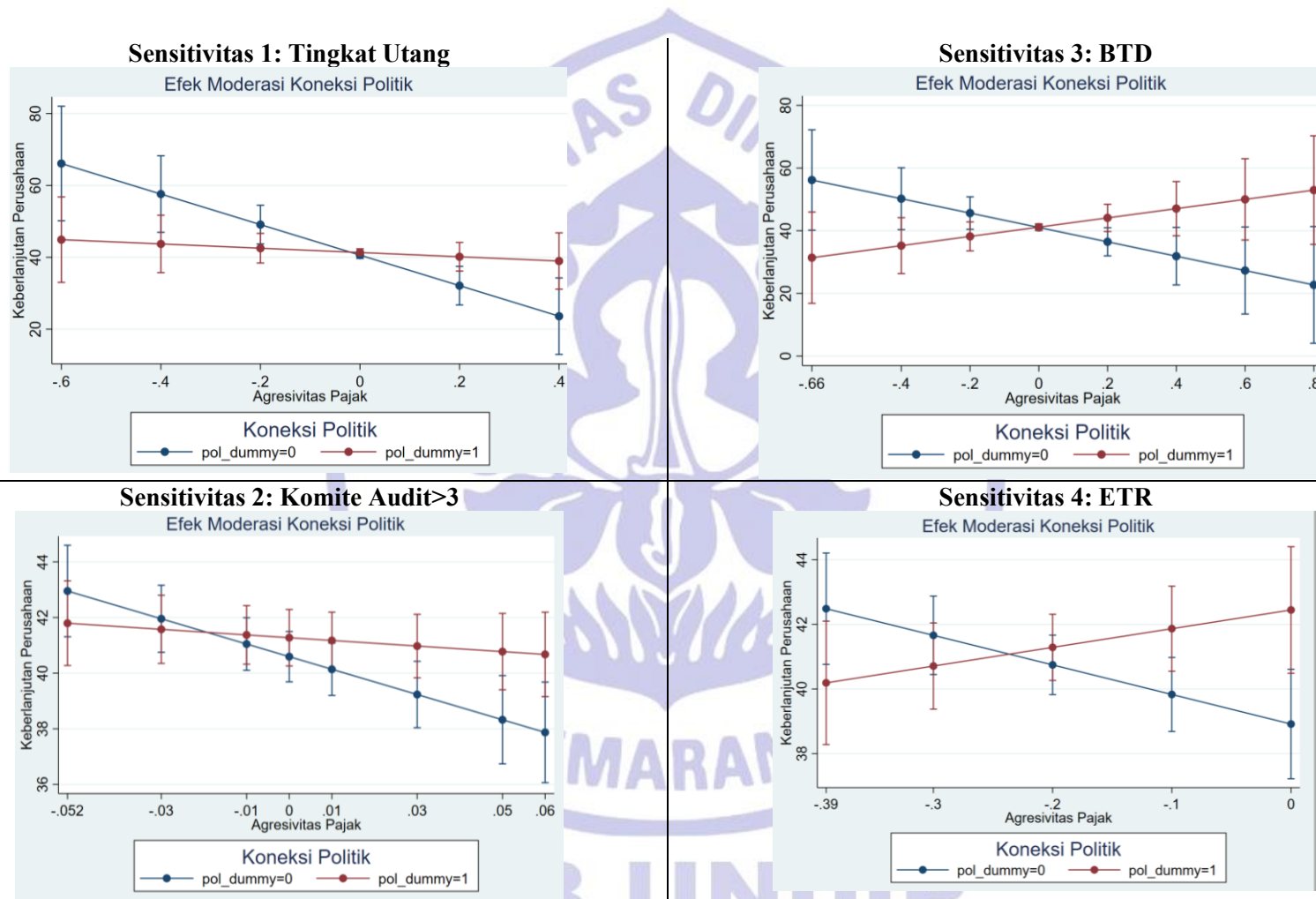
Uji sensitivitas dilakukan untuk menguji kekokohan (*robustness*) hasil penelitian. Uji ini dilakukan melalui lima pendekatan. Pertama, dengan mengontrol dampak tingkat utang perusahaan untuk membandingkan konsistensi hasil uji utama. Kedua, dilakukan pengujian robust dengan mengecualikan sampel perusahaan yang memiliki anggota komite audit kurang dari tiga orang. Uji sensitivitas ketiga, agresivitas pajak diukur ulang menggunakan pendekatan *book-tax differences* (BTD). Keempat, pengukuran agresivitas pajak menggunakan *effective tax rate* (ETR). Terakhir, dilaksanakan uji beda antara periode sebelum pandemi COVID-19 (2017-2019) dengan periode selama pandemi (2020-2022) untuk menguji stabilitas hasil dalam kondisi ekonomi yang berbeda. Hasil seluruh uji sensitivitas secara konsisten mendukung dan memperkuat temuan utama penelitian. Tabel 4.6 berikut adalah rangkuman hasil uji sensitivitas.

FEB UNDIP

Tabel 4.6. Uji Sensitivitas

	Sensitivitas 1 Tingkat Utang		Sensitivitas 2 Komite Audit>3		Sensitivitas 3 BTD		Sensitivitas 4 ETR		Sensitivitas 5 Uji Beda	
	Coef	Prob	Coef	Prob	Coef	Prob	Coef	Prob	Coef	Prob
<i>F-statistic</i>		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Konstanta	-36,296	0,011	-36,985	0,000	-43,990	0,000	-47,128	0,000	0,507	0,951
Agresivitas pajak	-42,480	0,002	-45,364	0,001	-22,924	0,058	-9,1492	0,015	-26,760	0,108
Koneksi politik	0,736	0,418	0,681	0,448	0,964	0,919	3,529	0,010	0,246	0,803
Agresivitas pajak*koneksi politik	36,540	0,031	35,356	0,039	37,692	0,012	14,933	0,006	11,111	0,619
Pertumbuhan pendapatan	0,038	0,774	0,038	0,768	0,030	0,820	0,020	0,879	0,009	0,939
Kualitas audit	-2,235	0,133	-2,801	0,058	2,625	0,079	-2,308	0,121	-2,220	0,109
Umur perusahaan	2,543	0,000	2,442	0,000	2,545	0,000	2,552	0,000	1,184	0,000
Komite audit	-1,086	0,243	-1,933	0,046	-1,006	0,289	-0,896	0,340	-0,619	0,473
Komisaris independent	5,477	0,097	6,533	0,049	4,847	0,222	5,469	0,156	1,980	0,521
Tingkat utang	-0,235	0,666								
Periode									5,377	0,000
Agresivitas pajak*koneksi politik*periode									18,506	0,514
Adjusted $R^2$	0,480		0,487		0,475		0,478		0,557	
Observasi	308		303		308		308		308	

Sumber: Data diolah (2025)



Gambar 4.2. Efek Moderasi Koneksi Politik Uji Sensitivitas

Uji *F-statistic* pada kelima model uji sensitivitas menunjukkan nilai *probability* 0,000. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa kelima model secara keseluruhan sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Nilai *F-statistic* yang konsisten signifikan pada seluruh spesifikasi model membuktikan bahwa model regresi yang dibangun secara keseluruhan telah memenuhi kriteria *goodness of fit*. Kekonsistenan hasil uji F pada semua model (termasuk model utama dan uji sensitivitas) juga menguatkan validitas spesifikasi model yang digunakan.

Dilihat dari segi kesesuaian model, nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* mencapai 0,480 ketika pengujian dilakukan dengan mengontrol dampak tingkat utang perusahaan. Hasil ini berarti model mampu menjelaskan 48% variasi variabel dependen, mengindikasikan bahwa penambahan variabel kontrol (tingkat utang) meskipun tidak signifikan secara statistik ( $p=0,666$ ) dapat meningkatkan daya penjelas model. Ketika pengujian dilakukan dengan mengeluarkan sampel perusahaan yang memiliki anggota komite audit kurang dari tiga diperoleh nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,487. Hal ini menunjukkan bahwa model pengujian dengan mengontrol tingkat utang perusahaan mampu menjelaskan sekitar 48% variasi dalam variabel dependen (keberlanjutan perusahaan).

Penggunaan alternatif pengukuran agresivitas pajak (BTD pada Sensitivitas 3 dan ETR pada Sensitivitas 4) menghasilkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* masing-masing sebesar 0,475 dan 0,478. Nilai tersebut menunjukkan hasil yang relatif stabil dan konsisten, menguatkan validitas temuan utama. Uji beda periode pandemi menghasilkan *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,557, yang menunjukkan bahwa model tetap memiliki daya prediksi yang baik meskipun dalam kondisi ekonomi yang berbeda.

Secara keseluruhan, nilai Adjusted R<sup>2</sup> yang berkisar antara 47,5% hingga 55,7% mencerminkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kekuatan penjelas yang moderat hingga kuat, dengan variabel-variabel independen yang dipilih memberikan kontribusi berarti dalam memprediksi keberlanjutan perusahaan, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi.

Analisis regresi pada uji sensitivitas menunjukkan hasil yang konsisten dengan uji utama. Pada model kontrol tingkat utang, agresivitas pajak memiliki koefisien -42,480 dengan signifikansi 0,002, sementara pada uji sensitivitas dengan mengeluarkan sampel perusahaan yang memiliki anggota komite audit kurang dari tiga, menunjukkan koefisien -45,364 dengan probabilitas 0,001. Ketika agresivitas pajak diukur menggunakan alternatif pengukuran dengan BTD, koefisien tetap negatif sebesar -22,924 namun dengan signifikansi yang menurun ( $p = 0,058$ ), yang menunjukkan hasil signifikan pada tingkat 10%. Sementara itu, ketika diukur dengan ETR, koefisiennya lebih kecil (-9,149) namun tetap signifikan ( $p = 0,015$ ), sehingga tetap mendukung arah hipotesis pertama meskipun dengan tingkat pengaruh yang lebih lemah. Temuan ini secara tegas membuktikan bahwa agresivitas pajak berdampak negatif terhadap keberlanjutan perusahaan.

Interaksi antara agresivitas pajak dan koneksi politik menunjukkan koefisien 36,540, nilai probabilitas 0,031 dalam pengujian dengan mengontrol tingkat utang perusahaan. Sedangkan uji sensitivitas dengan mengeluarkan sampel berkomite audit di bawah tiga orang diperoleh nilai 35,356 dan signifikansi sebesar 0,039. Pada saat agresivitas pajak diukur menggunakan BTD, koefisien interaksi

meningkat menjadi 37,692 dengan signifikansi yang lebih kuat ( $p = 0,012$ ), menunjukkan bahwa efek moderasi koneksi politik tetap konsisten bahkan dengan pendekatan pengukuran yang berbeda. Selanjutnya, dalam uji sensitivitas yang menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak, diperoleh koefisien interaksi sebesar 14,933 dengan nilai probabilitas 0,006. Meskipun nilai koefisiennya lebih rendah dibandingkan model-model sebelumnya, hasil ini tetap signifikan dan mendukung hipotesis bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan.

Gambar 4.2 menunjukkan efek moderasi koneksi politik pada pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan untuk uji sensitivitas. Pada sensitivitas 1 (mengontrol dengan tingkat utang), terlihat garis biru menurun tajam, artinya semakin tinggi agresivitas pajak, keberlanjutan perusahaan semakin rendah. Garis merah lebih landai, menunjukkan bahwa penurunan keberlanjutan akibat agresivitas pajak menjadi jauh lebih kecil pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik mengurangi efek negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Pola serupa terlihat pada uji sensitivitas dengan mengeliminasi komite audit kurang dari tiga. Garis biru (tanpa koneksi politik) tetap menurun tajam, sementara garis merah (dengan koneksi politik) lebih stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tata kelola relatif kuat (ditandai dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak), koneksi politik tetap memberikan perlindungan tambahan terhadap dampak negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan.

Hasil uji sensitivitas ketiga dan keempat yang mengukur agresivitas pajak menggunakan BTD dan ETR menunjukkan pola yang berbeda dengan uji sensitivitas sebelumnya. Pada perusahaan tanpa koneksi politik, agresivitas pajak (dengan proksi BTD dan ETR) tetap berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan. Namun, pada perusahaan dengan koneksi politik, hubungan tersebut justru positif, yang ditunjukkan oleh garis merah yang meningkat seiring kenaikan BTD dan ETR. Hal ini mungkin mencerminkan bahwa BTD dan ETR menangkap bentuk agresivitas pajak yang relatif legal dan strategis, sehingga koneksi politik tidak hanya menetralkan dampak negatif, tetapi juga berpotensi mengubahnya menjadi manfaat keberlanjutan. Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa koneksi politik dapat mengurangi risiko yang melekat pada praktik pajak agresif, baik melalui perlindungan regulasi maupun pengelolaan dampak reputasi. Secara keseluruhan, keempat uji sensitivitas ini memperkuat kesimpulan utama penelitian, yaitu bahwa koneksi politik berperan sebagai faktor moderasi yang melemahkan pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan.

Pengujian pada variabel moderasi menunjukkan variasi hasil. Pertumbuhan pendapatan memiliki nilai koefisien berkisar antara 0,009 hingga 0,038 di seluruh uji sensitivitas, dengan nilai probabilitas antara 0,774–0,939. Artinya uji sensitivitas pada semua model uji mendukung hasil uji utama, bahwa pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. Uji utama pada kualitas audit didukung oleh uji sensitivitas 1 dan 4 yang memiliki koefisien masing (-2,235, -2,308) dan probabilitas masing-masing (0,133 dan

0.121). Hasil pada uji sensitivitas 2 dan 3 memiliki nilai koefisien -2,801 dan 2,625, dengan probabilitas 0,058 dan 0,079 yang tidak mendukung hasil uji utama.

Dari berbagai variabel kontrol yang diuji, umur perusahaan muncul sebagai faktor yang paling konsisten dengan probabilitas 0,000, dan memiliki koefisien positif sebesar 2,543 (sensitivitas 1), 2,442 (sensitivitas 2), 2,545 (sensitivitas 3), 2,552 (sensitivitas 2). Hasil ini memperkuat bukti bahwa perusahaan dengan usia lebih matang cenderung memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik. Sensitivitas hasil pada komite audit tidak didukung oleh semua model. Hasil uji utama didukung oleh uji sensitivitas 1, 3 dan 4 yang memiliki koefisien masing-masing sebesar (-1,086, -1,006, -0,896) dengan nilai probabilitas (0,243, 0,289, 0,340). Hasil uji tidak didukung oleh uji sensitivitas 2 yang memiliki nilai koefisien -1,933 dan probabilitas sebesar 0,046. Hasil tersebut senada dengan kualitas audit.

Uji sensitivitas pada variabel kontrol komisaris independen menunjukkan hasil yang bervariasi. Hasil uji utama didukung oleh uji sensitivitas 3 dan 4 yang memiliki koefisien masing-masing sebesar 4,847 dan 5,469, dengan nilai probabilitas sebesar 0,222 dan 0,156. Sedangkan hasil uji sensitivitas 1 dan 2 tidak mendukung hasil utama dengan koefisien masing-masing sebesar 5,477 dan 6,533 dengan probabilitas sebesar 0,097 dan 0,049.

Hasil uji beda periode tahun 2017-2019 (sebelum pandemi covid) dibandingkan tahun 2020-2022 (selama pandemi covid), menunjukkan nilai koefisien 5,377 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan terdapat peningkatan signifikan 5,377 poin pada skor keberlanjutan perusahaan selama periode pandemi (2020-2022) dibandingkan periode pra-pandemi (2017-2019).

Interaksi periode dengan agresivitas pajak memperoleh nilai koefisien -2,231, dan probabilitas 0,912, hasil tersebut tidak signifikan. Artinya dampak agresivitas pajak terhadap keberlanjutan tidak berubah secara statistik antara 2017-2019 dan 2020-2022. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pandemi tidak meningkatkan atau menurunkan hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan. Interaksi koneksi politik dengan periode memiliki koefisien -0,756, dengan probabilitas 0,394. Hasil tersebut diartikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik tidak menunjukkan perbedaan keberlanjutan yang berarti. Lebih lanjut, interaksi *triple* antara agresivitas pajak koneksi politik dan periode memiliki koefisien 18,506; dengan probabilitas 0,514. Hasil tersebut juga tidak signifikan, sehingga tidak ditemukan bukti bahwa perbedaan masa pra pandemi dan masa pandemi memengaruhi hasil pada penelitian ini.

#### **4.7. Pembahasan**

##### **Analisis Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh negatif terhadap keberlanjutan perusahaan. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang diterapkan oleh perusahaan, semakin rendah tingkat keberlanjutan perusahaan. Hasil tersebut juga didukung oleh uji sensitivitas, baik dengan mengontrol dampak tingkat utang perusahaan, mengecualikan sampel dengan komite audit kurang dari tiga, maupun dengan pengukuran agresivitas pajak menggunakan BTD dan ETR. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak merugikan dari praktik agresivitas pajak bersifat kokoh dan tidak sensitif terhadap perubahan spesifikasi model. Hasil tersebut sesuai

dengan hipotesis yang dibangun dalam riset ini. Secara teoretis, temuan ini dapat diinterpretasikan dalam kerangka teori pemangku kepentingan.

Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lingkungan (Freeman, 1984; Hörisch *et al.*, 2020). Agresivitas pajak dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial perusahaan, namun sering kali bertentangan dengan ekspektasi etika publik dan kewajiban sosial perusahaan. Hal ini berdampak buruk pada hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas, dan konsumen, yang berpotensi merusak kepercayaan dan citra perusahaan di mata publik. Hal ini senada dengan Avi-Yonah (2008); Lanis & Richardson (2013) yang berpandangan bahwa perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak mereka dengan cara yang agresif mungkin dianggap kurang etis oleh pemangku kepentingan, yang dapat mengurangi legitimasi sosial perusahaan (Avi-Yonah, 2008; Lanis & Richardson, 2013).

Secara konseptual, agresivitas pajak mengacu pada semua tindakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui cara-cara yang tidak selalu transparan dan sering kali dianggap tidak etis. Dalam konteks teori pemangku kepentingan, perilaku ini dapat mengakibatkan ketegangan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Ketika perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak yang agresif, mereka dapat dianggap mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap komunitas yang membutuhkan dukungan fiskal untuk pembangunan sosial, pendidikan, atau kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemangku

kepentingan yang merasa dirugikan oleh praktik agresivitas pajak mungkin akan menuntut perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangannya (Bird & Davis-Nozemack, 2018).

Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa strategi pajak yang terlalu agresif dapat mengurangi keberlanjutan perusahaan karena tidak hanya meningkatkan risiko regulasi tetapi juga memperburuk persepsi pemangku kepentingan. Menurut Rudyanto *et al.* (2021), agresivitas pajak yang tinggi cenderung memperburuk kesejahteraan berkelanjutan masyarakat, terutama di negara-negara di mana alokasi pajak tidak efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan investor, semakin menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik bisnis mereka. Dalam konteks ini, penghindaran pajak yang agresif dapat dilihat sebagai pengabaian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan jangka panjangnya.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung pandangan bahwa agresivitas pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya justru dapat meningkatkan risiko reputasi bagi perusahaan. Menurut Kristiadi *et al.* (2020), perusahaan yang mengutamakan keuntungan jangka pendek melalui penghindaran pajak sering kali menghadapi kritik dari publik dan media, yang memperburuk hubungan perusahaan dengan masyarakat. Ketika praktik penghindaran pajak perusahaan diketahui publik, ini bisa memicu reaksi negatif dari pemangku kepentingan, termasuk regulator yang mungkin meningkatkan pengawasan dan memperketat regulasi pajak untuk perusahaan tersebut.

Agresivitas pajak di kalangan korporasi menjadi perhatian utama bagi badan regulasi, terutama karena dampaknya terhadap kepatuhan pajak, pengawasan audit, dan potensi penalti. Literatur menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam strategi pajak agresif sering dianggap sebagai entitas berisiko tinggi oleh otoritas pajak, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka diaudit. Jin *et al.* (2022), misalnya, menunjukkan korelasi positif antara agresivitas pajak perusahaan dan probabilitas audit, di mana otoritas pajak memfokuskan sumber dayanya pada perusahaan dengan praktik pajak yang berisiko. Peningkatan pengawasan ini secara signifikan dapat mengalihkan sumber daya perusahaan dari operasi inti, karena mereka harus mengalokasikan waktu dan personel untuk menangani audit dan investigasi, yang memakan waktu dan biaya.

Lebih jauh, dampak finansial dari agresivitas pajak melampaui biaya langsung audit. Perusahaan yang diketahui melakukan penghindaran pajak agresif sering kali menghadapi penalti substansial, termasuk denda finansial dan kerusakan reputasi. Raithatha & Shaw (2022) mencatat bahwa strategi pajak agresif dapat menyebabkan peningkatan biaya audit, karena auditor harus menilai risiko yang lebih tinggi terkait dengan klien semacam itu. Perusahaan mungkin menanggung biaya yang lebih tinggi dalam bentuk biaya audit dan potensi denda dari otoritas pajak, menekankan risiko finansial yang melekat pada perencanaan pajak agresif (Anggraeni & Hastuti, 2020).

Kasus penghindaran pajak berskala besar juga menggambarkan konsekuensi serius dari strategi pajak agresif. Apple Inc., misalnya, mendapat pengawasan ketat dari Komisi Eropa terkait praktik pajaknya di Irlandia, yang

mengakibatkan tuntutan pembayaran pajak tertunggak sebesar €13 miliar karena bantuan negara ilegal (Wahab & Holland, 2012). Demikian pula, Google telah menghadapi berbagai investigasi dan penalti terkait praktik pajaknya, termasuk penyelesaian besar dengan *Internal Revenue Service* Amerika Serikat (Boone *et al.*, 2013). Kasus-kasus ini menunjukkan risiko yang terkait dengan penghindaran pajak, serta potensi dampak finansial besar, termasuk kerusakan reputasi yang dapat memengaruhi posisi pasar dan kepercayaan konsumen.

Dampak dari penghindaran pajak mampu melampaui perusahaan dan berdampak pada pendapatan publik serta kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan secara signifikan dapat merusak anggaran pemerintah, yang berakibat pada penurunan layanan publik dan peningkatan beban pajak bagi wajib pajak yang patuh (Suwito *et al.*, 2023). Harjito *et al.* (2017) menekankan pentingnya kerangka kepatuhan pajak yang kokoh dan penegakan penalti untuk mencegah penghindaran pajak. Interaksi antara tata kelola perusahaan, agresivitas pajak, dan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat menekankan pentingnya perusahaan untuk mengadopsi praktik pajak yang bertanggung jawab, yang selaras dengan harapan masyarakat dan persyaratan regulasi.

Agresivitas pajak, yang sering kali melibatkan penghindaran kewajiban pajak, dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak citra perusahaan dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam persepsi keberlanjutan perusahaan, karena pemangku kepentingan mungkin melihat

tindakan agresivitas pajak sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Lanis & Richardson, 2013; Rudyanto *et al.*, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat berdampak negatif terhadap aspek-aspek keberlanjutan perusahaan. Misalnya, penelitian oleh Kristiadi *et al.* (2020) menemukan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara Rudyanto *et al.* (2021) menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat mengurangi kesejahteraan berkelanjutan. Penelitian oleh Shin & Park (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang dikeluarkan dari bursa memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tetap terdaftar. Lebih lanjut, tingkat penghindaran pajak yang tinggi meningkatkan risiko perpajakan dan menurunkan keberlanjutan, yang mengindikasikan bahwa strategi pajak yang agresif dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Sementara itu, Zeng (2016) menyatakan bahwa keberlanjutan berpotensi meningkatkan nilai pasar perusahaan, pengaruh negatif antara agresivitas pajak dan keberlanjutan dapat diartikan bahwa perusahaan dengan strategi pajak agresif sedikit terlibat dalam kegiatan keberlanjutan perusahaan. Studi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih agresif dalam menghindari pajak cenderung memiliki hubungan yang lebih buruk dengan pemangku kepentingan, yang akhirnya mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, antara lain Nasih *et al.* (2024); Mashuri & Ermaya (2020); Fabian *et al.* (2022); Emeka & Ngozi (2022); Lanis & Richardson (2013)); Col & Patel (2019); Sui *et al.* (2019) menyatakan hasil agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap keberlanjutan perusahaan. Hasil tersebut kemungkinan dikarenakan perusahaan menggunakan keberlanjutan perusahaan untuk menutupi dampak negatif dari agresivitas pajak, sehingga tetap dapat mempertahankan reputasi positif meskipun terlibat dalam praktik pajak yang agresif. Sedangkan Vacca *et al.* (2020) dan Nusantari *et al.* (2015) menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan tentang potensi risiko jangka panjang dari penerapan strategi pajak yang terlalu agresif, yang dapat merusak reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara upaya untuk meminimalkan beban pajak dan kebutuhan untuk mempertahankan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Freeman *et al.*, 2021; Hörisch *et al.*, 2020).

### **Analisis Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Hasil uji statistik yang dilakukan dalam riset ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana koneksi politik berperan dalam memoderasi pengaruh antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik mampu memperlemah dampak negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis

kedua yang menyatakan koneksi politik memperlemah pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan diterima.

Hasil uji interaksi agresivitas pajak dan koneksi politik terhadap keberlanjutan perusahaan konsisten pada berbagai uji sensitivitas. Temuan ini tetap stabil dan didukung oleh uji sensitivitas, baik saat mengontrol tingkat utang perusahaan, mengecualikan perusahaan dengan komite audit beranggotakan kurang dari tiga orang, maupun ketika menggunakan pengukuran agresivitas pajak dengan BTD dan ETR. Konsistensi mekanisme moderasi ini semakin terlihat dalam uji komparasi antarperiode (sebelum dan selama pandemi covid-19). Hasil yang tidak signifikan dari interaksi antara periode dengan agresivitas pajak dan koneksi politik menguatkan proposisi bahwa koneksi politik berfungsi sebagai mekanisme yang konsisten dalam meredam dampak negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan, tanpa terpengaruh perubahan kondisi makroekonomi. Stabilitas hasil ini sejalan dengan kerangka teoretis yang menyatakan bahwa akses politik memberikan sumber daya penting bagi perusahaan untuk mengelola risiko regulasi dan reputasi yang timbul dari praktik perencanaan pajak yang agresif, bahkan dalam situasi krisis sekalipun. Hasil ini mendukung pandangan bahwa koneksi politik dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang muncul dari praktik agresivitas pajak.

Koneksi politik mengacu pada hubungan antara para pemimpin perusahaan dengan pejabat pemerintah, yang dapat memengaruhi lingkungan regulasi dan operasional perusahaan. Hillman *et al.* (2009) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang kuat sering kali menerima perlakuan istimewa dari

regulator, yang dapat mencakup keringanan pajak atau perlindungan dari konsekuensi hukum yang biasanya dihadapi oleh perusahaan yang kurang terhubung secara politik. Dalam konteks ini, koneksi politik bertindak sebagai penyangga yang memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dengan strategi pajak yang agresif tanpa mengalami dampak negatif yang signifikan terhadap keberlanjutan mereka.

Faccio, (2006) menekankan prevalensi koneksi politik di kalangan perusahaan dan menggambarkan bagaimana hubungan ini memberikan akses ke sumber daya yang sulit diperoleh. Dengan mengamankan kontrak pemerintah, subsidi, dan persetujuan regulasi yang menguntungkan, perusahaan yang memiliki hubungan politik dapat meningkatkan kapabilitas operasional mereka dan mengalihkan sumber daya dari penghematan pajak ke dalam upaya keberlanjutan, sehingga mengurangi dampak negatif potensial dari strategi pajak agresif terhadap tujuan keberlanjutan (Jiang *et al.*, 2023).

Sejalan dengan premis RDT tentang pengelolaan ketergantungan untuk mendapatkan stabilitas, koneksi politik menawarkan saluran kuat bagi perusahaan untuk memengaruhi kebijakan dan regulasi. Hillman & Hitt (1999) berpendapat bahwa perusahaan merumuskan strategi politik berdasarkan ketergantungan sumber daya mereka, di mana koneksi politik menjadi aset strategis untuk mengadvokasi kebijakan yang menguntungkan. Bagi perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak, hubungan ini memungkinkan mereka untuk membentuk regulasi pajak dengan cara yang mengurangi risiko reputasi dan finansial terkait strategi pajak agresif. Dengan memengaruhi kebijakan pajak agar lebih

menguntungkan, perusahaan dapat mengelola tekanan eksternal yang mungkin menghambat komitmen mereka terhadap keberlanjutan (Wang *et al.*, 2019).

Rudyanto *et al.* (2023), mengungkapkan bahwa koneksi politik perusahaan dapat menyeimbangkan efisiensi pajak dan keberlanjutan dengan memperkuat reputasi mereka melalui komitmen terhadap praktik berkelanjutan. Selain itu, koneksi politik membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan regulasi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengelola agresivitas pajak tanpa mengorbankan komitmen keberlanjutan. (Faisal *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan melalui pengungkapan keberlanjutan, memanfaatkan hubungan politik untuk mempertahankan legitimasi meskipun ada kekhawatiran atas strategi pajak mereka. Nasih *et al.* (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik membantu perusahaan dalam mengelola alokasi sumber daya secara lebih bijak dalam kondisi penegakan regulasi yang lemah. Dengan akses informasi strategis ini, perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat menyesuaikan strategi pajaknya untuk meminimalkan risiko dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk keberlanjutan dan efisiensi pajak.

Koneksi politik memberikan perusahaan akses yang lebih besar ke sumber daya finansial dan informasi, yang dapat mendukung tujuan keberlanjutan mereka. Akses ke hibah pemerintah, perlakuan pajak yang menguntungkan, dan sumber daya keuangan lainnya membantu perusahaan dengan koneksi politik menutupi potensi kerugian finansial dari strategi pajak agresif. Wang *et al.* (2022) menyatakan bahwa koneksi ini dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan

perusahaan, yang memperkuat reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Misalnya, sumber daya tambahan yang diperoleh melalui koneksi politik dapat diarahkan ke program CSR yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan citra positif yang menutupi potensi reaksi negatif terhadap praktik pajak agresif. Akibatnya, perusahaan dengan koneksi politik dapat menyeimbangkan keuntungan finansial dari strategi pajak dengan manfaat reputasi dari upaya CSR, sehingga mempertahankan citra positif meskipun melakukan perencanaan pajak yang agresif.

Perusahaan yang terhubung secara politik sering kali lebih aktif dalam inisiatif keberlanjutan perusahaan, yang dapat menutupi persepsi negatif yang terkait dengan agresivitas pajak. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap CSR, perusahaan ini dapat meningkatkan reputasi mereka dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, sehingga mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang mereka (Li *et al.*, 2022; Saraswati *et al.*, 2020). Keberlanjutan perusahaan memungkinkan perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk menunjukkan kontribusi mereka kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai penyeimbang bagi agresivitas pajak. Dinamika ini menciptakan narasi di mana perusahaan dipandang sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial, meskipun strategi pajaknya, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik dan ketahanan perusahaan di mata publik dan badan pengawas.

Koneksi politik memungkinkan perusahaan untuk memiliki pengaruh terhadap kerangka kerja regulasi, memberikan mereka wawasan tentang perubahan kebijakan dan memungkinkan mereka menyesuaikan strategi pajak secara proaktif.

Pengaruh regulasi memungkinkan perusahaan yang terhubung secara politik untuk lebih baik menyesuaikan tindakan mereka dengan kebijakan yang akan datang, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan praktik pajak agresif (Boubakri *et al.*, 2012). Dengan tetap terinformasi dan terlibat dalam perkembangan regulasi, perusahaan-perusahaan ini dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam undang-undang pajak dan mempertahankan kepatuhan, bahkan saat menerapkan strategi pajak agresif. Koneksi politik tidak hanya mengurangi risiko regulasi langsung tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang tampak patuh, menjaga reputasi mereka dan mempromosikan keberlanjutan. Pendekatan proaktif dalam keterlibatan regulasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial dan regulasi, memperkuat citra berkelanjutan mereka sambil mengelola strategi pajak secara efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa koneksi politik dapat memoderasi berbagai hubungan antara variabel eksternal dan kinerja perusahaan. Misalnya, Dang *et al.* (2022) menemukan bahwa koneksi politik dapat memperkuat hubungan antara biaya keagenan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hal tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik memberikan perusahaan kemampuan untuk lebih efektif mengelola tekanan dari pemangku kepentingan. Demikian pula, Wu *et al.* (2022) menunjukkan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan efektivitas strategi perusahaan dalam menghadapi regulasi lingkungan, yang merupakan komponen penting dari keberlanjutan perusahaan.

*Resource Dependence Theory* (RDT), yang dikembangkan oleh Pfeffer dan Salancik (1978), memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami peran koneksi politik dalam hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Menurut RDT, perusahaan tidak sepenuhnya otonom dalam menentukan strategi mereka karena mereka bergantung pada sumber daya eksternal yang dikendalikan oleh pihak lain, seperti pemerintah. Untuk mengurangi ketergantungan ini, perusahaan sering kali mencari cara untuk memengaruhi atau mengontrol sumber daya yang mereka butuhkan, salah satunya adalah melalui koneksi politik. Hal ini sejalan dengan temuan (Wang *et al.*, 2019), yang menyoroti peran ganda koneksi politik dalam perolehan sumber daya dan tata kelola. Studi mereka tentang perusahaan di Tiongkok menunjukkan bahwa direktur yang memiliki hubungan politik meningkatkan akses perusahaan terhadap modal dengan memudahkan pinjaman dan mengurangi hambatan keuangan—sebuah mekanisme yang konsisten dengan premis RDT tentang perlunya memperoleh sumber daya eksternal untuk mengurangi ketidakpastian (Jiang *et al.*, 2023; Tashman, 2020; Ulrich & Barney, 1984).

Organisasi sering membangun hubungan antarorganisasi untuk mengakses sumber daya dan kapabilitas yang tidak mereka miliki secara internal, dengan membentuk aliansi, usaha bersama, atau kemitraan yang memberikan perlindungan stabil terhadap ancaman eksternal (Drees & Heugens, 2013). Dengan menyelaraskan diri dengan entitas politik, perusahaan memperoleh perlindungan yang mengurangi risiko terkait agresivitas pajak. Misalnya, agresivitas pajak biasanya membuat perusahaan menghadapi pengawasan regulasi yang meningkat

dan kerusakan reputasi, tetapi koneksi politik dapat meredam efek ini dengan memberikan legitimasi pada tindakan perusahaan, mengurangi tekanan regulasi, dan berpotensi memengaruhi persepsi publik. Sejalan dengan RDT, koneksi semacam itu berfungsi sebagai sumber ketahanan, memungkinkan organisasi untuk lebih efektif menghadapi ketidakpastian dan mempertahankan fokus pada keberlanjutan jangka panjang

Koneksi politik juga mengurangi risiko kerusakan reputasi dan sanksi regulasi yang biasanya terkait dengan agresivitas pajak. Aliansi strategis ini berfungsi sebagai pelindung, memungkinkan perusahaan untuk tetap fokus pada inisiatif keberlanjutan perusahaan meskipun ada kontroversi terkait pajak. Jiang *et al.* (2023) mencatat bahwa hubungan antarorganisasi semacam ini meningkatkan legitimasi dan otonomi perusahaan, menyediakan pelindung penting terhadap risiko reputasi dan memfasilitasi berbagi sumber daya. Hal ini sejalan dengan pandangan (Ulrich & Barney, 1984), yang menyatakan bahwa organisasi dalam dinamika kekuasaan berusaha untuk meningkatkan pengaruh mereka dengan mengendalikan atau menyeimbangkan ketergantungan eksternal, memastikan aliran sumber daya penting yang stabil.

Selain itu, koneksi politik juga mendorong aliran informasi yang lebih baik. Dengan mengamankan akses ke wawasan tentang perubahan regulasi dan kebijakan, organisasi lebih siap untuk menyesuaikan strategi pajak mereka secara proaktif, sejalan dengan fokus RDT pada kemampuan beradaptasi. Kapasitas adaptasi strategis ini, yang ditekankan oleh Tashman (2020), memungkinkan perusahaan untuk menavigasi agresivitas pajak dengan pandangan ke depan,

mengurangi dampak negatifnya terhadap keberlanjutan perusahaan. Pertukaran informasi penting di antara entitas yang terhubung memungkinkan perusahaan untuk merespons ancaman eksternal dengan lebih efektif.

Keuntungan finansial yang disediakan oleh koneksi politik juga memainkan peran dalam meredam efek agresivitas pajak terhadap keberlanjutan. Boubakri *et al.* (2012) menyoroti bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik sering menikmati biaya modal yang lebih rendah, yang meringankan beban keuangan mereka dan meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk investasi keberlanjutan. Biaya modal yang lebih rendah dapat mengimbangi dampak finansial dari strategi pajak agresif, memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan penghematan dari efisiensi pajak dan biaya modal ke inisiatif keberlanjutan. Akibatnya, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung tidak mengalami dampak negatif pada tujuan keberlanjutan mereka akibat perilaku pajak agresif, karena dukungan finansial dan penghematan biaya yang disediakan oleh koneksi politik mereka memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam praktik keberlanjutan tanpa mengorbankan tujuan finansial mereka (Ulrich & Barney, 1984).

Riset ini menemukan bahwa pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan lebih tepat dalam kondisi perusahaan memiliki koneksi politik daripada kondisi perusahaan tanpa koneksi politik. Pada perusahaan tanpa koneksi politik, agresivitas pajak memicu sanksi atau citra negatif, sehingga menghambat keberlanjutan perusahaan. Pada perusahaan dengan koneksi politik dampak negatifnya secara konsisten lebih kecil atau melemah, bahkan berkorelasi positif dengan keberlanjutan ketika diukur melalui *BTD* atau *ETR*.

Hasil secara keseluruhan pada riset ini menunjukkan koneksi politik melemahkan hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan selaras dengan mekanisme yang dijelaskan oleh Chen (2021) dan Huang *et al.* (2021), di mana koneksi politik berfungsi melalui tiga jalur utama. Pertama, akses informasi kebijakan, perusahaan terkoneksi politik dapat mengantisipasi perubahan regulasi perpajakan, memungkinkan mereka merancang strategi pajak yang lebih adaptif tanpa mengorbankan keberlanjutan. Kedua, pengurangan risiko regulasi, intervensi pemerintah terhadap praktik agresivitas pajak dapat diminimalkan, sehingga perusahaan terlindungi dari sanksi atau reputasi negatif. Ketiga, legitimasi sosial, koneksi politik membantu perusahaan memperoleh insentif pajak sekaligus mempertahankan citra korporasi, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Hasil penelitian ini juga memberikan jawaban atas argumen paradoks peran koneksi politik yang ditemukan pada literatur sebelumnya. Koneksi politik sering dikaitkan dengan rendahnya risiko regulasi dan akses terhadap kebijakan preferensial yang dapat mendorong strategi pajak agresif sekaligus menurunkan kepatuhan terhadap standar lingkungan (Faccio, 2006; Faisal *et al.*, 2023; Cheng *et al.*, 2017). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik justru dapat berkontribusi positif terhadap keberlanjutan perusahaan. Hal ini konsisten dengan argumen Berkman *et al.* (2010) dan Wu *et al.* (2022) yang menekankan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan legitimasi perusahaan serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang mendukung inisiatif keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks perusahaan di

Indonesia, manfaat koneksi politik dalam memperkuat keberlanjutan lebih dominan dibandingkan potensi risikonya. Fenomena ini sangat relevan di Indonesia, di mana koneksi politik antara pelaku bisnis dan pemerintah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap ekonomi-politik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan Penelitian**

##### **Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh negatif terhadap keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks teori pemangku kepentingan, tindakan agresivitas pajak dapat merusak hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Tindakan ini sering kali dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lingkungan, cenderung memandang praktik penghindaran pajak yang agresif sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik. Penghindaran pajak yang berlebihan dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi legitimasi sosial, dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, yang semuanya berdampak buruk pada keberlanjutan perusahaan.

Kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan berdampak negatif pada reputasi perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlanjutan jangka panjangnya. Selain itu, tekanan dari pemangku kepentingan dan regulasi yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan, yang bisa berdampak lebih besar daripada manfaat jangka pendek yang diperoleh dari penghindaran pajak. Dalam jangka panjang, perusahaan yang gagal menjaga keseimbangan antara strategi penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial

mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan operasional mereka.

### **Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik mampu menjadi pemoderasi pengaruh antara agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Sebagai pemoderasi, koneksi politik memiliki pengaruh kuat, karena mampu memperlemah dampak negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Koneksi politik memberikan perusahaan akses yang lebih besar ke sumber daya eksternal dan perlindungan dari risiko regulasi, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi dampak buruk dari praktik pajak yang agresif. Dilihat dari sisi *Resource Dependence Theory* (RDT), koneksi politik merupakan alat strategis yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola ketergantungan mereka pada sumber daya eksternal dan mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Koneksi politik dapat memberikan perlindungan dan dukungan dari pemerintah, memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan praktik agresivitas pajak tanpa mengalami konsekuensi negatif yang signifikan. Namun, meskipun koneksi politik dapat memberikan keuntungan jangka pendek, praktik ini juga dapat menimbulkan masalah etis dan meningkatkan risiko regulasi di masa depan.

Kesimpulan ini menyoroti pentingnya bagi perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pengurangan beban pajak, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap keberlanjutan perusahaan. Meskipun

strategi pajak yang agresif dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek, risiko jangka panjang terhadap reputasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan perusahaan jauh lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang seimbang, di mana upaya untuk meminimalkan beban pajak sejalan dengan komitmen untuk menjaga keberlanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.

## **5.2. Implikasi Penelitian**

### **Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi manajemen perusahaan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi manajer perusahaan, penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari strategi pajak yang agresif. Meskipun penghindaran pajak yang agresif dapat menghasilkan keuntungan finansial dalam jangka pendek, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi tersebut dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang melalui penurunan reputasi dan legitimasi sosial.

Bagi regulator, hasil penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum pajak. Upaya ini menjadi semakin krusial terutama terhadap perusahaan dengan indikasi penghindaran pajak yang agresif. Kebijakan yang mendorong transparansi, pelaporan yang lebih rinci, serta insentif bagi perusahaan yang mematuhi ketentuan pajak sekaligus aktif dalam kegiatan keberlanjutan, dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi praktik pajak yang merugikan publik.

Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, temuan ini memberikan sinyal bahwa agresivitas pajak merupakan indikator risiko yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Tingkat agresivitas pajak yang tinggi dapat menjadi tanda potensi masalah tata kelola dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penilaian investasi sebaiknya memasukkan aspek kepatuhan pajak sebagai bagian dari evaluasi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa agresivitas pajak bukan hanya isu fiskal, tetapi juga berdampak luas pada keberlanjutan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang ingin mempertahankan daya saing jangka panjang perlu memandang pengelolaan agresivitas pajak sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan mereka.

#### **Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Antara Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki peran penting dalam memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Hasil riset membuktikan bahwa koneksi politik mampu secara konsisten melemahkan dampak negatif agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan memiliki implikasi yang signifikan secara teoritis, praktis, dan kebijakan. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman *Resource Dependence Theory* (RDT) dalam konteks perusahaan di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa koneksi politik dapat berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko yang efektif dalam hubungan agresivitas pajak–keberlanjutan perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa koneksi politik bukan hanya sumber risiko moral

(*moral hazard*), tetapi juga dapat menjadi *strategic resource* yang memperkuat legitimasi perusahaan dan mengamankan aliran sumber daya, bahkan dalam kondisi makroekonomi yang bergejolak. Penelitian ini juga memperkaya literatur yang selama ini menyoroti paradoks koneksi politik—yang di satu sisi dapat memicu perilaku oportunistik, namun di sisi lain mampu melindungi reputasi perusahaan—dengan bukti bahwa pada konteks negara berkembang seperti Indonesia, manfaat koneksi politik terhadap keberlanjutan dapat lebih dominan daripada potensi risikonya.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk mengelola risiko regulasi dan reputasi yang timbul dari strategi pajak agresif, sambil tetap menjaga komitmen terhadap keberlanjutan. Akses terhadap informasi kebijakan, perlindungan dari intervensi regulasi, dan dukungan pemerintah memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan penghematan pajak dan sumber daya finansial ke inisiatif keberlanjutan, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan finansial dan tuntutan sosial. Bagi perusahaan tanpa koneksi politik, hasil ini menjadi peringatan bahwa strategi pajak agresif berpotensi memicu sanksi, tekanan regulasi, dan kerusakan reputasi yang dapat menghambat keberlanjutan. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak memiliki akses terhadap dukungan politik perlu mengadopsi pendekatan manajemen pajak yang lebih hati-hati, atau memperkuat legitimasi sosial melalui pengungkapan CSR dan kepatuhan regulasi yang tinggi.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan masukan penting bagi regulator dalam merancang kebijakan perpajakan dan pengawasan yang

mempertimbangkan adanya perbedaan akses sumber daya antar perusahaan. Regulasi harus diarahkan untuk mencegah terjadinya kesenjangan kepatuhan akibat perlindungan politik, serta memastikan bahwa koneksi politik tidak dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sosial. Pemerintah juga dapat memanfaatkan keterlibatan perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk mendorong agenda keberlanjutan secara lebih luas, misalnya dengan mengaitkan pemberian insentif atau keringanan pajak dengan pencapaian target keberlanjutan tertentu. Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengungkapan publik terkait koneksi politik dan praktik keberlanjutan, sehingga pemangku kepentingan memiliki informasi yang memadai untuk menilai integritas dan komitmen perusahaan.

Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi riset selanjutnya untuk menguji konsistensi efek moderasi koneksi politik pada hubungan agresivitas pajak dan keberlanjutan di berbagai sektor industri atau di negara dengan karakteristik stabilitas politik dan penegakan hukum yang berbeda. Studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi faktor mediasi, seperti reputasi perusahaan atau pengungkapan CSR, yang berpotensi memperkuat atau melemahkan hubungan ini. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, koneksi politik dapat berperan sebagai penyangga yang efektif terhadap risiko yang ditimbulkan oleh strategi pajak agresif, sekaligus menjadi alat strategis untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

#### **Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Meskipun memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan tersebut yaitu pengukuran keberlanjutan perusahaan hanya bergantung pada ESG *score*. Pengukuran ESG sering kali bergantung pada data yang terbatas, seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan informasi publik lainnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah, antara lain ketidaklengkapan data, terutama di perusahaan kecil atau yang beroperasi di negara berkembang seperti Indonesia yang cenderung tidak melaporkan informasi ESG secara menyeluruh.

#### **Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Antara Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Koneksi politik memainkan peran penting dalam memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks ketergantungan sumber daya, koneksi politik menyediakan akses ke sumber daya preferensial seperti kontrak pemerintah, subsidi, dan pengurangan pengawasan regulasi. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat. Keterbatasan tersebut adalah penggunaan data publik untuk mengukur koneksi politik. Pengukuran tersebut mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas dan kualitas hubungan antara perusahaan dan aktor politik tertentu. Pendekatan kuantitatif ini mungkin tidak dapat menggambarkan sepenuhnya kekuatan hubungan politik yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Misalnya, intensitas

atau kualitas dari koneksi politik mungkin berbeda antar perusahaan, sehingga memengaruhi hasil dan interpretasi penelitian.

#### **5.4. Agenda Penelitian Mendatang**

##### **Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Mengingat temuan dan keterbatasan penelitian ini, maka terdapat peluang penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut di masa depan untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara agresivitas pajak, dan keberlanjutan perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mempertimbangkan indikator keberlanjutan lainnya, seperti indeks keberlanjutan regional atau global agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan triangulasi data untuk keberlanjutan perusahaan. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber independen, termasuk analisis laporan audit, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta data pihak ketiga dari lembaga penilai keberlanjutan yang berbeda.

##### **Peran Koneksi Politik dalam Memoderasi Pengaruh Antara Agresivitas Pajak terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Terdapat saran untuk penelitian mendatang mengenai pengaruh koneksi politik dalam memoderasi pengaruh antara agresivitas pajak terhadap keberlanjutan perusahaan. Mengingat keterbatasan data kuantitatif dalam menangkap kualitas atau kekuatan hubungan politik, penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan metode pengukuran koneksi politik yang lebih komprehensif. Studi yang menggabungkan data kualitatif seperti wawancara dengan pemimpin

perusahaan atau analisis jaringan politik dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran koneksi politik dalam memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan mendalam terkait pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak dan keberlanjutan perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, D., Hajawiyah, A., & Rini, R. K. (2024). Tax amnesty, corporate social responsibility disclosure, and organizational inertia. *Business Strategy and Development*, 7(1). <https://doi.org/10.1002/bsd2.317>.
- Ajili, H., & Khlif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Anggraeni, D. P., & Hastuti, S. (2020). Does Managerial Ownership Moderate the Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Tax Aggressiveness? *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 229–242. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.137>.
- Ardiana, P. A. (2019). Stakeholder Engagement in Sustainability Reporting: Evidence of Reputation Risk Management in Large Australian Companies. *Australian Accounting Review*, 29(4), 726–747. <https://doi.org/10.1111/auar.12293>.
- Ashrafi, M., Adams, M., Walker, T. R., & Magnan, G. (2018). How corporate social responsibility can be integrated into corporate sustainability: a theoretical review of their relationships. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 25(8), 671–681. <https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1471628>.
- Ashrafi, M., Magnan, G. M., Adams, M., & Walker, T. R. (2020). Understanding the conceptual evolutionary path and theoretical underpinnings of corporate social responsibility and corporate sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12030760>.
- Asiaei, K., Bontis, N., Barani, O., & Jusoh, R. (2021). Corporate social responsibility and sustainability performance measurement systems: implications for organizational performance. In *Journal of Management Control* (Vol. 32, Issue 1). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s00187-021-00317-4>.
- Asiaei, K., & Jusoh, R. (2017). Using a robust performance measurement system to illuminate intellectual capital. *International Journal of Accounting Information Systems*, 26(June), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.06.003>.
- Asmoro, P. S., Ramakrishnan, S., Arsyanda, S., Alfandia, N. S., Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N. F., & Hidayat, K. (2024). ESG disclosure, governance, political connection, and tax Aggressiveness: what information

- is critical, and is more information always forceful? *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2435600>.
- Avi-Yonah, R. S. (2008). Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behavior. *Tax and Corporate Governance*, 183–198. <https://doi.org/10.2139/ssrn.944793>.
- Bacha, S., Ajina, A., & Ben Saad, S. (2021). CSR performance and the cost of debt: does audit quality matter? *Corporate Governance (Bingley)*, 21(1), 137–158. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2019-0335>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*.
- Baudot, L., Johnson, J. A., Roberts, A., & Roberts, R. W. (2020). Is Corporate Tax Aggressiveness a Reputation Threat? Corporate Accountability, Corporate Social Responsibility, and Corporate Tax Behavior. *Journal of Business Ethics*, 163(2), 197–215. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04227-3>.
- Beckman, C. M., Haunschild, P. R., & Phillips, D. J. (2004). Friends or strangers? Firm-specific uncertainty, market uncertainty, and network partner selection. *Organization Science*, 15(3), 259–275. <https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0065>.
- Benvenuto, M., Aufiero, C., & Viola, C. (2023). A systematic literature review on the determinants of sustainability reporting systems. *Heliyon*, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14893>.
- Berkman, H., Cole, R. A., & Fu, L. J. (2010). Political connections and minority-shareholder protection: Evidence from securities-market regulation in China. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 45(6), 1391–1417. <https://doi.org/10.1017/S0022109010000608>.
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1009–1025. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3162-2>.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. John Wiley & Sons, Inc.
- Bloomberg. (2021). *Bloomberg ESG Indices solutions for sustainable future*. [https://assets.bbhub.io/professional/sites/27/Bloomberg-Indices\\_ESG-Indices-Overview.pdf](https://assets.bbhub.io/professional/sites/27/Bloomberg-Indices_ESG-Indices-Overview.pdf)
- Bloomberg. (2023). *Environmental, Social and Governance (ESG) Scores Methodology and Field Information*.

- Bodhanwala, S., & Bodhanwala, R. (2018). Does corporate sustainability impact firm profitability? Evidence from India. *Management Decision*, 56(8), 1734–1747. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0381>.
- Boone, J. P., Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2013). *Religiosity and Tax Avoidance*.
- Boubakri, N., Cosset, J.-C., Montreal, H., & Saffar, W. (2012). The impact of political connections on firms' operating performance and financing decisions. *The Journal of Financial Research*, XXXV(3).
- Bowen, H. R. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. Harper.
- Cabelkova, I. (2021). Sustainability of state budgetary expenses: Tax compliance of low-, middle-, and high-income groups—the evidence from the czech republic. *Sustainability (Switzerland)*, 13(16). <https://doi.org/10.3390/su13168966>.
- Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *The Academy of Management Review*, 4(4), 497–505.
- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, Juli-August.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Research Collection School of Accountancy*, 91(1), 41–61.
- Chen, W. (2021). Tax risks control and sustainable development: evidence from China. *Meditari Accountancy Research*, 29(6), 1381–1400. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2020-0884>
- Chen, X. (2018). Corporate Social Responsibility Disclosure, Political Connection and Tax Aggressiveness: Evidence from China's Capital Markets. *Open Journal of Business and Management*, 06(01), 151–164. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2018.61010>.
- Chen, X., Liu, G., Liu, Y., & Zhang, Y. (2022). Banks' liability structure and risk taking: Evidence from a quasi-natural experiment in China. *Finance Research Letters*, 49. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103100>.
- Cheng, Z., Wang, F., Keung, C., & Bai, Y. (2017). Will Corporate Political Connection Influence the Environmental Information Disclosure Level? Based on the Panel Data of A-Shares from Listed Companies in Shanghai Stock Market. *Journal of Business Ethics*, 143(1), 209–221. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2776-0>

- Col, B., & Patel, S. (2019). Going to Haven? Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance. *Journal of Business Ethics*, 154(4), 1033–1050. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3393-2>.
- Crane, K. W., Linck, E., Carioscia, S. A., & Lal, B. (2019). *Assessment of the Utility of a Government Strategic Investment Fund for Space*.
- Damayanti, A., & Hardiningsih, P. (2021). Diterminan Pengungkapan Laporan Berkelanjutan. *Journal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 1–16.
- Dang, V. Q. T., Otchere, I., & So, E. P. K. (2022). Does the nature of political connection matter for corporate social responsibility engagement? Evidence from China. *Emerging Markets Review*, July 2021, 100907. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100907>
- Davis, G. F., & Cobb, J. A. (2010). Resource dependence theory: Past and future. In *Research in the Sociology of Organizations* (Vol. 28, pp. 21–42). [https://doi.org/10.1108/s0733-558x\(2010\)0000028006](https://doi.org/10.1108/s0733-558x(2010)0000028006).
- Davis, K. (1973). The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities. *The Academy of Management Journal*, 16(2), 312–322.
- Dawson, J. F. (2014). Moderation in Management Research: What, Why, When, and How. *Journal of Business and Psychology*, 29(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s10869-013-9308-7>.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1).
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Earnings management and corporate tax shelters. *National Tax Journal*, 62(1), 169–186. <https://doi.org/10.17310/ntj.2009.1.08>.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *The Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Drees, J. M., & Heugens, P. P. M. A. R. (2013). Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory: A Meta-Analysis. *Journal of Management*, 39(6), 1666–1698. <https://doi.org/10.1177/0149206312471391>.
- Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 11, 130–141. <https://doi.org/10.1002/bse.323>.

- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82.  
<https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>.
- Elalfy, A., Weber, O., & Geobey, S. (2021). The Sustainable Development Goals (SDGs): a rising tide lifts all boats? Global reporting implications in a post SDGs world. *Journal of Applied Accounting Research*, 22(3), 557–575.  
<https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2020-0116>.
- Elkington, J. (1998). Accounting for the Triple Bottom Line. *Measuring Business Excellence*, 2(3), 18–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/eb025539>.
- Emeka, O., & Ngozi, O. (2022). Tax Aggressiveness and Sustainability of Listed Oil and Gas Firms in Nigeria: Does Firm Size Matter? *IIARD International Journal of Economics and Business Management*, 8(2), 48–60.  
<https://doi.org/10.56201/ijebm.v8.no2.2022.pg48.60>.
- Emerson, R. M. (1962). Power-Dependence Relations. *American Sociological Review*, 27(1), 31–41.
- European Commission. (2002). *Corporate Social Responsibility Main Issues*.
- European Commission. (2011). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility*.
- Fabian, O., Joshua, O. J. K., & Ifeoma, A. (2022). Tax aggressiveness and sustainability of quoted firms in nigeria. *Journal of Accounting and Financial Management*, 8(2), 96–108.
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386.  
<https://www.bus.umich.edu/pdf/mitsui/workshopdocs/facciopaperrvs.pdf>
- Faccio, M. (2007). The characteristics of politically connected firms. In *The characteristics of politically connected firms* (51).  
<http://docs.lib.purdue.edu/ciberwp/51>.
- Faccio, M. (2016). Discussion of “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.” *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 115–120.  
<https://doi.org/10.1111/1911-3846.12214>.
- Faisal, F., Ridhasyah, R., & Haryanto, H. (2023). Political connections and firm performance in an emerging market context: the mediating effect of sustainability disclosure. *International Journal of Emerging Markets*, 18(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOEM-07-2020-0753>.

- Febrianti, D., Oktarini, K. W., & Firza, E. (2024). The External Control of Organization; A Resource Dependence Perspective (The Book Review). *Journal of Management, Entrepreneur and Cooperative*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.56869/jmec.v3i1.534>.
- Finch, N. (2006). The Emergence of CSR and Sustainability Indices. *Proceedings of the Academy of Accounting and Financial Studies*, 19–23.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. In E. M. EPSTEIN (Ed.), *Pitman series in Business and public policy*. Pitman Publishing Inc. <https://doi.org/10.4324/9780203982211-18>.
- Freeman, R. E., Dmytriyev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder Theory and the Resource-Based View of the Firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.1177/0149206321993576>.
- Freudenreich, B., Lüdeke-Freund, F., & Schaltegger, S. (2020). A Stakeholder Theory Perspective on Business Models: Value Creation for Sustainability. *Journal of Business Ethics*, 166(1), 3–18. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04112-z>.
- Geraldina, I., Ariefiara, D., Meini, Z., & Muktiyanto, A. (2023). *Greenwashing: teori dan praktik pada konteks perusahaan di negara ASEAN* (H. Noorhamida, Ed.). Deepublish.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889>.
- Graham, J. R., Raedy, J. S., & Shackelford, D. A. (2012). Research in accounting for income taxes. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1–2), 412–434. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.11.006>.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77. <https://doi.org/10.1108/09513579510146996>.
- Gribnau, H. J. L. M., & Jallai, A.-G. (2017). Good Tax Governance: A Matter of Moral Responsibility and Transparency. *Nordic Tax Journal*, 2017(1), 70–88. <https://doi.org/10.1515/ntaxj-2017-0005>.

- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability (Switzerland)*, *10*(12). <https://doi.org/10.3390/su10124549>.
- Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 59, pp. 5–21). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>.
- Hahn, T., Figge, F., Aragón-Correa, J. A., & Sharma, S. (2017). Advancing Research on Corporate Sustainability: Off to Pastures New or Back to the Roots? *Business and Society*, *56*(2), 155–185. <https://doi.org/10.1177/0007650315576152>.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). In *International Journal of Research & Method in Education* (Second edi). SAGE. <https://doi.org/10.1080/1743727x.2015.1005806>.
- Hakim, F. N. (2016). Pola patron-klien pedagang pasar tradisional dalam peningkatan kesejahteraan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *40*(1), 71–78.
- Hammami, A., & Zadeh, M. H. (2020). Audit quality, media coverage, environmental, social, and governance disclosure and firm investment efficiency: Evidence from Canada. *International Journal of Accounting and Information Management*, *28*(1), 45–72. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2019-0041>.
- Hanlon, M. (2005). The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences. *The Accounting Review*, *80*(1), 137–166.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, *50*(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, *93*(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Harjito, Y., Sari, C. N., & Yulianto. (2017). Tax Aggressiveness Seen From Company Characteristics and Corporate Social Responsibility. *Journal of Auditing Finance and Forensic Accounting*. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v5i2.3765>

- Harnesk, J., & Myhrberg, A. (2019). *Investigating the Relationship Between ESG and tax aggressiveness* [UMEA University]. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1327432>.
- Hart, S. L. (1995). A Natural-Resource-Based View of the Firm. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 20, Issue 4).
- Harymawan, I., Agustia, D., & Agung, A. K. (2017). Characteristics of politically connected firms in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 15(4), 17–23. [https://doi.org/10.21511/ppm.15\(4\).2017.02](https://doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.02)
- Harymawan, I., Putra, F. K. G., Fianto, B. A., & Wan Ismail, W. A. (2021). Financially distressed firms: Environmental, social, and governance reporting in indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810156>.
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis* (2nd ed.). The Guilford Press. [www.guilford.com/MSS](http://www.guilford.com/MSS).
- Herbohn, K., Walker, J., & Loo, H. Y. M. (2014). Corporate Social Responsibility: The Link Between Sustainability Disclosure and Sustainability Performance. *Abacus*, 50(4), 422–459. <https://doi.org/10.1111/abac.12036>.
- Hermawan, A. A. (2011). The influence of effective board of commissioners and audit committee on the informativeness of earnings: evidence from Indonesian listed firms. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 1–38.
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5>
- Hillman, A. J., & Hitt, M. (1999). Corporate Political Strategy Formulation: A Model of Approach, Participation, and Strategy Decisions. *The Academy of Management Review*, 24(4), 825–842. <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.1999.2553256>
- Hillman, A. J., Withers, M. C., & Collins, B. J. (2009). Resource dependence theory: A review. *Journal of Management*, 35(6), 1404–1427. <https://doi.org/10.1177/0149206309343469>.
- Hoffman, A. J., & Jennings, P. D. (2021). Institutional-Political Scenarios for Anthropocene Society. *Business and Society*, 60(1), 57–94. <https://doi.org/10.1177/0007650318816468>.

- Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. *Journal of Cleaner Production*, 275. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124097>.
- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy. *Journal of Business Finance and Accounting*, 45(9–10), 1293–1321. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>.
- Huang, M., Li, M., & Liao, Z. (2021). Do politically connected CEOs promote Chinese listed industrial firms' green innovation? The mediating role of external governance environments. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123634. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123634>.
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>.
- Indonesia Stock Exchange. (2020). Laporan Tahunan 2020. In *Laporan Tahunan 2020 Annual Report* (Vol. 434).
- International Finance Corporation. (2014). The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition. In *Otoritas Jasa Keuangan* (Vol. 1, Issue 7).
- International Monetary Fund. (2021). *World economic outlook: managing divergent recoveries: Vol. April*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.1955.tb00722.x>.
- Issah, O., & Rodrigues, L. L. (2021). Corporate social responsibility and corporate tax aggressiveness: A scientometric analysis of the existing literature to map the future. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su13116225>.
- Jacobs, D. (1974). Dependency and Vulnerability: An Exchange Approach to the Control of Organizations. *Administrative Science Quarterly*, 19(1), 45. <https://doi.org/10.2307/2391787>.
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

- Jiang, H., Luo, Y., Xia, J., Hitt, M., & Shen, J. (2023). Resource dependence theory in international business: Progress and prospects. *Global Strategy Journal*, 13(1), 3–57. <https://doi.org/10.1002/gsj.1467>.
- Jin, D., Shen, H., Wang, H., & Yin, D. (2022). Do State Tax Changes Affect Corporate Tax Aggressiveness? US Evidence. *Pacific Accounting Review*. <https://doi.org/10.1108/par-09-2021-0156>.
- Joni, J., Ahmed, K., & Hamilton, J. (2020). Politically connected boards, family and business group affiliations, and cost of capital: Evidence from Indonesia. *British Accounting Review*, 52(3). <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100878>.
- Kaptein, M., & Wempe, J. (2001). *The balanced company a Theory of Corporate Integrity*.
- Karbala, H., & Vincenzo, A. alexander. (2024). *The Effects of Environmental, Social and Governance (ESG) Reporting on Tax Avoidance*.
- Keeble, B. R. (1988). The Brundtland Report: “Our Common Future.” *Medicine and War*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.1080/07488008808408783>.
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia’s tax amnesty program. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>.
- Khelif, H., Guidara, A., & Hussainey, K. (2016). Sustainability level, corruption and tax evasion: A cross-country analysis. *Journal of Financial Crime*, 23(2), 328–348. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2014-0041>.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>.
- Kim, J., & Im, C. (2017). Study on corporate social responsibility (CSR): Focus on tax avoidance and financial ratio analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su9101710>.
- Kong, D., Tao, Y., & Wang, Y. (2020). China’s anti-corruption campaign and firm productivity: Evidence from a quasi-natural experiment. *China Economic Review*, 63. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101535>.
- Kotter, J. P. (1979). Managing External Dependence. *The Academy of Management Review*, 4(1), 87–92.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International*

*Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270.  
<https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>.

- Kovermann, J., & Velte, P. (2021). CSR and tax avoidance: A review of empirical research. *Corporate Ownership and Control*, 18(2), 20–39.  
<https://doi.org/10.22495/cocv18i2art2>.
- Kristiadi, F., Kurniawati, E. P., & Naufa, A. M. (2020). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: Evidence from Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 13(2), 105. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i2.21211>.
- Kücher, A., Mayr, S., Mitter, C., Duller, C., & Feldbauer-Durstmüller, B. (2020). Firm age dynamics and causes of corporate bankruptcy: age dependent explanations for business failure. *Review of Managerial Science*, 14(3), 633–661. <https://doi.org/10.1007/s11846-018-0303-2>.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100.  
<https://doi.org/10.1108/09513571311285621>.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Outside directors, corporate social responsibility performance, and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 33(2), 228–251.  
<https://doi.org/10.1177/0148558X16654834>.
- Lashitew, A. A. (2021). Corporate uptake of the Sustainable Development Goals: Mere greenwashing or an advent of institutional change? *Journal of International Business Policy*, 4(1), 184–200.  
<https://doi.org/10.1057/s42214-020-00092-4>.
- Latupeirissa, G., & Adhariani, D. (2020). External and internal economic impacts of eco-innovation and the role of political connections: A sustainability narrative from an emerging market. *Journal of Cleaner Production*, 258, 120579. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120579>.
- Law, K. K. F., & Mills, L. F. (2016). Military experience and corporate tax avoidance. In *Review of Accounting Studies* (Vol. 22, Issue 1). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s11142-016-9373-z>.
- Li, H., Meng, L., Wang, Q., & Zhou, L. A. (2008). Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms.

*Journal of Development Economics*, 87(2), 283–299.  
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.03.001>.

- Li, Q., & Guo, M. (2022). Do the resignations of politically connected independent directors affect corporate social responsibility? Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 73(74), 102174.  
<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102174>.
- Li, X., Li, W., & Zhang, Y. (2020). Family control, political connection, and corporate green governance. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17).  
<https://doi.org/10.3390/su12177068>.
- Li, Y., Wong, C. W. Y., & Miao, X. (2022). Political connection, political promotion and corporate environmental information disclosure in China. *Chinese Management Studies*, 16(1), 78–101. <https://doi.org/10.1108/CMS-06-2020-0233>.
- Liu, S., & Yan, M.-R. (2018). Corporate Sustainability and Green Innovation in an Emerging Economy—An Empirical Study in China. *Sustainability*, 10(11), 3998. <https://doi.org/10.3390/su10113998>.
- Lozano, R., & Huisingh, D. (2011). Inter-linking issues and dimensions in sustainability reporting. *Journal of Cleaner Production*, 19(2–3), 99–107.  
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.01.004>.
- Marbun, R. V, Putra, A. M., & Wijayanti, A. (2021). Koneksi politik dan manajemen skandal: sebuah temuan Empiris perusahaan BUMN. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 145–158.  
<https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.002>.
- Marrewijk, M. van. (2003). Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion. *Journal of Business Ethics*, 44, 95–105.
- Martinez, A. L., & Ramalho, V. P. (2017). Tax aggressiveness and corporate sustainability in Brazil. *Revista Catarinense Da Ciência Contábil*, 16(49), 7–16. <https://doi.org/10.2308/accr-52130>.
- Mashuri, A. A. S., & Ermaya, H. N. L. (2020). The Effect of Tax Aggressiveness and Media Exposure on Corporate Social Responsibility Disclosure with Profitability as Moderated Variables. *4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)*, 124(47), 16–28. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.047>.
- Mpofu, F. Y. (2022). Green Taxes in Africa: Opportunities and Challenges for Environmental Protection, Sustainability, and the Attainment of Sustainable

- Development Goals. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 16). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su141610239>.
- Na, H. J., Kang, H., & Lee, H. E. (2021). Does tax incentives affect future firm value for corporate sustainability? *Sustainability (Switzerland)*, 13(22). <https://doi.org/10.3390/su132212665>.
- Nadir Junior, A. M., Alberton, A., & Saath, K. C. de O. (2021). Tax benefits and sustainability: A study of municipalities in the state of santa catarina. *Revista de Administracao Publica*, 55(2), 331–356. <https://doi.org/10.1590/0034-761220200597>.
- Nasih, M., Al-Cholili, A. S. A., Harymawan, I., Haider, I., & Rahayu, N. K. (2020). Political connections, overinvestment and governance mechanism in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1790220>.
- Nasih, M., Harymawan, I., Abdul Rasid, S. Z., & Putra, F. K. G. (2024). Tax avoidance and sustainability reporting: Alignment or greenwashing strategy? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.2927>.
- Nogueira, J. A. P. (2021). *Tax sustainability and transparency the role of tax disclosures as an arbitrator for tax*. [https://doi.org/Nogueira, Jose Albino, Tax Sustainability and Transparency - The Role of Tax Disclosures as An Arbitrator for Tax Avoidance \(June 21, 2021\). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4073049 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4073049](https://doi.org/Nogueira, Jose Albino, Tax Sustainability and Transparency - The Role of Tax Disclosures as An Arbitrator for Tax Avoidance (June 21, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4073049 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4073049).
- Nusantari, N. I., Nuzula, N. F., & Darono, A. (2015). Pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks SRI KEHATI Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, 5(2), 1–9.
- Nuswantara, D. A., Fachruzzaman, D. A., Prameswari, R. D., Suyanto, R. D., Rusdiyanto, R., & Hendrati, I. M. (2023). The role of political connection to moderate board size, woman on boards on financial distress. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2156704>.
- Nyahuna, T., & Doorasamy, M. (2022). The influence of carbon tax on financial sustainability of South Africa's cement and mining industry. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(3), 804–810. <https://doi.org/10.38142/ijess.v3i3.359>.
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating

- role of national culture. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- Pan, X., & Tian, G. G. (2020). Political connections and corporate investments: Evidence from the recent anti-corruption campaign in China. *Journal of Banking and Finance*, 119, 105108. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.03.005>.
- Payne, D. M., & Raiborn, C. A. (2018). Aggressive Tax Avoidance: A Conundrum for Stakeholders, Governments, and Morality. *Journal of Business Ethics*, 147(3), 469–487. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2978-5>.
- Pellegrino, G., & Piva, M. (2020). Innovation, industry and firm age: are there new knowledge production functions? In *Eurasian Business Review* (Vol. 10, Issue 1). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s40821-019-00129-6>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan 1 (2017).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Pub. L. No. Nomor 55 /POJK.04/2015 (2015).
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). The external control of organizations: A resource dependence approach. In *Harper and Row Publishers*. stanford University Press.
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 1(3), 472–486.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 21–40.
- PWC. (2019). *Creating a strategy for a better world*. [www.pwc.com/sdgchallenge](http://www.pwc.com/sdgchallenge). <https://doi.org/10.2307/j.ctvc77cxj.37>
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). Do country characteristics affect the complementary level of financial and tax aggressiveness? *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 16(1), 45–62. <https://doi.org/10.21315/aamjaf2020.16.1.3>

- Rahdari, A. H., & Rostamy, A. A. A. (2015). Designing a general set of sustainability indicators at the corporate level. *Journal of Cleaner Production*, 108, 757–771. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.108>
- Raithatha, M., & Shaw, T. S. (2022). Firm's tax aggressiveness under mandatory CSR regime: Evidence after mandatory CSR regulation of India. *International Review of Finance*, 22(1), 286–294. <https://doi.org/10.1111/irfi.12348>
- Ramadhan, F. M. (2019). Anggota DPR Pebisnis Menyebar di Semua Fraksi. *Tempo.Co*. <https://grafis.tempo.co/read/1839/anggota-dpr-pebisnis-menyebar-di-semua-fraksi>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>.
- Robinson, J. (2004). Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development. *Ecological Economics*, 48(4), 369–384. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2003.10.017>
- Rodríguez-Fernández, M., Gaspar-González, A. I., & Sánchez-Teba, E. M. (2020). Sustainable social responsibility through stakeholders engagement. In *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* (Vol. 27, Issue 6, pp. 2425–2436). John Wiley and Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/csr.2023>.
- Rudyanto, A., Julisar, J., & Debora, D. (2023). Political connection as a double-edged sword: the case of tax aggressiveness practice during the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(4), 400–410. <https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2023-0113>.
- Rudyanto, A., & Pirzada, K. (2021). The role of sustainability reporting in shareholder perception of tax avoidance. *Social Responsibility Journal*, 17(5), 669–685. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2020-0022>
- Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2018). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 233–249. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0071>.
- Rudyanto, A., Utama, S., Martani, D., & Adhariani, D. (2021). Tax aggressiveness and sustainable welfare: the roles of corruption and tax allocation inefficiency. *Social Responsibility Journal*. <https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2020-0427>.

- Salem, R., Usman, M., & Ezeani, E. (2021). Loan loss provisions and audit quality: Evidence from MENA Islamic and conventional banks. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 79, 345–359. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2020.07.002>.
- Sánchez-Teba, E. M., Benítez-Márquez, M. D., Bermúdez-González, G., & Luna-Pereira, M. D. M. (2021). Mapping the knowledge of csr and sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810106>
- Saraswati, E., Sagitaputri, A., & Rahadian, Y. (2020). Political Connections and CSR Disclosures in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 1097–1104. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1097>.
- Schumpeter, J. (2021). The theory of economic development. In *The Theory of Economic Development*. <https://doi.org/10.4324/9781003146766>.
- Scott, W. R., & Davis, G. F. (2016). *Organization and Organizing (Rational, Natural, and Open System perspectives)*. Routledge.
- Serafeim, G., & Trinh, K. (2020). A Framework for Product Impact- Weighted Accounts A Framework for Product Impact-Weighted Accounts. *Harvard Business School, A Framewor*, 41.
- Shin, Y., & Park, J. (2022). Differences in Tax Avoidance According to Corporate Sustainability with a Focus on Delisted Firms. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/su14116648>.
- Sikka, P. (2010). Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance. *Accounting Forum*, 34(3–4), 153–168. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2010.05.002>.
- Simsek, Z., Lubatkin, M. H., & Floyd, S. W. (2003). Inter-firm networks and entrepreneurial behavior: A structural embeddedness perspective. *Journal of Management*, 29(3), 427–442. [https://doi.org/10.1016/S0149-2063\(03\)00018-7](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(03)00018-7).
- Sohail, A., Butt, Z., Butt, A. A., & Shahzad, A. (2024). Group-affiliations and corporate cash holdings: moderating role of political connectedness. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2022-0023>.
- Son, S. H. (2024). An Analysis of the Impact of ESG Incidents on Tax Avoidance in Korean Distribution Companies\*. *Journal of Distribution Science*, 22(11), 77–87. <https://doi.org/10.15722/jds.22.11.202411.77>.
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and*

- Control*, 13(3continued2), 279–283.  
<https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>.
- Sui, W., Yang, C., & Zhang, H. (2019). Is corporate social responsibility used to mask corporate speculation? Evidence from emerging China. *Sustainability (Switzerland)*, 11(12). <https://doi.org/10.3390/SU11123375>.
- Supriyati, S., & Anggraini, D. D. (2021). Sustainability Reporting and Tax Aggressiveness: Evidence from a Public Company in Indonesia. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 5(1), 71–80.  
<https://doi.org/10.28992/ijSAM.v5i1.249>.
- Suwito, S., Darwis, H., Ohorella, R. W. U., & Nindiasari, A. D. (2023). Corporate Social Responsibility Towards Tax Aggressiveness with Corporate Governance Mechanisms as a Moderation Variable (Empirical Study of Mining Companies on The Indonesian Stock Exchange). *Account and Financial Management Journal*, 08(11), 3222–3233.  
<https://doi.org/10.47191/afmj/v8i11.01>.
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1, 28–38.
- Tang, T., & Firth, M. (2011). Can book-tax differences capture earnings management and tax Management? Empirical evidence from China. *International Journal of Accounting*, 46(2), 175–204.  
<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2011.04.005>.
- Tashman, P. (2020). A Natural Resource Dependence Perspective of the Firm: How and Why Firms Manage Natural Resource Scarcity. *Business and Society*, 60(6), 1279–1311. <https://doi.org/10.1177/0007650319898811>
- Thompson, J. D. (1967). *Organization in action*. Mc Graw-Hill.
- Torelli, R., Balluchi, F., & Furlotti, K. (2020). The materiality assessment and stakeholder engagement : A content analysis of sustainability reports. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), 470–484.
- Tsai, P. H., Liu, Y., & Liu, X. (2021). Collusion, political connection, and tax avoidance in China. *Kyklos*, 74, 1–25. <https://doi.org/10.1111/kykl.12265>.
- Tsindeliani, I., Kot, S., Vasilyeva, E., & Narinyan, L. (2019). Tax system of the Russian Federation: Current state and steps towards financial sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 11(24). <https://doi.org/10.3390/su11246994>.

- Uddin, K. M. K., Rahman, M. M., & Saha, S. (2023). The impact of green tax and energy efficiency on sustainability: Evidence from Bangladesh. *Energy Reports*, 10, 2306–2318. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2023.09.050>.
- Ullah, S., Luo, R., Adebayo, T. S., & Kartal, M. T. (2023). Dynamics between environmental taxes and ecological sustainability: Evidence from top-seven green economies by novel quantile approaches. *Sustainable Development*, 31(2), 825–839. <https://doi.org/10.1002/sd.2423>.
- Ulrich, D., & Barney, J. B. (1984). Perspectives in Organizations: Resource Dependence, Efficiency, and Population. *The Academy of Management Review*, 9(3), 471–481.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007).
- United Nations. (2018). *The Sustainable Development Goals Report 2018*.
- Uryszek, T., & Klonowska, A. (2022). Fiscal sustainability vs tax gap - Evidence from Poland. *Acta Oeconomica*, 72(1), 85–103. <https://doi.org/10.1556/032.2022.00005>.
- Vacca, A., Iazzi, A., Vrontis, D., & Fait, M. (2020). The role of gender diversity on tax aggressiveness and corporate social responsibility: Evidence from Italian listed companies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su12052007>.
- Velte, P. (2017). The link between audit committees, corporate governance quality and firm performance: A literature review. *Corporate Ownership and Control*, 14(4), 15–31. <https://doi.org/10.22495/cocv14i4art2>.
- Vidal, N. G., & Van Buren, H. J. (2022). Corporate responsibility coalitions and the sustainability issues management capabilities of firms. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(5), 1109–1131. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2021-0295>.
- Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance-financial performance link. *Strategic Management Journal*, 18(4), 303–

319. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199704\)18:4<303::AID-SMJ869>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199704)18:4<303::AID-SMJ869>3.0.CO;2-G).

- Wahab, N. S. A., & Holland, K. (2012). Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value. *The British Accounting Review*, 44(2), 111–124. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>.
- Wang, B., Peng, C., Wu, J., & Liao, F. (2022). The Impact of Political Connections on Corporate Green Innovation: The Mediating Effect of Corporate Social Responsibility and the Moderating Effect of Environmental Public Opinion. *Sustainability (Switzerland)*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/su14084708>.
- Wang, Y., Yan, W., Ma, D., & Zhang, C. (2018). Carbon emissions and optimal scale of China's manufacturing agglomeration under heterogeneous environmental regulation. *Journal of Cleaner Production*, 176, 140–150. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.118>.
- Wang, Z., Liu, X., & Liu, Q. (2019). Study of the relationship between political connections and corporate re-entrepreneurial performance. *Sustainability (Switzerland)*, 11(15). <https://doi.org/10.3390/su11154027>
- Weisbach, D. A. (2003). *Corporate tax avoidance*. 96, 27.
- Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. *The Academy of Management Review*, 16(4), 691–718.
- Wu, B., Fang, H., Jacoby, G., Li, G., & Wu, Z. (2022). Environmental regulations and innovation for sustainability? Moderating effect of political connections. *Emerging Markets Review*, 50(June 2021), 100835. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100835>.
- Yasser, S., & Soliman, M. (2018). The effect of Audit Quality on Earnings Management in Developing Countries: The Case of Egypt. *International Research Journal of Applied Finance*, IX(4), 1–3.
- Younis, H., & Sundarakani, B. (2020). The impact of firm size, firm age and environmental management certification on the relationship between green supply chain practices and corporate performance. *Benchmarking*, 27(1), 319–346. <https://doi.org/10.1108/BIJ-11-2018-0363>.
- Youssef, I. S., Salloum, C., & Al Sayah, M. (2023). The determinants of profitability in non-financial UK SMEs. *European Business Review*, 35(5), 652–671. <https://doi.org/10.1108/EBR-09-2022-0173>.
- Zaid, M. A. A., Wang, M., Adib, M., Sahyouni, A., & Abuhijleh, S. T. F. (2020). Boardroom nationality and gender diversity: Implications for corporate

sustainability performance. *Journal of Cleaner Production*, 251.

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119652>.

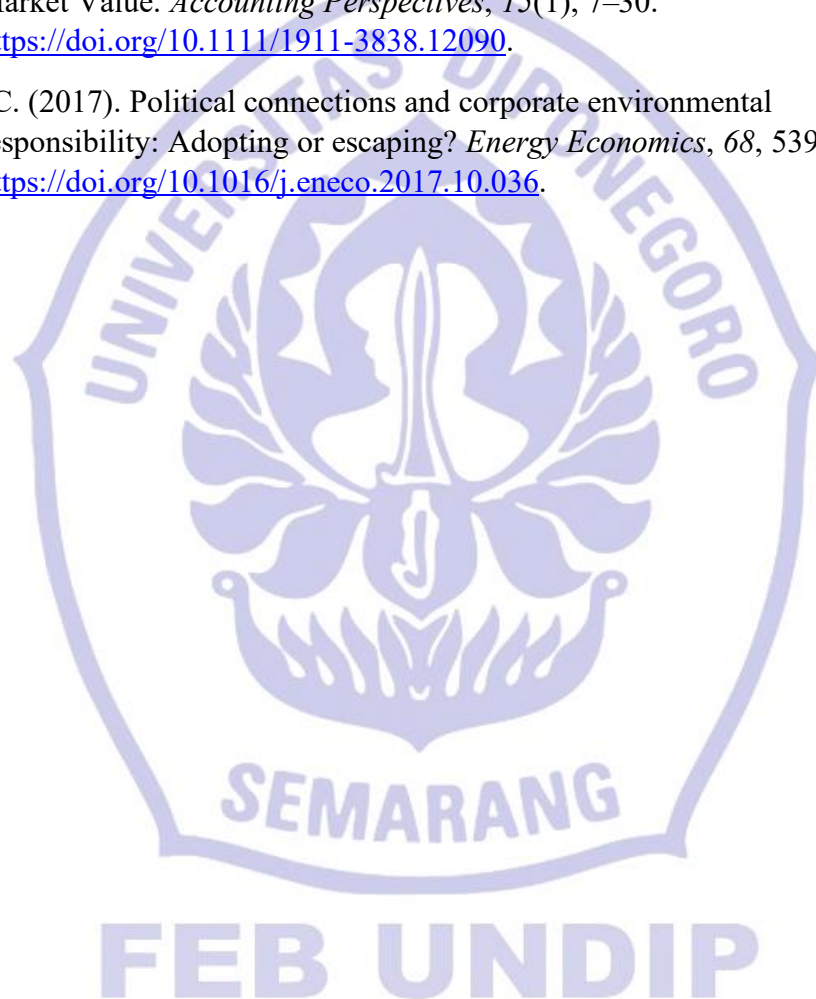
Zaman, R., Farooq, M. B., Khalid, F., & Mahmood, Z. (2021). Examining the extent of and determinants for sustainability assurance quality: The role of audit committees. *Business Strategy and the Environment*, 30(7), 2887–2906. <https://doi.org/10.1002/bse.2777>.

Zeng, T. (2016). Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness, and Firm Market Value. *Accounting Perspectives*, 15(1), 7–30.

<https://doi.org/10.1111/1911-3838.12090>.

Zhang, C. (2017). Political connections and corporate environmental responsibility: Adopting or escaping? *Energy Economics*, 68, 539–547.

<https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.10.036>.



### LAMPIRAN 1: TABULASI DATA PENELITIAN

No	Kode	Tahun	id	ind	SC	dtax	politik	growth	bigf	age	aucom	incom	Liability
1	ABDA	2017	1	8	34.64	0.046405	0	- 0.06	0	32	4	0.4	1,590,000,000,000
2	ABDA	2019	1	8	37.22	0.051652	0	- 0.10	0	34	3	0.5	1,330,000,000,000
3	ABDA	2020	1	8	46.95	0.036087	0	- 0.17	0	35	3	0.5	1,090,000,000,000
4	ABDA	2021	1	8	46.95	0.046167	0	- 0.12	0	36	3	0.5	983,790,000,000
5	ACST	2017	2	6	22.08	0.006708	0	0.69	1	22	3	0.4	1,200,000,000,000
6	ACST	2018	2	6	22.08	-0.05372	0	0.23	1	23	3	0.4	3,870,000,000,000
7	ADHI	2020	3	6	24.66	-0.05121	1	- 0.29	0	46	3	0.333333	32,520,000,000,000
8	ADHI	2021	3	6	24.66	-0.029	1	0.06	0	47	3	0.333333	34,240,000,000,000
9	ADHI	2022	3	6	24.05	-0.01154	1	0.18	0	48	3	0.333333	31,160,000,000,000
10	ADMF	2017	4	8	23.83	-0.023	0	0.06	1	13	2	0.333333	22,670,000,000,000
11	ADMF	2018	4	8	28.27	-0.00874	0	0.14	1	14	3	0.333333	23,750,000,000,000
12	ADMF	2019	4	8	29.98	-0.00925	0	0.11	1	15	3	0.333333	27,040,000,000,000
13	ADMF	2020	4	8	40.41	-0.00562	0	- 0.19	1	16	3	0.333333	21,200,000,000,000
14	ADMF	2021	4	8	40.41	-0.00454	0	- 0.10	1	17	3	0.333333	14,760,000,000,000
15	AGRO	2017	5	8	39.30	-0.00437	1	0.26	1	15	3	0.333333	9,440,000,000,000
16	AGRO	2018	5	8	39.19	-0.00453	1	0.30	1	16	3	0.666667	13,210,000,000,000
17	AGRO	2019	5	8	39.19	-0.00467	1	0.25	1	17	3	0.333333	22,590,000,000,000
18	AGRO	2020	5	8	37.20	-0.00643	1	- 0.06	1	18	3	0.5	23,730,000,000,000
19	AGRO	2022	5	8	38.29	-0.04203	1	- 0.37	1	20	4	0.6	10,510,000,000,000
20	AGRS	2021	6	8	50.23	-0.00392	0	0.29	0	22	4	0.6	11,290,000,000,000
21	AGRS	2022	6	8	52.23	0.007402	0	0.45	0	23	4	0.5	14,140,000,000,000
22	ALDO	2017	7	2	30.30	-0.01026	0	0.06	0	28	3	0.333333	209,440,000,000
23	ALDO	2018	7	2	30.30	-0.03045	0	0.66	0	29	3	0.333333	195,080,000,000
24	ALDO	2019	7	2	30.30	-0.01532	0	- 0.07	0	30	3	0.333333	391,710,000,000
25	ALDO	2020	7	2	39.19	-0.00031	1	0.01	0	31	3	0.333333	442,340,000,000

26	ALDO	2021	7	2	39.19	0.004046	1	0.32	0	32	3	0.333333	507,410,000,000
27	ALKA	2017	8	2	41.63	-0.02367	0	0.68	0	45	3	0.333333	75,510,000,000
28	ALKA	2018	8	2	43.19	-0.00406	0	0.86	0	46	3	0.333333	82,600,000,000
29	ALKA	2019	8	2	49.13	-0.0058	0	- 0.38	0	47	3	0.333333	500,030,000,000
30	ALKA	2020	8	2	50.06	-0.00044	0	- 0.08	0	48	3	0.333333	548,240,000,000
31	ALKA	2021	8	2	50.06	0.009091	1	0.70	0	49	3	0.333333	370,570,000,000
32	ALKA	2022	8	2	52.63	0.035754	1	0.19	0	50	3	0.333333	455,180,000,000
33	AMAR	2021	9	8	29.54	0.045135	0	0.10	1	20	3	0.666667	4,140,000,000,000
34	ASII	2017	10	3	32.89	0.006066	1	0.14	1	60	4	0.333333	121,950,000,000,000
35	ASII	2018	10	3	32.89	-0.00586	1	0.16	1	61	4	0.3	139,320,000,000,000
36	ASII	2019	10	3	41.10	-0.00818	1	- 0.01	1	62	4	0.3	165,190,000,000,000
37	ASII	2020	10	3	48.01	0.017822	1	- 0.26	1	63	4	0.3	142,750,000,000,000
38	ASII	2021	10	3	48.01	0.007866	1	0.33	1	64	4	0.4	151,700,000,000,000
39	ASII	2022	10	3	53.47	-0.01686	1	0.29	1	65	4	0.363636	169,580,000,000,000
40	BABP	2018	11	8	27.60	-0.0067	0	- 0.89	0	15	4	0.333333	9,450,000,000,000
41	BABP	2019	11	8	29.78	-0.00546	0	0.09	0	16	4	0.333333	9,050,000,000,000
42	BABP	2020	11	8	32.19	-0.00518	0	- 0.06	0	17	4	0.333333	10,100,000,000,000
43	BABP	2021	11	8	32.19	-0.00521	0	- 0.02	0	18	4	0.333333	11,650,000,000,000
44	BABP	2022	11	8	33.72	-0.0062	0	0.13	0	19	4	0.25	14,150,000,000,000
45	BBKP	2017	12	8	17.37	-0.00464	1	0.04	0	27	5	0.5	95,870,000,000,000
46	BBKP	2018	12	8	32.74	-0.00465	1	- 0.16	0	28	6	0.5	99,680,000,000,000
47	BBKP	2019	12	8	32.93	-0.0051	1	- 0.02	0	29	6	0.666667	91,360,000,000,000
48	BBMD	2017	13	8	37.58	-0.00543	0	0.03	0	13	3	0.5	7,910,000,000,000
49	BBMD	2018	13	8	37.86	-0.00511	0	- 0.06	0	14	3	0.5	8,740,000,000,000
50	BBMD	2019	13	8	38.02	-0.00517	0	0.03	0	15	3	0.5	9,420,000,000,000
51	BBMD	2020	13	8	44.61	-0.00244	0	0.12	0	16	3	0.5	10,150,000,000,000
52	BBMD	2021	13	8	44.61	-0.00047	0	0.06	0	17	3	0.5	11,690,000,000,000
53	BBMD	2022	13	8	44.04	-0.00579	0	0.05	0	18	3	0.5	12,030,000,000,000
54	BGTG	2017	14	8	42.66	-0.00539	1	0.40	0	11	2	0.75	3,170,000,000,000
55	BGTG	2018	14	8	46.11	-0.00525	1	- 0.01	0	12	4	0.666667	3,460,000,000,000

56	BGTG	2019	14	8	54.12	-0.00521	1	0.03	0	13	4	0.666667	3,670,000,000,000
57	BGTG	2020	14	8	56.23	-0.00526	1	- 0.08	0	14	4	0.666667	4,230,000,000,000
58	BGTG	2021	14	8	56.23	-0.00517	1	- 0.11	0	15	4	0.666667	6,430,000,000,000
59	BGTG	2022	14	8	56.23	-0.00532	1	0.22	1	16	3	0.333333	5,830,000,000,000
60	BIPI	2017	15	1	52.19	0.116469	0	0.43	0	10	4	0.333333	12,670,000,000,000
61	BIPI	2018	15	1	51.33	-0.02976	1	7.85	0	11	4	0.25	13,290,000,000,000
62	BIPI	2019	15	1	53.11	0.007995	1	1.59	0	12	4	0.333333	15,270,000,000,000
63	BIPI	2020	15	1	53.76	0.003296	1	0.14	0	13	4	0.333333	12,280,000,000,000
64	BIPI	2021	15	1	53.76	0.010083	1	- 0.18	0	14	4	0.333333	7,800,000,000,000
65	BIPI	2022	15	1	57.45	0.008914	0	- 0.31	0	15	4	0.333333	9,210,000,000,000
66	BIPP	2019	16	6	38.66	-0.03906	0	- 0.07	0	38	3	0.333333	1,050,000,000,000
67	BIPP	2020	16	6	39.63	-0.0232	0	0.48	0	39	3	0.333333	919,580,000,000
68	BIPP	2021	16	6	39.63	-0.04386	0	- 0.45	0	40	3	0.333333	942,010,000,000
69	BMHS	2022	17	9	47.84	-0.02964	1	- 0.12	0	18	3	0.2	1,130,377,704,585
70	BNBA	2017	18	8	23.90	-0.00927	0	- 0.05	1	11	3	0.666667	5,820,000,000,000
71	BNBA	2018	18	8	25.89	-0.00901	0	- 0.04	1	12	3	0.666667	5,650,000,000,000
72	BNBA	2019	18	8	27.04	-0.00823	0	- 0.00	1	13	3	0.666667	6,080,000,000,000
73	BNBA	2020	18	8	31.84	-0.02856	0	- 0.04	1	14	3	0.666667	6,130,000,000,000
74	BNBA	2021	18	8	31.84	-0.00177	1	- 0.18	1	15	3	0.666667	6,420,000,000,000
75	BNBA	2022	18	8	33.81	-0.00982	1	0.02	1	16	3	0.25	5,130,000,000,000
76	BNGA	2017	19	8	45.41	-0.01014	1	- 0.03	1	32	4	0.5	229,350,000,000,000
77	BNGA	2018	19	8	46.46	-0.0116	1	0.01	1	33	4	0.571429	227,200,000,000,000
78	BNGA	2019	19	8	54.76	-0.00959	1	0.08	1	34	4	0.5	231,170,000,000,000
79	BNGA	2020	19	8	57.98	-0.00893	1	- 0.06	1	35	6	0.5	239,890,000,000,000
80	BNGA	2021	19	8	57.98	-0.00363	0	- 0.04	1	36	3	0.285714	267,400,000,000,000
81	BNGA	2022	19	8	58.59	-0.00962	0	0.04	1	37	5	0.285714	261,480,000,000,000
82	BNLI	2017	20	8	26.98	0.201088	1	- 0.13	1	35	3	0.5	146,240,000,000,000
83	BNLI	2018	20	8	31.55	0.046927	1	- 0.09	1	36	4	0.5	126,820,000,000,000
84	BNLI	2019	20	8	29.51	0.036899	0	0.07	1	37	4	0.5	137,410,000,000,000
85	BNLI	2020	20	8	30.69	-0.60995	0	0.03	1	38	4	0.5	162,650,000,000,000

86	BNLI	2021	20	8	30.69	0.084125	0	-	0.01	1	39	4	0.571429	197,770,000,000,000
87	BNLI	2022	20	8	30.69	-0.03121	1		0.04	1	40	4	0.5	217,500,000,000,000
88	BOLA	2021	21	9	50.95	-0.02437	0		1.51	0	7	3	0.333333	60,920,000,000
89	BPFI	2017	22	8	43.01	-0.00477	0		0.36	0	23	3	0.333333	533,800,000,000
90	BPFI	2018	22	8	45.44	-0.00459	0		0.28	0	24	3	0.333333	949,600,000,000
91	BPFI	2019	22	8	48.64	-0.00516	0	-	0.08	0	25	3	0.333333	1,000,000,000,000
92	BPFI	2020	22	8	59.99	-0.00521	0	-	0.16	0	26	3	0.333333	613,540,000,000
93	BPFI	2021	22	8	59.99	-0.00521	0	-	0.19	0	27	3	0.333333	377,310,000,000
94	BPFI	2022	22	8	57.65	-0.00523	0	-	0.04	0	28	3	0.333333	335,940,000,000
95	BRIS	2019	23	8	47.35	-0.00526	1		0.10	1	17	5	0.5	38,040,000,000,000
96	BRIS	2020	23	8	53.08	-0.00256	1		4.43	1	18	4	0.5	217,840,000,000,000
97	BRIS	2021	23	8	53.08	-0.00393	1		0.06	1	19	8	0.555556	240,280,000,000,000
98	BRIS	2022	23	8	52.34	0.050897	1		0.07	1	20	6	0.444444	272,220,000,000,000
99	BSSR	2017	24	1	47.35	0.002632	1		0.63	0	27	3	0.222222	766,860,000,000
100	BSSR	2018	24	1	47.62	-0.01549	1		0.20	0	28	3	0.5	818,630,000,000
101	BSSR	2019	24	1	49.18	0.044859	1	-	0.06	0	29	3	0.375	1,110,000,000,000
102	BSSR	2020	24	1	47.49	0.011423	1	-	0.18	0	30	3	0.375	1,020,000,000,000
103	BSSR	2021	24	1	47.49	-0.04341	1		1.05	0	31	3	0.375	2,600,000,000,000
104	BSSR	2022	24	1	49.64	-0.21644	1		0.54	0	32	3	0.375	2,860,000,000,000
105	BTEK	2018	25	4	51.38	-0.00395	0		0.00	0	17	3	0.333333	3,460,000,000,000
106	BTPN	2019	26	8	32.25	0.06912	1		0.38	1	61	3	0.4	150,160,000,000,000
107	BTPN	2020	26	8	37.46	0.007319	0	-	0.12	1	62	4	0.6	150,200,000,000,000
108	BTPN	2021	26	8	37.46	0.016472	0	-	0.08	1	63	4	0.6	155,840,000,000,000
109	BTPN	2022	26	8	49.37	-0.0108	0		0.07	1	64	4	0.6	169,760,000,000,000
110	BUVA	2018	27	5	58.25	-0.01167	0		0.94	0	18	3	0.4	1,570,000,000,000
111	CINT	2017	28	5	28.67	-0.01051	0		0.23	0	39	3	0.5	72,910,000,000
112	CINT	2018	28	5	40.99	-0.01445	0	-	0.01	0	40	3	0.333333	67,730,000,000
113	CINT	2019	28	5	42.12	-0.01516	0		0.10	0	41	3	0.333333	131,820,000,000
114	CINT	2020	28	5	52.91	-0.0163	0	-	0.19	0	42	3	0.333333	102,700,000,000
115	CITA	2020	29	2	29.99	-0.03272	0		0.12	0	28	3	0.5	686,130,000,000

116	CITA	2021	29	2	29.99	0.023737	0	0.05	0	29	3	0.5	635,240,000,000
117	CITA	2022	29	2	35.20	0.075351	0	0.24	0	30	3	0.5	932,720,000,000
118	CSRA	2021	30	1	39.22	0.003996	1	0.48	0	38	3	0.333333	971,950,000,000
119	DCII	2022	31	9	39.84	-0.02685	0	0.20	1	11	3	0.333333	1,630,000,000,000
120	DLTA	2020	32	4	35.10	-0.00741	1	- 0.34	0	50	3	0.4	205,680,000,000
121	DLTA	2021	32	4	35.10	0.00776	1	0.25	0	51	3	0.2	298,550,000,000
122	DLTA	2022	32	4	33.72	-0.13222	1	0.14	0	52	3	0.2	306,410,000,000
123	DNET	2017	33	9	21.30	-0.17129	1	1.49	1	22	3	0.428571	105,690,000,000
124	DNET	2018	33	9	21.30	0.282411	1	1.30	1	23	3	0.428571	60,440,000,000
125	DNET	2019	33	9	25.50	0.045435	1	0.99	1	24	3	0.428571	5,950,000,000,000
126	DNET	2020	33	9	25.78	-0.05759	1	0.90	1	25	3	0.428571	5,490,000,000,000
127	DNET	2021	33	9	25.78	0.168167	1	0.73	1	26	3	0.428571	6,830,000,000,000
128	DNET	2022	33	9	25.91	0.103348	1	0.35	1	27	3	0.5	6,590,000,000,000
129	DSSA	2021	34	1	40.22	0.00286	1	0.41	0	25	3	0.6	17,940,000,000,000
130	DSSA	2022	34	1	47.85	-0.0151	1	1.86	0	26	4	0.6	53,330,000,000,000
131	ELSA	2017	35	1	24.09	0.009936	0	0.38	1	48	3	0.4	1,310,000,000,000
132	ELSA	2018	35	1	29.42	0.008083	0	0.33	1	49	3	0.5	1,770,000,000,000
133	ELSA	2019	35	1	34.29	-0.01816	0	0.27	1	50	3	0.5	3,230,000,000,000
134	ELSA	2020	35	1	36.43	-0.02073	0	- 0.08	1	51	3	0.5	3,820,000,000,000
135	ELSA	2021	35	1	36.43	-0.04489	0	0.05	1	52	3	0.5	3,460,000,000,000
136	ELSA	2022	35	1	33.46	0.138606	1	0.51	1	53	3	0.5	4,720,000,000,000
137	EMDE	2017	36	6	58.55	0.001918	1	0.20	0	41	2	0.4	675,650,000,000
138	EMDE	2018	36	6	58.55	-0.05198	1	- 0.43	0	42	2	0.4	1,080,000,000,000
139	EMDE	2021	36	6	70.16	0.271653	1	1.02	0	45	4	0.5	2,030,000,000,000
140	ESSA	2021	37	2	31.99	0.024394	1	0.70	0	15	4	0.4	7,240,000,000,000
141	ESSA	2022	37	2	33.01	0.220965	1	1.50	0	16	4	0.5	4,740,000,000,000
142	GEMS	2017	38	1	23.91	-0.02156	1	0.99	1	20	3	0.5	1,530,000,000,000
143	GEMS	2018	38	1	23.34	0.006233	1	0.46	1	21	3	0.5	4,050,000,000,000
144	GEMS	2019	38	1	27.04	-0.00596	1	0.05	1	22	3	0.5	5,850,000,000,000
145	GEMS	2020	38	1	35.05	0.009605	1	- 0.01	1	23	3	0.5	6,470,000,000,000

146	GEMS	2021	38	1	35.05	-0.01412	1	0.47	1	24	3	0.5	7,300,000,000,000	
147	GEMS	2022	38	1	36.77	-0.10102	1	0.91	1	25	3	0.333333	8,850,000,000,000	
148	GGRP	2021	39	3	32.04	-0.01139	0	0.16	0	31	3	0.4	4,490,000,000,000	
149	GGRP	2022	39	3	32.87	0.002378	0	0.36	0	32	3	0.4	5,890,000,000,000	
150	HKMU	2019	40	9	29.51	-0.04721	1	0.41	0	9	3	0.5	1,140,000,000,000	
151	HOME	2017	41	9	36.61	-0.04874	0	0.15	0	28	2	0.666667	57,000,000,000	
152	HRUM	2017	42	1	21.57	0.009904	1	0.51	1	22	3	0.4	784,450,000,000	
153	HRUM	2018	42	1	21.57	0.028218	1	0.10	1	23	3	0.333333	863,960,000,000	
154	INDY	2017	43	1	53.99	0.230961	1	0.43	0	17	3	0.4	14,640,000,000,000	
155	INDY	2018	43	1	54.78	-0.1197	1	1.87	1	18	3	0.4	34,250,000,000,000	
156	INDY	2019	43	1	55.67	0.133623	1	-	0.07	0	19	3	0.4	35,590,000,000,000
157	INDY	2021	43	1	57.92	-0.18122	1	0.66	0	21	5	0.4	39,980,000,000,000	
158	INDY	2022	43	1	59.50	-0.34828	1	0.47	0	22	5	0.4	34,950,000,000,000	
159	INPP	2017	44	9	55.84	-0.01905	1	0.09	0	21	3	0.4	1,070,000,000,000	
160	INPP	2018	44	9	56.31	-0.04268	1	0.29	0	22	3	0.4	2,420,000,000,000	
161	INPP	2019	44	9	52.59	0.217167	0	0.17	0	23	3	0.4	1,660,000,000,000	
162	INRU	2017	45	2	18.59	0.255109	1	0.48	0	34	3	0.5	2,400,000,000,000	
163	INRU	2018	45	2	20.59	0.011561	1	0.04	0	35	3	0.666667	2,370,000,000,000	
164	INRU	2020	45	2	23.25	-0.26207	1	0.25	0	37	3	0.666667	4,330,000,000,000	
165	INRU	2021	45	2	23.25	-0.06129	1	0.14	0	38	3	0.75	4,540,000,000,000	
166	IPOL	2017	46	2	31.94	-0.00892	0	0.02	0	22	3	0.333333	1,720,000,000,000	
167	IPOL	2018	46	2	32.51	-0.00574	0	0.13	0	23	3	0.25	1,740,000,000,000	
168	IPOL	2019	46	2	32.51	-0.07054	0	-	0.05	0	24	3	0.25	1,580,000,000,000
169	IPOL	2020	46	2	50.58	-0.09455	0	0.00	0	25	3	0.5	1,460,000,000,000	
170	IPOL	2021	46	2	50.58	-0.28593	0	0.19	0	26	3	0.5	1,630,000,000,000	
171	IPTV	2020	47	9	33.86	-0.01149	1	0.05	0	14	3	0.5	4,550,000,000,000	
172	IPTV	2021	47	9	33.86	-0.01592	1	0.02	0	15	3	0.333333	4,180,000,000,000	
173	ITIC	2020	48	5	43.54	-0.03376	0	0.35	0	38	3	0.5	181,660,000,000	
174	ITIC	2021	48	5	43.54	-0.01828	0	0.06	0	39	3	0.5	202,020,000,000	
175	ITIC	2022	48	5	48.08	-0.03205	0	0.17	0	40	3	0.5	188,890,000,000	

176	ITMA	2017	49	1	31.07	0.020304	0	-	0.01	0	29	3	0.333333	367,290,000
177	ITMA	2018	49	1	31.98	0.006845	0	-	0.20	0	30	3	0.333333	359,030,000
178	ITMA	2019	49	1	42.31	0.011399	0	-	0.88	0	31	3	0.333333	4,090,000,000
179	ITMA	2020	49	1	44.10	0.005844	0	-	0.10	0	32	3	0.333333	3,520,000,000
180	ITMA	2021	49	1	44.10	0.004918	0	18.29	0	33	3	0.333333	152,720,000,000	
181	ITMA	2022	49	1	38.38	0.010035	0	0.01	0	34	3	0.333333	149,730,000,000	
182	JKON	2017	50	6	37.80	0.011803	0	-	0.03	0	56	3	0.4	1,810,000,000,000
183	JKON	2018	50	6	47.19	0.058863	0	0.15	0	57	3	0.666667	1,800,000,000,000	
184	JKON	2019	50	6	54.18	-0.01167	0	0.06	0	58	3	0.5	2,230,000,000,000	
185	JKON	2020	50	6	55.51	-0.0399	0	-	0.45	0	59	3	0.333333	1,880,000,000,000
186	JKON	2022	50	6	52.61	0.037659	1	0.28	0	61	3	0.5	1,450,000,000,000	
187	KAYU	2020	51	9	50.30	-0.05027	0	0.69	0	10	3	0.5	18,660,000,000	
188	KAYU	2021	51	9	50.30	-0.0487	0	-	0.93	0	11	3	0.5	157,560,000,000
189	KAYU	2022	51	9	52.52	-0.04866	0	3.49	0	12	3	0.5	24,260,000,000	
190	KOBX	2017	52	3	32.05	-0.02502	0	0.78	0	15	3	0.333333	785,960,000,000	
191	KOBX	2018	52	3	32.46	-0.0499	0	0.44	0	16	3	0.333333	908,650,000,000	
192	KOBX	2019	52	3	39.16	-0.02457	0	-	0.30	0	17	3	0.333333	1,260,000,000,000
193	KOBX	2021	52	3	48.34	0.072936	0	1.30	0	19	3	0.5	1,150,000,000,000	
194	KOBX	2022	52	3	52.33	0.03473	0	0.47	0	20	3	0.333333	2,290,000,000,000	
195	MAYA	2017	53	8	37.20	-0.08111	1	0.16	1	27	3	0.5	53,790,000,000,000	
196	MAYA	2018	53	8	40.92	-0.11936	1	0.15	0	28	3	0.5	66,200,000,000,000	
197	MAYA	2019	53	8	43.64	-0.06646	1	0.12	0	29	3	0.5	81,070,000,000,000	
198	MAYA	2020	53	8	46.81	-0.08654	1	-	0.42	0	30	3	0.5	79,600,000,000,000
199	MAYA	2021	53	8	46.81	0.008183	1	0.22	0	31	3	0.333333	105,130,000,000,000	
200	MAYA	2022	53	8	47.28	-0.05385	1	0.22	0	32	3	0.333333	121,530,000,000,000	
201	MBSS	2019	54	1	41.76	0.136002	0	0.03	1	25	4	0.4	640,490,000,000	
202	MBSS	2021	54	1	53.01	0.123656	0	0.31	0	27	3	0.5	121,490,000,000	
203	MBSS	2022	54	1	53.49	0.07841	0	0.25	0	28	3	0.333333	385,900,000,000	
204	MGNA	2020	55	5	45.66	-0.00602	0	0.59	0	17	3	0.5	193,930,000,000	
205	MKNT	2017	56	5	26.36	0.003021	1	22.38	0	9	3	0.333333	24,490,000,000	

206	MKNT	2018	56	5	27.65	-0.01742	1	-	0.25	0	10	3	0.5	11,050,000,000
207	MNCN	2017	57	5	42.78	-0.08956	1		0.05	0	20	4	0.333333	4,750,000,000,000
208	MNCN	2018	57	5	41.93	-0.00489	1		0.06	0	21	4	0.333333	5,260,000,000,000
209	MNCN	2019	57	5	44.61	0.038062	1		0.12	0	22	4	0.333333	5,310,000,000,000
210	MNCN	2020	57	5	43.54	0.058992	1	-	0.05	0	23	4	0.333333	4,460,000,000,000
211	MNCN	2021	57	5	43.54	0.065129	1		0.26	0	24	4	0.333333	3,120,000,000,000
212	MNCN	2022	57	5	46.33	0.051443	1	-	0.09	0	25	3	0.25	2,510,000,000,000
213	MPOW	2018	58	7	20.84	0.032878	0	-	0.12	0	10	3	0.333333	268,750,000,000
214	MPOW	2019	58	7	25.81	-0.00492	0	-	0.16	0	11	3	0.333333	252,210,000,000
215	MPOW	2020	58	7	29.69	0.011281	0	-	0.21	0	12	3	0.333333	128,110,000,000
216	MPOW	2021	58	7	29.69	0.031507	0		0.08	0	13	3	0.333333	94,180,000,000
217	MTLA	2017	59	6	30.74	0.05147	1		0.11	1	23	3	0.4	1,430,000,000,000
218	MTLA	2018	59	6	28.91	0.033244	1		0.09	1	24	3	0.4	1,820,000,000,000
219	MTLA	2019	59	6	35.13	0.018031	0		0.02	1	25	3	0.4	2,260,000,000,000
220	MTLA	2020	59	6	49.96	-0.01413	1	-	0.21	1	26	3	0.4	1,860,000,000,000
221	MTLA	2021	59	6	49.96	0.002158	1		0.08	0	27	3	0.4	2,000,000,000,000
222	MTLA	2022	59	6	58.25	0.00245	1		0.15	0	28	3	0.4	1,980,000,000,000
223	NICK	2019	60	9	41.43	-0.04212	0		0.20	0	12	3	0.333333	2,830,000,000
224	NISP	2017	61	8	40.86	0.01908	1		0.08	1	13	3	0.5	118,690,000,000,000
225	NISP	2018	61	8	41.96	0.02838	1		0.09	1	14	4	0.5	131,990,000,000,000
226	NISP	2019	61	8	48.00	0.022704	1		0.13	1	15	4	0.5	153,040,000,000,000
227	NISP	2020	61	8	54.80	0.019954	1	-	0.04	1	16	4	0.5	176,470,000,000,000
228	NISP	2021	61	8	54.80	0.169271	1	-	0.08	1	17	4	0.5	182,070,000,000,000
229	NISP	2022	61	8	54.70	-0.08027	1		0.07	1	18	4	0.5	204,290,000,000,000
230	OMRE	2018	62	6	59.32	-0.02881	1	-	0.17	0	35	4	0.333333	146,960,000,000
231	PANR	2017	63	5	23.15	-0.03302	0	-	0.06	0	22	3	0.4	1,530,000,000,000
232	PNLF	2017	64	8	22.08	0.05988	0		0.14	0	35	3	0.333333	4,600,000,000,000
233	PNLF	2018	64	8	32.59	0.070802	0	-	0.14	0	36	3	0.333333	4,510,000,000,000
234	PNLF	2019	64	8	37.38	0.071218	0		0.03	0	37	3	0.333333	4,410,000,000,000
235	PNLF	2020	64	8	44.79	0.063079	0	-	0.34	0	38	3	0.333333	4,540,000,000,000

236	PNLF	2021	64	8	44.79	0.044897	0	-	0.04	0	39	3	0.25	4,480,000,000,000
237	PNLF	2022	64	8	49.52	-0.06085	0	-	0.05	0	40	3	0.333333	4,190,000,000,000
238	PTSP	2017	65	5	48.91	-0.01136	0		0.13	0	34	3	0.25	154,420,000,000
239	PTSP	2018	65	5	51.40	-0.01176	0		0.17	0	35	3	0.333333	153,800,000,000
240	PTSP	2019	65	5	49.69	-0.01175	0		0.15	0	36	3	0.333333	162,090,000,000
241	PTSP	2022	65	5	45.03	0.003566	0		0.31	0	39	3	0.333333	156,650,000,000
242	PYFA	2017	66	6	43.90	-0.05922	0		0.03	0	41	4	0.5	61,550,000,000
243	PYFA	2018	66	6	45.87	-0.06094	0		0.12	0	42	4	0.5	58,730,000,000
244	PYFA	2019	66	6	42.33	-0.06255	0	-	0.01	0	43	4	0.5	66,060,000,000
245	PYFA	2020	66	6	45.53	-0.05066	0		0.12	0	44	3	0.5	70,940,000,000
246	PYFA	2021	66	6	45.53	-0.00506	0		1.27	0	45	3	0.5	639,120,000,000
247	PYFA	2022	66	6	48.09	0.179295	0		0.13	0	46	3	0.75	1,080,000,000,000
248	PZZA	2019	67	9	26.36	-0.03133	1		0.12	1	12	3	0.333333	769,300,000,000
249	PZZA	2021	67	9	27.21	-0.02476	0	-	0.01	0	14	3	0.333333	974,960,000,000
250	RANC	2017	68	4	23.02	0.008056	0		0.06	0	20	3	0.333333	290,120,000,000
251	RANC	2018	68	4	23.87	0.017694	0		0.08	0	21	3	0.333333	343,420,000,000
252	RANC	2019	68	4	24.73	0.023013	0		0.02	0	22	3	0.333333	404,690,000,000
253	RANC	2020	68	4	33.79	0.000282	0		0.26	0	23	3	0.333333	774,630,000,000
254	RANC	2021	68	4	33.79	0.015915	0	-	0.04	0	24	3	0.333333	1,000,000,000,000
255	RICY	2017	69	5	16.55	-0.02557	0		0.31	0	30	3	0.333333	876,180,000,000
256	RICY	2018	69	5	19.76	0.042115	0		0.32	0	31	3	0.333333	798,110,000,000
257	RICY	2019	69	5	28.58	-0.01529	0		0.02	0	32	3	0.333333	1,160,000,000,000
258	RSGK	2022	70	9	54.36	-0.07584	0	-	0.17	1	31	3	0.5	78,153,729,326
259	SDRA	2018	71	8	33.84	0.007444	0		0.11	1	35	4	0.75	20,980,000,000,000
260	SDRA	2019	71	8	33.04	0.005598	0		0.12	1	36	5	0.75	30,000,000,000,000
261	SDRA	2020	71	8	38.89	0.006628	1	-	0.03	1	37	5	0.75	30,780,000,000,000
262	SDRA	2021	71	8	38.89	0.005363	1		0.00	0	38	4	0.666667	34,540,000,000,000
263	SIPD	2019	72	4	26.53	0.008354	1		0.30	0	34	3	0.25	1,450,000,000,000
264	SIPD	2020	72	4	30.71	0.006254	1		0.07	0	35	3	0.25	1,720,000,000,000
265	SOCI	2017	73	1	24.71	0.007923	0		0.07	0	7	3	0.333333	3,530,000,000,000

266	SOCI	2018	73	1	23.87	-0.00021	0	0.02	0	8	3	0.333333	3,250,000,000,000
267	SOCI	2019	73	1	24.71	-0.01141	0	0.18	0	9	3	0.5	4,880,000,000,000
268	SOCI	2020	73	1	29.86	0.029698	0	- 0.15	0	10	3	0.5	4,160,000,000,000
269	SOCI	2021	73	1	29.86	-0.01456	0	- 0.03	0	11	3	0.5	3,730,000,000,000
270	SOCI	2022	73	1	31.33	-0.0007	0	0.16	0	12	3	0.5	4,030,000,000,000
271	TAYS	2022	74	5	58.36	-0.01552	0	0.05	0	24	3	0.5	264,237,494,400
272	TBIG	2017	75	7	37.34	0.170715	1	0.08	0	13	3	0.75	22,000,000,000,000
273	TBIG	2018	75	7	39.34	-0.033	1	0.07	0	14	3	0.75	22,410,000,000,000
274	TBIG	2019	75	7	40.66	-0.07957	1	0.09	0	15	3	0.75	25,350,000,000,000
275	TBIG	2020	75	7	52.32	-0.0652	1	0.13	0	16	3	0.75	27,220,000,000,000
276	TBIG	2021	75	7	52.32	-0.03536	0	0.16	0	17	3	0.666667	32,080,000,000,000
277	TBIG	2022	75	7	60.60	-0.02833	0	0.06	0	18	3	0.5	32,220,000,000,000
278	TINS	2017	76	2	41.62	0.004573	1	0.32	1	41	4	0.125	3,890,000,000,000
279	TINS	2018	76	2	42.19	0.202013	1	0.20	1	42	4	0.2	5,810,000,000,000
280	TINS	2021	76	2	57.33	0.377602	1	- 0.04	1	45	4	0.333333	8,380,000,000,000
281	TINS	2022	76	2	63.71	-0.33214	1	- 0.14	1	46	3	0.333333	6,030,000,000,000
282	TOYS	2022	77	5	46.28	-0.01501	0	0.11	0	22	3	0.333333	102,271,048,390
283	TRIO	2022	78	5	37.56	0.147024	0	0.25	0	26	3	0.5	3,800,000,000,000
284	UNSP	2021	79	4	46.09	0.031619	1	0.58	0	110	3	0.4	15,150,000,000,000
285	VICO	2017	80	8	37.05	-0.00117	0	9.47	0	14	3	0.333333	23,410,000,000,000
286	VICO	2018	80	8	37.90	-0.00401	0	- 0.06	0	15	3	0.333333	26,090,000,000,000
287	VICO	2019	80	8	43.86	-0.00265	0	0.01	0	16	3	0.333333	27,740,000,000,000
288	VICO	2022	80	8	44.88	-0.01189	0	- 0.15	0	19	4	0.5	23,570,000,000,000
289	VINS	2017	81	8	53.96	0.026062	0	- 0.82	0	35	3	0.666667	66,610,000,000
290	VINS	2018	81	8	57.58	0.036417	0	- 0.18	0	36	3	0.666667	46,030,000,000
291	VINS	2019	81	8	59.33	0.10209	0	0.30	0	37	3	0.666667	97,840,000,000
292	VINS	2020	81	8	58.68	0.028986	0	- 0.23	0	38	3	0.666667	138,100,000,000
293	VINS	2021	81	8	58.68	0.029417	0	0.31	0	39	3	0.666667	115,980,000,000
294	VINS	2022	81	8	58.20	0.027314	0	- 0.03	0	40	3	0.666667	110,510,000,000
295	WEGE	2018	82	6	40.21	0.014744	1	0.49	0	10	4	0.333333	1,380,000,000,000

296	WEGE	2019	82	6	40.21	0.019345	1	-	0.22	0	11	4	0.25	2,880,000,000,000
297	WEGE	2020	82	6	49.04	-0.03754	1	-	0.38	0	12	3	0.333333	3,890,000,000,000
298	WEGE	2021	82	6	49.04	-0.01894	1	-	0.13	0	13	3	0.4	3,590,000,000,000
299	WEGE	2022	82	6	49.25	-0.01636	1	-	0.25	0	14	3	0.4	2,880,000,000,000
300	WIIM	2017	83	4	52.24	0.006262	1	-	0.12	0	23	3	0.333333	362,540,000,000
301	WIIM	2018	83	4	48.06	0.002048	1	-	0.05	0	24	3	0.333333	398,990,000,000
302	WIIM	2019	83	4	53.74	0.002252	1	-	0.01	0	25	3	0.333333	266,350,000,000
303	WIIM	2020	83	4	63.47	0.015278	1	-	0.43	0	26	3	0.333333	428,590,000,000
304	WIIM	2021	83	4	63.47	0.018757	1	-	0.37	0	27	3	0.333333	572,780,000,000
305	WIIM	2022	83	4	63.47	-0.04318	1	-	0.36	0	28	3	0.5	667,870,000,000
306	ZONE	2019	84	4	35.67	0.007448	0	-	0.32	0	14	3	0.5	173,000,000,000
307	ZONE	2021	84	4	40.49	0.010572	0	-	0.42	0	16	3	0.5	278,970,000,000
308	ZONE	2022	84	4	39.10	0.005204	0	-	0.45	0	17	3	0.333333	304,930,000,000

## LAMPIRAN 2: HASIL UJI UTAMA

## STATISTIK DESKRIPTIF

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
CS	308	40.96896	11.2575	16.55	70.16
dtax	308	-7.33e-20	.08132	-.6099517	.3776021
growth	308	.361321	1.82977	-.9316815	22.3815
age	308	28.03247	14.07283	7	110
aucom	308	3.292208	.6549767	2	8
incom	308	.4306862	.1267628	.125	.75
Liability	308	2.61e+13	5.69e+13	3.59e+08	2.72e+14

Koneksi politik	Freq.	Percent	Cum.
0	164	53.25	53.25
1	144	46.75	100.00
Total	308	100.00	

Kualitas audit	Freq.	Percent	Cum.
0	219	71.10	71.10
1	89	28.90	100.00
Total	308	100.00	

## PEMILIHAN MODEL

## 1. Uji Chow

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	308
Group variable: id	Number of groups	=	84
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.4957	min =		1
Between = 0.0055	avg =		3.7
Overall = 0.0105	max =		6
corr(u <sub>i</sub> , X <sub>b</sub> ) = -0.9308	F(8,216)	=	26.53
	Prob > F	=	0.0000

CS	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
dtax	-43.09289	16.06588	-2.68	0.008	-74.75887	-11.42692
1.pol_dummy	.7094165	1.082801	0.66	0.513	-1.424793	2.843626
pol_dummy#c.dtax						
1	37.02529	20.24001	1.83	0.069	-2.867915	76.9185
growth	.0372125	.1568378	0.24	0.813	-.2719159	.3463409
bigf	-2.297992	1.770926	-1.30	0.196	-5.7885	1.192516
age	2.515031	.1832466	13.72	0.000	2.153851	2.876211
aucom	-1.088816	1.110694	-0.98	0.328	-3.278002	1.10037
incom	5.434606	3.942269	1.38	0.169	-2.335636	13.20485
_cons	-26.06359	6.467218	-4.03	0.000	-38.81053	-13.31666
sigma_u	28.788255					
sigma_e	4.1295486					
rho	.97983822	(fraction of variance due to u <sub>i</sub> )				

F test that all u<sub>i</sub>=0: F(83, 216) = 21.81

Prob &gt; F = 0.0000

**2. Uji Hausman**

Random-effects GLS regression  
Group variable: id

Number of obs = 308  
Number of groups = 84

R-squared:

Within = 0.3481  
Between = 0.0141  
Overall = 0.0250

Obs per group:

min = 1  
avg = 3.7  
max = 6

corr(u\_i, X) = 0 (assumed)

Wald chi2(8) = 56.56  
Prob > chi2 = 0.0000

	CS	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
dtax		-32.6508	18.54909	-1.76	0.078	-69.00634	3.704745
1.pol_dummy		.4928222	1.191344	0.41	0.679	-1.842169	2.827813
pol_dummy#c.dtax							
1		12.33385	23.4298	0.53	0.599	-33.58772	58.25542
growth		.0437801	.1856076	0.24	0.814	-.3200042	.4075644
bigf		-5.413728	1.765465	-3.07	0.002	-8.873977	-1.95348
age		.6809382	.1088431	6.26	0.000	.4676096	.8942667
aucom		-.1647817	1.257752	-0.13	0.896	-2.629931	2.300367
incom		3.566439	4.417845	0.81	0.420	-5.092378	12.22526
_cons		22.62509	5.340307	4.24	0.000	12.15828	33.0919
sigma_u		10.161993					
sigma_e		4.1295486					
rho		.85826733	(fraction of variance due to u_i)				

**Uji Asumsi Klasik****1. Uji Normalitas**

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
residuals	308	0.99171	1.808	1.392	0.08198

**2. Uji multikolinearitas**

Variable	VIF	1/VIF
dtax	2.11	0.474035
1.pol_dummy	1.12	0.895446
pol_dummy#c.dtax		
1	2.14	0.466981
growth	1.02	0.979640
bigf	1.13	0.882205
age	1.02	0.979332
aucom	1.12	0.891522
incom	1.05	0.952533
Mean VIF	1.34	

**3. Uji heteroskedastisitas**

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

Variable: Fitted values of CS

H0: Constant variance

chi2(1) = 2.07  
Prob > chi2 = 0.1501

**4. uji autokorelasi**

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 50) = 60.141  
 Prob > F = 0.0000

### UJI REGRESI- Feasible Generalized Least Squares (FGLS)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances = 1 Number of obs = 308  
 Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 84  
 Estimated coefficients = 92 Obs per group:

min = 1  
 avg = 3.666667  
 max = 6

Wald chi2(91) = 2945.22  
 Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -819.1864

CS	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
dtax	-43.09289	13.45414	-3.20	0.001	-69.46253	-16.72326
1.pol_dummy	.7094165	.9067764	0.78	0.434	-1.067833	2.486666
pol_dummy#c.dtax						
1	37.02529	16.94971	2.18	0.029	3.804477	70.2461
growth	.0372125	.1313415	0.28	0.777	-.2202122	.2946372
bigf	-2.297992	1.483037	-1.55	0.121	-5.204691	.6087062
age	2.515031	.1534573	16.39	0.000	2.21426	2.815802
aucom	-1.088816	.9301348	-1.17	0.242	-2.911847	.7342144
incom	5.434606	3.301397	1.65	0.100	-1.036014	11.90523
id						
2	9.685867	3.766538	2.57	0.010	2.303589	17.06815
3	-50.55491	3.485825	-14.50	0.000	-57.387	-43.72282
4	39.96236	3.895568	10.26	0.000	32.32719	47.59753
5	39.52118	3.755273	10.52	0.000	32.16098	46.88138
6	37.86517	3.59144	10.54	0.000	30.82607	44.90426
7	.8865175	2.569269	0.35	0.730	-4.149158	5.922193
8	-26.36198	3.063435	-8.61	0.000	-32.3662	-20.35776
9	24.91813	4.605023	5.41	0.000	15.89245	33.94381
10	-29.55033	3.768811	-7.84	0.000	-36.93706	-22.16359
11	32.52851	3.662231	8.88	0.000	25.35067	39.70635
12	-3456209	3.08024	-0.11	0.911	-6.382779	5.691538
13	44.30534	3.676579	12.05	0.000	37.09938	51.51131
14	58.74996	3.950562	14.87	0.000	51.007	66.49292
15	64.01583	4.047422	15.82	0.000	56.08303	71.94863
16	-17.05256	2.978068	-5.73	0.000	-22.88946	-11.21565
17	45.6602	4.825945	9.46	0.000	36.20152	55.11888
18	37.3157	3.981778	9.37	0.000	29.51156	45.11984
19	12.02651	2.899911	4.15	0.000	6.342784	17.71023
20	-18.76552	2.96139	-6.34	0.000	-24.56974	-12.9613
21	60.39924	5.13115	11.77	0.000	50.34238	70.45611
22	31.35311	2.707619	11.58	0.000	26.04627	36.65994
23	49.97296	3.784429	13.20	0.000	42.55562	57.39031
24	16.20903	2.600337	6.23	0.000	11.11246	21.3056
25	51.70487	4.735043	10.92	0.000	42.42435	60.98538
26	-33.83244	3.778746	-8.95	0.000	-41.23864	-26.42623
27	55.33017	4.649536	11.90	0.000	46.21725	64.4431
28	-18.2709	2.774311	-6.59	0.000	-23.70845	-12.83335
29	1.86185	2.794864	0.67	0.505	-3.615983	7.339682
30	-13.80318	4.082981	-3.38	0.001	-21.80568	-5.800687
31	51.52884	5.172326	9.96	0.000	41.39127	61.66641
32	-40.76777	3.533243	-11.54	0.000	-47.6928	-33.84274
33	6.98739	3.126157	2.24	0.025	.8602353	13.11455
34	21.45906	3.472179	6.18	0.000	14.65371	28.2644
35	-41.65853	3.634871	-11.46	0.000	-48.78275	-34.53432
36	-2.517128	3.156597	-0.80	0.425	-8.703944	3.669688
37	36.72799	4.297551	8.55	0.000	28.30494	45.15103
38	17.5933	3.265619	5.39	0.000	11.1928	23.99379
39	-4.08372	3.10386	-1.32	0.188	-10.16717	1.999733
40	38.14868	5.201554	7.33	0.000	27.95382	48.34354
41	5.522859	4.251362	1.30	0.194	-2.809657	13.85537
42	9.744394	3.81685	2.55	0.011	2.263506	17.22528

43	50.58578	3.389075	14.93	0.000	43.94332	57.22825
44	42.72672	3.336211	12.81	0.000	36.18786	49.26557
45	-28.33584	2.791577	-10.15	0.000	-33.80723	-22.86445
46	20.86051	2.979686	7.00	0.000	15.02044	26.70059
47	39.39633	4.381224	8.99	0.000	30.80929	47.98337
48	-11.90298	2.953519	-4.03	0.000	-17.69177	-6.114193
49	3.004151	2.383474	1.26	0.208	-1.667373	7.675675
50	-26.22635	3.137532	-8.36	0.000	-32.3758	-20.0769
51	58.52868	4.336545	13.50	0.000	50.02921	67.02816
52	40.114	3.524065	11.38	0.000	33.20696	47.02104
53	11.64657	2.640735	4.41	0.000	6.470825	16.82232
54	28.8827	2.91584	9.91	0.000	23.16775	34.59764
55	44.96821	4.719548	9.53	0.000	35.71806	54.21835
56	35.94267	4.748837	7.57	0.000	26.63512	45.25022
57	30.87549	3.115924	9.91	0.000	24.76839	36.98259
58	37.82893	4.112633	9.20	0.000	29.76831	45.88954
59	22.05845	2.849983	7.74	0.000	16.47258	27.64431
60	50.1628	5.16382	9.71	0.000	40.0419	60.2837
61	55.14228	3.89852	14.14	0.000	47.50132	62.78324
62	14.75572	4.116188	3.58	0.000	6.688142	22.8233
63	9.287153	4.405188	2.11	0.035	.6531432	17.92116
64	-10.79041	2.34532	-4.60	0.000	-15.38715	-6.193664
65	1.236095	2.603044	0.47	0.635	-3.865777	6.337967
66	-22.6328	2.869012	-7.89	0.000	-28.25596	-17.00964
67	36.24668	4.428407	8.19	0.000	27.56716	44.9262
68	16.31728	3.042405	5.36	0.000	10.35428	22.28029
69	-13.07515	2.781186	-4.70	0.000	-18.52618	-7.624129
70	18.80378	4.370867	4.30	0.000	10.23704	27.37052
71	-11.91957	3.08901	-3.86	0.000	-17.97392	-5.865221
72	-15.11681	3.251207	-4.65	0.000	-21.48906	-8.744564
73	37.41713	3.971699	9.42	0.000	29.63275	45.20152
74	39.67366	4.244896	9.35	0.000	31.35382	47.9935
75	48.39001	3.808432	12.71	0.000	40.92562	55.85439
76	-11.96445	3.614172	-3.31	0.001	-19.0481	-4.880807
77	33.54922	4.375777	7.67	0.000	24.97286	42.12559
78	17.08528	4.081967	4.19	0.000	9.08477	25.08579
79	-29.76722	4.517576	-6.59	0.000	-38.6215	-20.91293
80	43.6799	3.771274	11.58	0.000	36.28834	51.07146
81	6.362517	2.412533	2.64	0.008	1.634039	11.091
82	55.22891	4.118111	13.41	0.000	47.15756	63.30026
83	35.66089	2.819598	12.65	0.000	30.13458	41.1872
84	41.98372	3.904364	10.75	0.000	34.3313	49.63613
_cons	-41.79594	6.437633	-6.49	0.000	-54.41347	-29.17841

**ADJUSTED R SQUARE**

. di e(r2\_a)  
.48215599

SEMARANG  
FEB UNDIP



-----  
**UJI ASUMSI KLASIK**

**1. Uji Normalitas**

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
residuals	308	0.99176	1.797	1.377	0.08426

**2. Uji multikolinearitas**

Variable	VIF	1/VIF
dtax	2.12	0.471322
1.pol_dummy	1.19	0.840537
pol_dummy#		
c.dtax		
1	2.18	0.459002
growth	1.03	0.971445
bigf	1.35	0.740147
age	1.04	0.965219
aucom	1.37	0.730390
incom	1.06	0.940582
Lnliabilit~w	1.84	0.544078
Mean VIF	1.46	

**3. Uji heteroskedastisitas**

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

Variable: Fitted values of CS

H0: Constant variance

chi2(1) = 1.31  
 Prob > chi2 = 0.2525

**4. uji autokorelasi**

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 50) = 60.725  
 Prob > F = 0.0000

**UJI REGRESI- Feasible Generalized Least Squares (FGLS)**

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances = 1 Number of obs = 308  
 Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 84  
 Estimated coefficients = 93 Obs per group:

min = 1  
 avg = 3.666667  
 max = 6

Log likelihood = -819.093 Wald chi2(92) = 2947.20  
 Prob > chi2 = 0.0000

CS	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
dtax	-42.47986	13.52464	-3.14	0.002	-68.98767 -15.97205
1.pol_dummy	.7362468	.9086245	0.81	0.418	-1.044624 2.517118
pol_dummy#c.dtax					
1	36.54034	16.98168	2.15	0.031	3.256864 69.82381
growth	.0377341	.1313073	0.29	0.774	-.2196235 .2950916
bigf	-2.23539	1.489645	-1.50	0.133	-5.155041 .6842613
age	2.543707	.1671422	15.22	0.000	2.216114 2.871299
aucom	-1.085897	.9298774	-1.17	0.243	-2.908423 .7366293
incom	5.476685	3.301832	1.66	0.097	-.9947871 11.94816
Lnliability	-.2349146	.5435105	-0.43	0.666	-1.300175 .8303463
id					
2	10.13758	3.907743	2.59	0.009	2.478545 17.79662
3	-50.12906	3.621378	-13.84	0.000	-57.22683 -43.03129

4	41.16455	4.785676	8.60	0.000	31.7848	50.5443
5	40.53387	4.425293	9.16	0.000	31.86046	49.20729
6	38.77084	4.157086	9.33	0.000	30.6231	46.91858
7	.7260431	2.595187	0.28	0.780	-4.360429	5.812516
8	-27.01909	3.419107	-7.90	0.000	-33.72041	-20.31776
9	25.54233	4.824839	5.29	0.000	16.08582	34.99884
10	-28.89453	4.061705	-7.11	0.000	-36.85533	-20.93374
11	33.56825	4.380713	7.66	0.000	24.98221	42.15429
12	.8525147	4.143246	0.21	0.837	-7.268098	8.973128
13	45.3627	4.415172	10.27	0.000	36.70912	54.01628
14	59.609	4.421282	13.48	0.000	50.94345	68.27456
15	65.14211	4.812687	13.54	0.000	55.70942	74.5748
16	-17.18831	2.993688	-5.74	0.000	-23.05583	-11.32079
17	46.12379	4.942273	9.33	0.000	36.43711	55.81047
18	38.22105	4.498061	8.50	0.000	29.40501	47.03709
19	13.04793	3.740212	3.49	0.000	5.717249	20.37861
20	-17.83705	3.657741	-4.88	0.000	-25.00609	-10.66801
21	60.51375	5.136432	11.78	0.000	50.44653	70.58097
22	31.46667	2.719521	11.57	0.000	26.13651	36.79683
23	51.36897	4.97447	10.33	0.000	41.61919	61.11875
24	16.36914	2.62581	6.23	0.000	11.22265	21.51563
25	52.47972	5.061712	10.37	0.000	42.55894	62.40049
26	-33.1688	4.077723	-8.13	0.000	-41.16099	-25.17661
27	55.89216	4.82656	11.58	0.000	46.43227	65.35204
28	-18.94746	3.184701	-5.95	0.000	-25.18936	-12.70556
29	1.910612	2.796293	0.68	0.494	-3.570023	7.391246
30	-13.95881	4.097593	-3.41	0.001	-21.98994	-5.927671
31	52.19291	5.394194	9.68	0.000	41.62048	62.76534
32	-41.48014	3.897785	-10.64	0.000	-49.11966	-33.84062
33	7.276619	3.196049	2.28	0.023	1.012479	13.54076
34	22.463	4.176607	5.38	0.000	14.277	30.649
35	-41.86537	3.665145	-11.42	0.000	-49.04892	-34.68182
36	-2.774099	3.211159	-0.86	0.388	-9.067855	3.519657
37	37.6265	4.772767	7.88	0.000	28.27205	46.98095
38	18.19943	3.553092	5.12	0.000	11.2355	25.16336
39	-3.63417	3.2726	-1.11	0.267	-10.04835	2.780008
40	38.74699	5.381077	7.20	0.000	28.20027	49.29371
41	5.208857	4.311718	1.21	0.227	-3.241954	13.65967
42	9.928388	3.839366	2.59	0.010	2.403369	17.45341
43	51.75525	4.33589	11.94	0.000	43.25707	60.25344
44	43.14797	3.474693	12.42	0.000	36.3377	49.95825
45	-28.16188	2.819604	-9.99	0.000	-33.6882	-22.63556
46	21.27383	3.128515	6.80	0.000	15.14206	27.40561
47	40.26622	4.820181	8.35	0.000	30.81884	49.7136
48	-12.43224	3.196469	-3.89	0.000	-18.6972	-6.167274
49	2.583599	2.573763	1.00	0.315	-2.460883	7.628082
50	-26.48034	3.191153	-8.30	0.000	-32.73488	-20.22579
51	58.67199	4.34789	13.49	0.000	50.15028	67.1937
52	40.62282	3.714481	10.94	0.000	33.34257	47.90307
53	12.7662	3.698586	3.45	0.001	5.5171	20.01529
54	28.7499	2.931103	9.81	0.000	23.00505	34.49476
55	45.06009	4.722904	9.54	0.000	35.80337	54.31681
56	36.00784	4.749791	7.58	0.000	26.69842	45.31726
57	31.49716	3.431017	9.18	0.000	24.77249	38.22183
58	38.01113	4.132943	9.20	0.000	29.91072	46.11155
59	22.37273	2.940443	7.61	0.000	16.60957	28.13589
60	50.28887	5.170489	9.73	0.000	40.1549	60.42284
61	56.69184	5.295513	10.71	0.000	46.31283	67.07086
62	14.24396	4.281904	3.33	0.001	5.851581	22.63633
63	9.741981	4.527834	2.15	0.031	.8675892	18.61637
64	-10.56968	2.399579	-4.40	0.000	-15.27277	-5.866596
65	.7422844	2.842015	0.26	0.794	-4.827962	6.312531
66	-23.25136	3.205373	-7.25	0.000	-29.53378	-16.96895
67	36.75895	4.582972	8.02	0.000	27.77649	45.74141
68	16.48388	3.06581	5.38	0.000	10.475	22.49276
69	-13.01253	2.784116	-4.67	0.000	-18.4693	-7.555764
70	18.35032	4.493732	4.08	0.000	9.542765	27.15787
71	-11.29249	3.411916	-3.31	0.001	-17.97972	-4.605255
72	-15.05481	3.253386	-4.63	0.000	-21.43133	-8.678292
73	38.32639	4.493374	8.53	0.000	29.51954	47.13324
74	39.64359	4.244179	9.34	0.000	31.32516	47.96203
75	49.65932	4.808311	10.33	0.000	40.2352	59.08344
76	-11.92042	3.614512	-3.30	0.001	-19.00474	-4.83611
77	33.40064	4.387938	7.61	0.000	24.80044	42.00084
78	17.57779	4.236842	4.15	0.000	9.273735	25.88185
79	-29.54214	4.546131	-6.50	0.000	-38.45239	-20.63188
80	44.9462	4.77467	9.41	0.000	35.58802	54.30438
81	5.730112	2.820929	2.03	0.042	.2011922	11.25903

82		56.02971	4.51457	12.41	0.000	47.18132	64.87811
83		35.67158	2.818851	12.65	0.000	30.14673	41.19643
84		42.16281	3.925112	10.74	0.000	34.46973	49.85588
_cons		-36.29611	14.25957	-2.55	0.011	-64.24437	-8.347861

**ADJUSTED R SQUARE**

```
. di e(r2_a)
.48073321
```





Variable	VIF	1/VIF
dtax	2.11	0.473736
1.pol_dummy	1.13	0.887377
pol_dummy#c.dtax		
1	2.14	0.466758
growth	1.02	0.979560
bigf	1.15	0.872537
age	1.02	0.977097
aucom	1.12	0.889887
incom	1.06	0.944399
Mean VIF	1.34	

### 3. Uji heteroskedastisitas

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

Variable: Fitted values of CS

H0: Constant variance

chi2(1) = 1.46  
Prob > chi2 = 0.2270

### 4. uji Autokorelasi

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 50) = 59.485  
Prob > F = 0.0000

### UJI REGRESI- Feasible Generalized Least Squares (FGLS)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances	=	1	Number of obs	=	303
Estimated autocorrelations	=	0	Number of groups	=	83
Estimated coefficients	=	91	Obs per group:		
			min	=	1
			avg	=	3.650602
			max	=	6
			Wald chi2(90)	=	2941.46
Log likelihood	=	-802.6131	Prob > chi2	=	0.0000

CS	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
dtax	-45.3635	13.38183	-3.39	0.001	-71.5914 -19.1356
1.pol_dummy	.6810983	.8973316	0.76	0.448	-1.077639 2.439836
pol_dummy#c.dtax					
1	35.35585	17.09079	2.07	0.039	1.858514 68.85319
growth	.0383525	.1301923	0.29	0.768	-.2168197 .2935247
bigf	-2.801045	1.475695	-1.90	0.058	-5.693355 .0912646
age	2.442442	.1548518	15.77	0.000	2.138938 2.745946
aucom	-1.933143	.9688294	-2.00	0.046	-3.832013 -.0342722
incom	6.532694	3.31531	1.97	0.049	.0348052 13.03058
id					
2	9.070284	3.740439	2.42	0.015	1.739159 16.40141
3	-49.90376	3.458034	-14.43	0.000	-56.68138 -43.12614
4	39.99849	3.912155	10.22	0.000	32.33081 47.66617
5	38.60843	3.743641	10.31	0.000	31.27103 45.94583
6	37.46419	3.560271	10.52	0.000	30.48619 44.4422
7	.4086215	2.55188	0.16	0.873	-4.592972 5.410215
8	-25.60511	3.046042	-8.41	0.000	-31.57524 -19.63498
9	23.96514	4.569922	5.24	0.000	15.00826 32.92202
10	-27.40613	3.799855	-7.21	0.000	-34.85371 -19.95856
11	31.9681	3.647278	8.76	0.000	24.81957 39.11664
12	-.3475094	3.050238	-0.11	0.909	-6.325866 5.630847
13	42.59401	3.695471	11.53	0.000	35.35102 49.837
14	59.33868	3.967895	14.95	0.000	51.56175 67.11561
15	63.2488	4.036136	15.67	0.000	55.33811 71.15948
16	-16.94606	2.947736	-5.75	0.000	-22.72352 -11.16861
17	44.38072	4.822391	9.20	0.000	34.929 53.83243

18	35.88211	3.980918	9.01	0.000	28.07966	43.68457
19	12.96309	2.887446	4.49	0.000	7.303802	18.62238
20	-17.59046	2.960976	-5.94	0.000	-23.39387	-11.78705
21	58.64169	5.129837	11.43	0.000	48.58739	68.69599
22	30.5485	2.702679	11.30	0.000	25.25135	35.84566
23	49.90161	3.754741	13.29	0.000	42.54245	57.26076
24	15.66063	2.585005	6.06	0.000	10.59411	20.72715
25	50.28574	4.724717	10.64	0.000	41.02546	59.54601
26	-32.09319	3.800248	-8.45	0.000	-39.54154	-24.64484
27	53.89184	4.636203	11.62	0.000	44.80505	62.97863
28	-18.05304	2.747192	-6.57	0.000	-23.43744	-12.66865
29	1.178112	2.775101	0.42	0.671	-4.260986	6.617211
30	-13.64545	4.039718	-3.38	0.001	-21.56316	-5.727752
31	50.27019	5.155956	9.75	0.000	40.1647	60.37567
32	-39.96401	3.507159	-11.39	0.000	-46.83791	-33.0911
33	6.616376	3.100932	2.13	0.033	.5386612	12.69409
34	20.79817	3.443179	6.04	0.000	14.04966	27.54668
35	-40.53381	3.625668	-11.18	0.000	-47.63999	-33.42763
36	1.579991	4.483091	0.35	0.725	-7.206705	10.36669
37	36.11826	4.267365	8.46	0.000	27.75437	44.48214
38	16.9109	3.249158	5.20	0.000	10.54267	23.27913
39	-4.525069	3.075517	-1.47	0.141	-10.55297	1.502832
40	36.10701	5.212314	6.93	0.000	25.89106	46.32295
42	9.303002	3.788011	2.46	0.014	1.878636	16.72737
43	49.71864	3.38036	14.71	0.000	43.09325	56.34402
44	41.58922	3.337811	12.46	0.000	35.04723	48.13121
45	-28.71009	2.765149	-10.38	0.000	-34.12968	-23.2905
46	19.86523	2.975222	6.68	0.000	14.0339	25.69655
47	37.68749	4.393129	8.58	0.000	29.07712	46.29787
48	-11.96307	2.924803	-4.09	0.000	-17.69558	-6.230564
49	2.665741	2.363288	1.13	0.259	-1.966218	7.2977
50	-25.57589	3.122197	-8.19	0.000	-31.69529	-19.4565
51	56.53219	4.354986	12.98	0.000	47.99657	65.0678
52	38.69345	3.537296	10.94	0.000	31.76048	45.62642
53	10.97496	2.629566	4.17	0.000	5.8211	16.12881
54	28.67369	2.890635	9.92	0.000	23.00815	34.33923
55	43.36071	4.708241	9.21	0.000	34.13272	52.58869
56	34.13799	4.750084	7.19	0.000	24.828	43.44798
57	30.71246	3.093524	9.93	0.000	24.64926	36.77565
58	36.1687	4.133805	8.75	0.000	28.06659	44.27081
59	21.60721	2.830542	7.63	0.000	16.05945	27.15497
60	48.36642	5.163832	9.37	0.000	38.2455	58.48735
61	54.74081	3.873008	14.13	0.000	47.14986	62.33177
62	15.41149	4.079207	3.78	0.000	7.416391	23.40659
63	8.091831	4.383761	1.85	0.065	-5.001837	16.68385
64	-10.6034	2.3212	-4.57	0.000	-15.15287	-6.053934
65	1.210015	2.576182	0.47	0.639	-3.839208	6.259238
66	-21.96631	2.857593	-7.69	0.000	-27.56709	-16.36553
67	34.75825	4.437165	7.83	0.000	26.06157	43.45494
68	15.29949	3.044533	5.03	0.000	9.332312	21.26666
69	-13.46836	2.758068	-4.88	0.000	-18.87408	-8.06265
70	18.64689	4.323153	4.31	0.000	10.17367	27.12012
71	-11.09397	3.082024	-3.60	0.000	-17.13463	-5.053317
72	-15.10827	3.218444	-4.69	0.000	-21.41631	-8.800237
73	35.59863	3.996132	8.91	0.000	27.76636	43.43091
74	38.55332	4.218802	9.14	0.000	30.28462	46.82202
75	46.42105	3.829186	12.12	0.000	38.91598	53.92612
76	-10.1195	3.626938	-2.79	0.005	-17.22817	-3.010834
77	32.46781	4.354217	7.46	0.000	23.9337	41.00192
78	16.28108	4.04998	4.02	0.000	8.343269	24.2189
79	-28.92068	4.485047	-6.45	0.000	-37.71121	-20.13015
80	42.34865	3.774749	11.22	0.000	34.95028	49.74702
81	6.15327	2.391433	2.57	0.010	1.466147	10.84039
82	53.8675	4.126612	13.05	0.000	45.77949	61.95551
83	34.8663	2.812091	12.40	0.000	29.3547	40.3779
84	40.3719	3.915749	10.31	0.000	32.69717	48.04662
_cons	-36.98483	6.660504	-5.55	0.000	-50.03918	-23.93048

**Adjusted R Square**

. di e(r2\_a)  
.48070906

**UJI SENSITIVITAS-AGRESIVITAS PAJAK DIUKUR DENGAN BTD****Uji Pemilihan Model****1. Uji Chow**

Fixed-effects (within) regression  
Group variable: id

Number of obs = 308  
Number of groups = 84

R-squared:

Within = 0.4885  
Between = 0.0051  
Overall = 0.0098

Obs per group:

min = 1  
avg = 3.7  
max = 6

corr(u\_i, Xb) = -0.9327  
F(8,216) = 25.79  
Prob > F = 0.0000

CS	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
BTD	-22.92424	14.4317	-1.59	0.114	-51.36923	5.520746
1.pol_dummy	.0964117	1.125723	0.09	0.932	-2.122397	2.31522
pol_dummy#c.BTD						
1	37.69172	18.01266	2.09	0.038	2.188636	73.1948
growth	.0301497	.1579427	0.19	0.849	-.2811565	.341456
bigf	-2.625186	1.78715	-1.47	0.143	-6.147672	.8973
age	2.544932	.1847574	13.77	0.000	2.180774	2.909091
aucom	-1.006331	1.132724	-0.89	0.375	-3.238938	1.226276
incom	4.84745	4.72149	1.03	0.306	-4.458642	14.15354
_cons	-26.37635	6.51091	-4.05	0.000	-39.2094	-13.54329
sigma_u	29.186917					
sigma_e	4.1585987					
rho	.98010292	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u\_i=0: F(83, 216) = 21.15 Prob > F = 0.0000

**2. Uji Hausman**

Random-effects GLS regression  
Group variable: id

Number of obs = 308  
Number of groups = 84

R-squared:

Within = 0.3550  
Between = 0.0130  
Overall = 0.0235

Obs per group:

min = 1  
avg = 3.7  
max = 6

corr(u\_i, X) = 0 (assumed)  
Wald chi2(8) = 50.11  
Prob > chi2 = 0.0000

CS	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
BTD	-12.64772	16.83516	-0.75	0.452	-45.64403	20.34858
1.pol_dummy	.1658756	1.23842	0.13	0.893	-2.261383	2.593134
pol_dummy#c.BTD						
1	9.475029	21.05981	0.45	0.653	-31.80145	50.75151
growth	.0451973	.1875624	0.24	0.810	-.3224183	.4128129
bigf	-5.421052	1.784428	-3.04	0.002	-8.918466	-1.923637
age	.6699471	.1092548	6.13	0.000	.4558116	.8840826
aucom	-.0295114	1.285939	-0.02	0.982	-2.549906	2.490883
incom	2.934787	5.246256	0.56	0.576	-7.347685	13.21726
_cons	23.04851	5.407939	4.26	0.000	12.44914	33.64788
sigma_u	10.12275					
sigma_e	4.1585987					
rho	.85559983	(fraction of variance due to u_i)				

**Uji Asumsi Klasik****1. Uji Normalitas**

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
residuals	308	0.99445	1.210	0.449	0.32685

## 2. Uji multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
BTD	2.65	0.377549
1.pol_dummy	1.16	0.863034
pol_dummy#		
c.BTDTA_w		
1	2.58	0.387437
growth	1.02	0.978365
bigf	1.15	0.869899
age	1.02	0.982580
aucom	1.13	0.887699
incom	1.05	0.951963

Mean VIF | 1.47

## 3. Uji heteroskedastisitas

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

Variable: Fitted values of SC

H0: Constant variance

chi2(1) = 0.45  
Prob > chi2 = 0.5001

## 4. uji Autokorelasi

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 50) = 63.417  
Prob > F = 0.0000

## UJI REGRESI- Feasible Generalized Least Squares (FGLS)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances = 1 Number of obs = 308  
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 84  
Estimated coefficients = 92 Obs per group:

min = 1  
avg = 3.666667  
max = 6

Wald chi2(91) = 2899.93  
Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -821.3455

CS	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
BTD	-22.92424	12.08562	-1.90	0.058	-46.61163 .7631413
1.pol_dummy	.0964117	.9427208	0.10	0.919	-1.751287 1.944111
pol_dummy#c.BTD					
1	37.69172	15.08444	2.50	0.012	8.126751 67.25669
growth	.0301497	.1322669	0.23	0.820	-.2290886 .289388
bigf	-2.625186	1.496623	-1.75	0.079	-5.558514 .3081419
age	2.544932	.1547224	16.45	0.000	2.241682 2.848183
aucom	-1.006331	.9485833	-1.06	0.289	-2.86552 .8528582
incom	4.84745	3.953945	1.23	0.220	-2.902139 12.59704
id					
2	13.17651	3.711202	3.55	0.000	5.902694 20.45034
3	-49.03448	3.455395	-14.19	0.000	-55.80693 -42.26203
4	42.25742	3.919363	10.78	0.000	34.57561 49.93923
5	42.23484	3.780126	11.17	0.000	34.82593 49.64375
6	39.40264	3.600774	10.94	0.000	32.34525 46.46003
7	3.174178	2.514957	1.26	0.207	-1.755048 8.103404
8	-24.95622	3.015125	-8.28	0.000	-30.86575 -19.04668
9	24.99747	4.717823	5.30	0.000	15.75071 34.24424
10	-27.85536	3.724347	-7.48	0.000	-35.15495 -20.55577
11	34.35139	3.688788	9.31	0.000	27.1215 41.58128
12	1.64594	3.066568	0.54	0.591	-4.364423 7.656303
13	46.27739	3.686981	12.55	0.000	39.05104 53.50374
14	61.36612	3.978925	15.42	0.000	53.56757 69.16467
15	65.60938	4.08973	16.04	0.000	57.59366 73.62511

16		-14.38001	2.825894	-5.09	0.000	-19.91866	-8.841355
17		47.7316	4.785083	9.98	0.000	38.35301	57.11019
18		40.06043	4.053108	9.88	0.000	32.11649	48.00438
19		13.90172	2.863415	4.85	0.000	8.289526	19.51391
20		-17.38774	2.911089	-5.97	0.000	-23.09337	-11.68211
21		63.68501	5.135726	12.40	0.000	53.61917	73.75085
22		32.95458	2.701669	12.20	0.000	27.6594	38.24975
23		52.55535	3.834148	13.71	0.000	45.04056	60.07015
24		18.73497	2.646823	7.08	0.000	13.54729	23.92265
25		53.85413	4.758747	11.32	0.000	44.52716	63.1811
26		-32.74559	3.739671	-8.76	0.000	-40.07522	-25.41597
27		57.48265	4.658325	12.34	0.000	48.3525	66.6128
28		-16.71456	2.706546	-6.18	0.000	-22.01929	-11.40982
29		3.197644	2.793329	1.14	0.252	-2.27718	8.672467
30		-12.21323	4.078893	-2.99	0.003	-20.20772	-4.21875
31		55.57797	5.17942	10.73	0.000	45.42649	65.72944
32		-38.92076	3.506662	-11.10	0.000	-45.79369	-32.04783
33		8.107345	3.119967	2.60	0.009	1.992322	14.22237
34		24.48047	3.60572	6.79	0.000	17.41339	31.54755
35		-40.74927	3.640368	-11.19	0.000	-47.88426	-33.61428
36		-1.734354	3.168311	-0.55	0.584	-7.94413	4.475421
37		38.11051	4.323842	8.81	0.000	29.63593	46.58508
38		20.54822	3.328161	6.17	0.000	14.02514	27.07129
39		-2.467672	3.077218	-0.80	0.423	-8.498908	3.563564
40		40.73989	5.158176	7.90	0.000	30.63005	50.84973
41		9.126322	4.124039	2.21	0.027	1.043355	17.20929
42		12.36005	3.871848	3.19	0.001	4.771367	19.94873
43		53.3674	3.459651	15.43	0.000	46.58661	60.14819
44		44.35776	3.330184	13.32	0.000	37.83072	50.8848
45		-27.02693	2.755367	-9.81	0.000	-32.42735	-21.62651
46		25.28538	2.90345	8.71	0.000	19.59472	30.97604
47		41.67874	4.375053	9.53	0.000	33.1038	50.25369
48		-9.858395	2.840899	-3.47	0.001	-15.42646	-4.290334
49		3.924258	2.395854	1.64	0.101	-.77153	8.620046
50		-24.75223	3.092115	-8.00	0.000	-30.81266	-18.6918
51		62.50506	4.246602	14.72	0.000	54.18187	70.82825
52		41.92702	3.537858	11.85	0.000	34.99295	48.86109
53		14.08099	2.568061	5.48	0.000	9.047682	19.1143
54		29.00332	2.948608	9.84	0.000	23.22415	34.78248
55		47.23533	4.729246	9.99	0.000	37.96617	56.50448
56		38.46443	4.776039	8.05	0.000	29.10357	47.8253
57		32.97715	3.178663	10.37	0.000	26.74709	39.20722
58		38.77524	4.15742	9.33	0.000	30.62685	46.92363
59		23.49633	2.839772	8.27	0.000	17.93048	29.06218
60		54.05202	5.132098	10.53	0.000	43.99329	64.11075
61		58.53649	4.099494	14.28	0.000	50.50163	66.57135
62		16.08331	4.135632	3.89	0.000	7.977624	24.18901
63		10.8856	4.45954	2.44	0.015	2.145059	19.62613
64		-10.55641	2.372886	-4.45	0.000	-15.20718	-5.90564
65		2.621455	2.555461	1.03	0.305	-2.387156	7.630067
66		-20.55176	2.723596	-7.55	0.000	-25.88991	-15.21361
67		38.82969	4.410836	8.80	0.000	30.18461	47.47477
68		17.36208	3.071369	5.65	0.000	11.34231	23.38186
69		-11.73126	2.775916	-4.23	0.000	-17.17195	-6.290562
70		21.76433	4.282877	5.08	0.000	13.37004	30.15861
71		-10.02553	3.020852	-3.32	0.001	-15.94629	-4.104766
72		-13.88811	3.198609	-4.34	0.000	-20.15727	-7.618953
73		39.25732	3.993786	9.83	0.000	31.42964	47.085
74		41.81715	4.230012	9.89	0.000	33.52648	50.10782
75		51.53738	3.760335	13.71	0.000	44.16726	58.9075
76		-11.1667	3.545312	-3.15	0.002	-18.11539	-4.218019
77		35.71094	4.376681	8.16	0.000	27.13281	44.28908
78		17.79672	4.144179	4.29	0.000	9.674278	25.91916
79		-28.71542	4.485362	-6.40	0.000	-37.50657	-19.92427
80		45.57083	3.790113	12.02	0.000	38.14234	52.99931
81		7.053044	2.450245	2.88	0.004	2.250653	11.85543
82		56.78111	4.111197	13.81	0.000	48.72331	64.83891
83		37.70245	2.812722	13.40	0.000	32.18962	43.21528
84		43.40301	3.933276	11.03	0.000	35.69393	51.11209
_cons		-43.98997	6.490846	-6.78	0.000	-56.71179	-31.26815

-----  
Adjusted R Square

. di e(r2\_a)  
.47484463



```
-----+-----
residuals |      308    0.99261    1.612    1.122    0.13103
```

## 2. Uji multikolinearitas

```
-----+-----
Variable |      VIF    1/VIF
-----+-----
    ETR |      1.79    0.557356
  1.pol_dummy |      3.81    0.262291
  pol_dummy# |
  c.ETR |
    1 |      4.55    0.219570
  growth |      1.03    0.974452
    bigf |      1.14    0.879802
    age |      1.02    0.978201
    aucom |      1.12    0.894365
    incom |      1.06    0.945765
-----+-----
Mean VIF |      1.94
```

## 3. Uji heteroskedastisitas

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
Assumption: Normal error terms  
Variable: Fitted values of SC

H0: Constant variance

chi2(1) = 0.46  
Prob > chi2 = 0.4990

## 4. uji Autokorelasi

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation  
F( 1, 50) = 72.081  
Prob > F = 0.0000

## UJI REGRESI- Feasible Generalized Least Squares (FGLS)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances = 1 Number of obs = 308  
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 84  
Estimated coefficients = 92 Obs per group:

min = 1  
avg = 3.666667  
max = 6

Wald chi2(91) = 2921.41  
Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -820.3179

```
-----+-----
CS | Coefficient Std. err. z P>|z| [95% conf. interval]
-----+-----
    ETR | -9.149277 3.769336 -2.43 0.015 -16.53704 -1.761514
  1.pol_dummy | 3.529326 1.372654 2.57 0.010 .8389744 6.219677
  pol_dummy#c.ETR |
    1 | 14.93263 5.43445 2.75 0.006 4.281303 25.58396
  growth | .0200879 .1321897 0.15 0.879 -.2389991 .2791749
    bigf | -2.308392 1.486905 -1.55 0.121 -5.222672 .6058873
    age | 2.551765 .1538798 16.58 0.000 2.250166 2.853364
    aucom | -.8957208 .9384501 -0.95 0.340 -2.735049 .9436076
    incom | 5.468882 3.85268 1.42 0.156 -2.082231 13.02

    id |
    2 | 13.97537 3.720951 3.76 0.000 6.682435 21.2683
    3 | -49.07999 3.442009 -14.26 0.000 -55.8262 -42.33377
    4 | 42.00439 3.880157 10.83 0.000 34.39943 49.60936
    5 | 42.78125 3.79335 11.28 0.000 35.34642 50.21608
    6 | 41.51118 3.661037 11.34 0.000 34.33568 48.68668
    7 | 2.972274 2.51969 1.18 0.238 -1.966229 7.910776
    8 | -24.792 3.00085 -8.26 0.000 -30.67356 -18.91045
    9 | 24.28637 4.65673 5.22 0.000 15.15934 33.41339
   10 | -28.47555 3.720425 -7.65 0.000 -35.76745 -21.18365
   11 | 33.43547 3.698295 9.04 0.000 26.18694 40.68399
   12 | .6102409 3.10762 0.20 0.844 -5.480582 6.701064
   13 | 46.4816 3.648616 12.74 0.000 39.33045 53.63276
   14 | 61.56848 3.942559 15.62 0.000 53.84121 69.29575
```

15		66.17376	4.093462	16.17	0.000	58.15073	74.1968
16		-12.91401	2.812005	-4.59	0.000	-18.42544	-7.40258
17		47.93954	4.7613	10.07	0.000	38.60756	57.27152
18		39.62937	3.952901	10.03	0.000	31.88183	47.37692
19		13.95749	2.84545	4.91	0.000	8.380512	19.53447
20		-17.99869	2.916225	-6.17	0.000	-23.71438	-12.28299
21		62.18122	5.148411	12.08	0.000	52.09052	72.27192
22		33.36728	2.684538	12.43	0.000	28.10568	38.62888
23		52.66109	3.80626	13.84	0.000	45.20096	60.12122
24		18.43058	2.564729	7.19	0.000	13.40381	23.45736
25		55.79035	4.806548	11.61	0.000	46.36969	65.21101
26		-33.08962	3.70906	-8.92	0.000	-40.35925	-25.82
27		56.53574	4.667753	12.11	0.000	47.38711	65.68437
28		-17.59043	2.771489	-6.35	0.000	-23.02245	-12.15841
29		3.318926	2.781901	1.19	0.233	-2.1335	8.771351
30		-11.96431	4.069161	-2.94	0.003	-19.93972	-3.988901
31		55.37668	5.146397	10.76	0.000	45.28993	65.46343
32		-39.62541	3.461157	-11.45	0.000	-46.40915	-32.84166
33		8.053242	3.145577	2.56	0.010	1.888025	14.21846
34		23.80848	3.449191	6.90	0.000	17.04818	30.56877
35		-40.58281	3.537812	-11.47	0.000	-47.5168	-33.64883
36		-2.24568	3.233399	-0.69	0.487	-8.583026	4.091666
37		38.22544	4.316628	8.86	0.000	29.76501	46.68588
38		20.30234	3.239785	6.27	0.000	13.95248	26.6522
39		-2.312386	3.061506	-0.76	0.450	-8.312829	3.688056
40		41.31786	5.149888	8.02	0.000	31.22426	51.41145
41		11.32732	4.119331	2.75	0.006	3.253577	19.40106
42		11.90216	3.802606	3.13	0.002	4.449194	19.35514
43		53.57226	3.438417	15.58	0.000	46.83309	60.31143
44		44.14869	3.33837	13.22	0.000	37.6056	50.69177
45		-26.18225	2.724181	-9.61	0.000	-31.52154	-20.84295
46		23.15828	2.868104	8.07	0.000	17.5369	28.77966
47		41.70262	4.349343	9.59	0.000	33.17806	50.22718
48		-10.16384	2.831886	-3.59	0.000	-15.71423	-4.613441
49		6.21125	2.46575	2.52	0.012	1.378469	11.04403
50		-25.40111	3.084812	-8.23	0.000	-31.44723	-19.35499
51		62.2457	4.213159	14.77	0.000	53.98806	70.50334
52		41.76724	3.525846	11.85	0.000	34.85671	48.67777
53		14.62252	2.608166	5.61	0.000	9.510606	19.73443
54		29.75482	2.982238	9.98	0.000	23.90974	35.5999
55		49.27509	4.766929	10.34	0.000	39.93208	58.6181
56		39.50298	4.833927	8.17	0.000	30.02866	48.9773
57		32.9117	3.150463	10.45	0.000	26.7369	39.08649
58		39.22445	4.137607	9.48	0.000	31.11488	47.33401
59		23.31976	2.880424	8.10	0.000	17.67423	28.96528
60		56.24559	5.194661	10.83	0.000	46.06424	66.42694
61		57.59149	3.902855	14.76	0.000	49.94204	65.24095
62		15.37068	4.186808	3.67	0.000	7.164683	23.57667
63		11.08224	4.384409	2.53	0.011	2.488953	19.67552
64		-9.192492	2.425873	-3.79	0.000	-13.94712	-4.437867
65		2.512845	2.555324	0.98	0.325	-2.495498	7.521188
66		-20.55266	2.699693	-7.61	0.000	-25.84396	-15.26136
67		40.45783	4.444639	9.10	0.000	31.7465	49.16917
68		18.42366	3.07071	6.00	0.000	12.40518	24.44214
69		-12.92656	2.85823	-4.52	0.000	-18.52859	-7.324537
70		21.09017	4.242787	4.97	0.000	12.77446	29.40588
71		-10.46032	2.996185	-3.49	0.000	-16.33274	-4.587905
72		-13.03653	3.255776	-4.00	0.000	-19.41773	-6.655326
73		40.00142	3.971008	10.07	0.000	32.21839	47.78445
74		41.18215	4.223621	9.75	0.000	32.90401	49.4603
75		51.93197	3.725673	13.94	0.000	44.62979	59.23416
76		-11.08757	3.525994	-3.14	0.002	-17.9984	-4.176753
77		36.25314	4.358369	8.32	0.000	27.71089	44.79538
78		17.76867	4.117389	4.32	0.000	9.698735	25.8386
79		-27.50684	4.526051	-6.08	0.000	-36.37774	-18.63595
80		46.36071	3.774166	12.28	0.000	38.96348	53.75794
81		7.818735	2.467023	3.17	0.002	2.98346	12.65401
82		56.54569	4.135443	13.67	0.000	48.44037	64.65101
83		38.08119	2.81911	13.51	0.000	32.55583	43.60654
84		43.76595	3.902618	11.21	0.000	36.11696	51.41494
_cons		-47.12841	6.562594	-7.18	0.000	-59.99086	-34.26596

**Adjusted R Square**

. di e(r2\_a)  
.4783371



1 1		- .8767387	1.080559	-0.81	0.417	-2.994595	1.241118
pol_dummy#period#c.dtax							
1 1		24.81873	34.25242	0.72	0.469	-42.31477	91.95223
growth		- .0071194	.1476195	-0.05	0.962	- .2964483	.2822094
bigf		-3.216716	1.449461	-2.22	0.026	-6.057606	- .3758254
age		.2040299	.0993542	2.05	0.040	.0092992	.3987606
aucom		.304606	1.010594	0.30	0.763	-1.676122	2.285334
incom		- .1077269	3.559714	-0.03	0.976	-7.084639	6.869185
_cons		31.11615	4.442587	7.00	0.000	22.40884	39.82346
-----							
sigma_u		10.032695					
sigma_e		3.8278795					
rho		.87292549				(fraction of variance due to u_i)	
-----							

## UJI ASUMSI KLASIK

### 1. Uji Normalitas (normal)

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
residuals	308	0.99264	1.605	1.111	0.13321

### 2. Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
dtax	4.54	0.220112
1.pol_dummy	2.25	0.443679
pol_dummy#		
c.dtax		
1	4.66	0.214376
1.period	1.91	0.523814
period#		
c.dtax		
1	4.59	0.217819
pol_dummy#		
period		
1 1	3.07	0.325318
pol_dummy#		
period#		
c.dtax		
1 1	4.70	0.212785
growth	1.03	0.971958
bigf	1.15	0.872617
age	1.04	0.958526
aucom	1.13	0.883272
incom	1.06	0.939402
Mean VIF	2.60	

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

Variable: Fitted values of CS

H0: Constant variance

chi2(1) = 3.41  
 Prob > chi2 = 0.0646

### 4. Uji Autokorelasi

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F( 1, 50) = 101.261  
 Prob > F = 0.0000

**UJI REGRESI- Feasible Generalized Least Squares (FGLS)**

Coefficients: generalized least squares

Panels: homoskedastic

Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances = 1                      Number of obs = 308  
 Estimated autocorrelations = 0                      Number of groups = 84  
 Estimated coefficients = 96                      Obs per group:

min = 1  
 avg = 3.666667  
 max = 6

Wald chi2(95) = 3549.63  
 Prob > chi2 = 0.0000  
 Log likelihood = -792.9438

CS	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
dtax	-26.76014	16.66612	-1.61	0.108	-59.42513	5.904862
1.pol_dummy	.2460967	.9874421	0.25	0.803	-1.689254	2.181448
pol_dummy#c.dtax						
1	11.11158	22.35429	0.50	0.619	-32.70202	54.92518
1.period	5.37668	.7899756	6.81	0.000	3.828356	6.925004
period#c.dtax						
1	-2.231826	20.17274	-0.11	0.912	-41.76967	37.30602
pol_dummy#period						
1 1	-.7563914	.8879175	-0.85	0.394	-2.496678	.983895
pol_dummy#period#c.dtax						
1 1	18.50597	28.33689	0.65	0.514	-37.03331	74.04525
growth	.0092266	.1209596	0.08	0.939	-.2278498	.246303
bigf	-2.219966	1.38502	-1.60	0.109	-4.934554	.4946225
age	1.184559	.2298083	5.15	0.000	.7341428	1.634975
aucom	-.6195597	.8640217	-0.72	0.473	-2.313011	1.073892
incom	1.979882	3.084661	0.64	0.521	-4.065943	8.025707
id						
2	-2.402668	3.936665	-0.61	0.542	-10.11839	5.313055
3	-34.97797	3.815531	-9.17	0.000	-42.45627	-27.49966
4	15.29445	4.970946	3.08	0.002	5.551572	25.03732
5	18.8604	4.498465	4.19	0.000	10.04357	27.67723
6	20.13029	4.085836	4.93	0.000	12.1222	28.13839
7	-3.237574	2.45795	-1.32	0.188	-8.055068	1.57992
8	-9.284351	3.647581	-2.55	0.011	-16.43348	-2.135224
9	4.031689	5.180362	0.78	0.436	-6.121634	14.18501
10	-11.99251	4.199387	-2.86	0.004	-20.22316	-3.761863
11	8.917032	4.648359	1.92	0.055	-.1935845	18.02765
12	-4.936872	2.901024	-1.70	0.089	-10.62277	.7490304
13	20.32043	4.719964	4.31	0.000	11.06947	29.57139
14	33.64698	5.006347	6.72	0.000	23.83472	43.45924
15	36.58445	5.253387	6.96	0.000	26.288	46.8809
16	-10.78009	2.867904	-3.76	0.000	-16.40108	-5.159101
17	22.62709	5.47022	4.14	0.000	11.90566	33.34852
18	12.08606	5.11701	2.36	0.018	2.056907	22.11522
19	13.00761	2.679314	4.85	0.000	7.75625	18.25897
20	-13.52865	2.83652	-4.77	0.000	-19.08812	-7.969168
21	30.14554	6.240251	4.83	0.000	17.91487	42.37621
22	20.10993	2.92564	6.87	0.000	14.37578	25.84408
23	29.00002	4.542746	6.38	0.000	20.0964	37.90364
24	11.33502	2.490202	4.55	0.000	6.454319	16.21573
25	31.82857	5.158955	6.17	0.000	21.7172	41.93993
26	-17.35795	4.133297	-4.20	0.000	-25.45906	-9.256834
27	37.16689	4.983419	7.46	0.000	27.39957	46.93421
28	-7.923766	2.905983	-2.73	0.006	-13.61939	-2.228143
29	-7.149716	2.85169	-2.51	0.012	-12.73893	-1.560506
30	-9.974634	3.790286	-2.63	0.008	-17.40346	-2.545809
31	21.19551	6.305499	3.36	0.001	8.836958	33.55406
32	-25.06618	3.868914	-6.48	0.000	-32.64911	-17.48324
33	-4.493353	3.306997	-1.36	0.174	-10.97495	1.988242
34	9.429426	3.627102	2.60	0.009	2.320437	16.53842
35	-23.63558	4.116572	-5.74	0.000	-31.70391	-15.56725
36	10.51697	3.458487	3.04	0.002	3.738461	17.29548
37	10.3169	5.344404	1.93	0.054	-.157945	20.79174
38	3.567331	3.601718	0.99	0.322	-3.491906	10.62657

39		-9.808434	2.951274	-3.32	0.001	-15.59282	-4.024043
40		13.48402	5.795488	2.33	0.020	2.125068	24.84296
41		2.168737	4.023771	0.54	0.590	-5.717708	10.05518
42		-2.18736	3.903947	-0.56	0.575	-9.838955	5.464235
43		32.768	3.998062	8.20	0.000	24.93194	40.60406
44		29.45929	3.539766	8.32	0.000	22.52148	36.39711
45		-23.41357	2.672274	-8.76	0.000	-28.65113	-18.17601
46		8.709858	3.213131	2.71	0.007	2.412236	15.00748
47		12.35269	5.504702	2.24	0.025	1.56367	23.1417
48		-6.973745	2.810889	-2.48	0.013	-12.48299	-1.464503
49		-7.4072979	2.239852	-0.18	0.856	-4.797327	3.982731
50		-7.783726	3.822925	-2.04	0.042	-15.27652	-.2909308
51		29.1892	5.636689	5.18	0.000	18.14149	40.23691
52		18.74297	4.409701	4.25	0.000	10.10011	27.38583
53		6.720446	2.513398	2.67	0.007	1.794277	11.64662
54		17.42138	3.117175	5.59	0.000	11.31182	23.53093
55		20.32781	5.474146	3.71	0.000	9.598685	31.05694
56		11.67173	5.455088	2.14	0.032	.9799515	22.3635
57		15.74785	3.504541	4.49	0.000	8.87908	22.61663
58		9.609877	5.39427	1.78	0.075	-.962698	20.18245
59		11.7787	3.021497	3.90	0.000	5.856672	17.70072
60		25.59359	5.891379	4.34	0.000	14.0467	37.14047
61		31.54763	4.874661	6.47	0.000	21.99347	41.10179
62		18.47651	3.860225	4.79	0.000	10.91061	26.04241
63		-3.233483	4.459863	-0.73	0.468	-11.97465	5.507687
64		-6.807981	2.236067	-3.04	0.002	-11.19059	-2.425371
65		5.293133	2.460213	2.15	0.031	.4712046	10.11506
66		-9.097025	3.215893	-2.83	0.005	-15.40006	-2.79399
67		9.179327	5.460987	1.68	0.093	-1.52401	19.88266
68		.6751206	3.518901	0.19	0.848	-6.221798	7.572039
69		-14.39027	2.579977	-5.58	0.000	-19.44693	-9.333609
70		13.33855	4.100584	3.25	0.001	5.301557	21.37555
71		-7.22698	2.915382	-2.48	0.013	-12.94102	-1.512936
72		-13.88496	2.992195	-4.64	0.000	-19.74956	-8.020365
73		9.827137	5.25492	1.87	0.061	-.4723167	20.12659
74		24.46539	4.407125	5.55	0.000	15.82758	33.10319
75		25.61787	4.684895	5.47	0.000	16.43564	34.80009
76		.9237134	3.745373	0.25	0.805	-6.417083	8.26451
77		15.09877	4.723321	3.20	0.001	5.841229	24.35631
78		3.480385	4.230764	0.82	0.411	-4.811761	11.77253
79		-13.91594	4.696434	-2.96	0.003	-23.12078	-4.7111
80		21.22968	4.647013	4.57	0.000	12.1217	30.33766
81		11.62187	2.323501	5.00	0.000	7.067892	16.17585
82		27.93168	5.331133	5.24	0.000	17.48286	38.38051
83		25.30972	2.949492	8.58	0.000	19.52882	31.09061
84		16.96459	4.952575	3.43	0.001	7.257719	26.67146
_cons		.5068438	8.307521	0.06	0.951	-15.7756	16.78929

Adjusted R Square  
 . di e(r2\_a)  
 .55736926

SEMARANG  
 FEB UNDIP